



PEMERINTAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR

Rancangan Awal

RPJMD

RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TAHUN 2025-2029

“Kaltim Sukses Menuju Generasi Emas”

Disusun dalam rangka Konsultasi Publik Ranwal
RPJMD 2025-2029
Samarinda, 25 Maret 2025

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan pembangunan di Provinsi Kalimantan Timur dalam beberapa tahun terakhir mengalami transformasi signifikan yang menjadikannya sebagai salah satu motor penggerak pertumbuhan ekonomi nasional. Provinsi Kalimantan Timur turut menjadi daerah dengan kontribusi PDRB terbesar di Kawasan Timur Indonesia, dengan sektor migas, perkebunan, dan industri pengolahan sebagai pilar utama perekonomian. Namun, tantangan seperti ketergantungan pada sektor ekstraktif, kesenjangan pembangunan antarwilayah, dan isu lingkungan masih menjadi hambatan. Kehadiran Ibu Kota Nusantara (IKN) semakin menambah dinamika pembangunan yang menuntut kesiapan Provinsi Kalimantan Timur menghadapi urbanisasi, perubahan tata ruang, dan lonjakan kebutuhan layanan publik.

Menghadapi fenomena tersebut, ketersediaan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas memiliki urgensi tersendiri untuk memanfaatkan peluang sekaligus mengatasi tantangan yang kompleks. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur perlu menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk periode 2025-2029. RPJMD merupakan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan yang memuat penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah, kemudian diturunkan menjadi tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah yang disertai dengan indikasi kerangka pendanaan. Dalam penyusunannya, rancangan Peraturan Daerah (Perda) tentang RPJMD harus ditetapkan paling lambat enam bulan setelah pelantikan kepala daerah.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dokumen RPJMD terhitung berlaku

sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah. Maka dari itu, periodisasi RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025–2029 ditetapkan sesuai dengan masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur terpilih pasca Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak yang diselenggarakan pada bulan November tahun 2024. Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur terpilih dilaksanakan pada tanggal 20 Februari 2025 dan masa bakti akan berakhir pada tahun 2030.

RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025–2029 mencerminkan komitmen dari Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur terpilih terhadap visi dan misi yang diusung selama masa kampanye. Tak hanya menjadi pedoman pembangunan daerah pada 5 (lima) tahun ke depan, RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025–2029 juga menjadi acuan penyusunan Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Selain itu, penyusunan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025–2029 diselaraskan dengan RPJPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025–2045 serta RPJM Nasional Tahun 2025–2029. Melalui keselarasan tersebut, diharapkan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025–2029 dapat menjadi sarana efektif dalam mewujudkan visi Kaltim Sejahtera 2045 dan Indonesia Emas 2045, sebagai bagian dari upaya mencapai tujuan jangka panjang daerah dan nasional.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum penyusunan dokumen RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19)
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
7. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025–2029 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 Nomor 11).

1.3 Hubungan Antar Dokumen

1. Hubungan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur dengan RPJMN

Penyusunan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025–2029 mengacu kepada strategi, arah kebijakan, dan prioritas pembangunan dengan memperhatikan tugas dan fungsi pemerintah daerah untuk mencapai sasaran nasional sebagaimana yang tercantum dalam RPJM Nasional.

2. Hubungan RPJMD dengan RPJPD Provinsi Kalimantan Timur

RPJMD Kalimantan Timur Tahun 2025–2029 merupakan pelaksanaan dari arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025–2045 tahap pertama. Oleh

karena itu, penyusunannya secara substantif mengacu pada RPJPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025–2045.

3. Hubungan RPJMD dengan Renstra Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur

RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025–2029 menjadi pedoman bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menyusun Renstra PD. Sasaran, arah kebijakan, dan program prioritas pembangunan daerah yang tercantum dalam RPJMD diwujudkan melalui pelaksanaan Renstra masing-masing Perangkat Daerah selama 5 (lima) tahun. Renstra PD disusun dengan memperhatikan tugas, fungsi, serta kewenangan masing-masing OPD sehingga implementasi RPJMD dapat berjalan secara terarah, terukur, dan terintegrasi dalam mencapai visi, misi, dan target pembangunan yang telah ditetapkan.

4. Hubungan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur dengan RPJMD Kabupaten/Kota

RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025–2029 menjadi pedoman dalam penyusunan dan/atau perubahan dokumen RPJMD Kabupaten/Kota, terutama pada perumusan arah kebijakan, strategi, dan prioritas pembangunan. Keselarasan ini penting untuk memastikan adanya sinergi antara perencanaan pembangunan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota untuk mewujudkan target kinerja yang direncanakan.

5. Hubungan RPJMD dengan RTRW Provinsi Kalimantan Timur

Penyusunan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025–2029 mengacu pada RTRW Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023–2042 dalam menentukan strategi dan arah kebijakan pembangunan berbasis ruang, baik ruang darat, laut, dan udara. Keselarasan antara RPJMD dan RTRW Provinsi Kalimantan Timur memastikan pembangunan sektoral yang sesuai dengan peruntukan ruang yang ditetapkan sehingga mencegah konflik pemanfaatan ruang, menjaga kelestarian lingkungan, dan mendukung pembangunan berkelanjutan.

6. Hubungan RPJMD dengan KLHS RPJMD Provinsi Kalimantan Timur

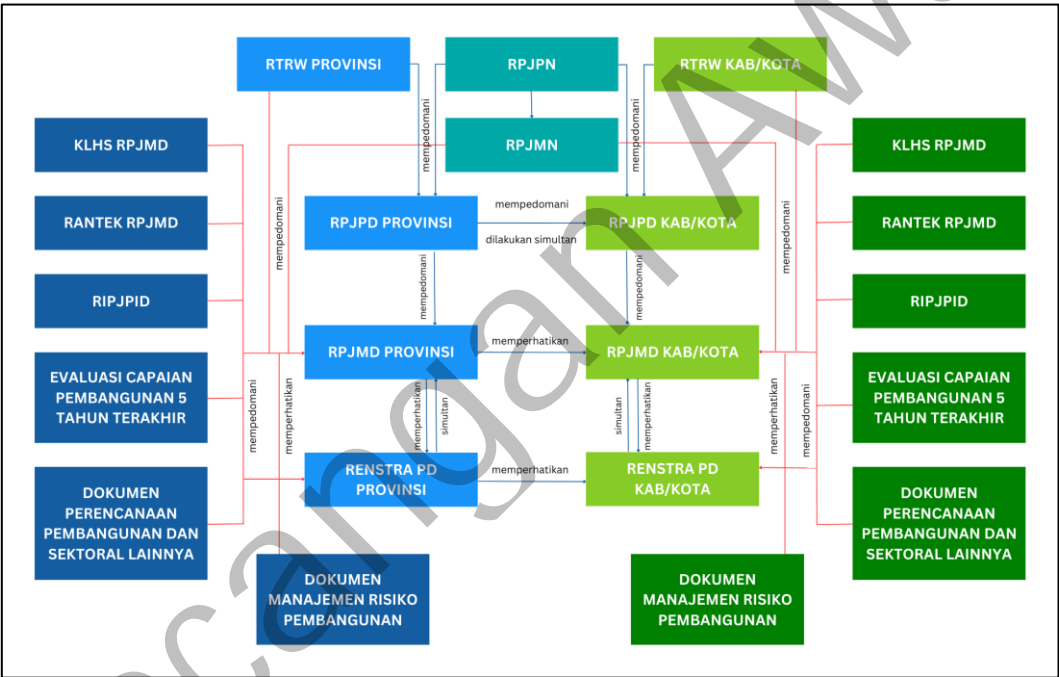
KLHS menjadi acuan dalam penyusunan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025–2029 untuk memastikan bahwa

prinsip pembangunan berkelanjutan terintegrasi secara menyeluruh dalam kebijakan, rencana, dan program pembangunan wilayah dengan mempertimbangkan daya dukung serta daya tampung lingkungan.

7. **Hubungan RPJMD dengan Evaluasi Capaian Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Kalimantan Timur**

Hasil evaluasi capaian pembangunan selama lima tahun terakhir, termasuk kesimpulan dan rekomendasinya, merupakan hal yang penting diperhatikan dan ditindaklanjuti dalam perumusan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025–2029.

8. **Hubungan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur dengan Dokumen Lainnya**



Gambar I.1

Hubungan Antara RPJPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya
(Sumber : Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024)

Penyusunan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025–2029 juga perlu mengacu pada beberapa dokumen perencanaan, di antaranya yaitu Rencana Teknokratik RPJMD Provinsi Kalimantan Timur yang menjadi, Rencana Induk Percepatan dan Perluasan Pembangunan Infrastruktur Daerah (RIPJPID), serta dokumen perencanaan pembangunan dan sektoral lainnya. Selain itu, RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025–2029 juga menjadi pedoman dalam perumusan dokumen manajemen risiko pembangunan yang berfungsi untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan memitigasi risiko yang dapat menghambat

pencapaian target pembangunan sehingga memastikan implementasi RPJMD berjalan efektif dan berkelanjutan.

1.4 Maksud dan Tujuan

RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2029 disusun dengan maksud untuk memberikan pedoman pelaksanaan pembangunan, mengoperasionalkan visi dan misi Gubernur/Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur, serta menjadi tolok ukur pertanggungjawaban kepala daerah selama periode 5 (lima) tahun. Selain itu, penyusunan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2029 juga dimaksudkan untuk menjamin terjadinya keterpaduan dan kesinambungan pembangunan yang berkelanjutan dalam jangka menengah sesuai dengan kondisi serta karakteristik daerah dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah.

RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2029 disusun dengan tujuan untuk mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan daerah; menjaga sinergi pembangunan jangka menengah antara pemerintah daerah dan pusat; serta mengoptimalkan penggunaan sumber daya melalui kebijakan pembangunan daerah yang terarah, terukur, dan berfokus pada prioritas pembangunan daerah. Selain itu, disusunnya RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2029 menjadi instrumen kebijakan untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam jangka waktu 5 (lima) tahun mendatang.

1.5 Sistematika Penyusunan

RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I

PENDAHULUAN

Memuat latar belakang penyusunan dokumen, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan.

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Menjelaskan gambaran umum kondisi daerah sebagai salah satu pertimbangan perumusan kebijakan RPJMD yang meliputi aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek daya saing, serta aspek pelayanan umum.

BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Menyajikan penjelasan mengenai kondisi pengelolaan keuangan daerah yang dilihat dari realisasi APBD Tahun Anggaran 2020–2024 serta mencantumkan proyeksi keuangan daerah Tahun Anggaran 2025–2029.

BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

Memuat tentang permasalahan utama yang merupakan faktor penghambat yang disimpulkan dari kesenjangan antara realita/capaian pembangunan dengan kondisi ideal yang seharusnya tersedia, serta memuat isu strategis daerah yang merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan dan dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya dapat mempengaruhi daerah baik secara langsung ataupun tidak langsung secara signifikan dalam 5 (lima) periode mendatang.

BAB V VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

Memuat visi dan misi pembangunan daerah yang diselaraskan dengan visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah. Visi menggambarkan hasil pembangunan daerah yang ingin diwujudkan, sedangkan misi merupakan upaya-upaya yang akan dilaksanakan daerah untuk mewujudkan visi dalam 5 (lima) tahun mendatang. Selain itu, terdapat tujuan yang merupakan rangkaian kinerja untuk mewujudkan visi dalam 5 (lima) tahun, sementara sasaran menggambarkan hasil pembangunan daerah yang mengarah pada pencapaian tujuan RPJMD.

BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Memuat strategi yang mencakup upaya-upaya yang akan dilakukan dalam rangka mencapai tujuan/sasaran RPJMD. Selain itu, bab ini memuat arah kebijakan sebagai kerangka kerja pembangunan daerah untuk 5 (lima) tahun ke depan. Arah kebijakan tersebut dijabarkan dari misi daerah dan diselaraskan dengan

strategi yang mempertimbangkan karakteristik serta kondisi daerah guna mencapai target tujuan dan sasaran RPJMD. Bab ini juga mencakup program prioritas pembangunan daerah, yaitu program-program utama yang akan diselenggarakan oleh Perangkat Daerah terkait untuk memenuhi indikator target kinerja visi dan misi pada tujuan/sasaran RPJMD.

BAB VII

PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Memuat daftar seluruh program pembangunan daerah yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah selama tahun 2026–2030, termasuk indikator program, target dan pagu indikatif program Perangkat Daerah setiap tahun. Perumusan program disusun berdasarkan identifikasi permasalahan pembangunan daerah pada setiap urusan, baik urusan wajib maupun pilihan.

BAB VIII

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Memuat gambaran hasil pembangunan yang ingin dicapai pada tahun 2025–2030 melalui penyajian 2 (dua) jenis indikator, yaitu Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Daerah (IKD). Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran RPJPD diukur melalui IKU, sedangkan target keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah diukur melalui IKD.

BAB IX

PENUTUP

Menjelaskan kaidah pelaksanaan RPJMD yang mencakup peran dokumen RPJMD dalam pelaksanaan pembangunan, konsistensi antara dokumen RPJMD dengan dokumen rencana pembangunan lainnya, serta mekanisme pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan RPJMD.

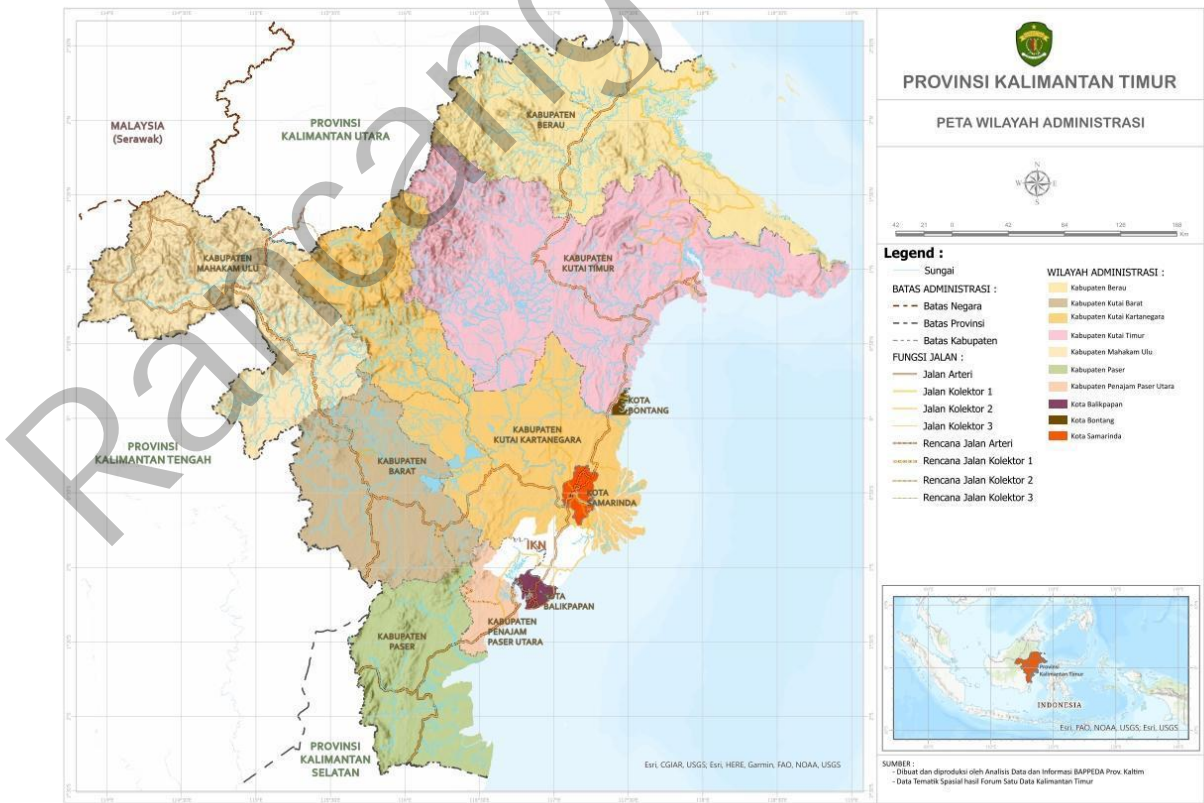
BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 Aspek Geografi Dan Demografi

1. Posisi dan Peran Strategis Daerah

Secara geografis, Provinsi Kalimantan Timur terletak antara 2° 37' 12.99" Lintang Utara (LU) dan -2° 28' 19.31" Lintang Selatan (LS), 113° 50' 3.61-119° 14' 13.06" Bujur Timur (BT). Secara administratif, batas wilayah Provinsi Kalimantan Timur sebagai berikut:

- Sebelah Utara : berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Utara dan Negara Malaysia bagian Timur;
- Sebelah Barat : berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Barat dan Provinsi Kalimantan Tengah;
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Selatan dan Selat Makassar; dan
- Sebelah Timur : berbatasan dengan Ibu Kota Nusantara (IKN), Selat Makassar dan Laut Sulawesi.



Gambar II.1
Peta Wilayah Administrasi Provinsi Kalimantan Timur
(Sumber: BAPPEDA Provinsi KALTIM, 2023)

Ditinjau dari segi administrasi pemerintahan, Provinsi Kalimantan Timur terbagi menjadi 7 (tujuh) kabupaten, yaitu: Berau, Kutai Kartanegara, Kutai Timur, Kutai Barat, Paser, Penajam Paser Utara, dan Mahakam Ulu, serta memiliki 3 (tiga) wilayah administrasi kota, yaitu: Balikpapan, Bontang, dan Samarinda. Sedangkan jumlah kecamatan di Provinsi Kalimantan Timur secara administratif terdiri atas 105 kecamatan yang terbagi kedalam 1.038 desa dan kelurahan. Sebagai catatan bahwa jumlah kecamatan, desa dan kelurahan ini masih melingkupi delineasi wilayah IKN. Adapun pembagian wilayah administratif Provinsi Kalimantan Timur menurut kabupaten/kota, kecamatan, desa dan kelurahan dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel II.1
Data Wilayah Administratif Provinsi Kalimantan Timur

No	Kabupaten/Kota	Luas wilayah (Ha)	Jumlah Kecamatan	Jumlah Desa dan Kelurahan
1	Paser	1.104.644	10	144
2	KUBAR	1.361.117	16	194
3	KUKAR	2.529.239	20	237
4	KUTIM	3.122.720	18	141
5	Berau	2.137.135	13	110
6	PPU	203.254	4	54
7	MAHULU	1.849.224	5	50
8	Balikpapan	51.023	6	34
9	Samarinda	71.678	10	59
10	Bontang	16.077	3	15
Luas Wilayah Laut 12 Mil		2.898.439	-	-
Kalimantan Timur		15.344.552	105	1.038

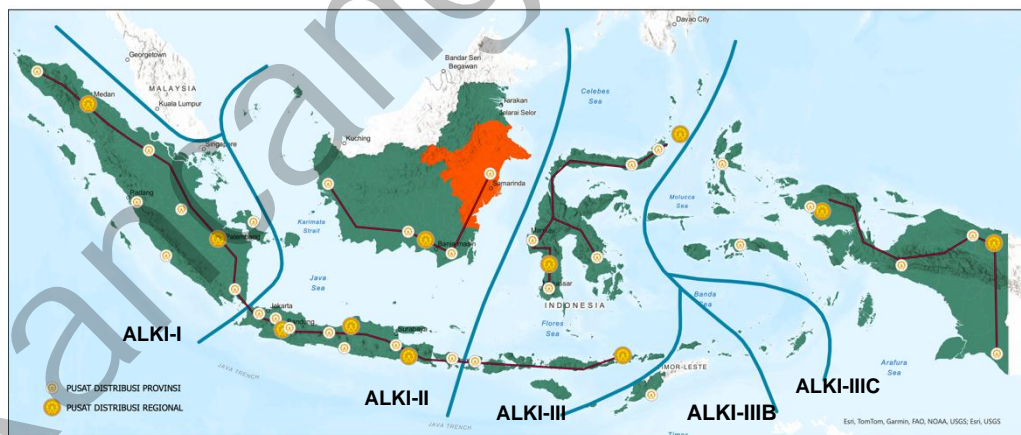
Sumber: RTRW Provinsi KALTIM Tahun 2023-2042

Provinsi Kalimantan Timur memiliki wilayah seluas 15.344.552 ha. Sebagian besar wilayah Provinsi Kalimantan Timur berupa daratan dengan luasnya mencapai 12.446.112 ha dan wilayah laut yang mencapai 2.898.439 ha. Luas wilayah tersebut telah disesuaikan dengan penetapan Ibu Kota Nusantara (IKN) berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, dimana luas wilayah Provinsi Kalimantan Timur menjadi berkurang sebesar 322.429 Ha.

Kalimantan Timur memiliki peran strategis dalam perekonomian nasional. Pada kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, kontribusi PDRB Kalimantan Timur menjadi yang terbesar di wilayah Kawasan Timur

Indonesia. Tercatat pada tahun 2019, kontribusi PDRB Kalimantan Timur terhadap nasional mencapai 4,12 persen dan pada tahun 2024 sebesar 3,09 persen. Selain itu, Kalimantan Timur juga memiliki peran geostrategis terutama setelah ditetapkannya Ibu Kota Nusantara (IKN), dimana Kalimantan Timur berperan sebagai Mitra dan Superhub ekonomi IKN. Superhub ekonomi IKN akan menjadi penggerak perekonomian di Provinsi Kalimantan Timur serta menjadi pemicu yang memperkuat rantai pasok dan rantai nilai antara aktivitas ekonomi di Pulau Kalimantan dan wilayah lainnya di Indonesia.

Secara geografis Kalimantan Timur terletak di tengah wilayah Indonesia yang berperan sebagai penghubung antara wilayah barat dan timur Indonesia. Posisi strategis ini potensial meningkatkan peran Kalimantan Timur dalam mendukung upaya pemerintah untuk mengurangi ketimpangan ekonomi antar wilayah dan mempermudah distribusi barang dan jasa ke berbagai penjuru nusantara. Selain itu, letaknya yang jauh dari ancaman bencana alam seperti gempa bumi dan gunung berapi menjadikan Kalimantan Timur sebagai lokasi yang aman dan ideal untuk pusat pemerintahan dan kegiatan ekonomi.



Gambar II.2

Peran Geostrategis Provinsi Kalimantan Timur Secara Nasional
(Sumber: BAPPEDA Provinsi KALTIM, 2024)

Peran geostrategis Kalimantan Timur juga cukup besar dalam konteks keamanan nasional. Wilayah Kalimantan Timur berbatasan dengan Selat Makassar yang juga menjadi jalur pelayaran internasional ALKI II. Hal ini menjadikan Kalimantan Timur memiliki nilai strategis dalam alur perdagangan nasional dan internasional, serta dalam menjaga kedaulatan wilayah maritim Indonesia dan memperkuat pengawasan

terhadap ancaman eksternal. Berdasarkan penjabaran peran geostrategis dimaksud, Kalimantan Timur berperan besar dalam upaya perwujudan Pulau Kalimantan sebagai Superhub Ekonomi Nusantara.

2. **Potensi Sumber Daya Alam**

Provinsi Kalimantan Timur memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah dimana hasilnya sebagian besar diekspor ke luar negeri dalam bentuk belum diolah. Komoditi yang hingga saat ini menjadi unggulan di Kalimantan Timur adalah batu bara, migas, dan kelapa sawit. Sementara untuk komoditi lainnya masih berpotensi besar untuk terus dikembangkan. Pengembangan potensi komoditi unggulan di Kalimantan Timur didukung dengan sumber daya lahan yang luas yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan sektor unggulan.

Tabel II.2
Luas Wilayah Potensial Berdasarkan Peruntukkan Kawasan

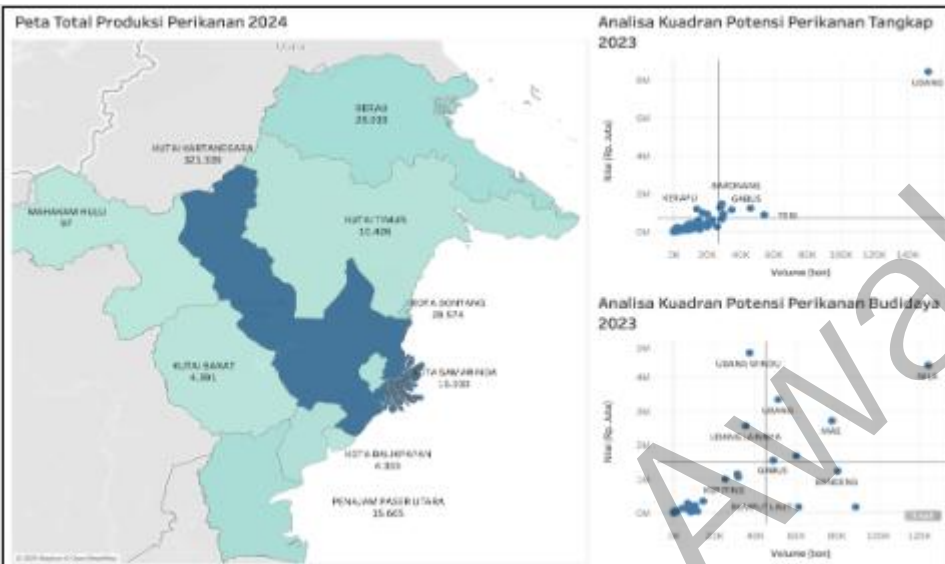
Peruntukan Kawasan	Luas (Ha)
Kawasan Hutan Produksi	5.953.731
Kawasan Pariwisata	9.857
Kawasan Perikanan	2.085.091
Kawasan Pertanian	3.469.408
Kawasan Peruntukan Industri	54.424

Sumber: Dinas PUPRPERA Provinsi KALTIM, 2024

Pengembangan industri hilir di Kalimantan Timur perlu diprioritaskan agar potensi sumber daya alamnya dapat dikelola untuk memberikan nilai tambah yang lebih besar bagi perekonomian daerah dan menciptakan perluasan lapangan kerja. Beberapa sektor yang menjadi potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Provinsi Kalimantan Timur sebagai berikut :

- 1) Kelautan dan Perikanan
- Kalimantan Timur memiliki potensi kelautan dan perikanan yang sangat besar dan terus mengalami tren produksi peningkatan. Dengan garis pantai yang panjang, sumber daya ikan yang melimpah, serta potensi budidaya laut yang beragam, Kaltim memiliki peluang besar untuk menjadi salah satu pusat perikanan utama di Indonesia. Berdasarkan Analisa Kuadran pada Gambar II. Xxx bahwa Provinsi Kaltim memiliki potensi jumlah produksi tinggi dan memiliki nilai ekonomis tinggi, seperti Udang,

Baronang, Kakap, Tongkol, Gabus, Teri, Patin, Nila, dan Ikan Mas. Peningkatan produksi perikanan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat pesisir.

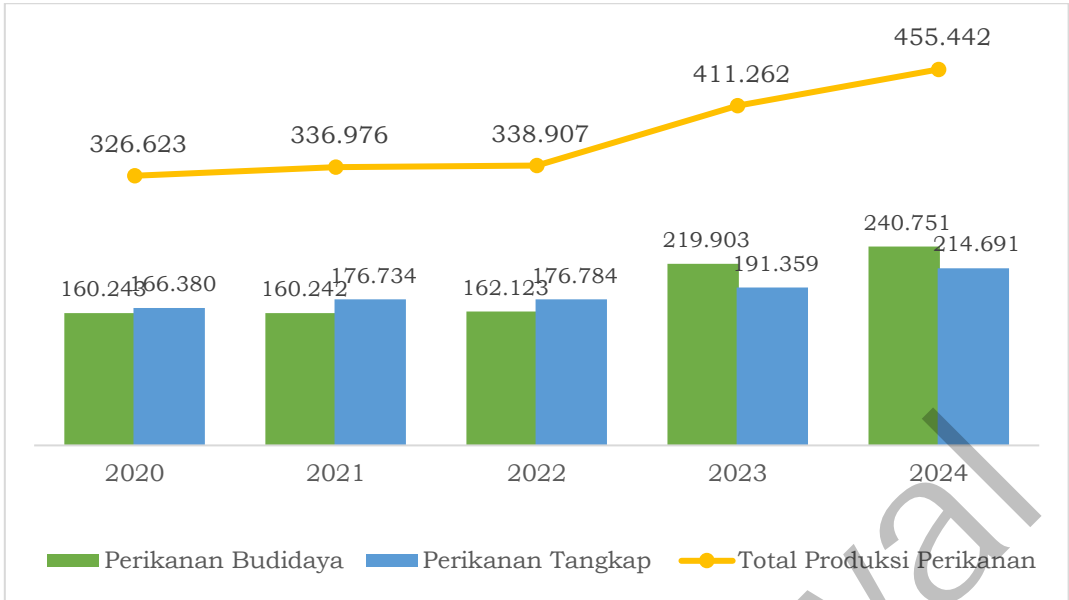


Gambar II.3

Sebaran Produksi Perikanan Tahun 2024 dan Analisa Kuadran terhadap Potensi Komoditi Perikanan Bernilai Ekonomi Tinggi Provinsi Kaltim Tahun 2023

(Sumber: DKP Provinsi KALTIM, 2025 & Portal Data KKP, 2024 (diolah))

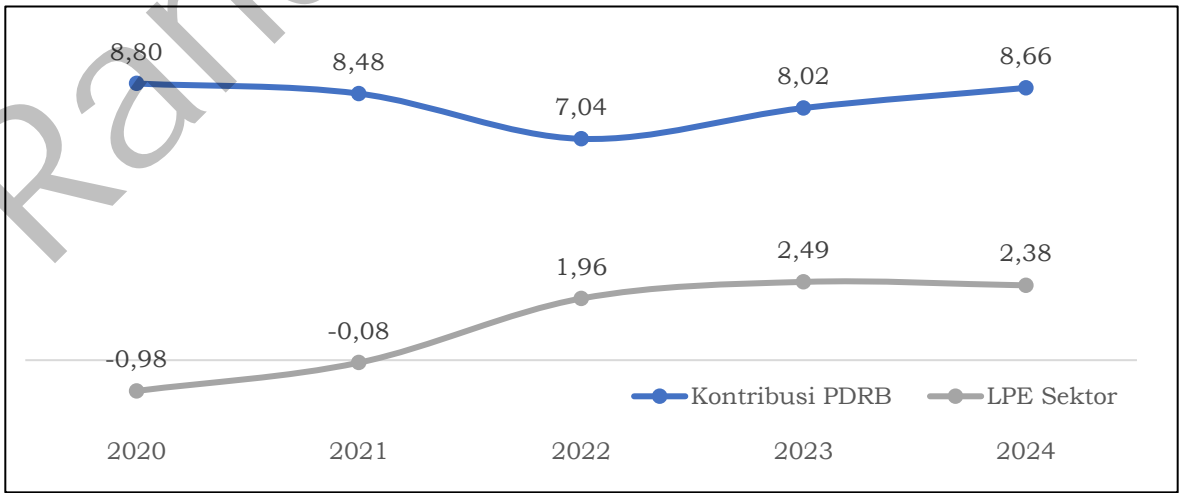
Produksi perikanan Kalimantan Timur selama lima tahun terakhir menunjukkan tren peningkatan, disebabkan salah satunya karena bantuan pemerintah dalam bentuk sarana dan prasarana kepada pelaku usaha perikanan serta mulai diterapkannya penangkapan serta budidaya ikan yang ramah lingkungan. Namun, dalam pencapaian produksi perikanan di Kalimantan Timur masih ditemui permasalahan yang perlu mendapat perhatian. Tingginya harga pakan mengakibatkan beberapa pelaku usaha menurunkan produksinya atau berhenti produksi sementara waktu, masih rendahnya kesadaran penggunaan alat tangkap ramah lingkungan, belum optimalnya sarana dan prasarana pangkalan pendaratan ikan, serta sistem pemasaran dan peningkatan nilai tambah produk perikanan.



Gambar II.4
Produksi Perikanan di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020–2024
(Sumber: DKP Provinsi KALTIM, 2024 (diolah))

2) Pertanian

Kontribusi sektor pertanian dalam arti luas terhadap PDRB Provinsi Kalimantan Timur tahun 2020-2024 secara umum mengalami tren fluktuasi, dimana tercatat pada tahun 2022 kontribusi sektor pertanian mengalami penurunan yang cukup signifikan dibandingkan tahun 2020 yaitu sebesar 1,75 persen. Hal ini disebabkan nilai PDRB sektor pertambangan dan penggalian sejak tahun 2021 kembali meningkat yang mengakibatkan kontribusi sektor pertanian tertekan. Namun, di tahun 2024 kontribusi sektor ini kembali meningkat menjadi 8,66 persen.



Gambar II.5
Kontribusi dan Laju Pertumbuhan Sektor Pertanian
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024 (persen)
(Sumber: BPS Provinsi KALTIM, 2025)

Dari sisi laju pertumbuhan ekonomi sektor pertanian dalam arti luas dari tahun ke tahun menunjukkan tren peningkatan. Tercatat pada tahun 2020 dan tahun 2021, laju pertumbuhan ekonomi sektor pertanian dalam arti luas mengalami pertumbuhan negatif yaitu pada angka -0,98 persen dan -0,08 persen. Penurunan ini dipengaruhi oleh kinerja subsektor kehutanan dan pennebangan kayu yang berkontraksi cukup dalam pada tahun 2020 yaitu sebesar -6,28 persen dan kontraksi pada subsektor tanaman pangan pada tahun 2021 yaitu sebesar -4,48 persen. Namun, pada tahun 2024 laju pertumbuhan ekonomi sektor pertanian dalam arti luas kembali meningkat menjadi 2,38 persen dengan sub sektor perkebunan yang menjadi penopang utamanya.

a. Tanaman Pangan

Swasembada beras merupakan status yang diupayakan terwujud di Provinsi Kalimantan Timur sejak lama, tetapi belum dapat dicapai hingga saat ini. Produksi padi di Provinsi Kalimantan Timur dilakukan pada lahan kering (ladang) dan lahan basah (sawah). Berdasarkan dukungan teknologi, agro- ekosistem sawah hingga saat ini mendapat dukungan teknologi lebih maju dibandingkan dengan ladang sehingga produksi padi sawah lebih banyak berperan dalam memenuhi kebutuhan pangan, meskipun produksi padi masih belum mencapai swasembada untuk tingkat Provinsi dan masih di bawah target produksi yang ditetapkan.

Tabel II.3
Luas Panen, Produksi, dan Produktivitas Padi Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024

Tahun	Luas Panen (Ha)	Produksi (ton)	Produktivitas (Ton/Ha)
2020	73.568	262.435	3,57
2021	66.269	244.678	3,69
2022	64.970	239.425	3,69
2023	57.082	226.972	3,97
2024	63.041	249.643	3,96

Sumber: BPS RI, 2025

Tabel II.4
Produksi Padi Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024

Kab/Kota	Produksi (Ton)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Paser	52.365,75	51.972,06	48.202,66	28.608,94	52.886,67
Kutai Barat	1.199,22	2.021,46	1.284,77	1.319,37	1.348,29

Kab/Kota	Produksi (Ton)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Kutai Kartanegara	110.940,44	104.441,83	105.025,70	115.103,82	106.553,73
Kutai Timur	17.078,56	13.119,61	12.076,25	10.167,79	13.938,46
Berau	23.352,73	22.364,87	21.135,98	20.498,89	16.693,40
PPU	47.018,03	42.130,14	45.160,69	45.100,57	48.133,90
Mahakam Ulu	1.081,75	932,09	489,42	680,75	681,92
Balikpapan	419,57	354,13	302,10	153,81	125,69
Samarinda	8.651,61	6.988,91	5.492,34	5.184,28	9.280,84
Bontang	326,86	352,88	255,43	153,85	0,29
Kalimantan Timur	262.434,52	244.677,98	239.425,34	226.972,07	249.643,19

Sumber: BPS Provinsi Kaltim, 2025

Tabel II.5
Produksi Beras Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024

Kab/Kota	Produksi (Ton)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Paser	30.459,51	30.230,50	28.037,95	16.640,91	30.762,49
Kutai Barat	697,54	1.175,83	747,33	767,42	784,27
Kutai Kartanegara	64.530,52	60.750,49	61.090,11	66.952,24	61.978,93
Kutai Timur	9.934,06	7.631,26	7.024,36	5.914,28	8.107,56
Berau	13.583,55	13.008,91	12.294,14	11.923,56	9.710,01
PPU	27.348,90	24.505,74	26.268,52	26.233,57	27.997,96
Mahakam Ulu	629,22	542,17	284,68	395,97	396,66
Balikpapan	244,05	205,99	175,72	89,47	73,11
Samarinda	5.032,37	4.065,23	3.194,72	3.015,53	5.398,37
Bontang	190,12	205,26	148,57	89,49	0,17
Kalimantan Timur	152.649,84	142.321,38	139.266,10	132.022,44	145.209,53

Sumber: BPS Provinsi Kaltim, 2025

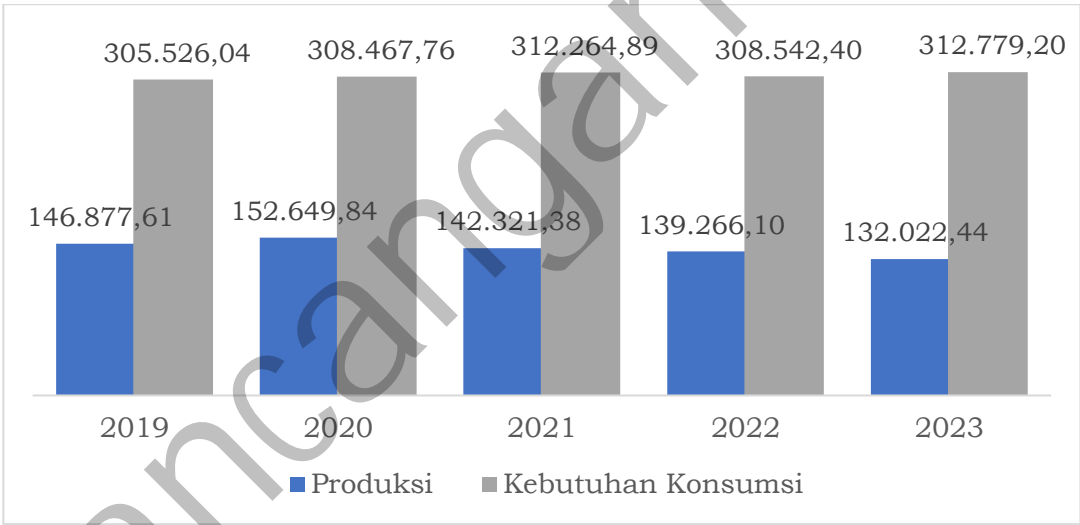
Tabel II.6
Produksi Jagung Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024

Kab/Kota	Produksi (Ton)				
	2020	2021	2022	2023	2024*
Paser	6.569,23	5.615,62	5.358,83	1.538,60	1.071,56
Kutai Barat	2.376,57	2.832,38	1.981,75	2.917,20	879,48
Kutai Kartanegara	9.296,99	5.717,84	6.982,08	7.674,00	4.639,98
Kutai Timur	5.762,85	6.774,56	7.283,61	2.122,40	916,71
Berau	48.881,75	63.023,55	51.072,78	19.335,90	138,18
PPU	1.898,14	2.535,01	503,28	171,60	533,11
Mahakam Ulu	2,17	7,94	12,74	3,20	-
Balikpapan	679,79	206,88	356,14	75,10	57,29
Samarinda	410,74	267,21	343,86	118,40	116,69

Kab/Kota	Produksi (Ton)				
	2020	2021	2022	2023	2024*
Bontang	42,18	38,00	40,62	87,90	94,77
Kalimantan Timur	75,920,42	87,018,99	73,935,68	34,044,30	8,447,77

Sumber: DPTPH Provinsi Kaltim, 2025
(*Data s.d Juni 2024 (Aplikasi SiPDPS))

Secara umum, pada periode tahun 2019-2024 terjadi penurunan produksi dan produktivitas. Penurunan dikarenakan luas lahan baku sawah dan luas panen yang berkurang, perubahan iklim, ketersediaan air dan benih unggul, serta menurunnya minat petani untuk menanam padi. Penurunan luas lahan baku sawah dikarenakan adanya perubahan fungsi lahan menjadi fungsi lainnya, terbatasnya bendungan dan embung, saluran irigasi yang tidak terpelihara dengan baik, tersebarnya lahan persawahan, serta luas sawah beririgasi yang hanya 11.920 Ha dari luas baku lahan sawah 46.640,03 Ha mengakibatkan rendahnya produktivitas.



Gambar II.6
Produksi dan Kebutuhan Konsumsi Beras (ton)
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023
(Sumber Data : DPTPH Prov. Kaltim, 2024)

Pola konsumsi beras di Kalimantan Timur cenderung tinggi, mengingat beras adalah makanan pokok bagi sebagian besar masyarakat. Dengan jumlah penduduk yang terus berkembang, permintaan beras pun terus meningkat. Hal ini memperburuk kesenjangan antara produksi dan kebutuhan lokal. Untuk menutupi kekurangan tersebut, Kalimantan Timur banyak mengandalkan pasokan beras dari daerah luar, seperti Sumatera, Sulawesi, dan Jawa. Upaya untuk mengatasi masalah ini tentu saja perlu melibatkan berbagai langkah, seperti peningkatan kualitas dan

kuantitas hasil pertanian beras melalui teknologi pertanian yang lebih modern, pengelolaan sumber daya alam yang lebih efisien, serta dukungan dari pemerintah dalam hal penyediaan infrastruktur yang lebih baik untuk mendukung pertanian beras di Kaltim.

b. Hortikultura

Tanaman hortikultura mencakup beragam jenis tanaman yang dapat dibedakan berdasarkan fungsinya, mulai dari sayuran, buah-buahan, tanaman hias, hingga tanaman obat. Tanaman-tanaman ini umumnya ditanam di lahan yang terbatas, seperti kebun rumah atau lahan pertanian kecil, dengan cara budidaya yang tepat dan inovatif, tanaman hortikultura dapat memberikan hasil yang optimal dan mendukung keberlanjutan kehidupan manusia. Sesuai Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18/Permentan/RC.040/4/2018 bahwa di Kalimantan Timur ditetapkan 3 komoditas prioritas sub sektor buah-buahan adalah Pisang, Pepaya dan jeruk. Sedangkan komoditas sayuran adalah bawang merah, cabai besar dan cabai rawit.

Tabel II.7
Produksi Tanaman Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023

Komoditas	Produksi (ton)				
	2019	2020	2021	2022	2023
Pisang	103.888	95.528	130.656	127.562	156.132
Pepaya	24.969	15.121	24.068	13.674	29.442
Jeruk	14.050	12.517	11.457	7.755	8.396
Bawang Merah	173	267	72	114	252
Cabai Rawit	8.029	9.081	8.367	7.778	7.470
Cabai Besar	4.614	4.290	5.916	2.083	1.183

Sumber Data : BPS Provinsi Kalimantan Timur, 2024

Tabel II.8
Produksi Tanaman Hortikultura Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023

Kab/Kota	Produksi (ton)					Cabai Besar
	Pisang	Pepaya	Jeruk Siam	Bawang Merah	Cabai Rawit	
Paser	26.095,46	394,54	2.036,31	31,00	461,60	40,00
Kutai Barat	1.165,15	163,70	53,80	-	248,90	9,80
Kutai Kartanegara	8.526,06	1.415,89	855,76	47,08	3.581,83	701,06
Kutai Timur	104.612,80	673,90	4.275,18	31,55	466,22	124,88
Berau	3.434,90	1.287,52	510,28	39,10	582,06	165,88

Kab/Kota	Produksi (ton)					Cabai Besar
	Pisang	Pepaya	Jeruk Siam	Bawang Merah	Cabai Rawit	
PPU	2.369,07	331,82	462,28	102,34	634,87	23,34
Mahakam Ulu	9,02	0,67	0,50	-	3,18	-
Balikpapan	2.280,64	23.840,50	136,40	-	1.218,73	-
Samarinda	7.511,28	1.278,25	61,25	1,13	209,65	52,45
Bontang	127,37	55,33	3,78	-	63,40	65,30
Kalimantan Timur	156.131,75	29.442,13	8.395,53	252,19	7.470,45	1.182,72

Sumber Data : *BPS Provinsi Kalimantan Timur, 2024*

Nilai produksi pisang pada tahun 2023 merupakan nilai produksi komoditas buah-buahan terbesar diantara komoditas tanaman lainnya, dan meningkat sebanyak 22,40 persen (28,57 ribu ton) dibandingkan tahun 2022. Kabupaten/kota dengan produksi pisang terbesar adalah Kabupaten Kutai Timur dan berkontribusi sebesar 67,00 persen terhadap total produksi buah-buahan di Kalimantan Timur (Kecamatan terbesar berasal dari Kaliorang dengan produksi sebanyak 75,52 ribu ton).

Sementara itu untuk komoditas bawang merah, cabe rawit dan cabe besar cukup fluktuatif, kecuali untuk cabe besar yang mengalami penurunan cukup drastis. Penurunan produksi cabai besar di Kalimantan Timur berdampak langsung pada ketersediaan pasokan cabai di pasar lokal, yang akhirnya mempengaruhi harga jual. Sehingga diperlukan upaya bersama dari pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat untuk mengatasi permasalahan ini. Inovasi dalam teknologi pertanian, pemenuhan sarana dan prasarana serta pendidikan kepada petani mengenai praktik pertanian yang ramah lingkungan dan efisien dapat menjadi solusi untuk mengatasi penurunan produksi di Kalimantan Timur.

c. Perkebunan

Sektor perkebunan memiliki potensi untuk berkontribusi signifikan terhadap ekonomi nasional khususnya di Provinsi Kalimantan Timur. Fakta bahwa masih terjadi penyerapan tenaga kerja yang tinggi di sektor pertanian, serta sumbangan devisa yang cukup besar dari sektor agribisnis yang berkembang pesat dan penyediaan bahan baku untuk industri hilir, menunjukkan ketahanan sektor pertanian dalam menopang

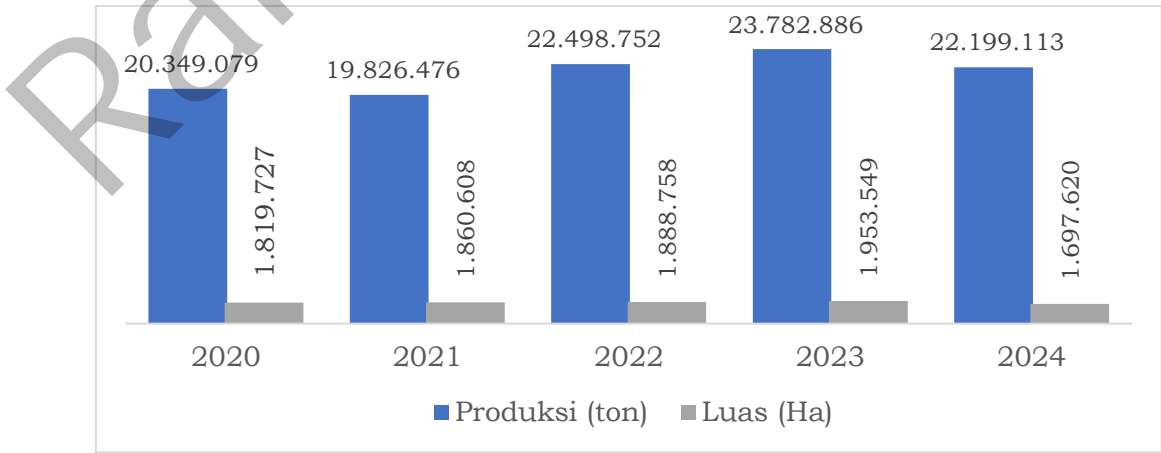
perekonomian. Provinsi Kalimantan Timur memiliki 5 (lima) komoditas perkebunan unggulan yang memberikan dampak cukup signifikan dalam pembentukan perekonomian daerah. Lima komoditas unggulan itu adalah kelapa sawit, karet, kelapa dalam, lada, dan kakao.

Tabel II.9
Produksi Perkebunan Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Tanaman di Provinsi Kalimantan Timur (ton) Tahun 2024*

Kabupaten/Kota	Kakao	Karet	Kelapa Dalam	Kelapa Sawit	Lada
Berau	725	100	1.794	2.785.000	556
Balikpapan	1	3.626	562	250	127
Bontang	-	-	17	734	-
Samarinda	3	599	306	15.371	16
Kutai Barat	21	35.107	218	1.233.000	6
Kutai Kartanegara	41	20.729	2.619	3.446.893	2.961
Kutai Timur	1.456	1.557	679	7.759.931	156
Mahakam Ulu	289	-	4	78.485	-
Paser	6	9.705	622	2.762.937	18
Penajam Paser Utara	1	2.157	1.022	585.377	1.240
KALTIM	2.543	73.580	7.843	18.667.978	5.080

Sumber: BPS Provinsi KALTIM, 2025 (*Angka Sementara)

Komoditas perkebunan yang sangat mendominasi dan menarik banyak investor dari luar daerah adalah kelapa sawit. Luasan dan produksi komoditi unggulan menunjukkan peningkatan dari tahun sebelumnya dikarenakan membaiknya harga komoditi perkebunan pada tahun 2024 sehingga membangkitkan semangat pekebun untuk berbudidaya dan memanen hasil budidayanya.



Gambar II.7
Produksi dan Luas Areal Perkebunan Provinsi Kaltim Tahun 2020–2024 Provinsi Kalimantan Timur
Sumber: BPS Provinsi KALTIM, 2025

Dengan tingkat produksi yang ada, akan terus dilakukan pengembangan, salah satunya melalui pengembangan kawasan perkebunan berbasis korporasi. Hal ini dilakukan agar kegiatan perkebunan tidak hanya terbatas pada peningkatan produksi, namun akan dapat terintegrasi dari hulu – hilir, dimana pengadaan benih/bibit, pengolahan/produksi, hingga distribusi ke konsumen akhir diintegrasikan dan dikelola oleh korporasi petani sedemikian rupa sehingga nilai tambah terbesar dari kegiatan pertanian bisa dinikmati pekebun yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan pekebun.

Komoditi Karet Rakyat di Kab. Kutai Barat, Kab. Paser, Kab. Kukar, dan Kab. Kutim memiliki potensi peningkatan produksi yang meningkat. Hal ini ditandai dengan besarnya calon tanaman produktif dengan tingkat produktivitas yang tinggi. Sehingga perlu dilakukan upaya-upaya intensifikasi, pengendalian hama dan penyakit, dan pengendalian gulma. Disisi lain pada Komoditi Karet di Kab. Kubar, Kab. Kukar, dan Kab. Paser memiliki luasan Tanaman Tua/Rusak yang cukup tinggi dengan potensi Produktivitas yang tinggi. Oleh karena itu diperlukan upaya peremajaan ataupun rehabilitasi pada komoditi tanaman tersebut.

d. Peternakan

Secara umum subsektor peternakan mengalami perkembangan yang berfluktuatif setiap tahunnya baik jumlah populasi ternak maupun produksi daging.

Tabel II.10
Populasi Ternak di Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2020-2024 (ekor)

No	Hewan	2020	2021	2022	2023	2024*
1	Sapi	119.974	121.290	108.613	57.757	62.678
2	Sapi Perah	87	76	68	12	69
3	Kambing	69.929	68.997	58.522	26.978	44.308
4	Domba	635	694	642	611	935
5	Babi	83.652	76.292	45.839	18.957	27.973
6	Kerbau	6.552	6.539	6.490	1.325	4.254
7	Kuda	95	143	95	24	94
8	Kelinci	10.830	9.462	7.931	857	1.006
9	Ayam Buras	4.435.205	4.815.976	5.183.873	686.916	2.569.524
10	Ayam Pedaging	59.402.832	60.804.149	61.412.191	54.860.076	55.408.677
11	Ayam Petelur	1.218.994	1.223.739	1.340.217	1.282.503	1.295.328
12	Itik	254.749	261.263	269.564	47.290	155.377

No	Hewan	2020	2021	2022	2023	2024*
13	Itik Manila	52.823	64.178	67.608	45.791	21.090
14	Puyuh	79.222	94.339	88.143	19.518	16.161

Ket: *) Angka Sementara; Sumber: DPKH Provinsi KALTIM, 2024

Populasi ternak di Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2024 masih sangat didominasi oleh ternak unggas yaitu sebesar 99,76 persen, sedangkan ternak ruminansia (sapi, kambing, domba, kerbau, babi, dan kelinci) hanya sebesar 0,24 persen. Penyebab turunnya jumlah populasi ternak besar terutama sapi potong diakibatkan oleh pemotongan sapi betina, adanya wabah penyakit mulut dan kuku (PMK), serta biaya produksi yang mahal.

Tabel II.11
Produksi dan Konsumsi Daging Oleh Masyarakat di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019–2024

No	Produksi/ Konsumsi	2020	2021	2022	2023	2024*
PRODUKSI						
1	Daging Ayam Potong (Ton)	55.280,28	56.584,34	57.150,18	64.525,43	65.170,69
2	Daging Sapi (Ton)	8.349,82	7.316,54	7.836,42	7.478,68	7.947,72
3	Telur (Ton)	14.008,58	14.402,58	15.594,35	10.858,94*	12.618,09
KONSUMSI						
1	Daging Ayam Pedaging (Ton)	60.372,41	65.702,56	67.609,21	71.564,91	72.177,90
2	Daging Sapi (Ton)	10.694,27	9.924,65	10.088,37	11.513,37	12.001,20
3	Telur (Ton)	23.667,38	26.433,12	26.018,62	28.606,01	23.336,94
DEFISIT/SURPLUS						
1	Daging Ayam Potong (%)	- 8.43%	- 13.88%	- 15.47%	- 9.84%	- 9.71%
2	Daging Sapi (%)	- 21.92%	- 26.28%	- 22.32%	- 35.04%	- 33.78%
3	Telur (%)	- 40.81%	- 45.51%-	- 40.06%	- 62.04%	- 45.93%

Ket: *) Angka Sementara; Sumber: DPKH Provinsi KALTIM, 2024

Tabel II.12
Produksi Daging Sapi Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024

Kab/Kota	Produksi (Ton)				
	2020	2021	2022	2023	2024*
Paser	509,30	469,17	1.020,96	341,03	335,20
Kutai Barat	296,51	240,43	298,88	254,57	241,70
Kutai Kartanegara	909,12	762,52	870,10	643,86	878,46
Kutai Timur	840,56	883,84	766,15	893,85	1.197,50
Berau	636,78	506,93	705,49	537,08	522,66
PPU	473,59	545,63	599,50	564,74	901,88
Mahakam Ulu	14,53	13,11	17,38	14,47	26,85
Balikpapan	1.692,49	1.335,79	1.149,55	1.447,10	1.179,19

Kab/Kota	Produksi (Ton)				
	2020	2021	2022	2023	2024*
Samarinda	2.096,74	1.918,07	1.700,55	2.075,32	2.096,68
Bontang	880,21	641,04	707,86	706,66	567,60
Kalimantan Timur	8.349,82	7.316,54	7.836,42	7.478,68	7.947,72

Ket: *) Angka Sementara; Sumber: DPKH Provinsi Kaltim, 2024

Tabel II.13
Produksi Daging Ayam Potong Menurut Kabupaten/Kota
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024

Kab/Kota	Produksi (Ton)				
	2020	2021	2022	2023	2024*
Paser	2.601,86	2.627,88	2.653,23	1.650,79	1.667,29
Kutai Barat	2.409,17	2.409,64	2.434,67	2.358,27	2.318,85
Kutai Kartanegara	13.262,74	13.989,87	14.126,97	5.188,18	5.240,06
Kutai Timur	2.740,38	3.561,20	3.597,75	3.637,39	3.673,76
Berau	1.684,25	1.689,92	1.707,75	10.937,63	11.047,01
PPU	1.840,90	1.704,67	1.721,72	1.179,13	1.190,92
Mahakam Ulu	69,87	70,73	71,43	-	-
Balikpapan	11.888,42	12.228,08	12.351,30	15.279,67	15.432,47
Samarinda	14.619,26	14.799,23	14.946,29	20.285,32	20.488,18
Bontang	4.163,42	3.503,11	3.539,08	4.009,05	4.049,14
Kalimantan Timur	55.280,28	56.584,34	57.150,18	64.525,43	65.170,69

Ket: *) Angka Sementara; Sumber: DPKH Provinsi Kaltim, 2024

Tabel II.14
Produksi Telur Menurut Kabupaten/Kota
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024

Kab/Kota	Produksi (Ton)				
	2020	2021	2022	2023	2024*
Paser	1.455,62	1.556,80	1.483,73	196,51	239,99
Kutai Barat	384,23	418,57	424,55	292,93	334,42
Kutai Kartanegara	3.607,93	3.669,03	3.726,94	3.377,63	3.687,30
Kutai Timur	1.308,24	1.310,25	1.799,30	533,58	871,56
Berau	2.130,79	2.371,80	2.262,04	1.878,66	1.900,42
PPU	896,93	770,45	777,92	487,03	755,60
Mahakam Ulu	44,94	49,01	48,15	7,99	13,71
Balikpapan	938,81	937,43	945,85	879,94	905,78
Samarinda	3.094,14	3.195,57	4.027,44	3.172,79	3.818,11
Bontang	146,95	123,67	98,43	31,88	91,20
Kalimantan Timur	14.008,58	14.402,58	15.594,35	10.858,94	12.618,09

Ket: *) Angka Sementara; Sumber: DPKH Provinsi Kaltim, 2024

Produksi daging Kalimantan Timur belum bisa mencukupi kebutuhan konsumsi daging masyarakat Kalimantan Timur sehingga untuk mencukupi kebutuhan konsumsi daging masih mendatangkan daging maupun produk olahan daging dari luar Kalimantan Timur. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya kualitas dan kuantitas sapi induk masih rendah, jarak kelahiran sapi (calving interval) cukup panjang, dan tingkat kematian pedet cukup tinggi.

Begitu juga dengan Produksi telur yang belum bisa mencukupi kebutuhan konsumsi telur masyarakat Kalimantan Timur, Untuk memenuhi kekurangan akan permintaan telur maka dipenuhi dengan pemasukan telur dari Pulau Jawa dan Sulawesi. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya peran swasta/ usaha peternakan rakyat dibidang ayam petelur masih rendah, biaya investasi usaha ayam petelur cukup tinggi, populasi ayam petelur masih sedikit, dan manajemen budidaya ayam petelur belum optimal.

Adanya sarana dan prasarana peternakan yang teralokasi dengan baik merupakan hal yang penting untuk mendukung keberlanjutan produksi hewan ternak yang berkualitas dan berkelanjutan, Sehingga sebagai upaya mendorong pemenuhan Produksi maka Pemerintah Kalimantan Timur telah melakukan strategi Pengembangan Desa Korporasi Ternak (PDKT) serta optimalisasi sistem integrasi ternak dengan sektor lain seperti integrasi sapi perkebunan sawit, integrasi sapi lahan pasca tambang, dan integrasi sapi perhutanan sosial.

e. Kehutanan

Pengelolaan sumber daya hutan nasional di Provinsi Kalimantan Timur telah dilakukan lebih dari empat dekade dan sempat menjadi sumber daya alam yang memiliki kontribusi sebagai penyumbang devisa nomor satu di Kalimantan Timur pada era 1970-an. Dalam rangka menghadapi tantangan mendatang, pengelolaan sumber daya hutan seluas 8.149.097,84 Ha yang terdiri dari hutan produksi konversi, hutan produksi terbatas, hutan produksi tetap, hutan lindung dan Kawasan Suaka Alam (KSA) atau Kawasan Perlindungan Alam (KPA) (Kepmen LHK Nomor 584 Tahun 2024), hendaknya mampu memberikan kontribusi terhadap perekonomian daerah dan jasa lingkungan.

Tabel II.15
Produksi Kayu Bulat

No	Nama Jenis	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Hutan Alam	M ³	1.122.077,09	1.261.179,69	1.009.177,57	751.972,92	887.293,41
2	Hutan Tanaman	M ³	3.484.923,24	3.314.494,10	3.206.086,00	4.613.355,95	5.146.333,56
3	Non-Kehutanan	M ³	227.281,22	260.724,00	218.807,27	194.763,82	259.805,98
TOTAL		M ³	4.834.281,55	4.836.397,79	4.434.071,18	5.560.092,69	6.293.432,95

Sumber: Dishut Provinsi KALTIM, 2025

Produksi hasil hutan bukan kayu (HHBK) berupa kayu bulat dari tahun 2020 cenderung mengalami kenaikan. Terjadi sedikit penurunan produksi di tahun 2022 dikarenakan pada tahun ini harga kayu bulat cenderung turun, sehingga perusahaan kehutanan cenderung mengurangi produksi.

Tabel II.16
Luas Lahan Kritis yang Direhabilitasi (Ha)

No	Tahun	Luas Lahan Kritis yang Direhabilitasi (Ha)
1.	2020	38.737,80
2.	2021	39.900,80
3.	2022	38.866,17
4.	2023	38.861,16
5.	2024	38.165,00
TOTAL		194.530,93

Sumber: Dishut Provinsi KALTIM, 2025

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan DAS dan Rehabilitasi Hutan Nomor SK.49/PDASRH/PPPDAS/DAS.0/12/2022 tanggal 27 Desember 2022 tentang Luas Lahan Kritis Nasional Tahun 2022, luas lahan kritis di Provinsi Kalimantan Timur seluas 274.477 Ha (diperbaharui setiap 5 tahun).

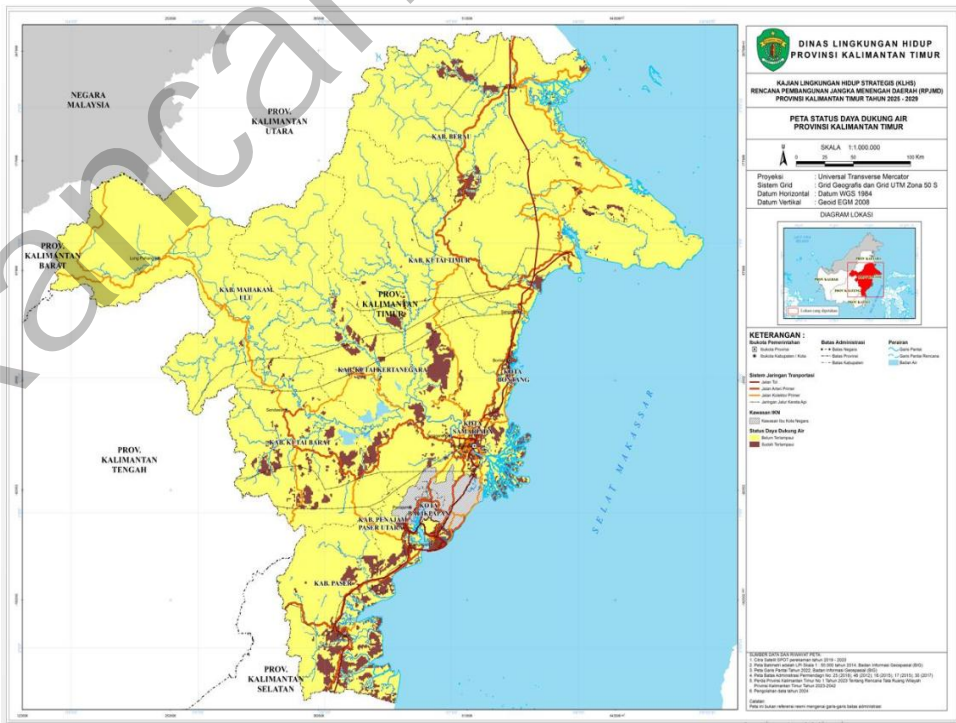
Secara keseluruhan, total luas lahan kritis yang direhabilitasi pada tahun 2020–2024 yaitu seluas 194.530,93 Ha. Sedangkan pada tahun 2024, terjadi kerusakan hutan seluas 12.766,01 Ha dengan rincian *illegal logging* seluas 1.049,64 Ha, kebakaran hutan seluas 6.869,65 Ha, dan perambahan seluas 4.846,71 Ha (Dishut Provinsi Kalimantan Timur, 2025).

Sektor kehutanan dapat berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perhutanan sosial. Perhutanan sosial merupakan sistem pengelolaan hutan lestari yang dapat dikelola oleh

masyarakat dan mendapatkan manfaat ekonomi dari hutan. Perhutanan sosial di Kalimantan Timur sampai pada tahun 2024 terdiri dari 5 (lima) skema, yaitu Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Kemitraan dan Hutan Adat dengan luas total 233.099,40 Ha (Kepmen LHK Nomor: SK.8/MENLHK-PKTL/REN/PLA.0/1/2023). Realisasi perhutanan sosial sampai dengan tahun 2024 sebesar 330.184,61 Ha yang dikelola oleh 179 unit pengelola (Kelompok Perhutanan Sosial).

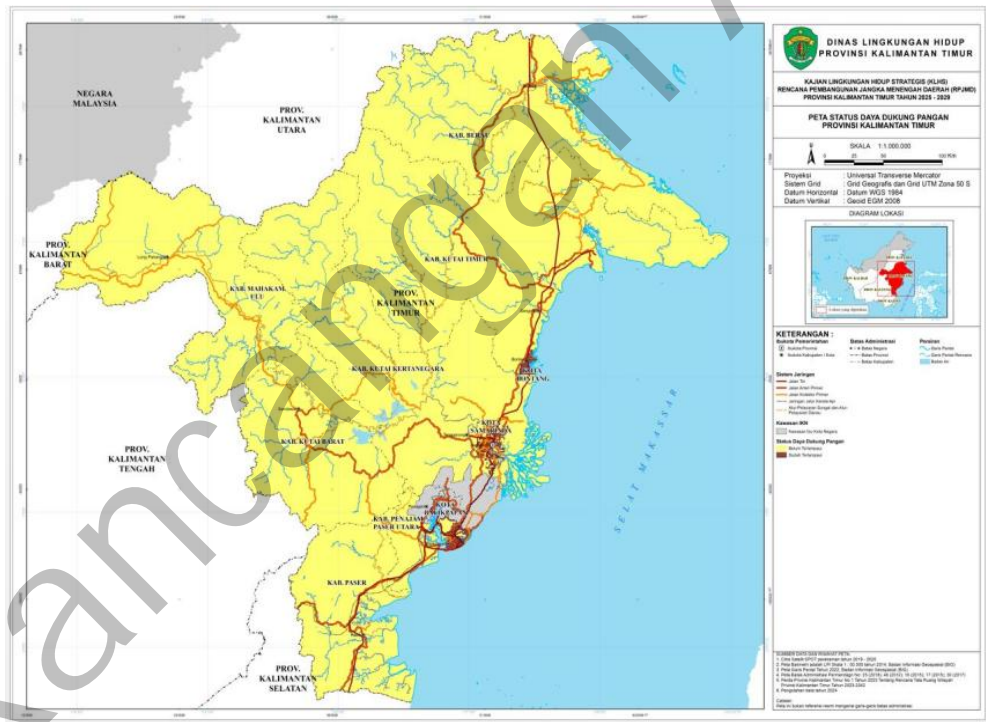
3. Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup di Kalimantan Timur menjadi isu krusial seiring dengan perkembangan wilayah, terutama kaitannya dengan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Kawasan hutan yang luas serta keanekaragaman hayati di Kalimantan Timur memberikan kontribusi penting terhadap daya dukung dan daya tampung lingkungan. Namun, ancaman dari deforestasi, kegiatan pertambangan dan pembangunan infrastruktur secara masif dapat mempercepat degradasi lingkungan apabila tidak dikelola dengan baik. Untuk mengetahui indikatif status daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, salah satunya dapat diketahui melalui identifikasi daya dukung air dan daya dukung pangan.



Gambar II.8
Peta Status Daya Dukung Air
Provinsi Kalimantan Timur
(Sumber: DLH Provinsi KALTIM, 2024)

Daya dukung penyediaan air di Kalimantan Timur dipengaruhi oleh kondisi geografis dan hidrologis. Meskipun potensi air baku yang berasal dari air permukaan dan air tanah cukup besar, namun belum mampu memenuhi kebutuhan masyarakat secara optimal. Selain itu, adanya perubahan iklim, deforestasi, dan alih fungsi lahan untuk pertambangan dan perkebunan memperburuk kualitas dan kuantitas air yang mengakibatkan penurunan daya dukung lingkungan. Berdasarkan hasil kajian lingkungan hidup strategis menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah Provinsi Kalimantan Timur berada pada wilayah dengan daya dukung air yang belum terlampaui dengan luas 11.646.333,50 Ha (93,60 persen) dan sudah terlampaui dengan luas 796.483,87 Ha (6,40 persen). Selanjutnya diperlukan konservasi daerah tangkapan air, rehabilitasi hutan, serta pengelolaan dan pemanfaatan air secara berkelanjutan untuk menjaga daya dukung penyediaan air.



Gambar II.9
Peta Status Daya Dukung Pangan Provinsi Kalimantan Timur
(Sumber: DLH Provinsi KALTIM, 2024)

Daya dukung penyediaan pangan menghadapi tantangan signifikan mengingat kondisi geografis dan iklim yang kurang optimal untuk pengembangan sektor pertanian, terutama untuk tanaman pangan. Sebagian besar wilayah Kalimantan Timur didominasi oleh hutan dan lahan gambut yang memiliki keterbatasan dalam produktivitas pertanian. Berdasarkan hasil kajian lingkungan hidup strategis, status daya dukung

penyediaan pangan di wilayah perkotaan umumnya sudah terlampaui, mengingat pemusatan distribusi penduduk yang ada di wilayah tersebut, yaitu Kota Balikpapan, Kota Samarinda, dan Kota Bontang. Sementara untuk wilayah Kabupaten yang sudah terlampaui yaitu Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Kutai Timur. Untuk meningkatkan daya dukung penyediaan pangan, diperlukan strategi diversifikasi pangan lokal dan penguatan ketahanan pangan berbasis komunitas, termasuk pengembangan teknologi pertanian yang sesuai dengan karakteristik lahan. Upaya ini penting guna mengurangi ketergantungan pada pasokan pangan dari luar daerah, serta menjaga keseimbangan lingkungan dalam proses produksi pangan.

4. Berketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan

a. Indeks Ketahanan Pangan

Kalimantan Timur secara geografis memiliki potensi alam yang besar untuk mendukung ketahanan pangan dengan lahan pertanian, kehutanan, dan perikanan yang cukup luas. Namun, hingga kini produksi pangan lokal, khususnya beras belum mampu memenuhi kebutuhan masyarakat Kalimantan Timur, sehingga masih bergantung pada impor dari luar daerah terutama dari Pulau Jawa dan Sulawesi. Untuk mengukur ketahanan pangan suatu wilayah dapat dilihat dari capaian Indeks Ketahanan Pangan (IKP) yang disusun dari 9 (sembilan) indikator yang merupakan turunan dari 3 (tiga) aspek ketahanan pangan yaitu ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan.

Tabel II.17
Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Tahun 2020-2024

No	Kabupaten/Kota	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Paser	82,26	80,48	81,76	83,70	80,04
2.	KUBAR	54,98	57,76	66,94	58,39	60,87
3.	KUKAR	84,28	84,73	84,44	85,53	87,17
4.	KUTIM	73,13	66,19	60,09	65,76	61,64
5.	Berau	85,34	86,77	86,16	85,33	81,91
6.	PPU	86,20	86,24	85,51	87,40	88,11
7.	MAHULU	63,17	52,75	53,29	57,68	56,53
8.	Balikpapan	87,66	88,68	89,47	91,40	91,23
9.	Samarinda	80,75	83,72	84,66	88,97	89,68
10.	Bontang	84,59	87,24	84,21	88,76	88,89
Kalimantan Timur		78,24	77,46	77,65	79,29	78,61

Sumber: Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi, BAPANAS, 2025

Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Kalimantan Timur menunjukkan tren yang positif dari 2020 hingga tahun 2023. Tren peningkatan ini menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah mulai mampu meningkatkan suplai konsumsi pangan masyarakat yang berdampak positif pada ketahanan pangan di Kalimantan Timur. Pada tahun 2023, Kalimantan Timur mencatat peningkatan signifikan dalam IKP, mencapai angka 79,29. Peningkatan ini menunjukkan keberhasilan dalam upaya meningkatkan ketahanan pangan, mungkin melalui kebijakan yang efektif, peningkatan produksi pertanian, atau perbaikan distribusi pangan.

Namun, untuk capaian IKP kabupaten/kota di Kalimantan Timur masih fluktuatif dengan kecenderungan meningkat di tahun 2024. Terjadinya penurunan IKP yang cukup tinggi di Kabupaten Kutai Timur disebabkan oleh penurunan akses terhadap air bersih serta penurunan rasio konsumsi terhadap ketersediaan pangan.

Ditinjau dari 3 (tiga) aspek ketahanan pangan, pada tahun 2023 aspek ketersediaan pangan masih memerlukan perhatian serius. Salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur aspek ketersediaan pangan adalah rasio konsumsi normatif terhadap produksi bersih beras, jagung, ubi jalar, ubi kayu, dan sagu serta stok beras pemerintah daerah.

Tabel II.18
Capaian Aspek Ketahanan Pangan
Menurut Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur Tahun 2023

No	Kabupaten/Kota	Ketersediaan	Keterjangkauan	Pemanfaatan
1.	Paser	81,31	87,38	82,73
2.	KUBAR	0,00	87,03	80,70
3.	KUKAR	78,27	91,28	86,67
4.	KUTIM	19,13	87,09	84,74
5.	Berau	76,02	94,43	85,50
6.	PPU	87,62	91,46	84,18
7.	MAHULU	0,00	84,63	80,73
8.	Balikpapan	-	98,62	85,49
9.	Samarinda	-	93,82	85,00
10.	Bontang	-	92,12	86,02
Kalimantan Timur		48,91	90,79	84,18

Sumber: Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi, BAPANAS, 2024

Pada aspek tersebut, baik di Provinsi Kalimantan Timur dan 3 (tiga) kabupaten yaitu Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Kutai

Barat dan Kabupaten Mahakam Ulu memiliki tingkat ketersediaan pangan yang masih rendah. Artinya Kalimantan Timur dan tiga kabupaten tersebut belum dapat memenuhi kebutuhan pangan untuk masyarakatnya secara mandiri. Hal ini disebabkan karena produksi pangan lokal belum bisa mengimbangi pertumbuhan jumlah penduduk. Sementara untuk wilayah perkotaan hanya disusun dari dua aspek, yaitu aspek keterjangkauan dan pemanfaatan pangan, mengingat ketersediaan pangan di wilayah perkotaan tidak dipengaruhi oleh produksi yang berasal dari wilayah sendiri tetapi berasal dari perdagangan antar wilayah.

b. Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan

Ketahanan pangan pada level individu diukur dengan indikator *Prevalence of Undernourishment* (PoU) atau prevalensi ketidacukupan konsumsi pangan yang digunakan untuk mengukur kondisi kerawanan pangan dan gizi di suatu wilayah. Semakin rendah PoU merepresentasikan peningkatan jumlah penduduk yang mengkonsumsi pangan sesuai standar kecukupan energi untuk hidup sehat, aktif, dan produktif.

Tabel II.19
Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur Tahun 2019-2023

Kabupaten/Kota	Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (Persen)				
	2019	2020	2021	2022	2023
Paser	10,10	11,64	15,37	20,54	11,99
KUBAR	9,24	11,17	14,20	16,39	12,63
KUKAR	9,34	11,14	14,41	18,52	10,59
KUTIM	6,78	9,24	10,90	16,35	8,70
Berau	5,24	5,14	12,30	14,16	7,86
PPU	10,08	11,58	16,60	23,09	16,34
MAHULU	5,48	8,20	10,76	18,22	13,82
Balikpapan	4,94	5,90	8,30	13,68	6,98
Samarinda	5,45	6,29	13,51	14,50	7,87
Bontang	5,02	5,21	9,84	11,72	6,95
Kalimantan Timur	7,02	8,24	12,56	16,19	9,20
Nasional	7,66	8,34	8,49	10,21	8,53

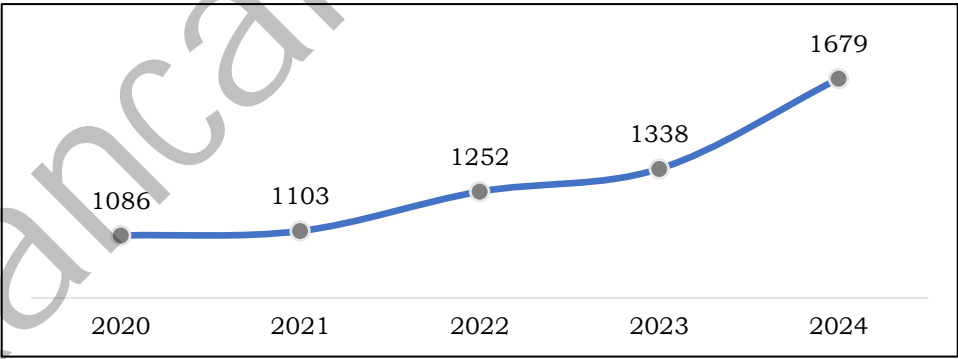
Sumber: BPS RI, 2024

Kondisi PoU Kalimantan Timur mulai tahun 2019 hingga tahun 2022 mengalami penurunan kinerja. Namun, di tahun 2023 PoU Provinsi

Kalimantan Timur kembali mengalami perbaikan kinerja yang cukup signifikan dengan nilai PoU yaitu sebesar 9,20 persen, meskipun belum mencapai kinerja sebaik di tahun 2019. Perbaikan kinerja PoU di Tahun 2023 karena adanya program pemerintah terhadap akses pangan masyarakat melalui Gerakan Pangan Murah, Bantuan pangan melalui Cadangan Pangan Pemerintah (CPP), Program Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA), serta Bantuan Pangan Non Tunai. Angka PoU Kalimantan Timur di tahun 2023 yang sebesar 9,20 persen merepresentasikan bahwa masih terdapat 9 orang dari 100 orang di Kalimantan Timur yang tidak mampu memenuhi kebutuhan energi untuk hidup normal, aktif, dan sehat.

c. Konsumsi Listrik Per Kapita

Konsumsi Listrik Per Kapita adalah ukuran jumlah listrik yang digunakan oleh rata-rata individu di suatu wilayah atau negara dalam jangka waktu satu tahun. Nilai ini dihitung dengan membagi total konsumsi listrik di wilayah tersebut dengan jumlah penduduknya. Konsumsi listrik per kapita mencerminkan tingkat pemanfaatan listrik oleh masyarakat, dan mengindikasikan perkembangan ekonomi, teknologi, dan akses energi di suatu wilayah.



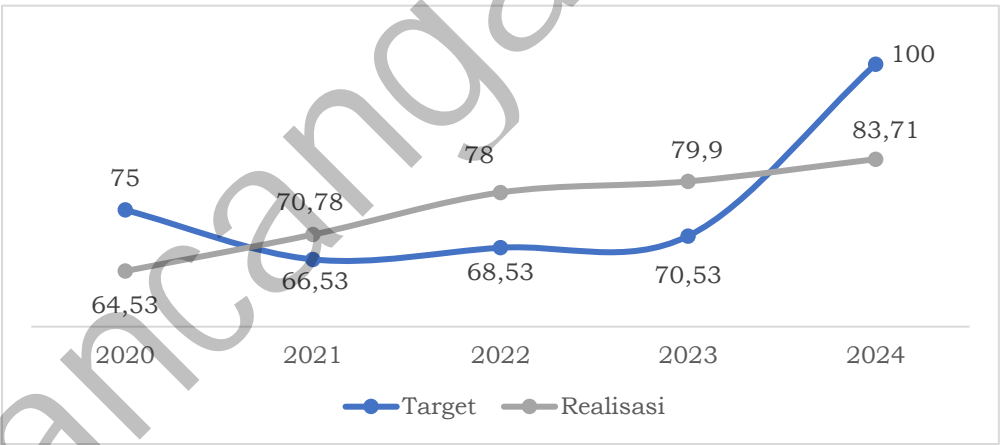
Gambar II.11
Konsumsi Listrik per Kapita (kWh) Tahun 2020-2024
(Sumber: DESDM Provinsi KALTIM, 2024)

Konsumsi listrik per kapita di Kalimantan Timur menunjukkan tren peningkatan yang konsisten dari tahun 2020 hingga 2024, dimana pada tahun 2020 tercatat sebesar 1.086 kWh per kapita dan terus meningkat pada tahun 2024 mencapai 1.679 kWh per kapita. Peningkatan terbesar terjadi antara tahun 2023 dan 2024, yaitu sebesar 341 kWh, menunjukkan adanya pertumbuhan yang signifikan dalam penggunaan

listrik selama periode tersebut. Kenaikan ini dapat mengindikasikan perkembangan ekonomi, peningkatan akses terhadap energi listrik, serta perubahan gaya hidup dan kebutuhan masyarakat yang semakin bergantung pada teknologi dan listrik.

d. Akses Rumah Tangga terhadap Konsumsi Air Minum

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Pemerintah Provinsi memiliki kewajiban pemenuhan air minum curah lintas kabupaten/kota. Selain itu Pemerintah Provinsi juga memiliki peran dalam mengkoordinasikan target pemenuhan kebutuhan akses air minum layak dan akses air minum aman (perpipaan dan non perpipaan). Dari Target RPJMN 2020-2024 untuk pemenuhan akses air minum layak di Kalimantan Timur sebesar 100%, kontribusi Kalimantan Timur dalam pemenuhan air minum layak pada akhir periode RPJMN 2020-2024 hanya mampu menembus angka 83,71% dari angka capaian Nasional 92,64%.



Gambar II.12
Target dan Realisasi Akses Air Minum Layak Tahun 2020-2024 (persen)
(Sumber: Dinas PUPRPERA Provinsi KALTIM, 2024)

Walaupun belum memenuhi target secara cakupan menunjukkan pencapaian layanan akses air minum layak di Kalimantan Timur dapat dikatakan baik, namun dari aspek keandalan, kualitas, dan kontinuitas sumber air baku perlu untuk terus mendapatkan perhatian. Ditambah lagi tantangan yang perlu mendapatkan perhatian selanjutnya adalah perubahan indikator kinerja dari air minum layak menjadi air siap minum perpipaan.

Tabel II.20
Akses Air Minum Layak Kabupaten/Kota Tahun 2024 (persen)

No	Kabupaten/Kota	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Paser	48,56	66,80	70,14	84,25	84,25
2.	KUBAR	31,04	72,19	86,02	86,02	43,21
3.	KUKAR	51,54	56,50	72,85	78,22	87,74
4.	KUTIM	40,11	44,20	51,73	55,03	60,01
5.	Berau	56,87	70,21	82,16	81,55	82,00
6.	PPU	32,14	49,90	30,90	23,35	89,07
7.	Mahulu	24,51	13,89	66,06	14,40	85,10
8.	Balikpapan	79,79	97,84	99,25	98,99	99,51
9.	Samarinda	87,28	79,39	87,27	87,27	85,86
10.	Bontang	99,96	81,18	83,55	83,55	83,55

(Sumber: Dinas PUPRPERA Provinsi KALTIM, 2025)

Agregat dari pencapaian akses air minum layak 10 kabupaten/kota di Kalimantan Timur telah memiliki capaian di atas 50 persen kecuali Kabupaten Kutai Barat, yang di tahun 2024 layanan aksesnya sempat bagus kemudian menurun kembali mencapai 43,21 persen karena kondisi topografi daerah yang berbukit, tingginya biaya operasional, serta masalah jaringan distribusi seperti kebocoran jaringan, kurangnya jaringan distribusi pada IPA yang Idle Capacity, dan pompa-pompa yang perlu diremajakan sehingga menyebabkan capaian layanan menurun.

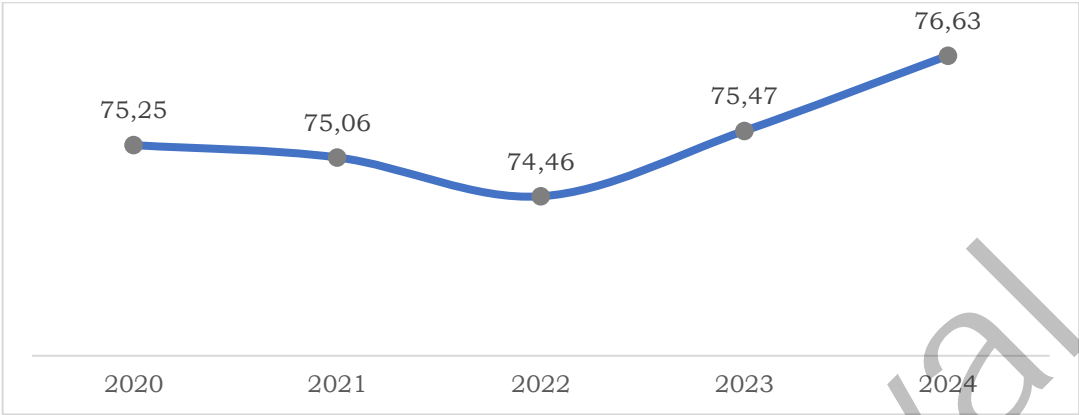
Sedangkan di Kabupaten PPU dan Mahulu, peningkatan akses air minum layak dipengaruhi oleh terbangunnya beberapa unit air baku dan peningkatan kualitas infrastruktur air minum (seperti pembangunan IPA, revitalisasi IPA, perluasan jaringan) baik dari pusat dan daerahnya sendiri. Kemudian, faktor jumlah penduduk yang relatif sedikit, dampaknya akan sangat signifikan memengaruhi kenaikan akses capaian tersebut.

5. Lingkungan Hidup Berkualitas

a. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Perekonomian Provinsi Kalimantan Timur yang didominasi oleh sumber daya alam tak terbarukan dengan pengelolaan yang bersifat ekstraktif menyebabkan peningkatan risiko kerusakan lingkungan hidup. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) menjadi indikator yang digunakan untuk menilai kondisi lingkungan hidup di Kalimantan

Timur, dimana dapat mencerminkan dampak dari aktivitas ekonomi serta efektivitas program dan kegiatan terhadap kualitas lingkungan.



Gambar II.13
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2020-2024
(Sumber: DLH Provinsi KALTIM, 2025)

IKLH Kalimantan Timur mengalami penurunan sejak tahun 2020 yang dipengaruhi oleh penambahan komponen baru, yaitu Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) dan penurunan Indeks Kualitas Air Sungai (IKA). Capaian IKLH Tahun 2024 meningkat dikarenakan adanya peningkatan angka pada Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Lahan (IKL) dan Indeks Kualitas Air Laut.

Tabel II.21
Indeks Kualitas Air, Udara, Lahan dan Air Laut
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024

Indeks	2020	2021	2022	2023	2024
IKA	53,7	51,92	53,02	52,64	52,64
IKU	89,06	88,84	87,59	89,64	91,43
IKL	79,76	82,21	81,85	83,86	84,03
IKAL	83,51	85,4	81,45	81,36	85,16

Sumber: DLH Provinsi KALTIM, 2025

b. Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman

Berkaitan dengan penanganan atau upaya penyediaan infrastruktur sanitasi terutama air limbah skala provinsi, sesuai dengan SPM yang ditetapkan. Hingga tahun 2024, akses sanitasi layak sudah mencapai 84,23 persen, namun pada level aman baru mencapai 4,88 persen atau masih berada dibawah capaian Nasional sebesar 10,21 persen (2023).

Tabel II.22
Akses Sanitasi Aman Tahun 2020-2024 (persen)

No	Kabupaten/Kota	2021	2022	2023	2024
1.	Paser	0,71	0,71	0,71	0,61
2.	KUBAR	1,59	1,59	1,59	21,69
3.	KUKAR	0,27	0,32	0,32	0,32
4.	KUTIM	2,28	2,70	2,70	5,71
5.	Berau	1,69	3,35	3,35	2,14
6.	PPU	0,25	3,70	3,70	0,20
7.	Mahulu	2,92	2,91	2,91	0,50
8.	Balikpapan	9,18	9,18	9,18	14,64
9.	Samarinda	1,25	7,59	7,59	0,77
10.	Bontang	2,64	7,63	7,63	2,28
KALTIM		2,68	4,71	4,71	4,88

(Sumber: Dinas PUPRPERA Provinsi KALTIM, 2025)

Masih rendah/kurangnya akses sanitasi aman terutama disebabkan rendahnya kesadaran masyarakat terkait pentingnya pengelolaan air limbah, khususnya tempat pembuangan tinja. Selain itu penyediaan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) atau Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) maupun dengan mengalirkan air limbah domestik ke Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik (IPALD) Terpusat atau Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) belum secara masif dilaksanakan.

c. Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah

Jumlah timbulan sampah di Kalimantan Timur dalam 5 (lima) tahun terakhir menunjukkan tren peningkatan hal ini akibat dari pertambahan penduduk dan aktivitas ekonomi. Begitupun dengan jumlah sampah yang terolah di fasilitas pengolahan sampah setiap tahun juga mengalami peningkatan.

Tabel II.23
Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Timbulan sampah (ton)	725.412,65	601.375,66	718.865,78	791.828,97	809.331,64
Jumlah sampah yang terolah di fasilitas pengolahan sampah (ton)	87.541	85.054	97.216	133.061	135.670
Jumlah sampah yang terolah di fasilitas pengolahan sampah (%)	12,07	14,14	13,52	16,80	16,76

Sumber: DLH Provinsi KALTIM, 2024

Jika melihat persentase jumlah sampah yang terolah di fasilitas pengolahan sampah diketahui bahwa angkanya sangat kecil, hal ini disebabkan karena beberapa hal seperti: 1). jumlah fasilitas pengolahan yang terbatas, tidak semua wilayah memiliki akses ke fasilitas pengolahan sampah, sehingga banyak sampah berakhir di tempat pembuangan akhir (TPA) atau tidak terkelola, 2). sistem pengumpulan sampah yang kurang efisien, 3). kesadaran dan partisipasi masyarakat yang rendah, 4). minimnya alokasi anggaran dan tidak berjalannya regulasi, 5). jarak antara sumber sampah dan fasilitas pengolahan, dan 6). kurangnya pemanfaatan teknologi pengolahan sampah.

6. Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

a. Penurunan Intensitas Emisi GRK

Indonesia dan Kalimantan Timur diakui turut berkontribusi terhadap pemanasan global melalui peningkatan emisi gas rumah kaca (GRK) dimana Indonesia termasuk penghasil emisi terbesar ke-6 di dunia, sementara Kalimantan Timur sendiri penghasil emisi terbesar ke-6 secara nasional (WRI, 2016). Penyumbang emisi GRK di Kalimantan Timur sampai tahun 2015 didominasi oleh sektor berbasis lahan berupa alih guna dan degradasi hutan (64 persen), energi (17 persen), limbah (17 persen), dan pertanian (2 persen).

Dalam konteks Rencana Aksi Daerah Gas Rumah Kaca (RAD GRK), Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan (PEP) adalah suatu kewajiban agar pemerintah daerah mengetahui capaian pelaksanaan kegiatan RAD GRK. Sejak tahun 2017, Kalimantan Timur tercatat sudah melakukan inventarisasi aksi mitigasi perubahan iklim dan di PEP kan. Hingga tahun 2023 total aksi yang sudah dilaporkan di Aplikasi AKSARA Bappenas adalah sebanyak 1.127 aksi.

Angka penurunan emisi gas rumah kaca Provinsi Kalimantan Timur menunjukkan perbaikan dari tahun ke tahun selama 5 (lima) tahun terakhir, memperlihatkan adanya dampak positif yang dihasilkan dari keberlanjutan upaya-upaya penurunan emisi yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan *stakeholder* terlibat.

Tabel II.24
Angka Penurunan Emisi Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024

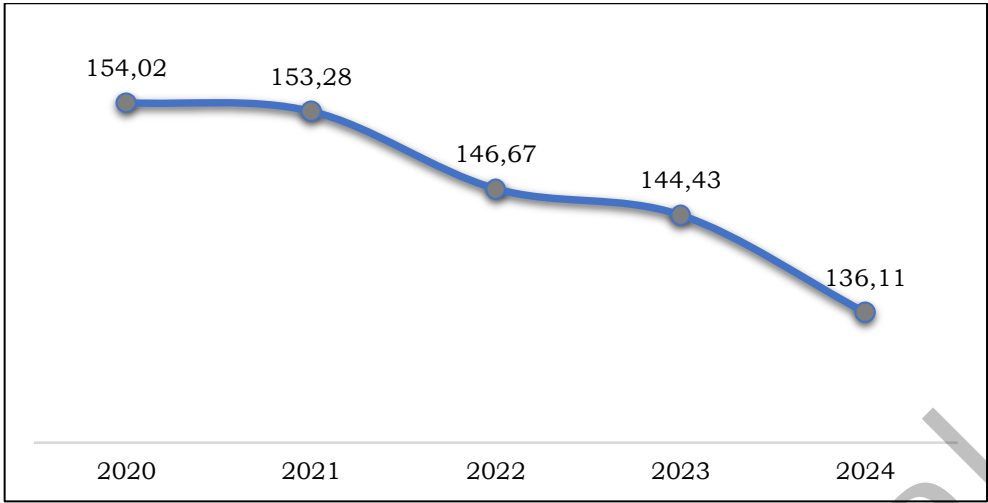
Keterangan	2020	2021	2022	2023	2024
Angka Penurunan Emisi (juta ton co2eq)	10,21	27,73	25,22	26,24	26,92

Sumber: DLH Provinsi KALTIM, 2025

Kalimantan Timur berhasil menurunkan emisi sebanyak 26.924.455,43 ton CO₂eq atau sebesar 49,19 persen pada tahun 2024 dari BAU (Business As Usual) *baseline* emisi sesuai dengan dokumen RAD GRK Kaltim pada tahun 2024 sebanyak 54.739.320,59 ton CO₂ Eq. Capaian persentase ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan target capaian persentase penurunan emisi dari BAU (*Business As Usual*) yang tercantum pada laporan capaian penurunan emisi gas rumah kaca provinsi Kalimantan timur tahun 2024 dari dinas lingkungan hidup provinsi Kalimantan timur adalah 31,05 persen. Fluktuasi capaian penurunan emisi disebabkan tingginya capaian penurunan emisi dari sektor lahan.

b. Indeks Risiko Bencana

Kalimantan Timur secara geografis merupakan wilayah yang relatif aman dari bencana. Namun, dampak perubahan iklim akibat emisi gas rumah kaca dapat memberikan potensi peningkatan risiko bencana di Kalimantan Timur. Risiko bencana yang paling berpotensi terjadi di Kalimantan Timur adalah bencana banjir, kebakaran permukiman, kekeringan, cuaca ekstrem, longsor, abrasi, serta kebakaran hutan dan lahan, yang sebagian besar dipengaruhi oleh perubahan iklim dan aktivitas manusia. Indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat risiko bencana di suatu daerah adalah Indeks Risiko Bencana (IRB). IRB merupakan alat ukur yang menghitung tingkat risiko bencana berdasarkan tiga komponen utama, yaitu bahaya (*hazard*), kerentanan (*vulnerability*), dan kapasitas (*capacity*). IRB membantu pemerintah dalam mengidentifikasi prioritas penanganan risiko bencana dan menentukan kebijakan mitigasi yang tepat. Semakin kecil nilai IRB merepresentasikan semakin rendah potensi terjadinya bencana di wilayah tersebut.



Gambar II.14
Indeks Risiko Bencana Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2020-2024
(Sumber: BPBD Provinsi KALTIM, 2025)

Indeks Risiko Bencana (IRB) di Kalimantan Timur sepanjang tahun 2015 hingga tahun 2024 terus mengalami penurunan. Hal ini disebabkan oleh semakin baiknya kapasitas penanggulangan bencana, implementasi penataan ruang berbasis mitigasi, pengendalian alih fungsi lahan, dan rehabilitasi lingkungan. Selain itu, peningkatan kesadaran masyarakat, edukasi kesiapsiagaan, serta penerapan kebijakan berbasis data risiko turut mendukung penurunan IRB di wilayah tersebut.

Tabel II.25
Nilai Indeks Risiko Bencana Provinsi Kalimantan Timur
Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2020–2024

No.	Kabupaten/Kota	2020	2021	2022	2023	2024	Kelas Risiko
1	Paser	196.40	196.40	196.40	191.78	187.98	Tinggi
2	Kutai Kartanegara	119.16	119.16	120.96	114.30	118.80	Sedang
3	Berau	202.40	202.40	188.37	173.74	148.64	Tinggi
4	Kutai Barat	156.40	156.40	153.65	149.15	151.32	Tinggi
5	Kutai Timur	190.00	190.00	181.57	185.17	173.36	Tinggi
6	Penajam Paser Utara	158.32	151.67	143.00	129.44	131.81	Sedang
7	Mahakam Ulu	156.40	156.40	156.40	156.40	146.03	Tinggi
8	Kota Balikpapan	108.14	123.46	110.79	118.21	101.43	Sedang
9	Kota Samarinda	102.94	101.05	92.77	98.29	85.20	Sedang
10	Kota Bontang	150.00	135.89	122.77	127.85	116.57	Sedang
	Rata-Rata	154.79	153.28	146.43	144.43	136.11	Sedang

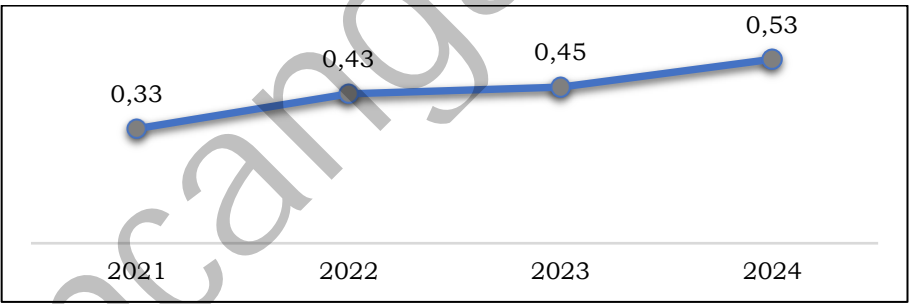
Sumber: BPBD Provinsi KALTIM, 2025

Jika dilihat secara lebih rinci di tingkat kabupaten/kota, beberapa daerah di Kalimantan Timur masih berada dalam kategori risiko

bencana "tinggi" pada tahun 2024 yaitu Kabupaten Paser dengan nilai 187,98, Kutai Timur dengan nilai 173,36 , Kutai Barat dengan nilai 151,32 , Berau dengan nilai 148,64, dan Mahakam Ulu dengan nilai 146,03

c. Indeks Ketahanan Daerah

Indeks Ketahanan Daerah (IKD) merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan capaian kegiatan penanggulangan bencana. IKD merupakan salah satu aspek penilaian dari Indeks Resiko Bencana yang melingkupi penilaian terhadap 71 indikator yang terbagi ke dalam 7 (tujuh) fokus prioritas penanggulangan bencana diantaranya peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana, perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana, pengembangan sistem pemulihan bencana, dan lain-lain. Semakin tinggi angka IKD merepresentasikan bahwa kegiatan penanggulangan bencana semakin baik di suatu daerah.



Gambar II.15
Indeks Ketahanan Daerah
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021-2024
(Sumber: BPBD Provinsi KALTIM, 2025)

IKD Provinsi Kalimantan Timur mengalami peningkatan setiap tahunnya hingga mencapai 0,53 di tahun 2024. Namun, capaian ini masih masuk dalam kategori rendah. Hal ini disebabkan masih rendahnya capaian kinerja pada beberapa indikator diantaranya restorasi sungai untuk ancaman banjir, perlindungan daerah untuk tangkapan air untuk ancaman banjir, restorasi lahan gambut untuk ancaman kebakaran hutan dan lahan, dan lain-lain.

7. Demografi

a. Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk

Jumlah penduduk Kalimantan Timur pada tahun 2020 sebesar 3.757.220 jiwa dan terus meningkat menjadi 4.045.860 jiwa pada tahun 2024 atau bertambah sebesar 288.640 jiwa.

Tabel II.26
Jumlah Penduduk Provinsi Kalimantan Timur Menurut Kabupaten/Kota
Tahun 2020-2024

No	Kab/Kota	2020	2021	2022	2023	2024	Laju Pertumbuhan Penduduk (2020-2024) (%)
1	Paser	274.890	278.040	281.140	284.110	286.990	1,10
2	KUBAR	171.940	173.750	175.470	177.130	178.740	0,99
3	KUKAR	727.610	735.970	746.370	756.790	789.770	2,14
4	KUTIM	432.550	440.290	447.940	455.500	462.990	1,71
5	Berau	247.210	250.950	254.660	258.290	261.830	1,45
6	PPU	178.060	180.590	188.900	197.630	267.690	11,38
7	MAHULU	32.420	32.870	33.320	33.770	34.250	1,39
8	Balikpapan	687.060	694.940	702.600	710.040	717.230	1,10
9	Samarinda	827.070	835.150	843.010	850.630	858.080	0,96
10	Bontang	178.410	180.920	183.370	185.850	188.290	1,37
Kalimantan Timur		3.757.220	3.803.470	3.856.780	3.909.740	4.045.860	1,93

Ket : Data Proyeksi Hasil SP Tahun 2020; Kaltim Dalam Angka; Sumber: BPS KALTIM, 2023

Laju pertumbuhan penduduk Provinsi Kalimantan Timur tumbuh sebesar 1,93 persen selama lima tahun sejak tahun 2020–2024. Pertumbuhan penduduk paling tinggi yaitu Kabupaten Penajam Paser Utara, dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 11,38 persen. Hal ini disebabkan oleh migrasi besar-besaran Pegawai Negeri Sipil (PNS) dari pusat, seiring persiapan pemindahan Ibu Kota Negara.

b. Rasio dan Kepadatan Penduduk

Berdasarkan *Sex Ratio*, jumlah penduduk di Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2024 menunjukkan jumlah penduduk laki-laki lebih banyak daripada jumlah penduduk perempuan atau tepatnya 100-110 penduduk laki-laki di antara 100 penduduk perempuan.

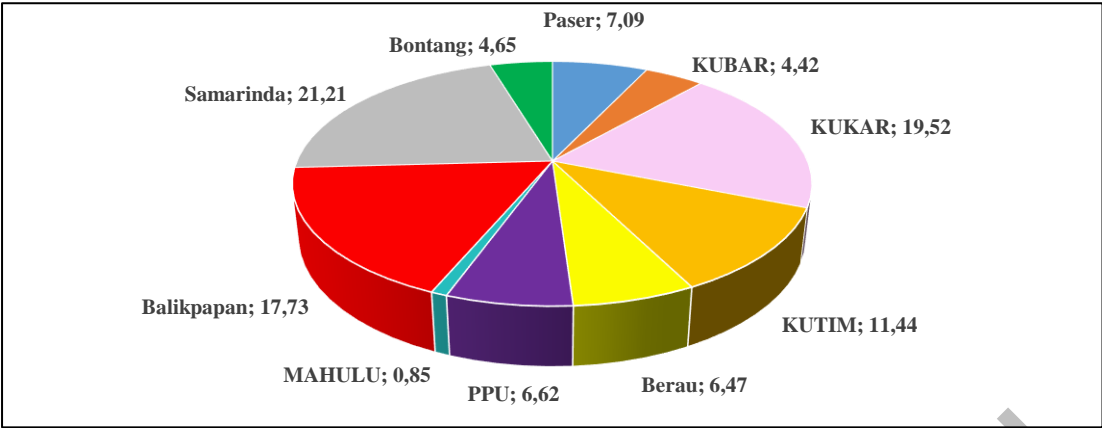
Tabel II.27
Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin, Sex Ratio, dan
Kepadatan Penduduk Menurut Kabupaten/Kota
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024

No	Kab/Kota	Penduduk			Sex Ratio	Kepadatan Penduduk (Per Km ²)
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah		
1	Paser	148.880	138.110	286.990	107,80	27,00
2	KUBAR	93.950	84.800	178.740	110,79	13,00
3	KUKAR	409.890	379.880	789.770	107,90	29,00
4	KUTIM	248.020	214.980	462.990	115,37	15,00
5	Berau	139.350	122.480	261.830	113,77	12,00
6	PPU	137.570	130.120	267.690	105,72	84,00
7	MAHULU	17.760	16.490	34.250	107,66	2,00
8	Balikpapan	366.050	351.190	717.230	104,23	1.407,00
9	Samarinda	435.900	422.180	858.080	103,25	1.197,00
10	Bontang	96.560	91.730	188.290	105,26	1.171,00
Kalimantan Timur		2.093.900	1.951.960	4.045.860	107,27	32,00

Ket : Data Proyeksi Hasil SP Tahun 2020; Kaltim Dalam Angka; Sumber: BPS KALTIM, 2023

Kepadatan penduduk terendah terdapat di Kabupaten Mahakam Ulu sebesar 2 per km². Hal ini disebabkan oleh kondisi geografis yang terpencil dan sulit dijangkau, sehingga kurang menarik bagi pendatang untuk menetap atau berinvestasi serta keterbatasan infrastruktur dasar seperti jalan, listrik, dan fasilitas kesehatan juga menjadi faktor utama yang menghambat perkembangan permukiman dan meningkatkan jumlah penduduk di Kabupaten Mahakam Ulu.

Persebaran penduduk di Provinsi Kalimantan Timur tidak merata sehingga terjadi ketimpangan antar kabupaten/kota, baik itu dari jumlah penduduk maupun kepadatannya. Penduduk Provinsi Kalimantan Timur paling banyak berdomisili di Kota Samarinda, yaitu sebesar 21,21 persen. Kota Samarinda menjadi daerah dengan kepadatan penduduk tertinggi mengingat Kota Samarinda merupakan pusat pemerintahan sekaligus perdagangan di Provinsi Kalimantan Timur. Adapun persebaran penduduk terendah di Provinsi Kalimantan Timur yaitu Kabupaten Mahakam Ulu dengan distribusi tidak mencapai satu persen (0,85 persen).



Gambar II.16
Distribusi Penduduk menurut Kabupaten/Kota
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 (persen)
(Ket : Data Proyeksi Hasil SP Tahun 2020; Sumber: BPS KALTIM, 2023)

c. Keberadaan Masyarakat Adat

Keberadaan masyarakat adat di Kalimantan Timur memiliki nilai historis dan kultural, terdiri dari berbagai suku asli, seperti Dayak, Kutai, dan Paser. Masyarakat adat ini hidup selaras dengan alam, menjaga ekosistem melalui praktik-praktik tradisional seperti ladang berpindah, sistem pengelolaan hutan, dan ritual-ritual adat yang menjaga keseimbangan lingkungan. Hutan dan lahan bagi masyarakat adat bukan sekadar sumber penghidupan, tetapi juga merupakan bagian dari identitas budaya mereka yang diwariskan dari generasi ke generasi. Kendati demikian, arus modernisasi dan pembangunan sering kali membawa tantangan, seperti konflik lahan dengan perusahaan perkebunan atau tambang, yang mengancam keberlanjutan hidup masyarakat adat dan kearifan lokal mereka.

Peran dan fungsi masyarakat adat di Kalimantan Timur tidak hanya terbatas pada aspek sosial dan budaya, tetapi juga berkontribusi dalam pelestarian lingkungan. Mereka sering menjadi garda terdepan dalam upaya konservasi hutan dan keanekaragaman hayati, karena memiliki pengetahuan lokal yang unik tentang ekosistem di sekitar mereka. Fungsi mereka sebagai penjaga tradisi dan alam ini semakin penting di tengah isu perubahan iklim dan kerusakan lingkungan. Oleh karena itu, peran mereka semakin mendapat perhatian dalam berbagai kebijakan lingkungan, meskipun pengakuan atas hak-hak mereka masih perlu ditingkatkan agar dapat sepenuhnya diintegrasikan dalam proses pembangunan yang berkelanjutan.

d. Proyeksi Demografi Tahun 2025-2029

Proyeksi penduduk memberikan gambaran mengenai ukuran dan struktur umur penduduk di masa depan yang didasarkan pada asumsi-asumsi tertentu dari komponen-komponen laju pertumbuhan penduduk, yaitu kelahiran, kematian dan perpindahan (migrasi). Perhitungan proyeksi penduduk dilakukan dengan mempertimbangkan aspek masa pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur yang dengan pemindahan IKN diperkirakan akan mengubah besaran migrasi penduduk di Kalimantan Timur.

Tabel II.28
Proyeksi Jumlah Penduduk

Penduduk Tahun 2024 (Ribuan Orang)	Proyeksi Penduduk (Ribuan Orang)				
	2025	2026	2027	2028	2029
4.045,86	4.267,60	4.478,36	4.677,52	4.864,47	5.038,56

Sumber : BPS Provinsi KALTIM, 2024

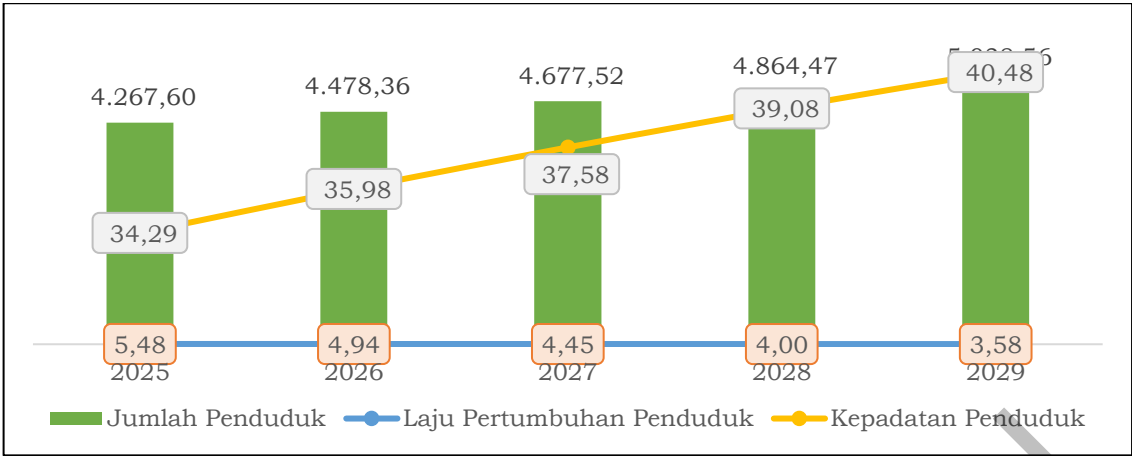
Jumlah penduduk Provinsi Kalimantan Timur diproyeksikan meningkat setiap tahunnya hingga mencapai 5.038,56 ribu orang pada tahun 2029. Meningkatnya jumlah penduduk Kalimantan Timur yang cukup besar ini dipengaruhi adanya proyeksi jumlah populasi Ibu Kota Nusantara.

Tabel II.29
Proyeksi Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Penduduk Tahun 2024 (Ribuan Orang)	Proyeksi Penduduk (Ribuan Orang)				
		2025	2026	2027	2028	2029
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Laki-laki	2.093,90	2.204,41	2.309,19	2.407,92	2.500,29	2.585,97
Perempuan	1.951,96	2.063,19	2.169,17	2.269,60	2.364,18	2.452,59
Rasio	107,27	106,84	106,46	106,09	105,76	105,44

Sumber : BPS Provinsi KALTIM, 2024

Berdasarkan rasio jenis kelamin, jumlah penduduk Provinsi Kalimantan Timur menunjukkan jumlah penduduk laki-laki lebih banyak daripada jumlah penduduk perempuan atau tepatnya 100-110 penduduk laki-laki di antara 100 penduduk perempuan.



Gambar II.17
Proyeksi Jumlah, Laju Pertumbuhan dan Kepadatan Penduduk
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2029
(Sumber: BPS Provinsi KALTIM, 2024)

Menurut Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 63 Tahun 2022, pada tahun 2025-2029 merupakan periode pemindahan penduduk tahap 2, sehingga jumlah penduduk diproyeksikan meningkat signifikan seiring pemindahan ASN selesai pada tahap ini sehingga kepadatan penduduk di Provinsi Kalimantan Timur juga semakin tinggi diproyeksikan mencapai 40,48 per km2 di tahun 2029 dengan laju pertumbuhan penduduk 3,58 persen.

Tabel II.30
Proyeksi Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur

Kelompok Umur	Proyeksi Penduduk (Ribuan Orang)				
	2025	2026	2027	2028	2029
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
0-14 Tahun	991,85	1.020,93	1.051,98	1.084,36	1.117,28
15-64 Tahun	3.044,56	3.208,60	3.358,32	3.493,90	3.615,67
> 65 Tahun	231,19	248,83	267,22	286,21	305,61
Angka Ketergantungan	40,17	39,57	39,28	39,23	39,35

Sumber : BPS Provinsi KALTIM, 2024

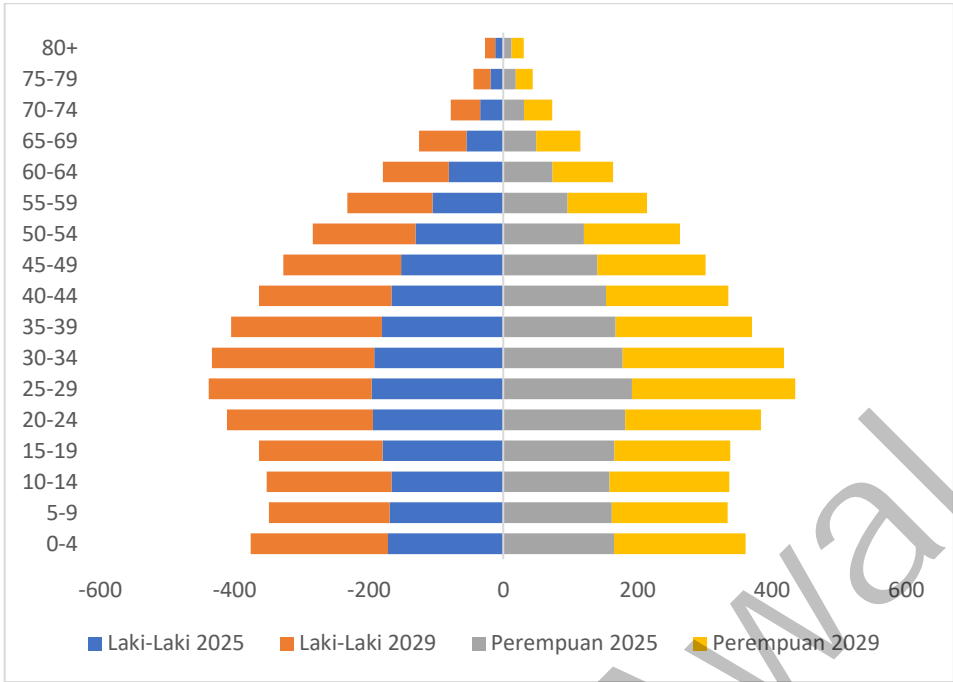
Hasil proyeksi memperlihatkan adanya peningkatan pada penduduk umur 0-14 tahun dari 991,86 ribu orang pada tahun 2025 menjadi 1.117,28 ribu orang pada tahun 2029. Pertambahan jumlah penduduk usia muda turut dipengaruhi oleh dinamika penduduk akibat pemindahan IKN yang berasal dari pola fertilitas perempuan pendatang dan jumlah penduduk dependen atau penduduk ikutan usia muda. Proporsi penduduk usia kurang dari 15 tahun mewakili 23,24 persen dari total populasi pada tahun 2025 dan diproyeksikan akan meningkat menjadi 26,18 persen pada

2029. Sebagian besar penduduk Provinsi Kalimantan Timur berada pada usia produktif (penduduk usia 15-64 tahun) diproyeksikan bertambah sampai dengan tahun 2029 mencapai 3.615,67 ribu orang.

Penduduk yang berumur 65 tahun ke atas diproyeksikan akan meningkat lebih dari dua kali lipat dari tahun 2020 hingga tahun 2045. Berdasarkan hasil perhitungan proyeksi, jumlah penduduk umur 65 tahun ke atas pada tahun 2029 sekitar 305,61 ribu orang atau sekitar 7,61 persen dari jumlah total penduduk di tahun 2029, meningkat dari tahun 2025 yang sebesar 5,42 persen. Namun demikian, pertambahan jumlah penduduk lansia dan usia muda masih lebih kecil dibanding pertambahan penduduk usia produktif. Hal ini tentu saja menciptakan peluang bagi Provinsi Kalimantan Timur jika dikelola dengan baik.

Dalam kondisi tersebut dapat dikatakan bahwa Provinsi Kalimantan Timur akan mengalami bonus demografi yang terlihat dari angka ketergantungan yang diproyeksikan sebesar 40,17 persen pada tahun 2025 dan menurun menjadi 39,35 persen pada tahun 2029 dengan capaian di bawah 50 persen. Artinya setiap 100 orang yang berusia kerja (produktif) mempunyai tanggungan sebanyak 40 orang yang tidak dan belum produktif.

Bonus demografi juga dapat diartikan bahwa setiap penduduk usia kerja menanggung sedikit penduduk usia tidak produktif. Untuk mendapatkan bonus demografi tersebut, maka kualitas SDM harus ditingkatkan secara maksimal melalui pendidikan, pelayanan kesehatan dan penyediaan lapangan pekerjaan. Ke depan kemiskinan yang menjadi simbol ketidakberdayaan dalam ekonomi akan semakin menghilang tergantikan dengan tingkat kesejahteraan yang lebih baik.



Gambar II.18
Proyeksi Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2029
(Sumber: BPS Provinsi KALTIM, 2024)

Proyeksi penduduk Provinsi Kalimantan Timur menunjukkan penambahan penduduk paling banyak pada usia produktif (15-64 tahun) dalam periode 2025-2029. Peningkatan ini merupakan dampak pemindahan penduduk ke IKN, sehingga piramida penduduk Kalimantan Timur cenderung tidak berubah bentuk, dengan proporsi penduduk produktif lebih banyak dibandingkan penduduk usia anak (0-14 tahun) dan usia lansia (60 tahun ke atas).

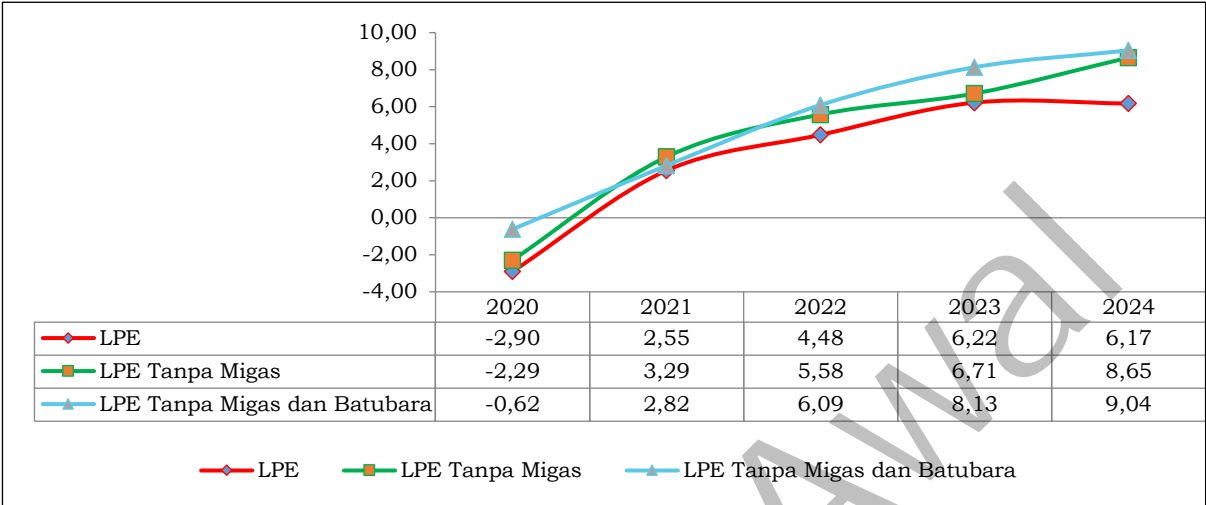
2.2 ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

1. Kesejahteraan Ekonomi

a. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Laju pertumbuhan ekonomi (LPE) merupakan indikator ekonomi makro yang umumnya digunakan untuk menggambarkan keberhasilan pembangunan suatu daerah. Capaian LPE dapat digunakan sebagai salah satu bahan pertimbangan untuk menentukan arah kebijakan pembangunan ekonomi yang akan datang. LPE merupakan persentase pertumbuhan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang dihasilkan di suatu wilayah dari satu periode ke periode berikutnya atas dasar harga

konstan. Pertumbuhan ekonomi ditandai dengan peningkatan konsumsi masyarakat, investasi, pengeluaran pemerintah, dan net ekspor.



Gambar II.19
Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2020-2024 (persen)
(Sumber: BPS Provinsi KALTIM, 2024)

LPE Kalimantan Timur pada kurun waktu tahun 2020-2024 mengalami peningkatan, seiring dengan pulihnya perekonomian global dan nasional pasca pandemi Covid-19, LPE Kalimantan Timur mulai tumbuh di tahun 2021 hingga tahun 2024. Peningkatan LPE tersebut bersumber dari hampir seluruh lapangan usaha, utamanya pertambangan dan penggalian. Peningkatan LPE lapangan usaha pertambangan dan penggalian disebabkan oleh meningkatnya produksi komoditas batu bara yang salah satunya dikarenakan tingginya permintaan ekspor ke negara tujuan.

Percepatan pertumbuhan LPE juga disebabkan oleh keberlanjutan pembangunan proyek-proyek strategis nasional di wilayah Kalimantan Timur, utamanya pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Pembangunan IKN telah mendorong pertumbuhan ekonomi di beberapa lapangan usaha, seperti konstruksi, pengadaan listrik dan gas, serta jasa dan perdagangan. Selain itu, aktivitas ekonomi masyarakat yang terus membaik juga menjadi penopang pertumbuhan ekonomi wilayah.

Tabel II.31
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024 (%)

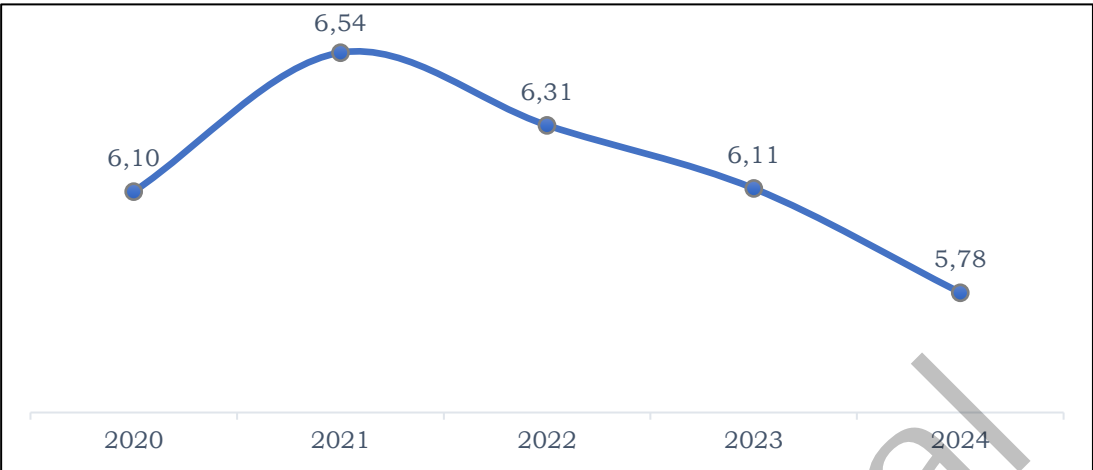
No	KAB/KOTA	2020	2021	2022	2023	2024
1	Paser	-2,86	5,39	1,10	1,38	3,77
2	KUBAR	-2,87	4,19	4,78	5,82	7,57
3	KUKAR	-4,21	2,68	3,70	5,13	5,62
4	KUTIM	-3,08	-0,89	5,58	7,71	9,82
5	Berau	-3,32	5,36	3,95	5,44	7,28
6	PPU	-2,34	-1,69	14,49	29,85	30,68
7	MAHULU	-0,22	1,27	0,91	2,80	3,60
8	Balikpapan	-0,91	4,57	4,96	6,49	3,23
9	Samarinda	-0,99	2,78	6,60	8,62	8,66
10	Bontang	-2,74	1,60	2,46	4,16	-2,51

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2025

Kondisi tersebut berdampak pada perkembangan ekonomi kabupaten/kota se-Kalimantan Timur yang secara umum mengalami peningkatan. Rata-rata kabupaten/kota mengalami pertumbuhan yang mengalami pertumbuhan yang cepat adalah Kabupaten Penajam Paser Utara dengan capaian 30,68 persen dan tertinggi dibandingkan Kabupaten/Kota lainnya. Hal ini disebabkan adanya pembangunan IKN di Kabupaten Penajam Paser Utara sehingga sektor konstruksi di Kab PPU mengalami peningkatan.

b. Kemiskinan

Salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur kesejahteraan masyarakat di suatu wilayah adalah tingkat kemiskinan. Kemiskinan adalah kondisi seseorang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar makanan maupun bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Penduduk dikategorikan miskin jika memiliki rata-rata pengeluaran per-kapita per-bulan di bawah garis kemiskinan. Sebagai informasi, angka garis kemiskinan di Kalimantan Timur pada tahun 2024 adalah sebesar 833.955 rupiah/kapita/bulan. Angka tingkat kemiskinan yang semakin rendah merepresentasikan semakin baik kinerja penanganan kemiskinan di suatu wilayah.



Gambar II.20
Tingkat Kemiskinan Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2020-2024 (persen)
Sumber: BPS Provinsi KALTIM, 2024

Tingkat kemiskinan Kalimantan Timur pada kurun waktu tahun 2020-2024 cenderung menurun. Pada tahun 2020, tingkat kemiskinan mencapai 6,10 persen dan menurun pada tahun 2024 menjadi sebesar 5,78 persen. Lonjakan peningkatan tingkat kemiskinan terjadi di tahun 2021. Hal ini disebabkan kondisi pandemi Covid-19 yang menghambat aktivitas sosial ekonomi masyarakat. Pencapaian kinerja penanganan kemiskinan di Kalimantan Timur juga dapat dilihat dari penurunan angka kemiskinan ekstrem yang telah mencapai 0,27 persen di tahun 2024.

Penurunan kemiskinan di Kalimantan Timur pada tahun 2024 dipengaruhi salah satunya melalui Program Intervensi Kemiskinan Penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH), jaminan kepada tenaga kerja rentan miskin, serta jaminan kesehatan kepada keluarga miskin.

Tabel II.32
Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2020-2024 (persen)

Kabupaten/Kota	2020	2021	2022	2023	2024
Paser	9,23	9,73	9,43	9,11	8,63
KUBAR	9,29	10,24	10,2	9,72	9,56
KUKAR	7,31	7,99	7,96	7,61	7,28
KUTIM	9,55	9,81	9,28	9,06	8,81
Berau	5,19	5,88	5,65	5,54	5,08
PPU	7,36	7,61	7,25	6,97	6,69
MAHULU	11,44	11,9	11,55	11,38	10,75

Kabupaten/Kota	2020	2021	2022	2023	2024
Balikpapan	2,57	2,89	2,45	2,31	2,23
Samarinda	4,76	4,99	4,85	4,81	4,3
Bontang	4,38	4,62	4,54	4,11	3,74
KALTIM	6,1	6,54	6,31	6,11	5,78

Sumber: BPS Provinsi KALTIM, 2025

Perkembangan persentase kemiskinan Kabupaten/Kota se Kaltim juga menunjukkan penurunan di Tahun 2024. Jika dilihat dari capaiannya daerah perkotaan seperti Samarinda, Balikpapan, dan Bontang masih menjadi yang terendah dibandingkan dengan daerah Kabupaten. Capaian kemiskinan tertinggi masih berada di Kabupaten Mahakam Ulu yaitu 10,75%. Salah satu faktor penyebab tingginya angka kemiskinan di kabupaten Mahakam Ulu adalah permasalahan aksesibilitas dan konektivitas yang menghambat perkembangan ekonomi wilayah serta kesempatan masyarakat untuk dapat meningkatkan kesejahteraan sosial ekonominya.

Tabel II.33

Jumlah Penduduk Miskin menurut Kabupaten/Kota (Ribuan Jiwa)

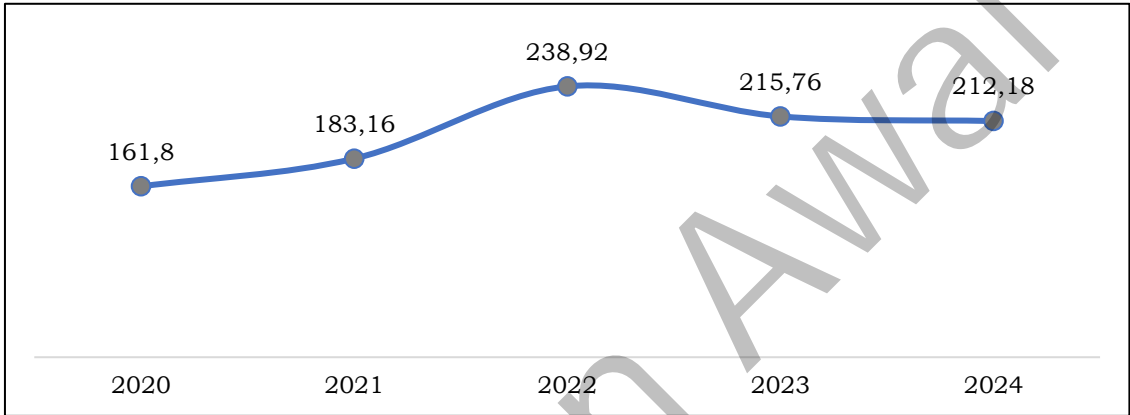
Kabupaten/Kota	2020	2021	2022	2023	2024
Paser	26,77	27,56	27,02	26,39	25,28
KUBAR	13,78	15,38	15,38	14,69	14,49
KUKAR	58,42	62,36	62,87	60,86	59
KUTIM	36,98	37,78	36,84	37,04	37,11
Berau	12,3	13,62	13,31	13,26	12,35
PPU	11,93	12,13	11,59	11,19	10,78
MAHULU	3,26	3,18	3,1	3,06	2,9
Balikpapan	17,02	18,53	15,83	14,99	14,53
Samarinda	41,92	42,84	41,95	41,89	37,8
Bontang	7,91	8,41	8,39	7,71	7,11
KALTIM	230,27	241,77	236,25	231,07	221,34

Sumber: BPS Provinsi KALTIM, 2025

Jika dilihat dari jumlah absolutnya penduduk miskin tertinggi ada pada Kabupaten Kutai Kartanegara yang mencapai 59 ribu jiwa, dan Kutai Timur 37,11 ribu jiwa hal ini dikarenakan kondisi wilayah kedua Kabupaten ini yang cukup luas.

c. PDRB Per Kapita

PDRB per kapita menggambarkan rata-rata pendapatan yang dihasilkan oleh setiap penduduk dalam periode tertentu. Indikator ini digunakan untuk mengukur tingkat kemakmuran masyarakat di suatu wilayah. PDRB per kapita dihitung dengan membagi total nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) suatu daerah dengan jumlah penduduk yang tinggal di daerah tersebut pada tahun yang sama.



Gambar II.21

PDRB per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024 (Juta Rupiah)
(Sumber: BPS Provinsi KALTIM, 2025)

Nilai PDRB per kapita Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Provinsi Kalimantan Timur pada kurun waktu tahun 2020-2024 cenderung mengalami penurunan. Sama halnya dengan Provinsi, nilai PDRB per kapita ADHB Kabupaten/Kota rata-rata juga mengalami penurunan kecuali Kota Samarinda dan Kota Balikpapan yang mengalami peningkatan.

Tabel II.34

PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur Tahun 2020-2024 (Juta Rupiah)

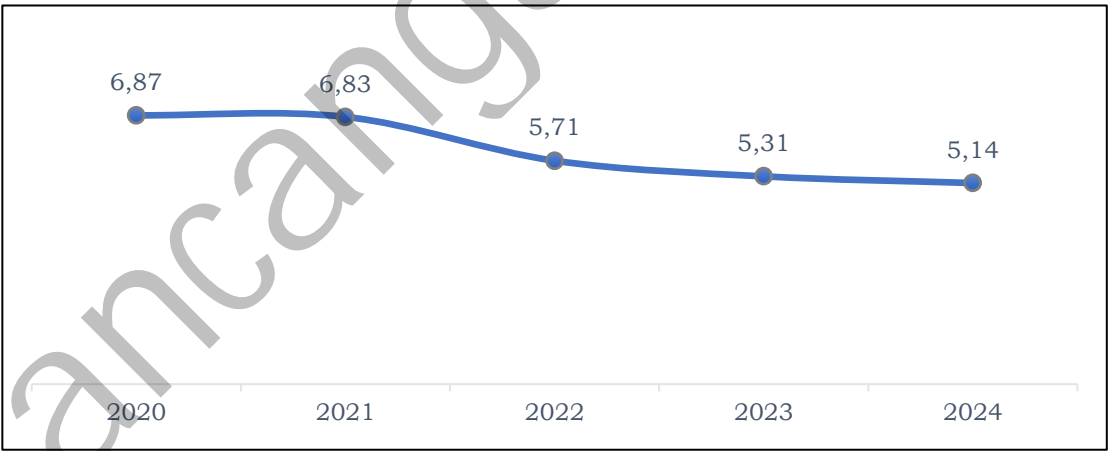
No	Kab/Kota	2020	2021	2022	2023	2024
1	Paser	157,18	193,82	271,26	208,43	193,14
2	KUBAR	158,03	184,71	247,40	222,08	222,07
3	KUKAR	204,50	241,07	322,08	270,72	259,19
4	KUTIM	268,80	310,29	471,27	369,42	344,49
5	Berau	143,67	171,49	236,23	198,53	194,08
6	PPU	50,78	55,87	69,50	87,26	87,14
7	MAHULU	85,38	90,43	95,12	100,94	110,20
8	Balikpapan	151,31	160,30	181,29	201,64	214,11
9	Samarinda	80,36	85,22	98,88	104,97	114,69
10	Bontang	311,88	320,30	344,15	366,46	363,37

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2025

Penyebab penurunan tersebut lebih banyak dipengaruhi oleh adanya penurunan harga komoditas migas dan batu bara akibat krisis keuangan global yang berpengaruh negatif terhadap perekonomian. Pola PDRB per kapita ADHB Kalimantan Timur yang mengikuti volatilitas harga migas dan batu bara menunjukkan dominasi sektor tersebut dalam menentukan tingkat kesejahteraan masyarakat Kalimantan Timur.

d. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. TPT digunakan sebagai indikator untuk mengukur tenaga kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja. Kinerja TPT menunjukkan kemampuan ekonomi untuk menciptakan lapangan kerja yang mampu menyerap persediaan tenaga kerja yang ada di suatu wilayah. Semakin tinggi nilai TPT merepresentasikan semakin banyak persediaan tenaga kerja yang tidak termanfaatkan.



Gambar II.22
Tingkat Pengangguran Terbuka
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024 (persen)
(Sumber: BPS Provinsi KALTIM, 2025)

Jika dilihat dari perkembangannya, tingkat pengangguran terbuka terus mengalami penurunan dari tahun 2020 yang mencapai 6,87 persen menjadi 5,14 persen di tahun 2024. Penurunan terjadi dikarenakan efek dari pandemi COVID-19 yang telah berkurang ditandai dengan kinerja perekonomian yang meningkat serta pembangunan IKN di Kalimantan Timur.

Angka TPT di Kalimantan Timur memiliki kecenderungan berada diatas rata-rata nasional. Salah satu penyebab relative tingginya TPT di Kalimantan Timur dikarenakan masih bertumpunya perekonomian Kalimantan Timur pada sektor pertambangan dan penggalian yang bersifat padat modal. Selain itu, masih adanya kesenjangan keterampilan dan pendidikan, keterbatasan lapangan kerja di sektor industri yang mensyaratkan keahlian khusus dan belum optimalnya keterhubungan (*link and match*) antara dunia pendidikan dan dunia usaha/industri.

Tabel II.35
Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/Kota di Provinsi
Kalimantan Timur Tahun 2020-2024 (persen)

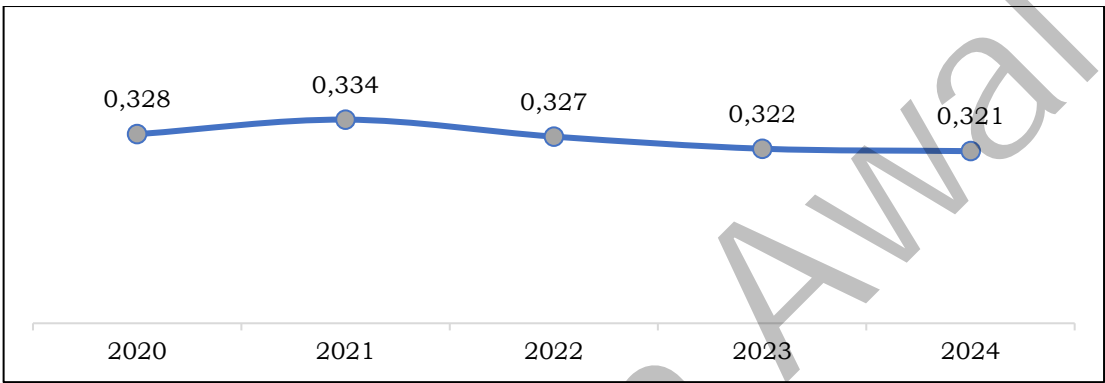
Kabupaten/Kota	2020	2021	2022	2023	2024
Paser	4,52	5,77	4,88	4,72	4,53
KUBAR	4,97	5,14	4,62	6,16	5,58
KUKAR	5,7	5,66	4,14	4,05	4,11
KUTIM	5,45	5,35	6,48	5,93	5,76
Berau	5,08	5,82	5,02	4,95	5,15
PPU	6,22	2,95	2,12	2,07	2,05
MAHULU	3,49	3,14	2,44	2,09	2,51
Balikpapan	9	8,94	6,9	6,09	6,22
Samarinda	8,26	8,16	6,78	5,92	5,75
Bontang	9,46	9,92	7,81	7,74	7,06
KALTIM	6,87	6,83	5,71	5,31	5,14

(Sumber: BPS Provinsi KALTIM, 2025)

Pada tingkat kabupaten/kota di Kalimantan Timur, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Berau, Kabupaten Mahakam Ulu dan Kota Balikpapan mengalami peningkatan TPT di tahun 2024. Meningkatnya TPT di kabupaten/kota tersebut dipengaruhi oleh migrasi penduduk yang mencari pekerjaan, hampir selesainya proyek Refinery Development Master Plan (RDMP) Pertamina Balikpapan yang mengurangi volume pekerjaan, banyaknya lulusan SMA dan SMK yang belum melanjutkan pendidikan dan masih mencari pekerjaan. Pada sektor pertanian terjadi pergeseran dari status pekerja bebas di pertanian menjadi buruh dan berusaha sendiri.

e. Ketimpangan Pendapatan

Indeks Gini atau Gini Ratio adalah indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan antar penduduk suatu wilayah. Indeks Gini memiliki rentang nilai antara 0 (nol) hingga 1 (satu), dimana nilai yang mendekati 1 (satu) menunjukkan ketimpangan pendapatan yang semakin melebar, sedangkan nilai yang mendekati 0 (nol) menunjukkan distribusi pendapatan yang semakin merata.



Gambar II.23
Indeks Gini Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024
(Sumber: BPS Provinsi KALTIM, 2025)

Pada kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir indeks gini Kalimantan Timur terus mengalami penurunan dari semula 0,328 di tahun 2020 menjadi 0,321 di tahun 2024. Salah satu kondisi meningkatnya indeks gini terjadi di tahun 2021 yang diakibatkan oleh pandemi Covid-19. Kondisi ini mengalami perbaikan di tahun 2022 hingga 2024 seiring membaiknya kinerja aktivitas ekonomi masyarakat di berbagai lapangan usaha yang memberikan kesempatan kepada masyarakat berpenghasilan rendah untuk mendapatkan manfaat dari perputaran roda perekonomian sehingga terjadi perbaikan pemerataan pendapatan di Kalimantan Timur.

Indeks gini kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2024 yang masuk dalam kategori sedang adalah Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Berau, Kota Balikpapan Kota Samarinda dan Kota Bontang. Sedangkan kabupaten/kota yang indeks gininya termasuk dalam kategori rendah yaitu Kabupaten Paser, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Mahakam Ulu.

Tabel II.36
Indeks Gini Menurut Kabupaten/Kota
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024 (jiwa)

No	Kab/Kota	2020	2021	2022	2023	2024
1	Paser	0,290	0,288	0,282	0,292	0,271
2	KUBAR	0,338	0,317	0,300	0,277	0,266
3	KUKAR	0,294	0,283	0,269	0,284	0,307
4	KUTIM	0,325	0,328	0,304	0,336	0,283
5	Berau	0,300	0,377	0,352	0,327	0,317
6	PPU	0,292	0,263	0,274	0,299	0,258
7	MAHULU	0,259	0,270	0,288	0,330	0,285
8	Balikpapan	0,311	0,325	0,334	0,323	0,324
9	Samarinda	0,324	0,322	0,346	0,323	0,330
10	Bontang	0,405	0,340	0,324	0,299	0,330

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2025

f. Indeks Modal Manusia

Pembangunan manusia dilakukan untuk menjaga momentum dan keberlanjutan pembangunan serta pertumbuhan ekonomi diukur menggunakan Indikator Indeks Modal Manusia (IMM). Penggunaan IMM tidak hanya menunjukkan kuantitas namun juga kualitas *outcome* pembangunan manusia.

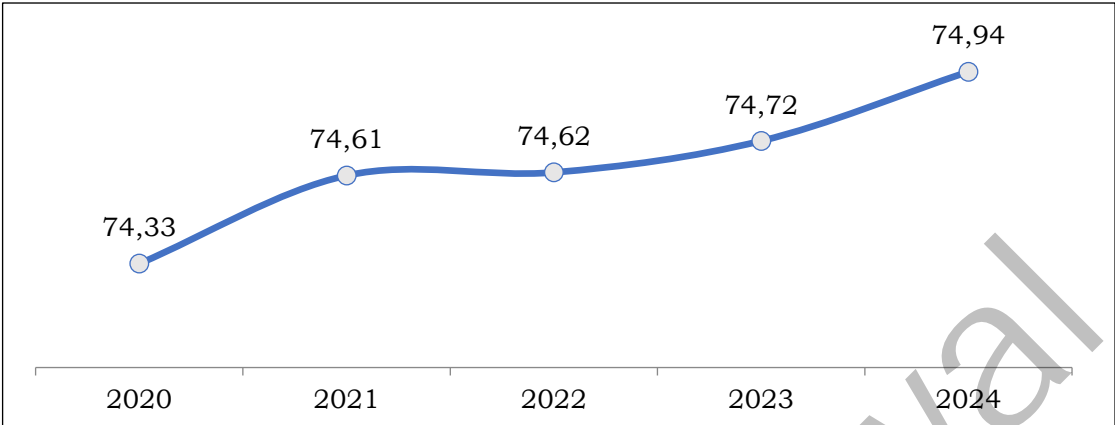
Indikator IMM ini direpresentasikan dengan tiga dimensi yaitu *survival*, pendidikan dan kesehatan. Skor IMM berkisar dari 0 hingga 1, IMM yang tinggi menunjukkan bahwa suatu wilayah telah berhasil dalam memberikan akses pendidikan dan kesehatan yang baik kepada penduduknya yang akan mendukung produktivitas tenaga kerja di masa depan. IMM Kalimantan Timur pada tahun 2023 mencapai 0,56, capaian ini berada diatas nasional sebesar 0,54 dan berada pada peringkat ke tujuh tertinggi dibandingkan provinsi yang lain.

2. Kesehatan untuk Semua

a. Umur Harapan Hidup

Umur harapan hidup adalah perkiraan rata-rata tambahan umur seseorang yang diharapkan dapat terus hidup. Indikator ini digunakan untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan dan derajat kesehatan masyarakat. Umur harapan hidup di Provinsi Kalimantan Timur mengalami kenaikan setiap tahunnya, dimana pada tahun 2020 sebesar 74,33 tahun hingga menjadi 74,94 tahun pada tahun 2024. Angka ini mengindikasikan bahwa bayi yang

lahir pada tahun 2024 akan memiliki harapan hidup hingga usia 74-75 tahun.



Gambar II.24
Umur Harapan Hidup Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024
(Sumber: BPS Provinsi KALTIM, 2025)

Kinerja pemerintah dalam meningkatkan umur harapan hidup di Kalimantan Timur, terutama didukung oleh upaya preventif dan kuratif yang telah dilakukan secara sinergis dengan seluruh stakeholders. Upaya preventif dilakukan melalui penanggulangan penyakit menular, penyakit terkait kehamilan, neonatal, dan penyakit-penyakit terkait gizi, sedangkan dari sisi kuratif melalui penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan yang memadai.

Sedangkan jika dirinci menurut Kabupaten/Kota, Kota Balikpapan memiliki usia harapan hidup tertinggi mencapai 75,64 tahun dan Kabupaten Mahakam Ulu mencapai usia harapan hidup 73,44 tahun merupakan usia harapan hidup terendah dibanding kabupaten/kota lainnya. Angka ini mengindikasikan bahwa bayi yang lahir di Kabupaten Mahakam Ulu pada tahun 2024 akan memiliki harapan hidup hingga usia 73-74 tahun.

Tabel II.37
Umur Harapan Hidup Berdasar Kabupaten/Kota
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020 – 2024 (tahun)

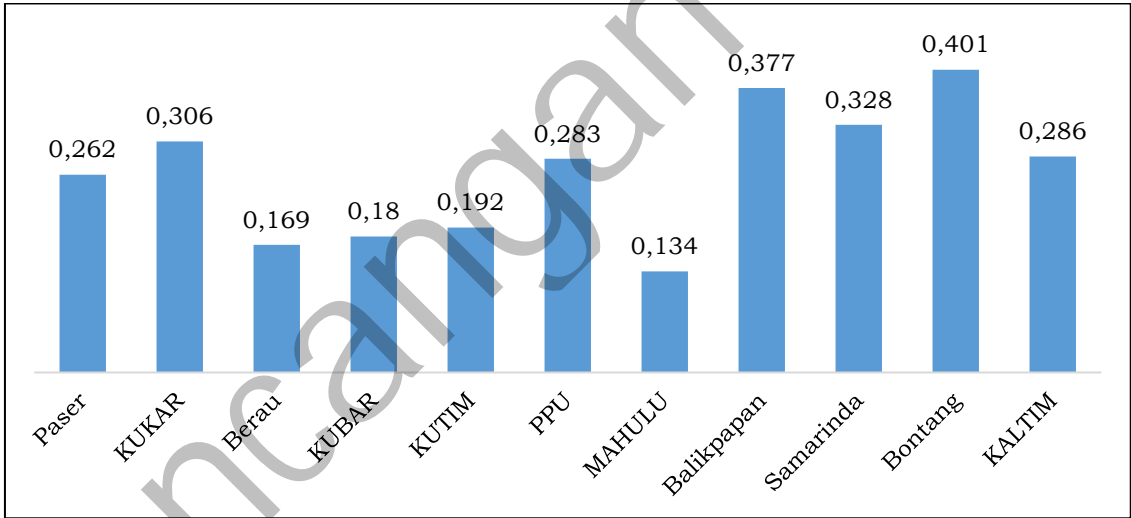
No	Kab/Kota	2020	2021	2022	2023	2024
1	Paser	73,48	73,77	73,78	73,89	74,10
2	KUBAR	73,37	73,63	73,63	73,73	73,93
3	KUKAR	73,64	73,99	74,00	74,12	74,33
4	KUTIM	73,86	74,21	74,22	74,33	74,55
5	Berau	73,06	73,35	73,35	73,45	73,66
6	PPU	73,57	73,87	73,90	74,03	74,27

No	Kab/Kota	2020	2021	2022	2023	2024
7	MAHULU	73,06	73,30	73,32	73,44	73,64
8	Balikpapan	75,20	75,50	75,52	75,64	75,87
9	Samarinda	74,83	75,12	75,15	75,27	75,51
10	Bontang	74,37	74,67	74,69	74,81	75,03

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2025

b. Indeks Keluarga Sehat

Indeks Keluarga Sehat (IKS) adalah ukuran yang digunakan untuk menilai kesehatan suatu keluarga berdasarkan 12 indikator. IKS mencerminkan proporsi keluarga yang sehat di suatu wilayah dibandingkan dengan total jumlah keluarga yang ada. Nilai IKS berkisar antara 0 hingga 1, dimana Keluarga Sehat jika nilai IKS > 0,8, Keluarga Pra Sehat jika nilai IKS 0,5 – 0,8 dan Keluarga Tidak Sehat jika nilai IKS < 0,5. Berikut data IKS yang menggambarkan kondisi di 10 kabupaten/kota.



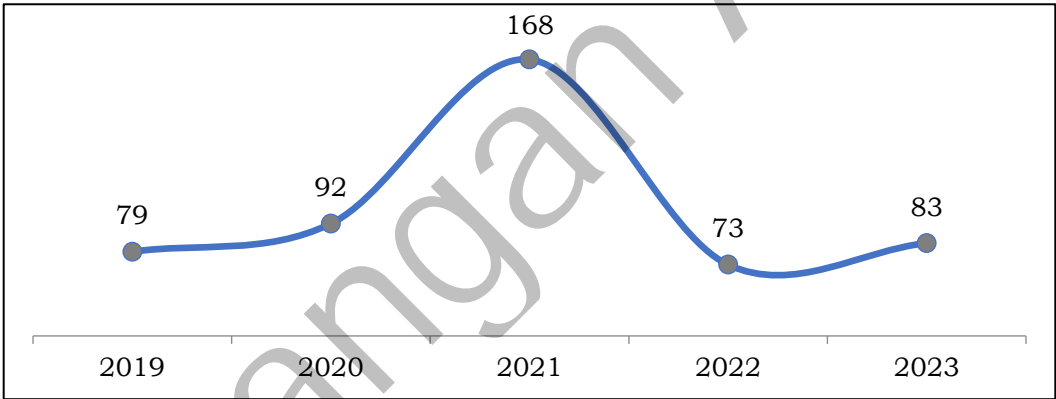
Gambar II.25

Indeks Keluarga Sehat Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023
(Sumber: Dinkes Provinsi KALTIM, 2024)

Capaian IKS Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2023 sebesar 0,286 yang termasuk dalam kategori "Keluarga Tidak Sehat", terutama disebabkan rendahnya capaian indikator penderita tuberkolosis paru yang berobat sesuai standar, penderita hipertensi yang berobat teratur dan penderita gangguan jiwa berat yang diobati dan tidak ditelantarkan. Secara umum, berdasarkan nilai IKS, seluruh kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur masih masuk dalam kategori "Keluarga Tidak Sehat".

c. Angka Kematian Ibu

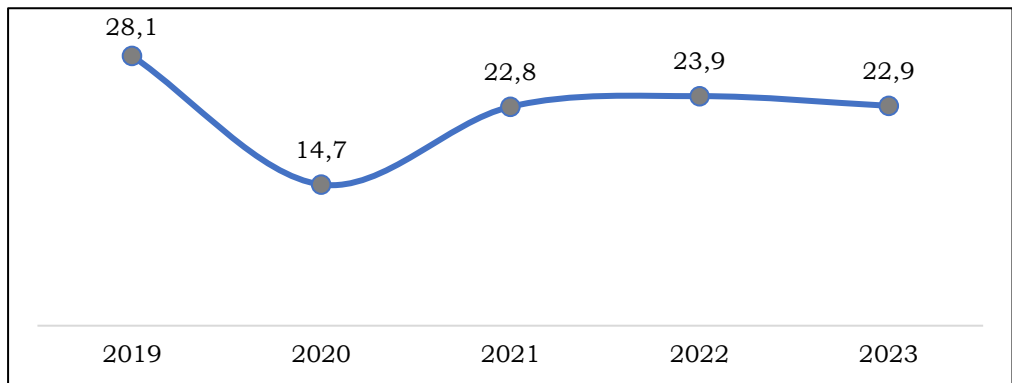
Kematian Ibu masih menjadi tantangan utama di sektor kesehatan di Provinsi Kalimantan Timur. Berdasarkan hasil long form sensus penduduk 2020 Provinsi Kalimantan Timur, Angka Kematian Ibu mencapai 177 kematian per 100.000 kelahiran. Tren Jumlah Kematian Ibu dari tahun 2019–2023 berfluktuasi, namun mengalami peningkatan pada tahun 2023 mencapai 83 jiwa. Sedangkan pada tahun 2022, sebanyak 73 jiwa ibu yang meninggal yang disebabkan gangguan kehamilan atau penanganannya (tidak termasuk kecelakaan, bunuh diri, atau kasus insidentil) selama kehamilan, melahirkan, dan dalam masa nifas (42 hari setelah melahirkan) tanpa memperhitungkan lama kehamilan. Berikut data kematian ibu yang menggambarkan kondisi di 10 kabupaten/kota.



Gambar II.26
Jumlah Kematian Ibu Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2019-2023 (Jiwa)
(Sumber: DINKES Provinsi KALTIM, 2024)

d. Prevalensi Stunting

Prevalensi stunting merupakan persentase jumlah balita di suatu populasi yang mengalami stunting. Prevalensi ini digunakan sebagai indikator untuk menilai masalah gizi pada kelompok balita di suatu wilayah.



Gambar II.27
Prevalensi Stunting Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2019-2023
(Sumber: SSGI Kementerian Kesehatan, 2023)

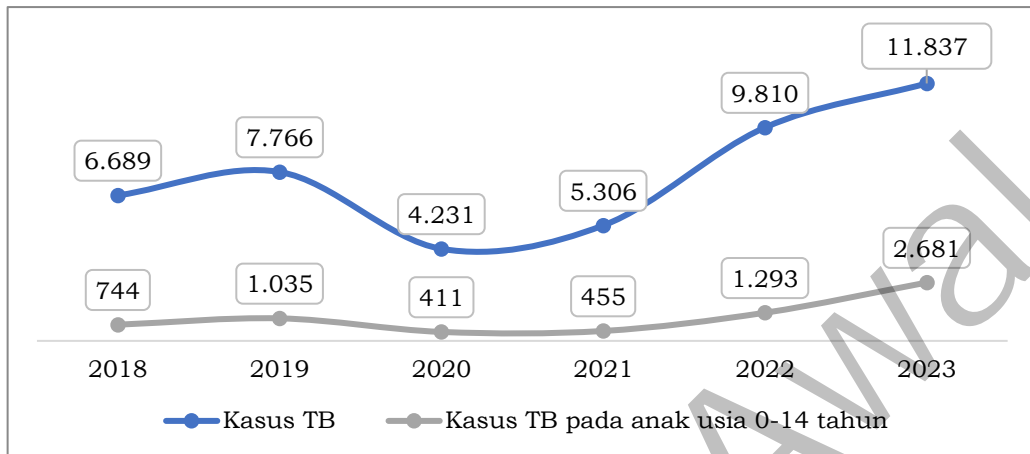
Angka stunting di Kalimantan Timur cenderung menurun sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2023. Meskipun demikian, kinerja penurunan prevalensi stunting ini masih belum sesuai dengan harapan. menurut rekomendasi WHO, *Cut of Point* stunting tidak dinyatakan bermasalah apabila <20 persen, namun sampai dengan tahun 2023 prevalensi stunting di Kalimantan Timur masih berada di angka 22,9 persen. Angka ini di atas prevalensi stunting nasional yang mencapai 21,5. Secara nasional, prevalensi stunting Kalimantan Timur pada tahun 2022 berada urutan ke-16 dan pada tahun 2023 menurun berada pada peringkat ke-22. Selanjutnya, jika diperhatikan menurut Kabupaten/kota, prevalensi stunting dengan nilai dibawah 20 persen hanya di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Secara umum, tantangan yang dihadapi dalam menangani prevalensi stunting yaitu perubahan perilaku masyarakat terkait pola asuh dan pemahaman tentang gizi, kurangnya akses ke makanan bergizi, layanan kesehatan yang kurang memadai, sanitasi yang buruk dan kurangnya akses terhadap air bersih. Diperlukan dukungan dan sinergitas antar Perangkat Daerah dalam rangka percepatan penurunan stunting di Provinsi Kalimantan Timur.

e. Penyakit Menular

Salah satu penyakit menular yang saat ini menjadi perhatian dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur adalah penyakit tuberkulosis. Hal ini dikarenakan jumlah kasus tuberkulosis dan jumlah kematian selama pengobatan tuberkulosis tinggi dan meningkat di setiap

tahunnya. Tuberkulosis adalah penyakit paru-paru akibat kuman *Mycobacterium tuberculosis*. Tuberkulosis akan menimbulkan gejala berupa batuk yang berlangsung lama (lebih dari 3 minggu), biasanya berdahak, dan terkadang mengeluarkan darah.



Gambar II.28
Kasus TB Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2023
(Sumber: Dinkes Provinsi KALTIM, 2024)

Dalam 6 tahun terakhir jumlah kasus tuberkulosis cenderung mengalami peningkatan dari tahun 2018 sejumlah 6.689 kasus menjadi 11.837 kasus. Pada kategori usia 0-14 tahun juga mengalami peningkatan dari 744 kasus di tahun 2018 menjadi 2.681 kasus di tahun 2023. Pada tahun 2023 jumlah kasus tuberkulosis yang relatif tinggi berada di Kota Samarinda dan Balikpapan. Sementara itu, rata-rata angka kesembuhan pengobatan tuberkulosis sebesar 85,80 persen.

Faktor utama penyebab meningkatnya kasus tuberkulosis adalah karena masih rendahnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat untuk melakukan pemeriksaan diri ketika terjangkit gejala tuberkulosis. Stigma yang terbangun di masyarakat masih beranggapan bahwa tuberkulosis adalah penyakit menular berbahaya yang mengakibatkan penderitanya dijauhi. Upaya edukasi, penemuan kasus sedini mungkin, serta pengobatan secara tuntas merupakan tindakan yang terpenting untuk memutuskan rantai penularan tuberkulosis di masyarakat.

f. Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional

Universal Health Coverage (UHC) atau kepesertaan jaminan kesehatan nasional merupakan sistem penjaminan kesehatan yang

memastikan setiap warga dalam populasi memiliki akses yang adil terhadap pelayanan bermutu dengan biaya terjangkau. Jumlah peserta JKN di Provinsi Kalimantan Timur mengalami kenaikan di setiap tahunnya. Peserta JKN pada tahun 2020 berjumlah 3.460.756 peserta, kemudian terus meningkat hingga tahun 2024 menjadi 4.331.236 peserta.



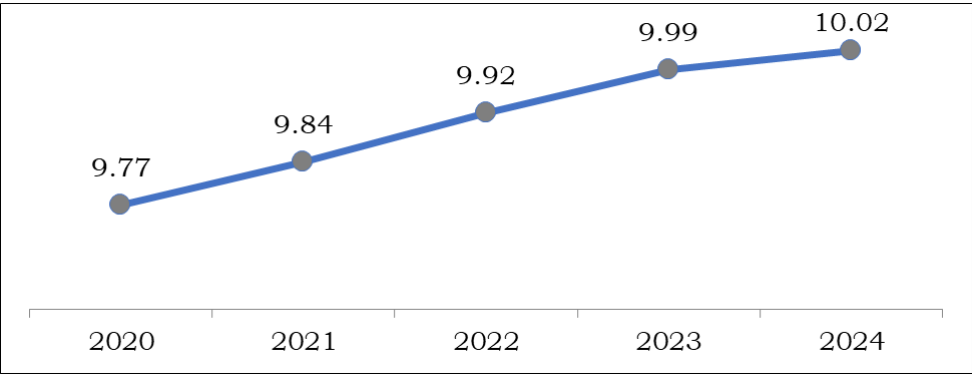
Gambar II.29
Jumlah Peserta dan Cakupan Kepesertaan JKN
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024
(Sumber: BPJS Kesehatan Kalimantan Timur, 2025)

Peningkatan jumlah peserta dan cakupan kepesertaan JKN menjadi salah satu dari beberapa aspek utama keberhasilan pemerintah dalam menyediakan kemudahan akses pelayanan kesehatan yang dibutuhkan masyarakat. Capaian ini tercermin melalui cakupan UHC Kalimantan Timur yang mengalami peningkatan dalam 5 tahun terakhir, dimana cakupan pada tahun 2020 mencapai 94,35 persen dan meningkat menjadi 107,03 persen pada tahun 2024.

3. Pendidikan Berkualitas yang Merata

a. Rata-Rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah (RLS) mencerminkan jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk dalam menempuh pendidikan formal, dan berkontribusi signifikan terhadap indeks pembangunan manusia. Di Provinsi Kalimantan Timur, Capaian rata-rata lama sekolah menunjukkan tren yang positif, sejalan dengan upaya Pemerintah dalam meningkatkan akses dan kualitas pendidikan.



Gambar II.22
Rata-Rata Lama Sekolah Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2020-2024
(Sumber: BPS, Kalimantan Timur, 2025)

Data tersebut menunjukkan bahwa rata-rata waktu yang ditempuh oleh penduduk usia 15 tahun ke atas di Kalimantan Timur dalam menyelesaikan semua jenjang pendidikan formal yang pernah dijalani adalah hingga jenjang SMA kelas X. Dilihat dari capaian rata-rata lama sekolah di Kalimantan Timur, dapat disimpulkan bahwa wajib belajar 12 tahun belum tercapai di Kalimantan Timur, tentunya ini disebabkan masih adanya masyarakat Kalimantan Timur berusia 15 tahun ke atas yang tidak menamatkan pendidikan wajib belajarnya hingga lulus dari jenjang SMA.

Tentunya kondisi ini juga tidak lepas dari beberapa faktor yang mempengaruhi, mulai dari ketersediaan infrastruktur pendidikan seperti ketersediaan unit sekolah dan kecukupan ruang kelas dalam kondisi baik untuk menampung anak usia sekolah, hingga kondisi ekonomi keluarga dan budaya masyarakat yang sangat mempengaruhi anak untuk menamatkan pendidikannya.

Tabel II.38
Rata-Rata Lama Sekolah Berdasar Kabupaten/Kota
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020–2024 (tahun)

No	Kab/Kota	2020	2021	2022	2023	2024
1	Paser	8,55	8,79	8,80	8,91	8,92
2	KUBAR	8,47	8,70	8,78	8,85	8,89
3	KUKAR	9,22	9,23	9,24	9,26	9,27
4	KUTIM	9,19	9,43	9,44	9,45	9,47
5	Berau	9,52	9,53	9,54	9,56	9,57
6	PPU	8,28	8,36	8,51	8,53	8,57
7	MAHULU	7,97	8,18	8,36	8,49	8,50
8	Balikpapan	10,68	10,91	10,92	10,93	10,99
9	Samarinda	10,48	10,49	10,71	10,93	10,95

No	Kab/Kota	2020	2021	2022	2023	2024
10	Bontang	10,79	10,80	10,81	10,92	10,97

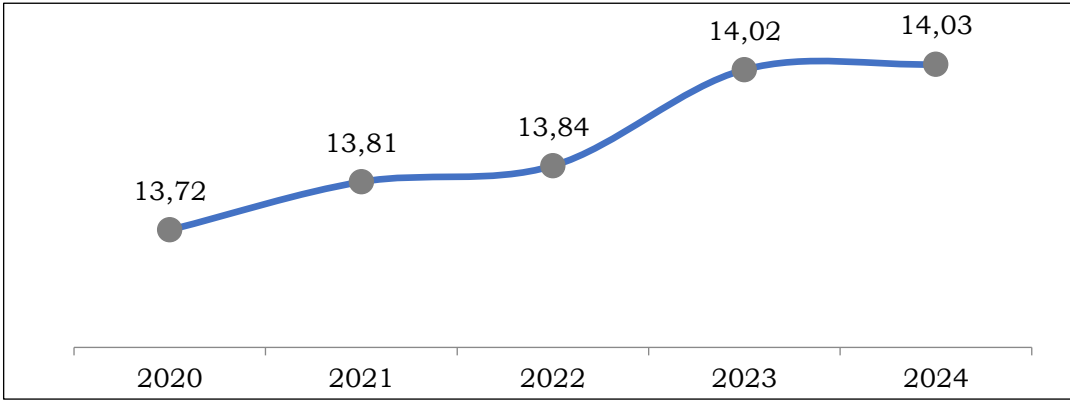
Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2025

Sama halnya dengan pencapaian IPM, rata-rata lama sekolah Provinsi Kalimantan Timur juga sangat berkorelasi dengan capaian rata-rata lama sekolah Kabupaten/kota. Jika dilihat dari pertumbuhan capaian RLS pada Kabupaten/kota tahun 2024. Rata-rata pertumbuhan RLS Kabupaten/kota di Kalimantan Timur berada pada angka 0,027 tahun, dimana ada 4 Kabupaten yang pertumbuhannya hanya 0,01 tahun yaitu Kabupaten Paser, Kutai Kartanegara, Berau dan Mahakam Ulu.

Jika melihat kondisi capaian 4 Kabupaten tersebut, dapat ditarik kesimpulan sementara bahwa Kabupaten Paser dan Berau merupakan daerah paling ujung perbatasan antara Kaltim-Kalsel dan Kaltim-Kaltara yang memiliki permasalahan dalam hal akses pendidikan. Begitu halnya dengan Kabupaten Kutai Kartanegara yang memiliki cakupan wilayah paling luas di Kalimantan Timur. Namun kondisi Kabupaten Mahakam Ulu memiliki sedikit perbedaan, dimana Mahakam Ulu memiliki karakteristik wilayah yang lebih sulit serta akses infrastruktur jalan yang masih buruk sehingga berpengaruh pada sulit dan mahal biaya pembangunan infrastruktur pendidikan.

b. Harapan Lama Sekolah

Harapan lama sekolah (HLS) merupakan indikator yang menggambarkan lamanya waktu bersekolah yang diharapkan dapat dirasakan oleh anak-anak usia tertentu pada jenjang pendidikan usia tersebut di masa mendatang berdasarkan kondisi pendidikan saat ini. Indikator HLS sangat penting dalam menilai kualitas pendidikan dan potensi pengembangan sumber daya manusia di suatu daerah.



Gambar II.23
Harapan Lama Sekolah Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2020-2024
(Sumber: BPS, Kalimantan Timur, 2025)

Capaian HLS Provinsi Kalimantan Timur juga menunjukkan tren peningkatan yang positif, meski pada tahun 2024 peningkatan hanya sebesar 0,01 tahun. Hal ini mengindikasikan bahwa capaian HLS pada Kabupaten/kota juga mengalami perlambatan. Kondisi ini sama halnya dengan rata-rata lama sekolah yang juga bergantung pada capaian ditingkat Kabupaten/kota.

Tabel II.39
Harapan Lama Sekolah Berdasar Kabupaten/Kota
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020 – 2024 (tahun)

No	Kab/Kota	2020	2021	2022	2023	2024
1	Paser	13,10	13,25	13,27	13,37	13,38
2	KUBAR	12,90	13,02	13,09	13,25	13,36
3	KUKAR	13,59	13,60	13,63	13,64	13,65
4	KUTIM	12,89	12,90	13,00	13,01	13,02
5	Berau	13,32	13,33	13,35	13,36	13,37
6	PPU	12,56	12,57	12,70	12,86	12,87
7	MAHULU	12,51	12,61	12,62	12,63	12,78
8	Balikpapan	14,14	14,22	14,23	14,24	14,25
9	Samarinda	14,89	15,09	15,10	15,39	15,40
10	Bontang	13,03	13,17	13,18	13,43	13,73

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2025

Meski capaian HLS Kabupaten/kota di Kalimantan Timur terus mengalami peningkatan di setiap tahunnya, namun pada tahun 2024 mengalami perlambatan yang cukup signifikan. Terbukti dari 10 Kabupaten/kota hanya ada 2 Kabupaten yang pertumbuhannya mencapai 0,1 tahun yaitu Kabupaten Kutai Barat dan Mahakam Ulu. Bahkan Kota Balikpapan dan Samarinda hanya bertumbuh 0,01 tahun

dari tahun 2023. Perlambatan capaian HLS dapat disebabkan kondisi ketersediaan infrastruktur pendidikan yang lebih sedikit dari yang dibutuhkan untuk menampung penduduk usia sekolah, kecukupan guru yang berpengaruh pada pembukaan kelas belajar dengan kualitasnya, kemudahan akses penduduk dari tempat tinggal terhadap fasilitas pendidikan, kondisi ekonomi keluarga hingga budaya masyarakat.

c. Angka Partisipasi Sekolah

Angka partisipasi sekolah (APS) merupakan indikator penting dalam menilai akses pendidikan di suatu daerah. Terdapat beberapa komponen dalam angka partisipasi sekolah yaitu angka partisipasi kasar (APK) dan angka partisipasi murni (APM). Masing-masing indikator ini memberikan gambaran yang berbeda mengenai tingkat partisipasi masyarakat dalam pendidikan formal.

Tabel II.40
Angka Partisipasi Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2020-2024

Usia Sekolah/Jenjang Pendidikan	2020	2021	2022	2023	2024
Angka Partisipasi Sekolah					
17 - 12	99,73	99,6	99,57	99,64	99,69
13-15	99,07	98,9	98,75	98,71	98,73
16-18	81,88	82,1	81,43	81,5	81,84
Angka Partisipasi Kasar					
SD Sederajat	105,75	105,26	105,21	106,46	104,69
SLTP Sederajat	92,17	92,03	91,47	92,28	104
SLTA Sederajat	95,23	95,52	95,09	95,16	99,1
Angka Partisipasi Murni					
SD Sederajat	98,44	98,36	98,45	98,53	96,56
SLTP Sederajat	81,28	81,3	82,65	83,36	83,86
SLTA Sederajat	69	69,29	69,1	69,89	72,61

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2025

APK yang tinggi menunjukkan bahwa sebagian besar anak usia sekolah di Kalimantan Timur telah terdaftar di sekolah pada jenjang tertentu tanpa memperhatikan ketepatan umur peserta didiknya. Sedangkan APM yang lebih rendah dibandingkan APK menunjukkan masalah pada ketepatan umur siswa terhadap jenjang pendidikan yang seharusnya, hal ini tentunya dipengaruhi oleh berbagai faktor yaitu, anak yang terlambat dalam mengenyam pendidikan dan anak yang putus sekolah.

Dalam undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem pendidikan Nasional pada pasal 11 jelas disebutkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga tanpa diskriminasi. Melihat data capaian APS yang belum mencapai 100% menunjukkan masih adanya anak usia sekolah yang tidak mendapatkan akses terhadap pendidikan, hal ini sejalan dengan data Anak Tidak Sekolah (ATS) di Kalimantan Timur.

Tabel II.41
Angka Anak Tidak Sekolah (ATS)
Di Kalimantan Timur

Kabupaten Kota	Jumlah Belum Pernah Bersekolah (BPB)	Jumlah Drop Out (DO)	Jumlah Lulus Tidak Melanjutkan (LTM)	Total
Samarinda	4.221	2.076	2.079	8.376
Balikpapan	3.300	1.674	1.149	6.123
Bontang	841	525	275	1.641
Kutai Kartanegara	5.523	2.945	3.627	12.095
Kutai Timur	9.945	1.996	1.470	13.411
Kutai Barat	1.181	859	729	2.769
Paser	1.769	1.376	1.582	4.727
Penajam Paser Utara	814	749	621	2.184
Berau	2.110	1.225	1.163	4.498
Mahakam ulu	517	158	114	789
Total	30.221	13.583	12.809	56.613

Sumber: pd.data.kemendikbud.go.id (16 Maret 2025)

Data diatas menunjukkan bahwa Kalimantan Timur menghadapi tantangan serius dalam meningkatkan angka partisipasi sekolah, tingginya jumlah siswa yang belum pernah bersekolah, drop out dan lulus tetapi tidak melanjutkan pendidikan menunjukkan perlunya intervensi yang lebih besar dari pemerintah.

Tabel II.42
Angka Belum Pernah Bersekolah (BPB)
Di Kalimantan Timur

No.	Kabupaten/kota	Usia				Total
		<7	7-12	13-15	>15	
1	Samarinda	0	1.506	989	1.726	4.221
2	Balikpapan	0	1.218	752	1.330	3.300
3	Bontang	0	189	162	490	841
4	Kutai Kartanegara	0	1.304	1.297	2.922	5.523

No.	Kabupaten/kota	Usia				Total
		<7	7-12	13-15	>15	
5	Kutai Timur	0	1.452	2.200	6.293	9.945
6	Kutai Barat	0	342	293	546	1.181
7	Paser	0	432	471	866	1.769
8	Penajam Paser Utara	0	225	208	381	814
9	Berau	0	534	561	1.015	2.110
10	Mahakam ulu	0	140	131	246	517
Total		0	7.342	7.064	15.815	30.221

Sumber: *pd.data.kemendikbud.go.id* (16 Maret 2025)

Kabupaten Kutai Timur dan Kutai Kartanegara memiliki jumlah anak yang belum pernah sekolah paling tinggi di antara Kabupaten/kota lain. dengan memiliki wilayah paling luas di Kalimantan Timur, Kutai Timur dan Kutai Kartanegara juga memiliki ketergantungan yang tinggi pada sektor pertambangan dan perkebunan. Sehingga masyarakat tinggal tersebar dekat pada daerah pertambangan dan perkebunan, kondisi ini juga menyulitkan pemerintah daerah untuk menyediakan infrastruktur pendidikan di daerah tersebut yang penduduknya tidak terkumpul dalam satu wilayah. Selain itu, intervensi untuk anak yang belum pernah bersekolah ini tentunya bergantung pada Pemerintah Kabupaten/kota dalam penyelesaiannya. Dimana Pemerintah Provinsi tidak memiliki kewenangan intervensi langsung kepada jenjang dasar dan ujian paket.

Tabel II.43
Angka Drop Out (DO) Kalimantan Timur

No.	Kabupaten/Kota	Jenjang Pendidikan				Total
		PAUD	DASAR (SD)	MENENGAH (SMP)	ATAS (SMA/SMK)	
1	Samarinda	0	480	585	1.011	2.076
2	Balikpapan	0	382	476	816	1.674
3	Bontang	0	128	144	253	525
4	Kutai Kartanegara	0	878	973	1.094	2.945
5	Kutai Timur	0	671	670	655	1.996
6	Kutai Barat	0	257	269	333	859
7	Paser	0	383	476	517	1.376
8	Penajam Paser Utara	0	204	296	249	749
9	Berau	0	362	430	433	1.225
10	Mahakam ulu	0	17	79	62	158
Total		0	3.762	4.398	5.423	13.583

Sumber: *pd.data.kemendikbud.go.id* (16 Maret 2025)

Berbagai faktor penyebab terjadinya drop out atau putus sekolah anak, seperti kondisi ekonomi keluarga yang mengharuskan anak lebih memilih untuk bekerja, akses jarak antara rumah dengan sekolah yang begitu jauh, anak berhadapan dengan hukum, anak dalam pernikahan, kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan hingga budaya masyarakat.

Tabel II.44
Angka Lulus Tidak Melanjutkan (LTM) Kalimantan Timur

No.	Kabupaten/Kota	JENJANG PENDIDIKAN		Total
		DASAR (SD)	MENENGAH (SMP)	
1	Samarinda	889	1.190	2.079
2	Balikpapan	452	697	1.149
3	Bontang	97	178	275
4	Kutai Kartanegara	1.497	2.130	3.627
5	Kutai Timur	603	867	1.470
6	Kutai Barat	291	438	729
7	Paser	690	892	1.582
8	Penajam Paser Utara	275	346	621
9	Berau	488	675	1.163
10	Mahakam ulu	47	67	114
Total		5.329	7.480	12.809

Sumber: pd.data.kemendikbud.go.id (16 Maret 2025)

Anak lulus yang tidak melanjutkan juga disebabkan oleh faktor yang kurang lebih sama dengan anak yang drop out. Namun, kendala dalam penanganan ATS ini adalah banyak ATS memiliki umur yang melebihi batas usia sekolah. Sehingga intervensinya juga bergantung pada keaktifan Pemerintah Kabupaten/kota, dimana untuk penyelesaian penduduk yang memiliki umur lebih dari usia sekolah adalah dengan melalui ujian paket A, B dan C.

Intervensi pemerintah daerah terhadap ATS usia sekolah akan berdampak pada peningkatan angka partisipasi sekolah (APS), sedangkan intervensi terhadap ATS pada penduduk yang memiliki umur lebih dari usia sekolah akan berdampak pada peningkatan capaian rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun keatas. Pada akhirnya dapat meningkatkan capaian indeks pembangunan manusia pada dimensi pendidikan.

d. Angka Literasi dan Numerasi

Kemampuan Literasi merupakan kemampuan individu membaca dalam memahami, menggunakan, merefleksi dan mengevaluasi beragam jenis teks (teks informasional dan teks fiksi). Sedangkan kemampuan numerasi merupakan kemampuan individu dalam berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan.

Standar kompetensi minimum literasi dan numerasi merupakan indikator penting dalam mengukur keberhasilan dari sisi kualitas hasil pembelajaran peserta didik, serta sebagai bahan untuk mengevaluasi kualitas pendidikan di Provinsi Kalimantan Timur. Satuan pendidikan dan/atau kabupaten/kota yang dikategorikan mencapai kompetensi minimum jika paling sedikit 75 persen peserta didik pada satuan pendidikan dan/atau kabupaten/kota memiliki level hasil belajar minimal “cakap”.

Tabel II.45
Angka Literasi dan Numerasi di Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2021-2023

Indikator	2021	2022	2023
Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk numerasi	6,72	12,65	32,36
Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk literasi membaca	29,48	40,38	53,89
Persentase kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk numerasi	0,00	0,00	10,00
Persentase kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk literasi membaca	10,00	20,00	40,00

Sumber: Kemendikbud, 2024

Apabila dilihat dari capaian kabupaten/kota, terdapat 9 kabupaten/kota belum mencapai kompetensi minimum untuk numerasi dan 6 kabupaten/kota yang belum mencapai kompetensi minimum untuk literasi membaca. Kondisi ini mencerminkan tantangan yang memerlukan perhatian khusus dari pemerintah Provinsi dan Kabupaten/kota dan semua pemangku kepentingan untuk melakukan intervensi yang tepat. Termasuk diantaranya adalah pemenuhan fasilitas penunjang pembelajaran baik dari buku teks dan non teks, pendukung media pembelajaran siswa, hingga intervensi terhadap

peningkatan kompetensi pendidik dalam mengembangkan proses pembelajaran yang lebih menarik dan inovatif.

e. Akreditasi sekolah

Akreditasi adalah proses penilaian yang dilakukan oleh lembaga independen untuk menentukan sejauh mana satuan pendidikan memenuhi standar yang telah ditetapkan. Akreditasi memiliki fungsi untuk menilai dan menjamin mutu pendidikan, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap satuan pendidikan serta menjadi dasar dalam pengambilan keputusan untuk pengembangan pendidikan di daerah.

Tabel II.46
Data Akreditasi Kewenangan Provinsi Tahun 2024
Kalimantan Timur

PROVINSI				KABUPATEN/KOTA			
JENJANG	NEGERI	SWASTA	TOTAL	JENJANG	NEGERI	SWASTA	TOTAL
SLB	11	24	35	SD	1658	273	1931
A	1		1	A	488	120	608
B	7	6	13	B	908	99	1007
BT	1	2	3	BT	4	20	24
C	2	15	17	C	252	33	285
TT		1	1	TT	6	1	7
SMA	144	97	241	SMP	458	247	705
A	88	34	122	A	166	90	256
B	40	33	73	B	206	100	306
BT	3	9	12	BT	6	10	16
C	12	21	33	C	80	47	127
TT	1		1				
SMK	88	131	219				
A	30	18	48				
B	51	67	118				
BT	1	3	4				
C	6	42	48				
TT		1	1				
Total	243	252	495	Total	2116	520	2636

Sumber: BAN-PDM Prov. Kaltim, 2024

Pada jenjang yang menjadi kewenangan Provinsi, satuan pendidikan di dominasi akreditasi “B” dengan total 41,21%, akreditasi “A” 34,55%, akreditasi C 19,80% dan belum/tidak terakreditasi sebesar 4,44%. Mutu Pendidikan yang tercermin dari akreditasi sekolah memiliki dampak signifikan terhadap kepercayaan Masyarakat. Sekolah dengan akreditasi tinggi cenderung mendapatkan kepercayaan lebih dari orang

tua dan Masyarakat, sedangkan sekolah dengan akreditasi rendah atau belum terakreditasi menghadapi tantangan dalam menarik kepercayaan orang tua untuk menyekolahkan anaknya.

Pemerataan Pendidikan berkualitas juga dapat dicerminkan dari meratanya satuan Pendidikan yang memiliki akreditasi tinggi. Dimana komponen yang menjadi penilaian akreditasi adalah kinerja pendidik dalam proses pembelajaran, kepemimpinan Kepala satuan Pendidikan dalam pengelolaan satuan Pendidikan, iklim lingkungan belajar serta kompetensi hasil pembelajaran lulusan dan/atau peserta didik. Upaya peningkatan kualitas Pendidikan harus menjadi prioritas bagi pemerintah daerah untuk membangun kepercayaan Masyarakat dan memastikan Pendidikan yang berkualitas bagi Masyarakat yang pada akhirnya dapat meningkatkan angka partisipasi sekolah dan rata-rata lama sekolah di Kalimantan Timur.

f. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) adalah ukuran yang digunakan untuk menilai tingkat kemampuan literasi suatu masyarakat, dengan melihat dari berbagai aspek seperti kemampuan membaca, menulis, memahami, dan menggunakan informasi secara efektif. Komponen Indeks Literasi Masyarakat diukur berdasarkan Pemerataan layanan perpustakaan, Ketercukupan koleksi, Ketercukupan tenaga kerja, Tingkat kunjungan masyarakat, Jumlah perpustakaan ber SNP, Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan sosialisasi atau promosi serta Ke anggota perpustakaan. Kategori penilaian yang digunakan adalah IPLM 0-29,9 masuk dalam kategori sangat rendah, IPLM 30-49,9 masuk dalam kategori rendah, IPLM 50-79,9 masuk dalam kategori sedang, IPLM 80-89,9 masuk dalam kategori tinggi dan IPLM 90-100 masuk dalam kategori sangat tinggi.

Tabel II.47
Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	20,78	17,74	36,06	68,77	78,34

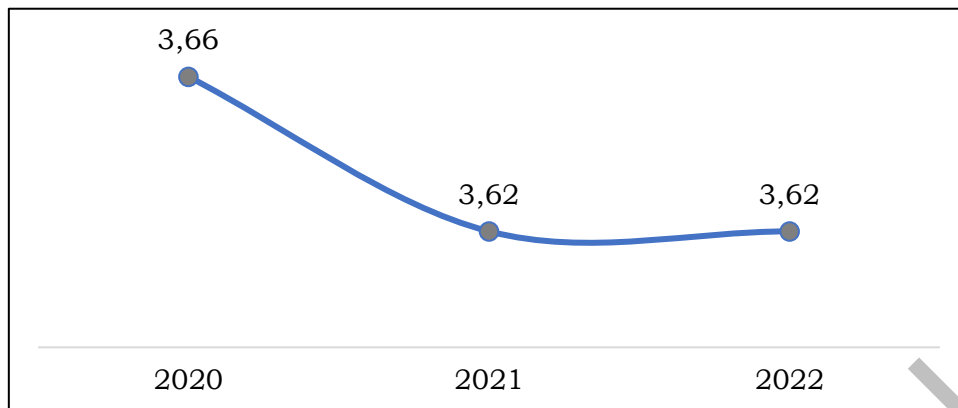
Sumber: Dinas Perpustakaan & Arsip Provinsi KALTIM, 2024

Pada tahun 2020 IPLM Kalimantan Timur adalah 20,78 dan pada tahun 2024 sebesar 78,34 dan masuk dalam kategori sedang. Namun, pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 IPLM Kalimantan Timur pada kategori posisi rendah dan sangat rendah. Hal ini dikarenakan dampak Pandemi Covid-19 yang berakibat pada pembatasan ruang gerak seperti mengurangi akses masyarakat terhadap pendidikan formal, perpustakaan, dan bahan bacaan. Dalam upaya untuk meningkatkan IPLM Kalimantan Timur maka beberapa hal yang perlu menjadi perhatian adalah peningkatan kemudahan masyarakat dalam mengakses informasi/buku, majalah, atau sumber bacaan digital, peningkatan kemampuan masyarakat dalam membaca dan memahami informasi, peningkatan kemampuan menulis dan menyampaikan ide serta minat dan kesadaran masyarakat dalam peningkatan budaya membaca.

g. Indeks Literasi Digital

Pembangunan teknologi digital memiliki dampak luas terhadap kehidupan sehari-hari, terutama dalam memberikan kemudahan akses informasi, komunikasi, dan efisiensi perencanaan dan pelaksanaan pekerjaan. Pembangunan teknologi digital mencakup berbagai aspek yang berhubungan dengan peningkatan literasi digital, infrastruktur, sistem, dan layanan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

Literasi digital adalah kemampuan individu untuk mengakses, memahami, membuat, mengkomunikasikan dan mengevaluasi informasi melalui teknologi digital yang bisa diterapkan dalam kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat. Empat pilar dalam mengukur indeks literasi digital yaitu Digital Skill, Digital Culture, Digital Ethics dan Digital Safety.



Gambar II.30
Indeks Literasi Digital Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2020-2022
(Sumber: Kominfo RI, 2023)

Indeks Literasi Digital Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2022 mencapai 3,62 dan berada pada peringkat tiga besar nasional. Pada *digital skills* atau indikator kecakapan digital Kalimantan Timur sebesar 3,55 poin. Pilar ini mengukur kecakapan pengguna internet dalam menggunakan komputer atau gawai, mengunggah/mengunduh data, mengecek ulang informasi dari internet. *Digital ethics* atau indikator etika digital mencapai 3,90 poin. Pilar ini mengukur kepekaan pengguna internet dalam mengunggah konten tanpa izin, berkomentar kasar di media sosial dan menghargai privasi di media sosial. *Digital safety* atau indikator keamanan digital sebesar 3,17 poin. Pilar ini mengukur kemampuan pengguna internet dalam mengidentifikasi dan menghapus spam/*malware*/virus di komputer atau gawai pribadi, kebiasaan mencadangkan data dan pelindungan data pribadi. *Digital culture* atau indikator budaya digital sebesar 3,86 poin. Pilar ini mengukur kebiasaan pengguna internet seperti mencantumkan nama penulis/pengunggah asli saat melakukan *reposting*, membuat unggahan dengan mempertimbangkan perasaan pembaca dari suku/agama/pandangan politik berbeda, menikmati dan berbagi konten seni budaya Indonesia di ruang digital.

4. Perlindungan Sosial yang Adaptif

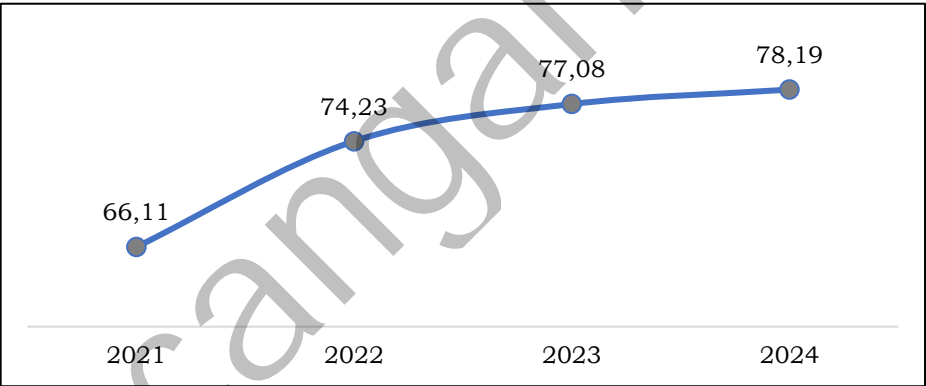
Ketersediaan jaminan sosial ketenagakerjaan menjadi aspek penting dalam melindungi pekerja dari risiko sosial-ekonomi, meningkatkan kesejahteraan hidup, dan mendorong produktivitas tenaga kerja di

berbagai sektor. Sebanyak 837.154 tenaga kerja di Kalimantan Timur, baik penerima upah maupun bukan penerima upah, telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan pada tahun 2023. Namun, tingkat cakupan kepesertaan aktif BPJS Ketenagakerjaan baru mencapai 45,32 persen jika dibandingkan dengan total penduduk bekerja berusia 15 tahun ke atas. Angka ini menunjukkan masih adanya tantangan untuk memperluas perlindungan jaminan sosial bagi seluruh tenaga kerja Kalimantan Timur.

5. Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju

a. Indeks Kerukunan Umat Beragama

Indikator yang digunakan untuk menggambarkan tingkat kerukunan umat beragama di suatu wilayah adalah Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB). Indikator IKUB diukur melalui 3 (tiga) dimensi yaitu toleransi, kesetaraan, dan kerja sama.



Gambar II.31

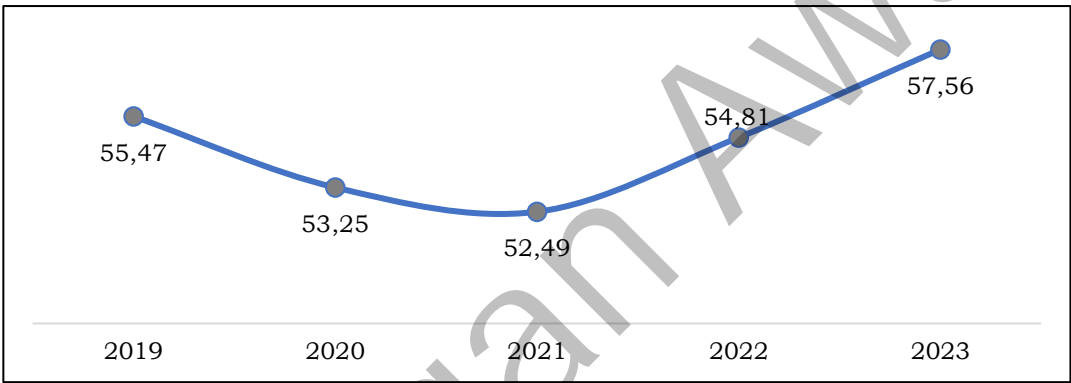
Indeks Kerukunan Umat Beragama Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2021-2024

(Sumber: Kementerian Agama RI, 2025)

IKUB Kalimantan Timur mengalami peningkatan setiap tahunnya hingga mencapai 78,64 di tahun 2024 dan masuk dalam kategori rukun tinggi. Peningkatan skor ini terjadi di seluruh dimensi baik toleransi (78,64), kesetaraan (78,22) maupun kerja sama (77,72). Hal ini mencerminkan adanya upaya yang efektif dalam membangun keharmonisan antarumat beragama di Kalimantan Timur, dengan indikasi semakin meningkatnya toleransi, kerja sama, serta penghormatan antar umat beragama dan kelompok masyarakat.

b. Indeks Pembangunan Kebudayaan

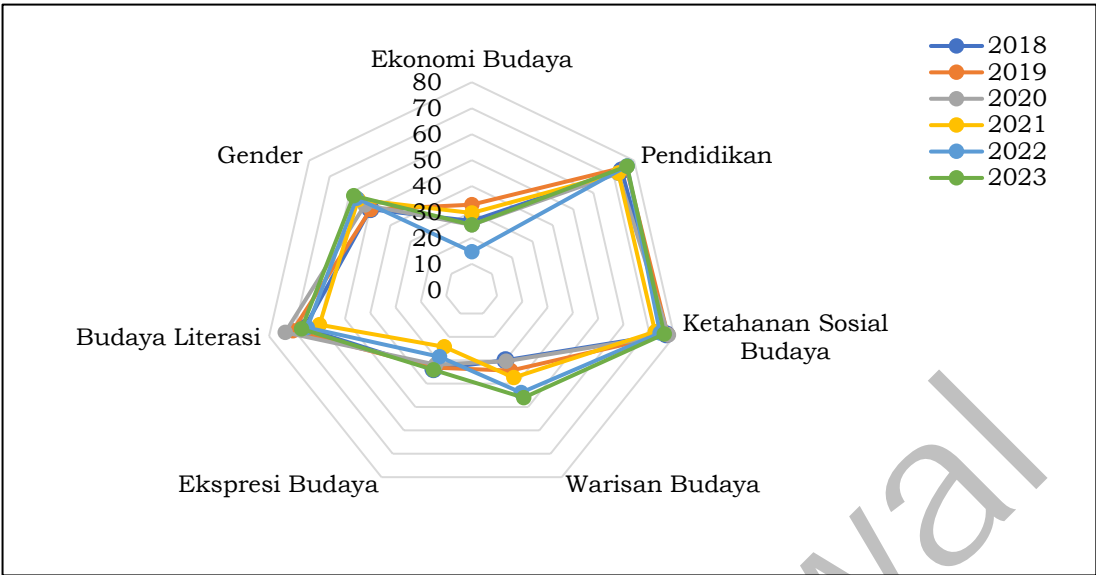
Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) disusun sebagai salah satu instrumen untuk memberikan gambaran kemajuan pembangunan kebudayaan yang diukur berdasarkan tujuh dimensi yaitu dimensi ekonomi budaya, pendidikan, ketahanan sosial budaya, warisan budaya, ekspresi budaya, budaya literasi dan gender. Nilai IPK Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2019 sebesar 55,47 dan meningkat menjadi 57,56 di tahun 2023. Capaian IPK Kalimantan Timur mengalami penurunan pada tahun 2020 dan 2021 akibat pandemi Covid-19.



Gambar II.32

Capaian Indeks Pembangunan Kebudayaan
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019–2023
(Sumber: KEMENDIKBUD, 2024)

Terhadap capaian IPK Provinsi Kalimantan Timur tersebut masih terdapat beberapa tantangan yang perlu diantisipasi, terutama pada dimensi yang rata-rata nasionalnya lebih baik dari pada capaian Provinsi Kalimantan Timur.



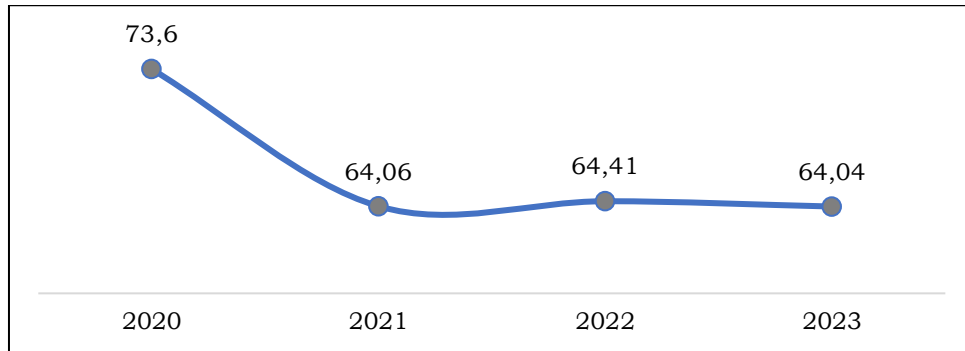
Gambar II.33
Dimensi Indeks Pembangunan Kebudayaan
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018–2023
(Sumber: KEMENDIKBUD, 2024)

Pada tahun 2023 terdapat empat dimensi yang berada dibawah capaian nasional yaitu dimensi ekonomi budaya, ekspresi budaya, warisan budaya dan gender. Berkenaan dengan itu diperlukan sinergi antar lembaga terkait di provinsi maupun kabupaten/kota dengan masyarakat sebagai pelaku seni budaya, masyarakat sebagai pemilik ataupun sebagai pengapresiasi seni budaya.

6. Keluarga Berkualitas, Kesenjangan Gender dan Masyarakat Inklusif

a. Indeks Perlindungan Anak

Salah satu indikator untuk mengukur capaian keberhasilan pembangunan pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak adalah melalui Indeks Perlindungan Anak (IPA). Indeks Perlindungan Anak (IPA) meliputi beberapa klaster yaitu Klaster Hak Sipil dan Kebebasan, Klaster Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif, Klaster Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan, Klaster Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya, serta Klaster Perlindungan Khusus. Semakin tinggi Indeks Perlindungan Anak (IPA) merepresentasikan bahwa keberhasilan pembangunan pemenuhan dan perlindungan hak anak semakin baik.

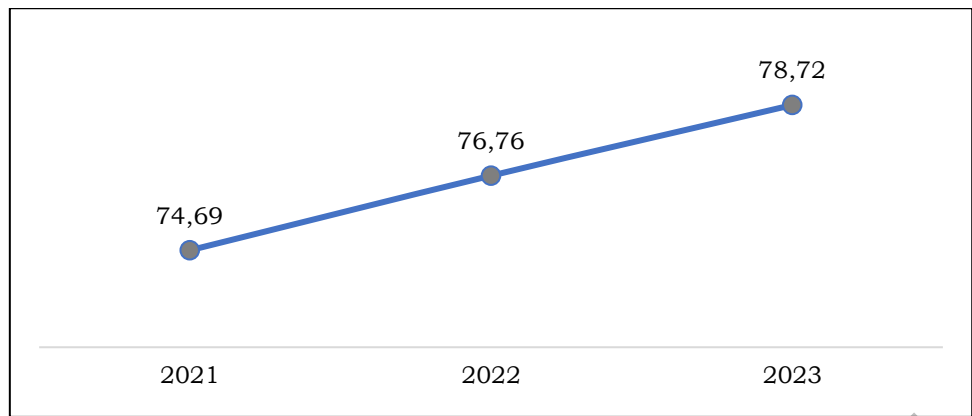


Gambar II.34
Indeks Perlindungan Anak
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2023
(Sumber: Kemenpppa RI, 2025)

Tren IPA Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2020 hingga tahun 2023 cenderung mengalami penurunan. Turunnya IPA di tahun 2023 disebabkan oleh rendahnya capaian pada Klaster Hak Sipil dan Kebebasan serta pada Klaster Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya. Kondisi ini memerlukan sinergi dan kolaborasi antar pihak untuk menyelesaikan permasalahan perlindungan dan pemenuhan hak anak. Berbagai strategi implementatif dan komprehensif sangat diperlukan untuk meningkatkan capaian IPA Kalimantan Timur.

b. Indeks Kualitas Keluarga

Indeks Kualitas Keluarga (IKK) merupakan suatu pengukuran pencapaian kualitas keluarga yang dinilai melalui lima dimensi yang meliputi Dimensi Kualitas Legalitas dan Struktur (KLS), Dimensi Kualitas Ketahanan Fisik (KKF), Dimensi Kualitas Ketahanan Ekonomi (KKE), Dimensi Kualitas Ketahanan Sosial Psikologi (KKSP), Dimensi Kualitas Ketahanan Sosial Budaya (KKSB).

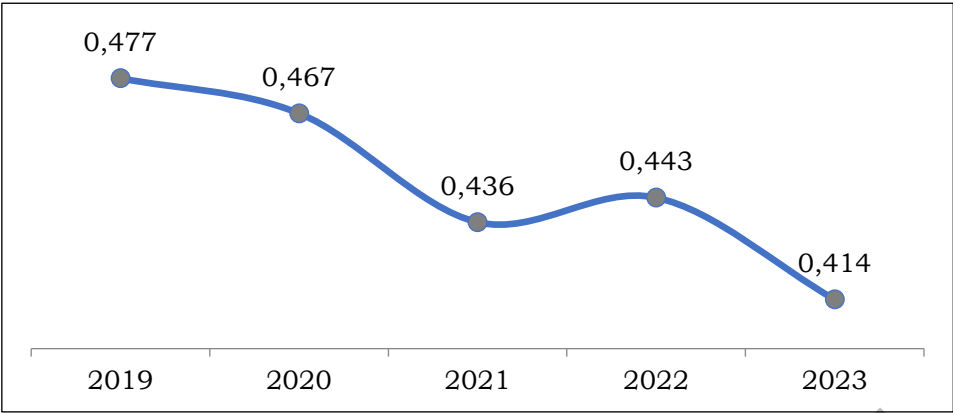


Gambar II.35
Indeks Kualitas Keluarga
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021-2023
(Sumber: SIGA Kemenppa, 2025)

IKK Kalimantan Timur termasuk kategori responsif gender dan hak anak atau kategori tertinggi dalam penilaian IKK dengan capaian 78,72 pada tahun 2023. Meskipun nilai IKK di tahun 2023 mengalami peningkatan, beberapa indikator komposit penyusun IKK mengalami penurunan, diantaranya Prevalence of Undernourishment (PoU) semua umur yaitu proporsi penduduk di suatu wilayah yang mengonsumsi pangan kurang dari standar kecukupan energi, persentase rumah tangga yang ada ART menjadi korban kejahatan, persentase rumah tangga yang ada perkawinan anak-anak dan lain-lain.

c. Indeks Ketimpangan Gender

Indeks Ketimpangan Gender (IKG) adalah ukuran yang menunjukkan tingkat ketimpangan gender antara laki-laki dan perempuan dalam tiga dimensi, yaitu: Kesehatan reproduksi, Pemberdayaan gender, Pasar tenaga kerja. Indeks Ketimpangan Gender (IKG) di Kalimantan Timur sejak tahun 2018 hingga 2023 menunjukkan tren penurunan, dimana capaian IKG Kalimantan Timur juga tercatat selalu lebih rendah dari capaian IKG Nasional. Hal ini mengindikasikan ketimpangan gender yang semakin mengecil atau kesetaraan yang semakin baik.



Gambar II.36
Indeks Ketimpangan Gender Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2019-2023
(Sumber: BPS Provinsi KALTIM, 2024)

IKG Kalimantan Timur Tahun 2023 mencapai 0,414 turun 0,029 poin dibandingkan tahun 2022. Penurunan ini akibat meningkatnya capaian kesetaraan pada dimensi penyusun IKG antara laki-laki dan perempuan. Sementara itu, capaian IKG kabupaten/kota selama kurun waktu 2018-2023 cukup bervariasi. Hal ini mengindikasikan ketimpangan gender masih menjadi permasalahan dalam pembangunan gender di Provinsi Kalimantan Timur. Penurunan Ketimpangan gender terbesar terdapat pada tahun 2021 sebanyak 0,031 poin dari tahun 2020. Penurunan ketimpangan pada 2021 dipengaruhi perbaikan pada dimensi Kesehatan reproduksi serta di dukung makin setaranya dimensi pemberdayaan dan dimensi pasar tenaga kerja.

Tabel II.14
Indeks Ketimpangan Gender Provinsi Kalimantan Timur Menurut
Kabupaten/Kota Tahun 2019-2023

No	Kab/Kota	2019	2020	2021	2022	2023
1	Paser	0,504	0,549	0,511	0,528	0,489
2	KUBAR	0,574	0,484	0,501	0,490	0,491
3	KUKAR	0,540	0,556	0,511	0,540	0,490
4	KUTIM	0,561	0,530	0,518	0,552	0,532
5	Berau	0,523	0,493	0,467	0,380	0,502
6	PPU	0,550	0,438	0,572	0,527	0,544
7	MAHULU	0,509	0,406	0,449	0,421	0,362
8	Balikpapan	0,300	0,297	0,246	0,344	0,178
9	Samarinda	0,320	0,311	0,222	0,197	0,237
10	Bontang	0,253	0,235	0,348	0,253	0,314
Kalimantan Timur		0,477	0,467	0,436	0,443	0,414

Sumber: BPS Provinsi KALTIM, 2024

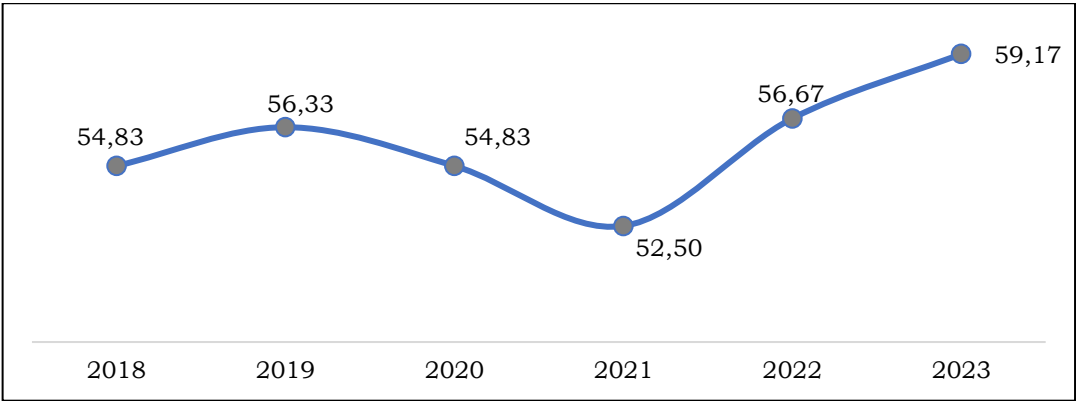
Pada tahun 2023, ketimpangan gender tertinggi terjadi di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dengan nilai 0,544, sedangkan ketimpangan gender terendah terdapat di Kota Balikpapan dengan nilai 0,178. Rendahnya ketimpangan di Balikpapan dipengaruhi oleh perbaikan dalam dimensi kesehatan reproduksi serta pasar kerja. Secara umum, jika dibandingkan antara kabupaten dan kota, terlihat bahwa Indeks Ketimpangan Gender (IKG) di wilayah kota cenderung lebih baik dibandingkan kabupaten. Hal ini mengindikasikan adanya kesenjangan dalam pembangunan berbasis gender antara daerah perkotaan dan pedesaan di Kalimantan Timur.

Secara umum, kinerja pada ketiga dimensi penyusun Indeks Ketimpangan Gender (IKG) menunjukkan kecenderungan yang terus membaik. Turunnya IKG Provinsi Kalimantan Timur dari 0,443 pada 2022 menjadi 0,414 pada 2023 dipengaruhi oleh makin setara antara capaian laki-laki dan perempuan pada sebagian besar indikator penyusun IKG.

Dimensi penyusun Indeks Ketimpangan Gender terdiri dari dimensi kesehatan reproduksi, dimensi pemberdayaan, serta dimensi pasar tenaga kerja. Khusus untuk dimensi kesehatan reproduksi, indikator yang digunakan hanya berfokus pada penduduk perempuan, sedangkan dua dimensi lainnya menggunakan perbandingan indikator antara penduduk laki-laki dan perempuan.

d. Indeks Pembangunan Pemuda

Salah satu indikator untuk mengukur kinerja pembangunan kepemudaan di suatu wilayah adalah Indeks Pembangunan Pemuda (IPP). Indikator IPP menggambarkan kapasitas pemuda berdasarkan domain pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan, lapangan dan kesempatan kerja, partisipasi dan kepemimpinan, serta gender dan diskriminasi.



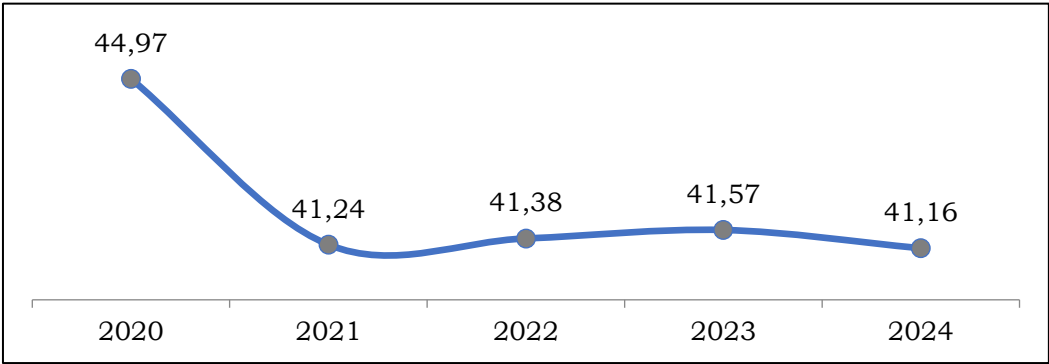
Gambar II.37
Indeks Pembangunan Pemuda Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2018-2023
(Sumber: BAPPENAS, 2024)

IPP Provinsi Kalimantan Timur selama kurun waktu 6 tahun terakhir mengalami peningkatan dari 54,83 pada tahun 2018 menjadi 59,17 pada tahun 2023. Semua capaian domain IPP mengalami peningkatan, kecuali domain partisipasi dan kepemimpinan. Hal ini disebabkan oleh menurunnya partisipasi pemuda dalam kegiatan sosial kemasyarakatan dan partisipasi pemuda yang aktif dalam organisasi.

2.3 ASPEK DAYA SAING DAERAH

1. Daya Saing Sumber Daya Manusia

Produktivitas penduduk ditentukan oleh kelompok umur dimana terdapat kelompok usia non produktif (<15 tahun dan >64 tahun) dan usia produktif (15-64 tahun). Asumsi umum yang berlaku adalah penduduk usia non produktif akan menjadi beban tanggungan oleh penduduk usia produktif, baik dalam hal pendidikan, kesehatan, maupun pemenuhan kebutuhan sehari-hari.



Gambar II.38
Rasio Ketergantungan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024
(Sumber: BPS Provinsi KALTIM, 2024)

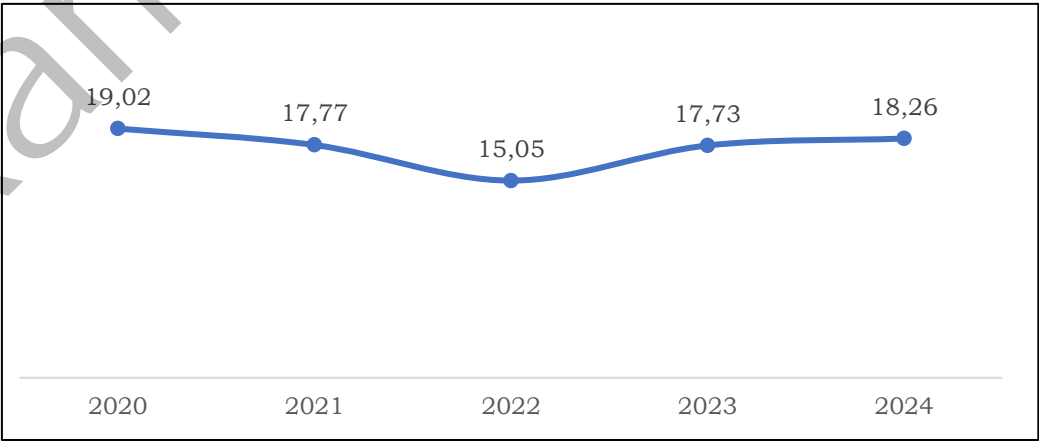
Rasio ketergantungan penduduk non produktif dalam lima tahun terakhir relatif mengalami penurunan sebesar 41,16 pada tahun 2024 yang artinya setiap 100 penduduk usia produktif menanggung 41–42 orang penduduk usia non produktif. Besarnya rasio ketergantungan di bawah 50 persen, dapat dikatakan bahwa Provinsi Kalimantan Timur mengalami bonus demografi. Bonus demografi menggambarkan keadaan di mana sebuah daerah memiliki jumlah penduduk usia produktif yang lebih besar dibandingkan dengan penduduk lansia atau anak-anak.

Jumlah penduduk usia produktif yang lebih banyak dapat memberikan dampak positif, baik secara ekonomi maupun sosial. Jumlah penduduk usia produktif yang banyak menjadi potensi bagi pemerintah untuk dapat memanfaatkan daya manusia yang ada dengan lebih optimal. Melalui persiapan matang dan sistem yang lebih baik, penduduk usia produktif ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi.

2. Iptek, Inovasi dan Produktivitas Ekonomi

a. Rasio PDRB Industri Pengolahan

Rasio PDRB industri pengolahan mencerminkan rasio hasil nilai tambah sektor industri pengolahan dengan total nilai PDRB. Semakin besar nilai PDRB yang dihasilkan oleh sektor industri pengolahan, semakin tinggi proporsinya terhadap PDRB.

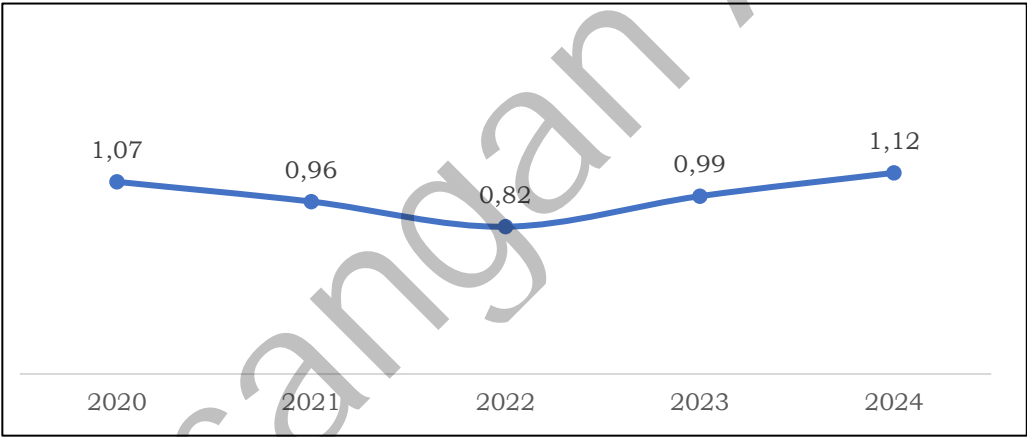


Gambar II.39
Rasio PDRB Industri Pengolahan
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024 (persen)
(Sumber: BPS Provinsi KALTIM, 2024)

Rasio PDRB industri pengolahan Provinsi Kalimantan Timur tahun 2020-2024 cenderung mengalami peningkatan hingga mencapai 18,26 persen di tahun 2024. Hal ini disebabkan mulai beroperasinya beberapa industri baru di Kalimantan Timur, seperti smelter nikel di Kabupaten Kutai Kartanegara, Pabrik Semen di Kabupaten Kutai Timur dan Amonium Nitrat di Kota Bontang dan Kabupaten Kutai Kartanegara.

b. Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum

Rasio PDRB akomodasi makan dan minum adalah persentase bagian PDRB yang dikontribusikan oleh aktivitas terkait pariwisata meliputi penyediaan akomodasi bagi wisatawan serta penyediaan jasa makan dan minum. Semakin besar nilai PDRB yang dihasilkan oleh aktivitas terkait pariwisata, semakin tinggi proporsinya terhadap PDRB.



Gambar II.40
Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024 (persen)
(Sumber: BPS Provinsi KALTIM, 2025)

Rasio PDRB akomodasi makan dan minum Kalimantan Timur tahun 2020-2024 cenderung mengalami peningkatan mencapai 1,12 persen di tahun 2024. Meningkatnya rasio PDRB penyediaan akomodasi makan dan minum di tahun 2024 disebabkan ada 148 event yang dilaksanakan di Kalimantan Timur pada tahun 2024 seperti perayaan HUT RI di IKN, MTQ Nasional ke XXX, *East Borneo Internasional Folklore Festival* (EBIFF), dan peningkatan MICE yang dilaksanakan di Kalimantan Timur.

c. Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Pengolaborasian pariwisata dan ekonomi kreatif menjadi strategi yang efektif untuk meningkatkan ekonomi suatu daerah. Kedua sektor ini secara beriringan saling memperkuat dan menciptakan sinergi positif yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Pariwisata berperan sebagai pendorong utama yang menggerakkan sektor ekonomi kreatif, sedangkan ekonomi kreatif pun turut menambah nilai tambah bagi sektor pariwisata.

Tabel II.48
Tabel Data Kunjungan Wisatawan ke Kalimantan Timur 2019 – 2023

NO	DAFTAR DATA	2019	2020	2021	2022	2023
1	Wisatawan Mancanegara	72.301	19.786	17.798	16.507	37.828
2	Wisatawan Nusantara	6.875.817	2.884.329	3.055.130	6.295.708	9.242.915
3	Total Wisatawan	6.948.118	2.904.115	3.072.928	6.312.215	9.280.743

Pada tahun 2019, pariwisata Kalimantan Timur berada dalam kondisi yang stabil dengan jumlah wisatawan yang tinggi, baik dari mancanegara maupun domestik. Namun, pandemi COVID-19 di tahun 2020 menyebabkan pembatasan perjalanan internasional dan domestik membuat sektor pariwisata mengalami penurunan drastis dalam jumlah wisatawan. Pada tahun 2021 terdapat tanda-tanda awal pemulihan, terutama di sektor wisata domestik, seiring dengan pelonggaran kebijakan perjalanan dan peningkatan kepercayaan masyarakat. Tahun 2023 menjadi titik balik bagi industri pariwisata, dengan jumlah wisatawan yang melampaui angka sebelum pandemi. Wisatawan domestik mengalami pertumbuhan yang lebih cepat dibandingkan wisatawan mancanegara, menunjukkan bahwa pariwisata dalam negeri menjadi motor utama pemulihan sektor ini. Berdasarkan hasil penilaian Indeks Pembangunan Kepariwisata Nasional (IPKN) tahun 2024, Kaltim menduduki peringkat keempat se-Indonesia dengan nilai 4,54. (2022: 14, 2023: 10, 2024: 4)

Tabel II.49
Distribusi PDRB Ekonomi Kreatif Kalimantan Timur
Menurut Sub Sektor Ekonomi Kreatif Tahun 2023

No	Sub Sektor Ekonomi Kreatif	PDRB 2023 (Rp Juta)	Kontribusi (%)	
			Sektor Ekonomi Kreatif	PDRB Kaltim 2023
1	Aplikasi	802.780,07	2,73	0,15
2	Arsitektur	8.276,18	0,03	0,00
3	Desain Interior	89.276,92	0,30	0,02
4	Desain Komunikasi Visual	4.347,08	0,01	0,00
5	Desain Produk	475.611,31	1,62	0,09
6	Fashion	4.115.785,12	13,98	0,79
7	Film, Animasi, Video	360.699,59	1,23	0,07
8	Fotografi	13.606,59	0,05	0,00
9	Game Developer	301.274,46	1,02	0,06
10	Kriya	2.913.341,45	9,90	0,56
11	Kuliner	18.160.266,93	61,70	3,46
12	Musik	142.729,52	0,48	0,03
13	Penerbitan	1.793.017,15	6,09	0,34
14	Periklanan	8.631,47	0,03	0,00
15	Seni Pertunjukan	114.568,74	0,39	0,02
16	Seni Rupa	71.859,63	0,24	0,01
17	Televisi dan Radio	55.249,41	0,19	0,01
Total		29.431.321,34	100,00	5,61

Sumber: Dinas Pariwisata Prov. KALTIM, 2023

Kontribusi sektor ekonomi kreatif terhadap PDRB Kalimantan Timur mampu memberikan nilai tambah sekitar 29,43 triliun rupiah (5,61 persen) terhadap PDRB Kalimantan Timur pada tahun 2023. Kuliner merupakan subsektor ekonomi kreatif paling tinggi dalam pembentukan PDRB ekonomi kreatif sebesar Rp 18,16 triliun (61,70 persen), disusul dengan subsektor fesyen sebesar Rp 4,12 triliun (13,98 persen) dan kriya sebesar Rp 2,91 triliun (9,90 persen).

d. Rasio Kewirausahaan

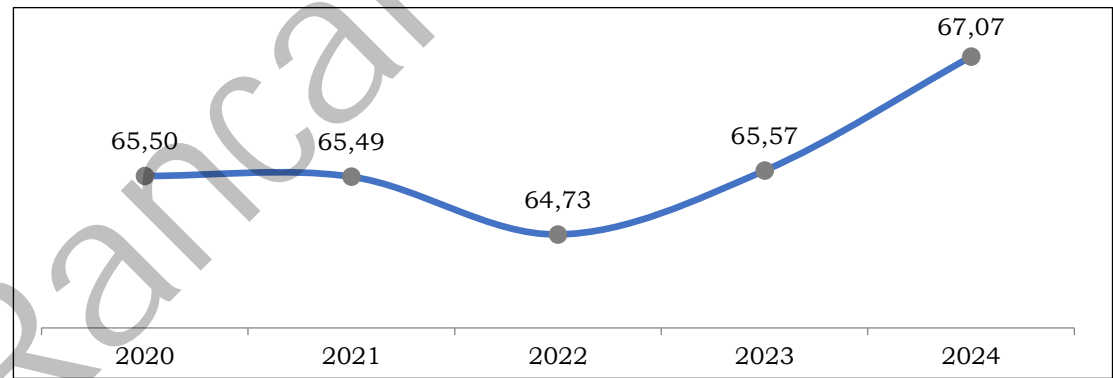
Rasio kewirausahaan daerah merupakan perbandingan jumlah orang yang berusaha dibantu buruh tetap di masing-masing daerah dengan total angkatan kerja daerah pada tahun yang sama. Rasio kewirausahaan Kalimantan Timur tahun 2023 sebesar 2,04 persen (BPS & Disnaker Provinsi Kalimantan Timur (diolah), 2024).

Kondisi kewirausahaan di Kalimantan Timur secara umum masih menghadapi tantangan dalam mendorong pertumbuhan wirausaha yang merata di seluruh wilayah. Meski provinsi ini memiliki potensi sumber

daya alam yang besar dan terus mengalami pembangunan ekonomi, sektor kewirausahaan masih perlu diperkuat, terutama di daerah yang jauh dari pusat-pusat ekonomi. Tantangan seperti akses terhadap modal, pengembangan keterampilan, serta infrastruktur yang kurang memadai di beberapa daerah menjadi faktor yang memengaruhi rendahnya angka kewirausahaan di wilayah ini. Selain itu, ketergantungan ekonomi terhadap sektor pertambangan dan energi juga membuat diversifikasi ke sektor lain, seperti kewirausahaan, menjadi lebih lambat berkembang.

e. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Salah satu indikator yang digunakan untuk menggambarkan kinerja pembangunan di bidang ketenagakerjaan adalah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Indikator TPAK mengukur besarnya partisipasi angkatan kerja dalam dunia kerja. Indikator TPAK dapat mengindikasikan besarnya pasokan tenaga kerja (*labor supply*) yang tersedia untuk melakukan aktivitas ekonomi. Semakin besar angka persentase TPAK menggambarkan semakin besar proporsi jumlah angkatan kerja terhadap seluruh penduduk usia kerja.



Gambar II.41
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024
(Sumber: BPS Provinsi KALTIM, 2025)

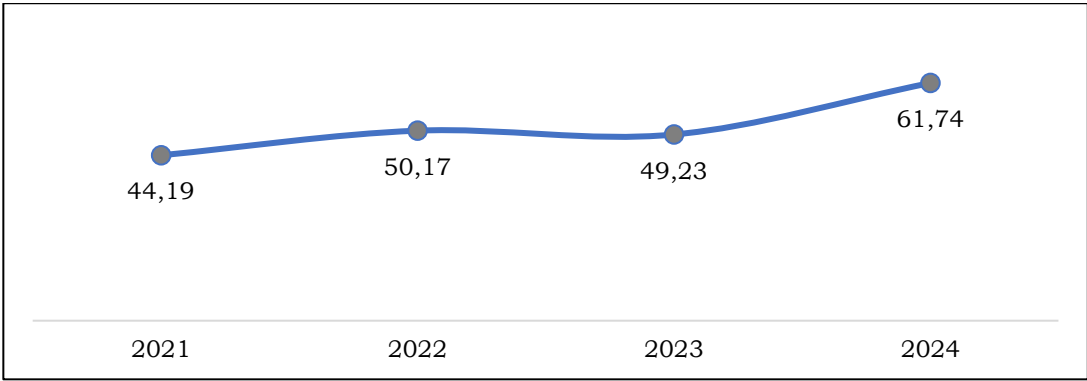
TPAK Kalimantan Timur dalam kurun waktu lima tahun terakhir mengalami peningkatan hingga mencapai 67,07 persen di tahun 2024. Namun dalam perkembangannya terdapat penurunan angka TPAK di kurun waktu tertentu. Sebagai contoh pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 angka TPAK menurun hingga 64,73 persen. Hal ini disebabkan terjadinya pergeseran penduduk angkatan kerja menjadi

penduduk bukan angkatan kerja, baik yang sekolah, mengurus rumah tangga, atau kegiatan yang lainnya. Selain itu, penurunan angka TPAK ini juga disebabkan oleh pertumbuhan jumlah penduduk yang lebih besar dari pertumbuhan angkatan kerja.

Sektor jasa konstruksi mempunyai peranan yang strategis dalam mendukung peningkatan daya saing tenaga kerja. Jumlah tenaga kerja konstruksi yang telah disertifikasi dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 sebanyak 25.155 orang, dimana 2.914 orang tenaga kerja konstruksi kualifikasi ahli dan 6.234 orang tenaga kerja konstruksi kualifikasi terampil yang dibiayai oleh APBD Provinsi dan APBD Kab/Kota. Namun demikian, jumlah yang disertifikasi ini masih belum mencakup seluruh pekerja di bidang konstruksi. Pemenuhan tenaga kerja konstruksi bersertifikat merupakan standar persyaratan untuk dapat bekerja di dunia jasa konstruksi. Penyelenggaraan pelatihan dan sertifikasi tenaga kerja konstruksi bermanfaat untuk peningkatan kualitas, keselamatan, keterampilan dan daya saing tenaga kerja konstruksi serta untuk meningkatkan profesionalisme pekerja konstruksi, menjamin kualitas dan keselamatan dalam setiap tahap pembangunan.

f. Indeks Inovasi Daerah

Indeks Inovasi Daerah (IID) adalah indikator yang digunakan untuk mengukur dan menilai inovasi daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan. IID didasarkan pada variabel dan indikator tertentu yang digunakan untuk memetakan pelaksanaan inovasi daerah, memberikan penghargaan dan melakukan pembinaan pemerintahan daerah. Aspek penilaian IID meliputi kecepatan inovasi, kemanfaatan inovasi, regulasi inovasi, ketersediaan SDM terhadap inovasi daerah, dan kualitas inovasi.



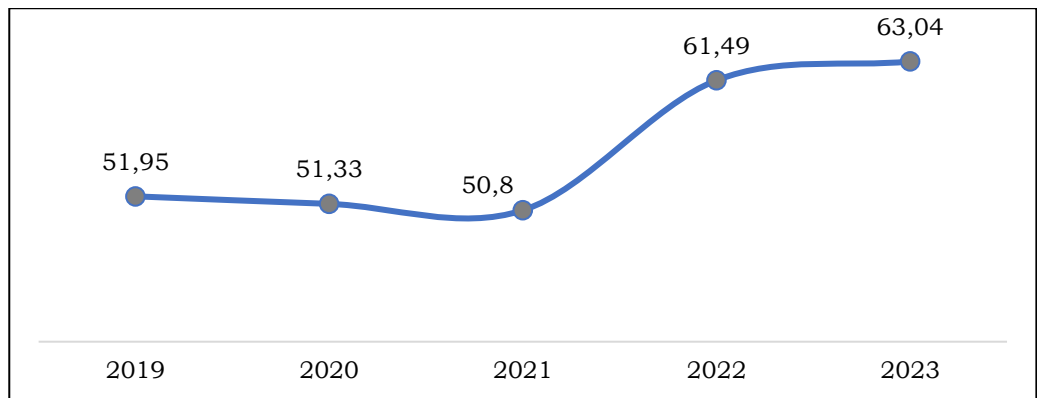
Gambar II.42
Indeks Inovasi Daerah Kalimantan Timur Tahun 2021-2024
(Sumber: Kemendagri RI, 2025)

Skor Indeks Inovasi Daerah Kalimantan Timur dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir mengalami pertumbuhan. Peningkatan cukup signifikan terjadi pada tahun 2024 sebesar 61,74 termasuk kategori Sangat Inovatif dan berada pada peringkat ke 10 (sepuluh) dari 38 Provinsi. Peningkatan skor IID ini disebabkan mulai meningkatnya inisiasi pelaksanaan inovasi dalam berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan. Peningkatan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan dan penguatan ekosistem inovasi di tingkat lokal juga diperlukan agar inovasi daerah dapat terlaksana secara berkelanjutan dan memberikan dampak yang lebih luas bagi pembangunan Kalimantan Timur.

2. Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru

a. Indeks Ekonomi Hijau

Indeks Ekonomi Hijau di Provinsi Kalimantan Timur mencerminkan sejauh mana pembangunan ekonomi di provinsi ini memperhatikan keberlanjutan lingkungan, efisiensi sumber daya, dan kesejahteraan masyarakat. Kalimantan Timur sebagai daerah dengan potensi sumber daya alam besar menghadapi tantangan dalam mengintegrasikan prinsip-prinsip hijau di tengah tekanan aktivitas ekonomi seperti pertambangan, kehutanan, dan pembangunan ibu kota negara baru.



Gambar II.43
Indeks Ekonomi Hijau Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2019–2023
(Sumber: Bappenas, 2024)

Berdasarkan gambar di atas, Indeks Ekonomi Hijau Provinsi Kalimantan Timur dari tahun ke tahun cenderung berfluktuatif, namun secara umum terjadi kenaikan. Kenaikan IEH dari tahun 2021 sampai dengan 2023 dikarenakan adanya kenaikan nilai beberapa indikator pembentuk IEH seperti indikator bauran energi baru terbarukan dari sumber energi primer, kualitas udara pada parameter NO₂, persentase penurunan emisi kumulatif dari baseline, Pendapatan Regional Domestik Bruto (PDRB) per Kapita, rata-rata lama sekolah, serta penurunan nilai indikator tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran.

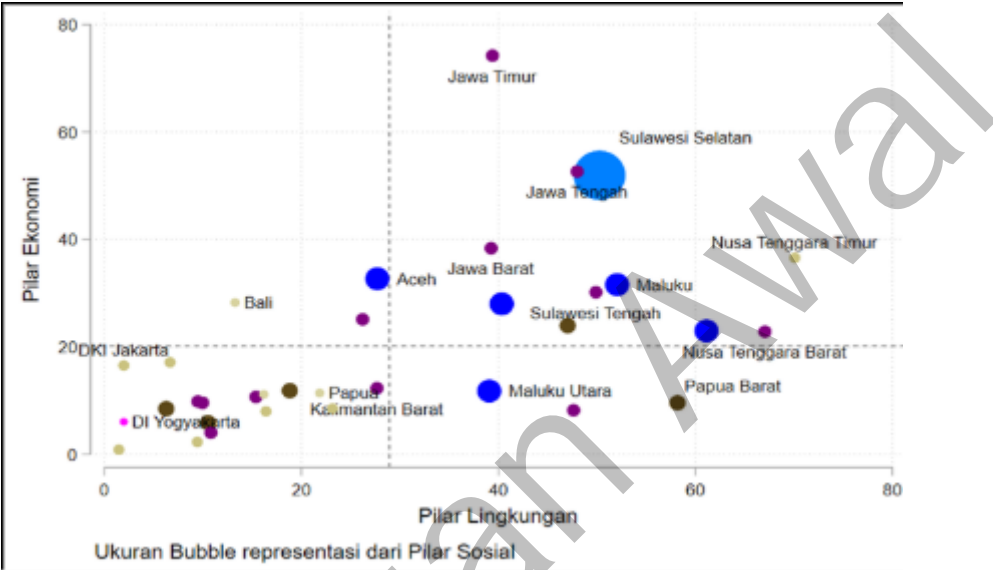
b. Indeks Ekonomi Biru

Ekonomi biru adalah pembangunan yang berbasis pada nilai ekonomi sumber daya laut Indonesia, yang menciptakan nilai tambah pada rantai suplai (langsung dan tidak langsung) sehingga dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjaga keberlanjutan lingkungan.

Kalimantan Timur memiliki potensi besar untuk mengembangkan ekonomi biru, mengingat wilayahnya yang kaya akan sumber daya kelautan dan pesisir. Pembangunan ekonomi biru di Kaltim berfokus pada pemanfaatan sumber daya laut secara berkelanjutan, seperti perikanan, pariwisata bahari, dan energi terbarukan. Pengembangan ini bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menciptakan

lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir, sambil tetap menjaga kelestarian lingkungan laut.

Untuk mengukur atau melihat kinerja pertumbuhan sektor ekonomi biru baik di tingkat nasional, maupun di tingkat provinsi disusunlah Indeks Ekonomi Biru Indonesia (IBEI). Indeks ini IBEI disusun dari beberapa indikator perekonomian makro (agregatif), yang dapat mencerminkan perkembangan aspek ekonomi, sosial dan lingkungan.



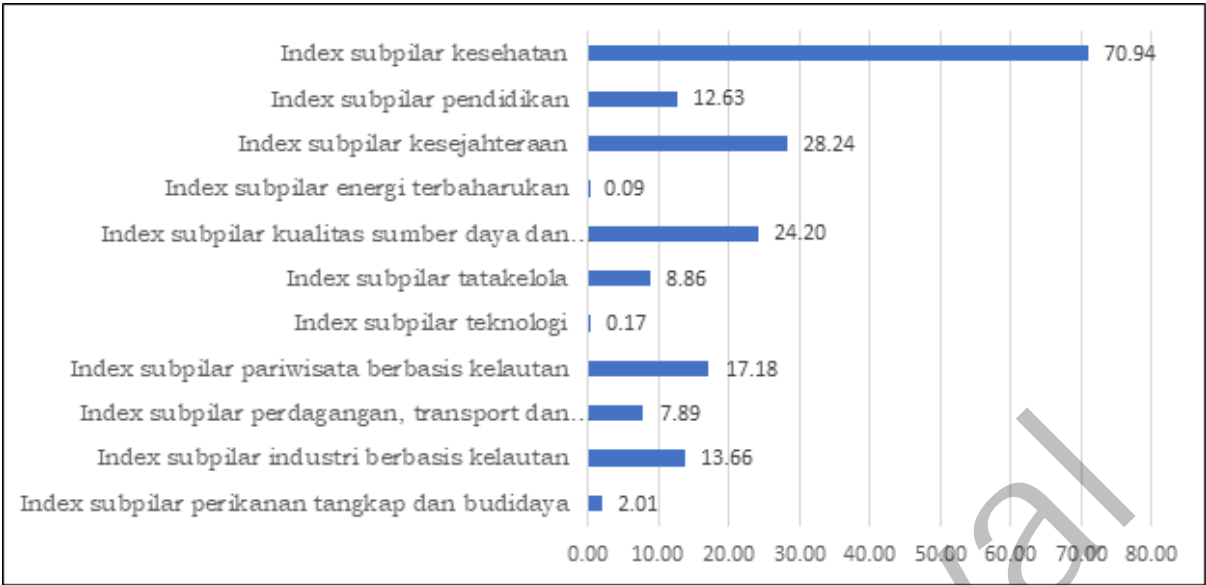
Gambar II.44

Analisa Kuadran IBEI 2023

Sumber : BAPPENAS, 2024

Dari Gambar diatas, IBEI Provinsi Kalimantan Tahun 2023 mencapai mencapai 29,07 (dibawah rata-rata Nasional yaitu 42,56). Capaian IBEI Provinsi Kaltim 2023 ini dibentuk oleh Indeks Pilar Ekonomi Kaltim sebesar 11,9 (dibawah rata-rata nasional sebesar 20), Indeks Pilar Lingkungan 18,8 (dibawah rata-rata nasional sebesar 17), dan Indeks Sosial sebesar 57,75 (rata nasional sebesar 54).

Oleh karena itu perlu lebih ditekankan pada upaya meningkatkan skor di pilar lingkungan (kualitas sumber daya laut dan konserasi serta dan penerapan Energi Baru Terbarukan) dan Sektor Ekonomi (perikanan tangkap dan budidaya serta sub pilar perdagangan, transport dan logistik)



Gambar II.45
Capaian Sub Pilar Penyusun IBEI Provinsi Kalimantan Timur 2023
Sumber : BAPPENAS, 2024

b. Energi Baru Terbarukan (EBT)

Kalimantan Timur memiliki potensi besar dalam pengembangan energi baru dan terbarukan (EBT) yang sejalan dengan visi pembangunan berkelanjutan, terutama karena posisinya sebagai wilayah strategis dengan kekayaan sumber daya alam. Berdasarkan dokumen Rencana Umum Energi Daerah (RUED) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2050 potensi EBT sebesar 20.025,94 MW, yang berasal dari Potensi Panas Bumi sebesar 18 MW, Potensi Tenaga Air sebesar 2.118,80 MW, Potensi Minihidro dan Mikrohidro 3.112 KW, Potensi Energi Surya sebesar 13.479 MW, Potensi Biomassa 936,14 MW, Potensi Biogas sebesar 150 MW, Potensi Energi Angin sebesar 212 MW, dan Potensi *Coal Bed Methane* (CBM) sebesar 88,8 TCF (*trilliun cubic feet*).

Tabel II.50
Bauran Energi Daerah Provinsi Kalimantan Timur 2024

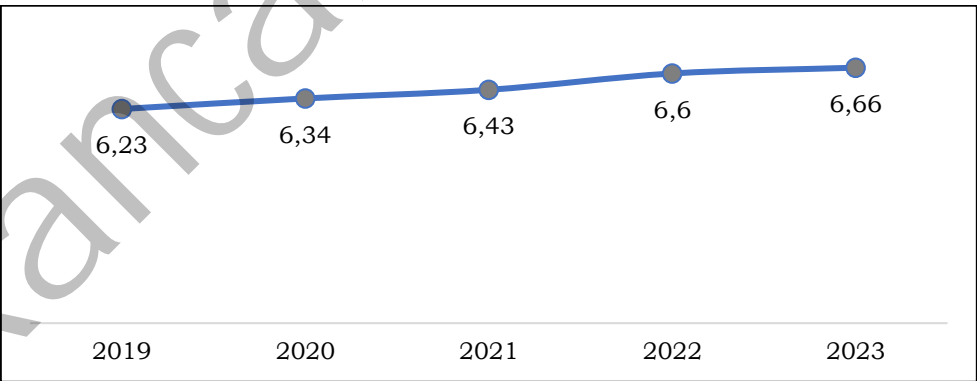
No	Uraian	BOE	TOE	MTOE	%
1	EBT	6,994,663.83	979,252.94	0.98	12.14%
2	Minyak Bumi	21,149,991.51	2,960,998.8	2.96	36.71%
3	Gas Bumi	21,437,322.89	3,001,225.20	3.00	37.21%
4	Batubara	8,036,082.68	1,125,051.58	1.13	13.95%
Total		57,618,060.91	8,066,528.53	8.07	100%

Sumber: DESDM Provinsi KALTIM, 2025

Jika dibandingkan potensi EBT dengan bauran EBT tahun 2023 sebesar 11,44 persen, dapat dikatakan bahwa pengembangan EBT di Kalimantan Timur belum optimal. Hal ini dikarenakan diperlukannya biaya investasi awal yang tinggi, kurangnya infrastruktur pendukung, ketergantungan pada teknologi dan bahan baku impor, hambatan regulasi dan kebijakan, kompetisi dengan energi konvensional, serta tantangan teknologi dan inovasi. Di sisi lain, semakin berkurangnya cadangan energi fosil dan meningkatnya kesadaran masyarakat tentang dampak perubahan iklim yang diakibatkan oleh emisi GRK akan mempercepat pemanfaatan EBT.

3. Transformasi Digital

Pertumbuhan pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), kesenjangan digital, dan potensi pembangunan TIK suatu wilayah dapat diukur menggunakan Indeks Pembangunan TIK. Terdapat tiga subindeks penyusun Indeks Pembangunan TIK, yaitu akses dan infrastruktur TIK, penggunaan TIK, dan keahlian TIK. Indeks Pembangunan TIK memiliki skala 0-10, dimana semakin tinggi nilai indeks menunjukkan pembangunan TIK yang semakin baik di suatu daerah.



Gambar II.46
Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2012-2023
(Sumber: BPS RI, 2024)

Indeks Pembangunan TIK Kalimantan Timur memperlihatkan adanya peningkatan yang cukup konsisten dari tahun ke tahun. Tren kenaikan ini mencerminkan perkembangan infrastruktur TIK, aksesibilitas teknologi, dan kemungkinan peningkatan penggunaan TIK oleh masyarakat di

Kalimantan Timur, yang sejalan dengan perkembangan teknologi digital di tingkat nasional maupun global.

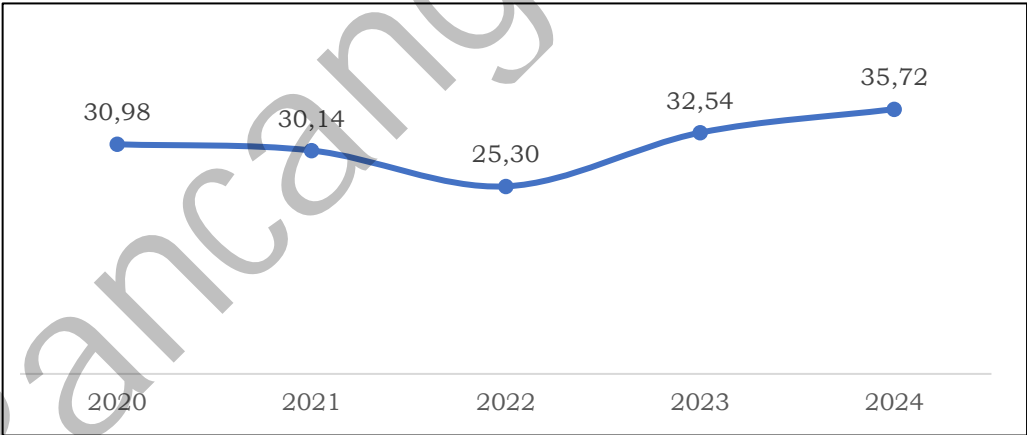
4. Integrasi Ekonomi Domestik dan Global

a. Pembentukan Modal Tetap Bruto

Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) adalah pengeluaran untuk barang modal yang mempunyai umur pemakaian lebih dari satu tahun dan tidak merupakan barang konsumsi. PMTB mencakup bangunan tempat tinggal dan bukan tempat tinggal, bangunan lain seperti jalan

dan bandara, serta mesin dan peralatan. Pengeluaran barang modal untuk keperluan militer tidak dicakup dalam rincian ini tetapi digolongkan sebagai konsumsi pemerintah. PMTB juga merupakan salah satu unsur yang dipakai dalam metode penghitungan PDRB. Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB) merupakan share PMTB terhadap PDRB Provinsi.

Gambar II.47



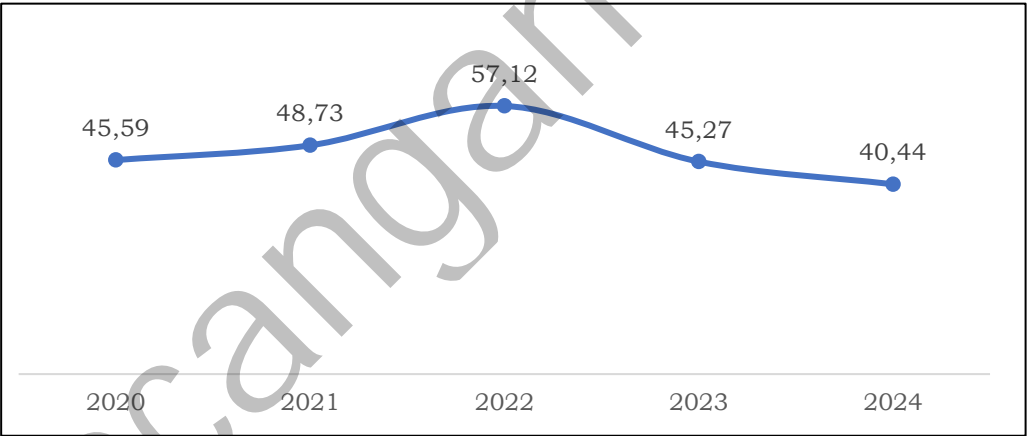
Rasio PDRB Pembentukan Modal Tetap Bruto
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024 (persen)
(Sumber: BPS Provinsi KALTIM, 2025)

Rasio PDRB Pembentukan Modal Tetap Bruto Kalimantan Timur tahun 2020-2024 cenderung mengalami peningkatan mencapai 35,72 persen di tahun 2024. Meningkatnya rasio PDRB Pembentukan Modal Tetap Bruto disebabkan meningkatnya investasi di sektor konstruksi dengan adanya pembangunan IKN dan berbagai proyek pembangunan serta revitalisasi infrastruktur di kabupaten dan kota.

b. Ekspor Barang dan Jasa

Ekspor barang dan jasa memiliki dampak signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Ekspor barang dan jasa dapat memperluas pasar untuk produk- produk domestik di pasar internasional, meningkatkan penjualan, dan membuka peluang bagi pertumbuhan ekonomi.

Ketika ekspor barang dan jasa mengalami peningkatan, maka pendapatan negara juga meningkat karena peningkatan penjualan dan penerimaan deviden. Peningkatan pendapatan ini mendorong investasi, inovasi, dan pertumbuhan sektor-sektor ekonomi yang terkait dengan produksi barang dan jasa yang diekspor. Selain itu, ekspor juga meningkatkan efisiensi dan daya saing industri dalam negeri untuk dapat bersaing di pasar global.



Gambar II.48
Rasio PDRB Net Ekspor Barang dan Jasa
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024 (persen)
(Sumber: BPS Provinsi KALTIM, 2025)

Rasio PDRB Net Ekspor Barang dan Jasa Kalimantan Timur tahun 2020-2024 cenderung mengalami penurunan mencapai 40,44 persen di tahun 2024, namun masih mendominasi pada komponen pengeluaran PDRB. Turunnya Rasio PDRB Net Ekspor Barang dan Jasa dikarenakan mulai meningkatnya nilai PDRB Pembentukan Modal Tetap Bruto dan Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga.

5. Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pertumbuhan Ekonomi

a. Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur

Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur di Kalimantan Timur pada tahun 2023 mencapai angka 7,39 dan mengalami peningkatan pada tahun 2024 sebesar 7,89 yang menandakan bahwa layanan infrastruktur di Kalimantan Timur berada pada kategori yang cukup baik. Nilai ini menggambarkan sebagian besar infrastruktur telah berfungsi optimal, meskipun terdapat beberapa aspek yang memerlukan peningkatan lebih lanjut agar layanan yang diberikan lebih merata dan efisien.

Beberapa infrastruktur di Kalimantan Timur yang masih perlu untuk dilakukan peningkatan kualitas antara lain pada sektor transportasi, perumahan dan permukiman.

1) Infrastruktur Jalan

Berdasarkan data tahun 2024, masih terdapat kondisi jalan tidak mantap (dalam kondisi Rusak Ringan dan Rusak Berat), baik ruas jalan yang merupakan kewenangan pusat, provinsi maupun kabupaten/kota. Kondisi ini membutuhkan perhatian untuk dilakukan peningkatan. Sedangkan kondisi yang sudah mantap harus terus dilakukan pemeliharaan untuk meningkatkan kelancaran lalu lintas dan keamanan bagi pengguna jalan.

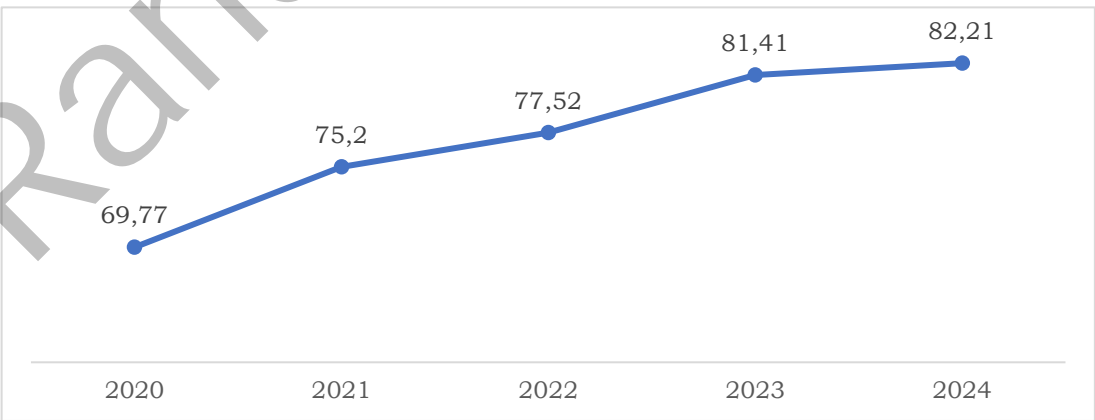
Tabel II.51
Panjang Jalan Menurut Status dan Kondisi
di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024

No	Status Jalan	Baik (Km)	Sedang (Km)	Rusak Ringan (Km)	Rusak Berat (Km)	Total Panjang Jalan (Km)
1	Paser	176,16	75,15	102,96	650,92	1.005,19
2	KUBAR	643,42	260,74	509,12	110,16	1.523,44
3	KUKAR	524,86	827,79	490,96	349,42	2.193,02
4	KUTIM	234,79	55,85	78,62	736,50	1.105,77
5	Berau	395,43	280,21	26,04	984,40	1.686,08
6	PPU	302,68	25,13	37,75	655,49	1.021,46
7	Mahulu	90,25	7,63	155,6	484,05	737,59
8	Balikpapan	362,8	86,85	21,92	29,57	501,18
9	Samarinda	726,53	39,60	50,05	65,12	881,30
10	Bontang	90,14	62,64	39,59	2,96	195,34
11	Kalimantan Timur	321,38	450,46	55,55	111,46	938,85
12	Nasional	285,30	1.284,46	136,41	100,58	1.806,76

Sumber: Dinas PUPRPERA Provinsi KALTIM, 2024

Capaian panjang jalan provinsi dalam kondisi mantap terus meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2020, presentase jalan dalam kondisi mantap hanya mencapai 69,77%, sementara pada tahun 2024 telah mencapai 82,21%. Faktor pendorong meningkatnya capaian jalan mantap adalah terus dilakukannya perbaikan serta pemeliharaan jalan provinsi oleh Bidang Bina Marga dan Unit Pelaksanaan Teknis Daerah (UPTD) Pemeliharaan Infrastruktur Dinas PUPR & PERA. Selain untuk meningkatkan kemantapan jalan, penanganan jalan diprioritaskan untuk mendukung kawasan - kawasan perekonomian Kalimantan Timur, seperti ruas jalan Batas Kutim - Talisayan dan ruas jalan Talisayan - Tanjung Redeb yang mendukung pengembangan sektor perkebunan, pertanian dan pariwisata. Serta ruas jalan Simp. 3 Kota Bangun - Kota Bangun dan ruas jalan Simp. 3 Sebulu - Muara Kaman yang mendukung pengembangan sektor pertanian.

Sebagai upaya membangkitkan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan, dan keamanan provinsi, pemerintah merencanakan pembangunan ruas jalan baru strategis di Provinsi Kalimantan Timur. Seperti pembangunan ruas jalan Sp. 4 Outer Ring Road IV - Bandara APT. Pranoto, ruas jalan Jembatan Mahulu – Jalan Jakarta (Samarinda), ruas jalan Akses Jembatan Sei. Nibung (Kutim), dan pembangunan ruas jalan daerah perbatasan Tering - Ujoh Bilang (Kubar – Mahulu).



Gambar II.49
Persentase Kemantapan Jalan Tahun 2020-2024
(Sumber: Dinas PUPRPERA Provinsi KALTIM, 2024)

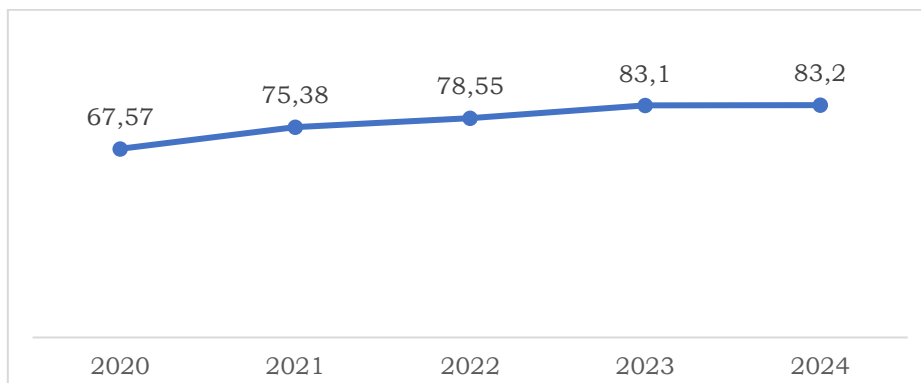
Sampai saat ini rasio panjang jalan terhadap luas wilayah di Kalimantan Timur mencapai 107,07 km/1.000 km² dan masih di bawah

rasio panjang jalan secara nasional, yaitu 291,02 km/1.000 km². Beberapa kendala dan permasalahan yang dihadapi antara lain:

1. Penyebaran penduduk yang tidak merata;
2. Penyediaan lahan pembangunan jalan yang belum sesuai dengan kebutuhan;
3. Pembangunan jalan di perbatasan terkendala fungsi pemanfaatan ruang dan status kawasan lindung;
4. Dukungan pendanaan melalui swasta belum optimal;
5. Kelas jalan arteri tidak mampu mengakomodir tonase kendaraan yang melintas, terutama pada pusat-pusat ekonomi pertanian dalam arti luas, pertambangan dan penggalian, dan industri.

2) Penataan Ruang

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) adalah hasil perencanaan tata ruang yang memuat tujuan, kebijakan, dan strategi pengembangan, serta penetapan rencana struktur ruang wilayah, pola ruang wilayah, dan kawasan strategis. Selain itu, RTRW juga mencakup arahan pemanfaatan ruang serta pengendalian pemanfaatan ruang wilayah. Keberhasilan pencapaian penyelenggaraan penataan ruang dinilai melalui skoring penyelenggaraan penataan ruang. Terbitnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja beserta turunannya, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, penetapan Kawasan Strategis Provinsi tidak lagi dilakukan melalui Perda Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR), melainkan menjadi bagian dari substansi Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Perubahan ini terutama berpengaruh pada peningkatan kinerja pada aspek pelaksanaan penataan ruang di Kalimantan Timur.

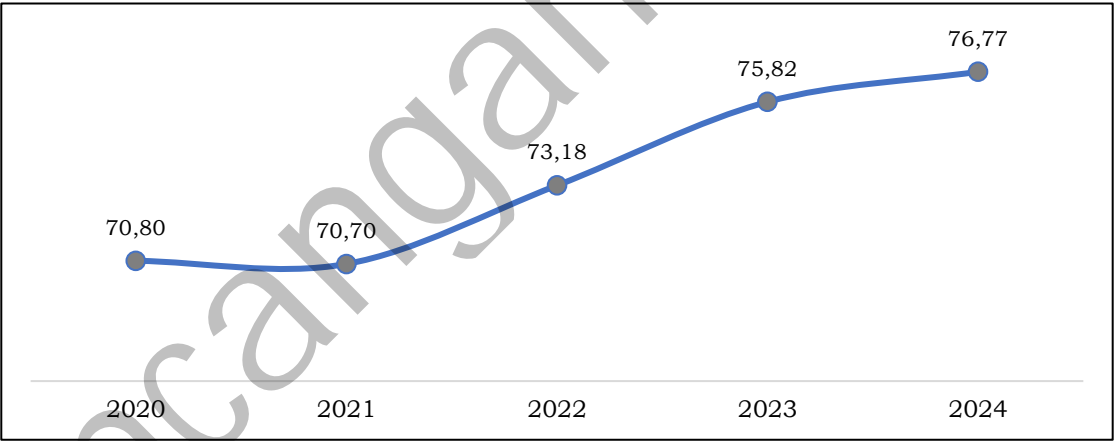


Gambar II.50
Skoring Penyelenggaraan Penataan Ruang
(Sumber: Dinas PUPRPERA Provinsi KALTIM, 2024)

Data menunjukkan bahwa, capaian kinerja skoring penyelenggaraan penataan ruang dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 mengalami peningkatan, hal tersebut disebabkan oleh berbagai upaya yang dilakukan pada Aspek Pembinaan Penataan Ruang, Aspek Pengaturan Penataan Ruang, dan Aspek Pelaksanaan Penataan Ruang.

3) Perumahan dan Permukiman

Perumahan dan permukiman merupakan kebutuhan dasar manusia yang dijamin konstitusi. Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh layanan kesehatan.



Gambar II.51
Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Hunian Layak di Kalimantan Timur Tahun 2020-2024
(Sumber: BPS RI, 2025)

Peningkatan persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian layak, menandakan bahwa selama periode 5 (lima) tahun terakhir Kalimantan Timur mampu secara efektif menyediakan hunian yang layak. Hal ini terutama disebabkan keberhasilan pelaksanaan program kawasan permukiman tahun 2020-2024 melalui Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Dalam rentang waktu tersebut, telah dilakukan perbaikan RTLH sejumlah 26.732 unit melalui berbagai skema pendanaan, antara lain program tanggung jawab sosial

perusahaan (CSR), APBN, APBD Provinsi Kalimantan Timur dan APBD kabupaten/kota

Salah satu tantangan yang dihadapi dalam upaya untuk meningkatkan Akses Rumah Tangga terhadap Hunian Layak adalah permasalahan inkonsistensi data RTLH. Masalah lainnya adalah harga bahan baku dan upah pekerja yang relatif tinggi dan ketersediaan sarana dan prasarana permukiman yang layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Penanganan kawasan kumuh merupakan upaya Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk meningkatkan kualitas lingkungan permukiman yang dianggap tidak layak huni. Berdasarkan Permen PU No. 14/PRT/Tahun 2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, terdapat 7 aspek dan 16 variabel yang digunakan untuk mengukur tingkat kekumuhan suatu wilayah. Dari tujuh aspek yang ditetapkan, kekumuhan di Kalimantan Timur utamanya disebabkan oleh aspek kondisi proteksi kebakaran, pengelolaan persampahan, pengelolaan air limbah, drainase lingkungan, dan jalan lingkungan.

Tabel II.52
Luas Kawasan Kumuh Menurut Kewenangan

No.	Kab/Kota	Luas (Ha)			Luas Kewenangan Provinsi Berdasarkan BA Verifikasi	SK Bupati/Walikota
		Pusat	Provinsi	Kab/Kota		
1	Paser	180,74	35,06	8,72	28,74	No. 653/KEP-116/2021
2	KUBAR	933,37	73,56	38,69		No. 592/K.425/2021
3	KUKAR	92,61	25,49	15,5	25,49	No. 105/SK-BUP/HK/2023
4	KUTIM	74,77	310,14	172,03	270,62	No. 600/K.652/2023
5	Berau	0	25,79	2,47		No. 30 Tahun 2020
6	PPU	0	39,4	0		No.593.33/212/2023
7	MAHULU	49,2	22,52	49,98		No. 600/650/K.126/2023
8	Balikpapan	52,99	21,78	29,92	21,78	No. 188.45-203/2023
9	Samarinda	21,43	24,25	24,83	19,13	No. 663/404/HK-KS/XI/2020
10	Bontang	32,8	33,35	7,41	18,3	No. 188.45/509/DPKP2/2020
Kalimantan Timur		1437,91	611,34	349,55		

Sumber: Dinas PUPRPERA Provinsi KALTIM, 2024

Luas kawasan kumuh di Kalimantan Timur tahun 2024 seluas 2.398,8 Ha yang terbagi dalam beberapa kewenangan, yakni kewenangan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Sesuai Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,

penanganan oleh tiga level pemerintahan dilakukan berdasarkan rentang luasan. Pemerintah Pusat memiliki kewenangan untuk penanganan areal kumuh untuk luasan di atas 15 Ha, Pemerintah Provinsi dengan luasan 10-15 Ha, sementara Pemerintah Kabupaten/Kota menangani areal di bawah 10 Ha.

4) Sumber Daya Air

Pengelolaan sumber daya air berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, serta pengendalian daya rusak air. Pengelolaan ini bertujuan untuk menjamin keberlanjutan keberadaan air, ketersediaannya dalam jumlah dan kualitas yang cukup, serta pemanfaatannya secara adil dan berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, ekonomi, dan lingkungan.

Pengelolaan sumber daya air memiliki 5 dimensi kebijakan dan strategi, yakni konservasi, pendayagunaan sumber daya air, pengendalian daya rusak air, peran serta masyarakat, dan sistem informasi sumber daya air. Dimensi pendayagunaan air dan pengendalian daya rusak air masih perlu mendapatkan perhatian lebih lanjut.

Kondisi eksisting penyediaan kapasitas air baku untuk air minum pada tahun 2024 sebesar 11,01 m³/detik, meningkat dibandingkan tahun 2023 sebesar 8,17 m³/detik. Seiring dengan berkembangnya jumlah penduduk dan aktivitas ekonomi, kebutuhan air baku akan terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2045 diperkirakan kebutuhan air baku untuk air minum adalah 23,9 m³/detik. Secara khusus, pada tahun 2024, masih terdapat defisit air baku di Balikpapan, Penajam Paser Utara dan Bontang. Kondisi ini terjadi dikarenakan belum selesainya pembangunan Bendungan Marangkayu, pemanfaatan eks lubang tambang (void) Indominco, Bendung Sungai Bontang, dan belum terkoneksinya pipa transmisi air baku dari Bendungan Sepaku Semoi untuk Kota Balikpapan dan Penajam Paser Utara.

Daerah irigasi sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2015 Tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai. Kriteria pembagian tanggung jawab dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi terbagi ke dalam tiga tingkat

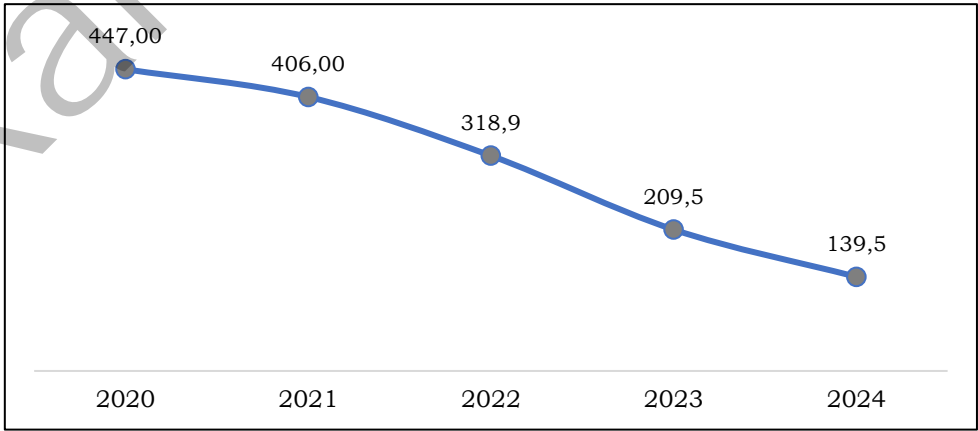
kewenangan, yaitu kewenangan pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota.

Tabel II.53
Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi Berdasarkan Luas Permen PU
No.14/PRT/M/2015, Baku, Potensial dan Fungsional

No	Nama Daerah Irigasi	Luas Areal (Ha)			
		Permen PU No.14/PRT/M/2015	Potensial	Fungsional	Baku
1	DI Biatan	1.779	383,56	263,53	2145
2	DI Labanan	1.100	196,52	196,52	754
3	DI Merancang	1.200	1084,2	191,4	1275
4	DI Semurut	1.089	737,65	309,43	1047
5	DI Marangkayu	1.507	938,19	515,68	1453
6	DI Sungai Buluh	1.089	701,53	84,27	785
7	DI Kaliorang	1.300	1295,8	137,35	1433
8	DI Selangkau	2.987	891,65	123,87	1015,5
Total		12.060	6.229	1.822	9.908

Sumber: Dinas PUPRPERA Provinsi KALTIM, 2024

Data menunjukan Daerah Irigasi Permukaan (DI) yang berada di Kabupaten Berau (DI Biatan, DI Labanan, DI Merancang, DI Semurut) Kabupaten Kutai Timur (DI Kaliorang, DI Selangkau) dan Kabupaten Kutai Kartanegara (DI Marangkayu, DI Sungai Buluh). Secara data tabular maupun kondisi eksisting luasan fungsional areal daerah irigasi masih sangat jauh pemanfaatannya dibandingkan luas baku yang tersedia, sehingga hal ini perlu menjadi perhatian semua stakeholder terkait, khususnya pihak terkait pertanian dan tanaman pangan.

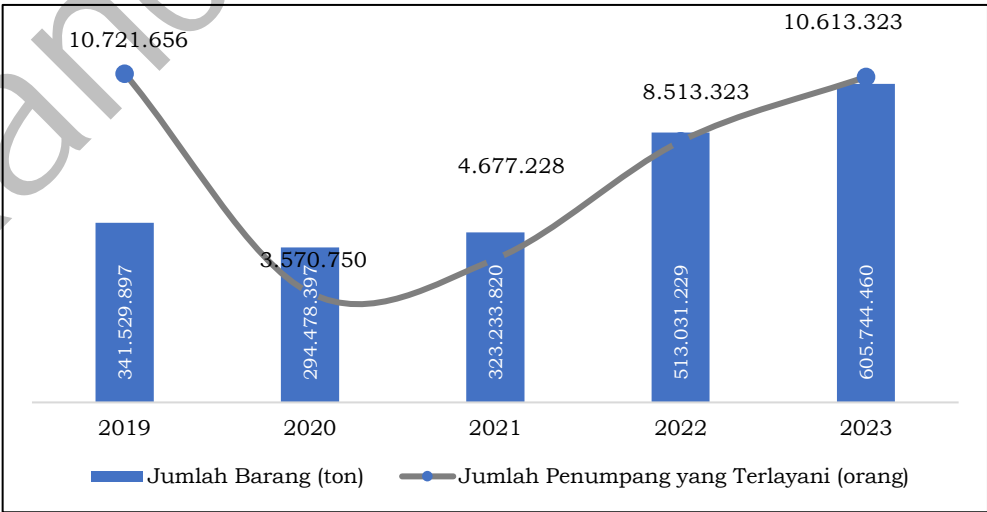


Gambar II.52
Luas Genangan Banjir Perkotaan Tahun 2020-2024 (Ha)
(Sumber: Dinas PUPRPERA Provinsi KALTIM, 2025)

Pada dimensi pengendalian daya rusak air, prioritas penanganannya adalah pengurangan luas genangan banjir. Penanganan banjir diprioritaskan pada wilayah perkotaan, yakni Kota Balikpapan, Samarinda dan Bontang yang merupakan Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dan Kawasan Strategis Provinsi (KSP) Kalimantan Timur. Luas genangan banjir Kota Balikpapan, Samarinda dan Bontang dalam 4 (empat) tahun terakhir mengalami penurunan. Kinerja penurunan luas genangan banjir ini terutama dikarenakan adanya kolaborasi yang efektif antar *stakeholders*, baik yang berhubungan dengan penyediaan infrastruktur pengendali banjir maupun peningkatan kesadaran masyarakat. Namun penurunan luas genangan masih fokus pada 3 (tiga) kota utama dan Kota Sangatta yang masuk dalam wilayah Sungai Kewenangan Provinsi Kalimantan Timur, sedangkan kota lainnya belum menjadi prioritas, kedepannya ini perlu menjadi perhatian.

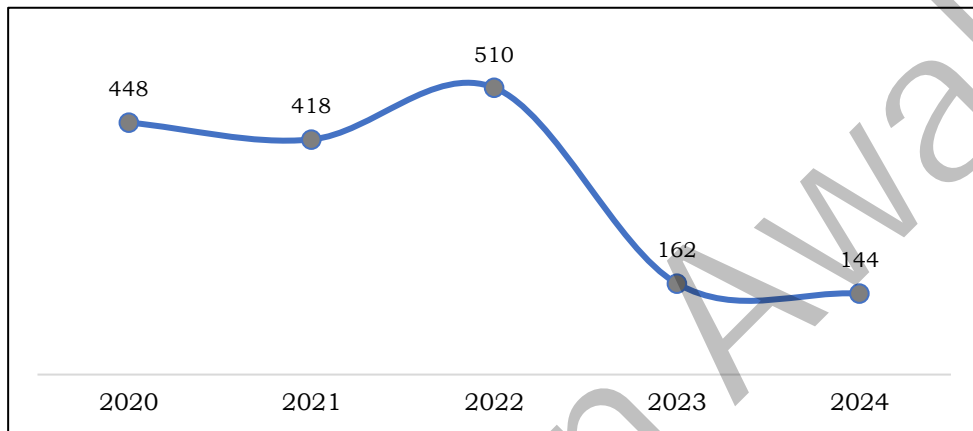
5) Infrastruktur Perhubungan

Berkaitan dengan angkutan penumpang dan barang, baik berupa angkutan darat, laut, dan udara, mengalami kontraksi pada tahun 2020. Kontraksi ini disebabkan beberapa negara melakukan pembatasan layanan transportasi untuk mencegah penyebaran wabah pandemi Covid-19. Sejak tahun 2021, seiring dengan mulai pulihnya perekonomian jumlah penumpang dan barang yang diangkut terus mengalami peningkatan.



Gambar II.53
Jumlah Penumpang yang Terlayani dan Jumlah Barang
Tahun 2019-2023
(Sumber: DISHUB Provinsi KALTIM, 2024)

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, kecelakaan lalu lintas mengalami penurunan. Jumlah kecelakaan tertinggi terjadi pada tahun 2022 dengan 510 kejadian, namun pada tahun 2023 dan 2024 mengalami penurunan yang signifikan, masing-masing dengan 162 dan 144 kejadian. Turunnya jumlah kecelakaan lalu lintas di Kalimantan Timur, salah satunya disebabkan meningkatnya pemasangan fasilitas pengaman jalan pada ruas-ruas jalan provinsi.



Gambar II.54
Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas (Kejadian) Tahun 2020-2024
(Sumber: DISHUB Provinsi KALTIM, 2024)

Angkutan penumpang di Kalimantan Timur utamanya dilayani melalui bandar udara. Provinsi Kalimantan Timur memiliki 6 (enam) bandar udara yang terdiri dari 1 (satu) bandara yang diusahakan oleh PT. Angkasa Pura I yakni Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman (SAMS) Sepinggian di Kota Balikpapan dan 5 (lima) bandara dikelola oleh Unit Pengelola Bandar Udara (UPBU) Kementerian Perhubungan RI yakni Bandara APT Pranoto di Kota Samarinda, Bandara Kalimantan di Kabupaten Berau, Bandara Maratua di Kabupaten Berau, Bandara Dajah Dawai di Kabupaten Mahakam Ulu, dan Bandara Melalan di Kabupaten Kutai Barat. Bandara SAMS Sepinggian, Bandara Kalimantan dan Bandara APT Pranoto telah mampu melayani penerbangan udara menggunakan pesawat berbadan lebar. Selain itu, dalam rangka peningkatan konektivitas dan aksesibilitas serta mendorong pertumbuhan dan pemerataan ekonomi wilayah telah direncanakan pembangunan bandara Ujoh Bilang di Kabupaten Mahakam Ulu dan Bandara Paser di Kabupaten Paser. Kedua rencana bandara ini telah memiliki izin penetapan lokasi dari Kementerian Perhubungan.

Berkaitan dengan angkutan barang, moda transportasi utama yang digunakan adalah angkutan laut. Saat ini pelabuhan yang memiliki fungsi sangat penting bagi Kalimantan Timur adalah Pelabuhan Balikpapan yang merupakan pelabuhan utama (PU) dan Pelabuhan Samarinda yang menjadi pelabuhan pengumpul (PP). Selain itu telah dibangun juga Pelabuhan Maloy yang diharapkan dapat melayani aktivitas ekonomi maupun industri di wilayah Kutai Timur dan sekitarnya. Optimalisasi dan pengembangan ketiga pelabuhan tersebut diharapkan dapat mendukung transformasi ekonomi di Kalimantan Timur. Berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 552/K.784/2022 tentang Rencana Induk Pelabuhan Pengumpan Regional telah ditetapkan 2 (dua) pelabuhan pengumpan regional, 3 (tiga) rencana pelabuhan penumpang regional, 2 (dua) pelabuhan penyeberangan kelas I, dan 5 (lima) pelabuhan sungai dan danau.

Tabel II.54
Hierarki Pelabuhan Nasional Di Kalimantan Timur
Berdasarkan Rencana Induk Pelabuhan Nasional Tahun 2017-2037

No.	Penetapan Lokasi Dan Hierarki Pelabuhan						
	Kab/Kota	No.	Pelabuhan	Hierarki Pelabuhan			
				2017	2022	2027	2037
XXIII. Provinsi Kalimantan Timur							
304	Balikpapan	1	Balikpapan	PU	PU	PU	PU
305	Berau	2	Mantaritip	PR	PR	PR	PR
306	Berau	3	Tanjung Redeb	PR	PP	PP	PP
307	Bontang	4	Lhok Tuan	PP	PP	PP	PP
308	Bontang	5	Tanjung Laut	PP	PP	PP	PP
309	KUKAR	6	Kuala Samboja / Sebulu	PP	PP	PP	PP
310	KUKAR	7	Tanjung Santan	PP	PP	PP	PP
311	KUTIM	8	Maloy	PP	PP	PP	PP
312	KUTIM	9	Sangatta	PP	PP	PP	PP
313	KUTIM	10	Sangkulirang	PR	PR	PR	PR
314	Paser	11	Tana Paser / Pondong	PP	PP	PP	PP
315	PPU	12	Penajam Paser	PP	PP	PP	PP
316	Samarinda	13	Samarinda	PP	PP	PP	PP

Sumber: Kementerian Perhubungan RI, 2022

Tabel II.55
Rencana Induk Pelabuhan Pengumpan Regional
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022

PELABUHAN PENGUMPAN REGIONAL

No	Kabupaten/Kota	Pelabuhan	Hirarki	
1	Berau	Mantaritip	Pengumpan Regional	
2	Kutai Timur	Sangkulirang	Pengumpan Regional	
RENCANA PELABUHAN PENGUMPAN REGIONAL				
1	Balikpapan	Kampung Baru Tengah	Pengumpan Regional	
2	Balikpapan	Somber	Pengumpan Regional	
3	Penajam Paser Utara	Penajam Speedboat	Pengumpan Regional	
PELABUHAN PENYEBERANGAN KELAS I				
No	Kabupaten/Kota	Pelabuhan	Status Pencapaian	Keterangan
1	Balikpapan	Kariangau	Operasi	Kelas I
2	Penajam Paser Utara	Penajam	Operasi	Kelas I
PELABUHAN SUNGAI DAN DANAU				
1	Kutai Barat	Tering	Operasi	Pengumpan
2	Kutai Barat	Melak	Operasi	Pengumpan
3	Mahakam Ulu	Ujoh Bilang	Operasi	Pengumpan
4	Mahakam Ulu	Long Bagun	Operasi	Pengumpan
5	Samarinda	Sungai Kunjang	Operasi	Pengumpan

Sumber: RIPP Prov. Kaltim, 2022

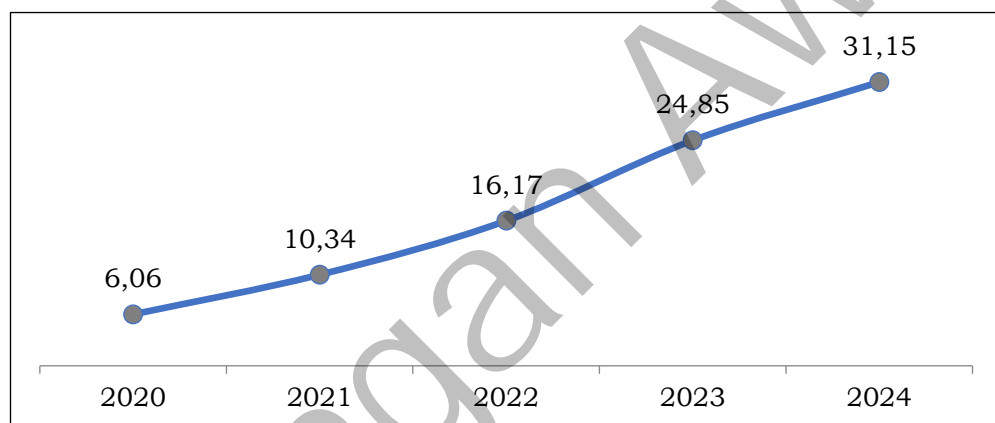
Untuk transportasi darat, di Kalimantan Timur terdapat 2 terminal tipe A yang telah beroperasi untuk melayani rute Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) yaitu Terminal Tipe A Batu Ampar di Balikpapan, dan Terminal Tipe A Samarinda di Samarinda Seberang. Selanjutnya untuk melayani Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) ditetapkan 7 Terminal Tipe B yang tersebar di 6 Kabupaten/Kota yakni di Samarinda, Bontang, Berau, Kutai Timur, Kutai Kartanegara dan Paser.

Berkaitan dengan angkutan massal perkotaan sampai saat ini belum berkembang sesuai dengan harapan. Beberapa hal yang menjadi kendala adalah belum adanya lembaga pengelola transportasi massal yang efektif, keterbatasan infrastruktur perkotaan, pola permukiman yang tersebar dan

kebiasaan masyarakat yang bergantung pada kendaraan pribadi. Dalam upaya untuk menangani kemacetan dan pengurangan emisi dari sektor transportasi, angkutan massal perkotaan perlu untuk dikembangkan, terutama di Kota Balikpapan, Samarinda, dan Bontang.

b. Persentase Desa Mandiri

Pembangunan desa dimaknai sebagai proses untuk meningkatkan kapabilitas penduduk dalam mengelola dan memanfaatkan potensi yang terdapat di desa. Klasifikasi status desa yaitu Desa Mandiri, Desa Maju, Desa Berkembang, Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal.



Gambar II.55
Persentase Desa Mandiri
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024
(Sumber: DPMPD Provinsi KALTIM, 2025)

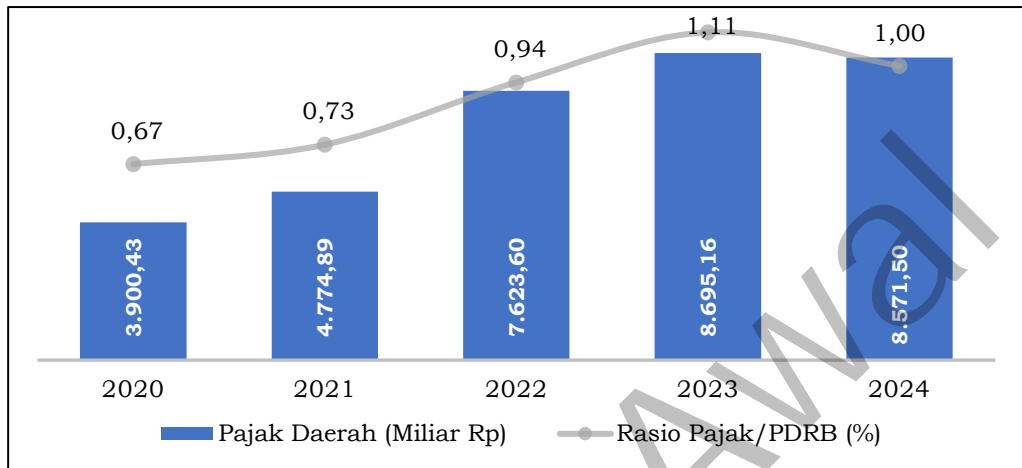
Persentase desa mandiri di Kalimantan Timur dalam kurun waktu 2021-2024 mengalami peningkatan dengan capaian 31,15 persen di tahun 2024. Peningkatan ini disebabkan oleh meningkatnya desa yang memiliki ketersediaan dan akses terhadap layanan dasar, kegiatan sosial, kegiatan ekonomi, lingkungan, aksesibilitas dan administrasi pemerintahan yang sudah sangat baik.

6. Stabilitas Ekonomi Makro

a. Rasio Pajak Terhadap PDRB

Rasio pajak terhadap PDRB menggambarkan rasio penerimaan pajak terhadap PDRB. Semakin tinggi rasio pajak terhadap PDRB menunjukkan semakin besar penerimaan pajak daerah. Rasio pajak daerah yang semakin meningkat mencerminkan peran pemerintah

daerah dalam meningkatkan kapasitas fiskal dan memperkuat sumber pendapatan lokal guna mendukung pembangunan dan pelayanan publik di tengah pertumbuhan ekonomi yang signifikan.



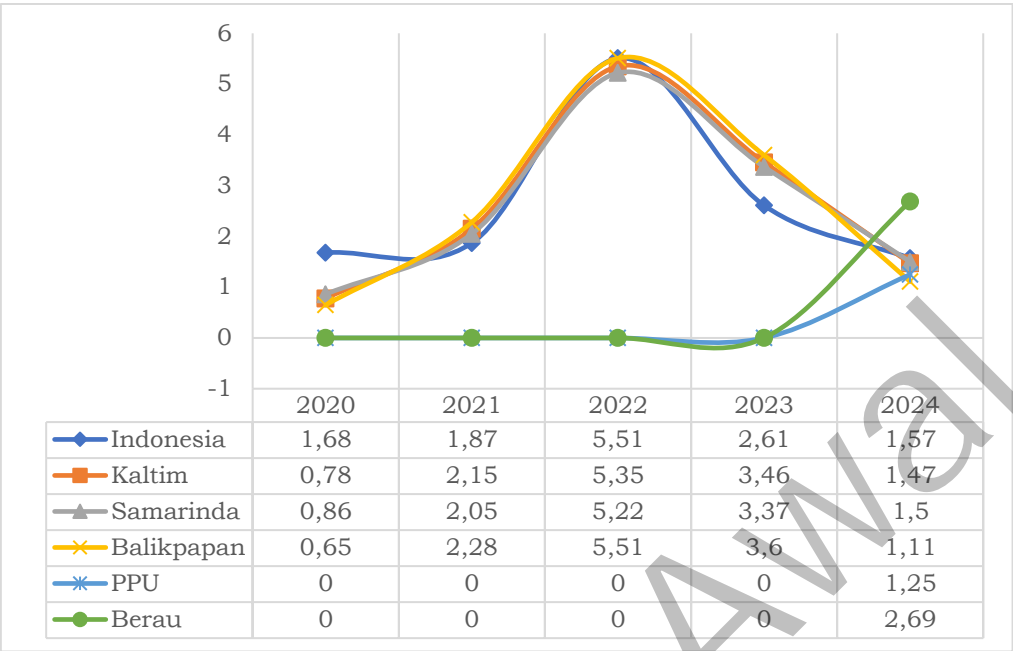
Gambar II.56
Jumlah dan Rasio Pajak Daerah Terhadap PDRB
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020–2023
(Sumber: BAPENDA dan BPS Provinsi KALTIM, 2025)

Rasio pajak terhadap PDRB mengalami tren peningkatan. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya pendapatan pajak daerah. Pendapatan Pajak Daerah Kalimantan Timur mengalami tren peningkatan. Peningkatan pajak ini terutama dipicu oleh proyek pembangunan IKN yang mendorong lonjakan aktivitas ekonomi. Selain itu, tingginya harga komoditas global, terutama batu bara dan migas, meningkatkan aktivitas sektor pertambangan dan energi yang menjadi andalan ekonomi daerah. Peningkatan konsumsi masyarakat seiring pertumbuhan ekonomi juga meningkatkan nilai pajak, seperti pajak kendaraan bermotor dan opsen pajak, serta kebijakan optimalisasi pemungutan pajak dan digitalisasi layanan juga berperan dalam meningkatkan kepatuhan dan penerimaan pajak.

b. Laju Inflasi

Inflasi terjadi karena adanya peningkatan harga yang ditunjukkan oleh naiknya beberapa indeks kelompok pengeluaran, yaitu kelompok transportasi, kelompok makanan, minuman dan tembakau, serta kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya. Sebagai upaya menekan

inflasi daerah dilakukan melalui strategi, yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif.



Gambar II.57
Laju Inflasi di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024 (persen)
(Sumber: BPS Provinsi KALTIM, 2025)

Pada tahun 2020 terjadi pandemi Covid-2019 yang menyebabkan terjadi deflasi disebabkan adanya pembatasan mobilitas masyarakat. Tingginya inflasi pada tahun 2022 disebabkan adanya kenaikan harga BBM yang berimbas pada naiknya harga barang dan adanya peningkatan permintaan bahan pokok menjelang momen natal dan tahun baru. Tahun 2024 laju inflasi sebesar 1,47 persen yang dipengaruhi oleh kenaikan harga pada kelompok pengeluaran kesehatan dan perawatan probadi dan jasa lainnya.

Pada tahun 2024, terdapat wilayah penambahan perhitungan inflasi yaitu Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Berau. Kota Balikpapan pada tahun 2024 mengalami inflasi lebih rendah dibandingkan daerah lainnya yaitu sebesar 1,11 persen, dan tertinggi yaitu di Kabupaten Berau sebesar 2,69 persen. Secara keseluruhan tingkat inflasi Kalimantan Timur berada di bawah inflasi nasional sebesar 1,57 persen.

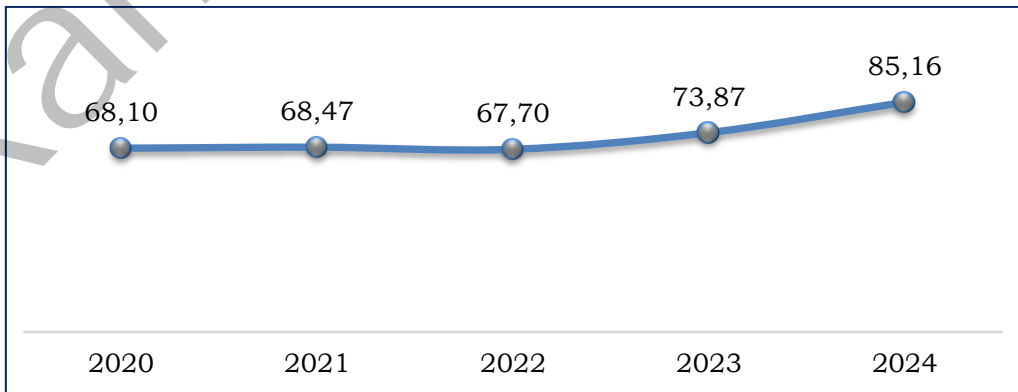
2.4 ASPEK PELAYANAN UMUM

1. Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif

- a. Indeks Reformasi Birokrasi

Reformasi Birokrasi (RB) merupakan sebuah kebutuhan di tengah dinamika kompleksitas global yang menyebabkan tuntutan masyarakat yang semakin tinggi. Tujuan mewujudkan tata kelola pemerintahan melalui RB yang berkualitas pada akhirnya adalah untuk mempercepat tercapainya Pembangunan. Dengan kata lain, RB merupakan sebuah instrumen alat dalam rangka percepatan pencapaian prioritas kerja Pembangunan. RB menjadi salah satu dari lima agenda prioritas Pembangunan Nasional yang menjadi fokus dari pemerintahan. Arahan Presiden tentang RB berkaitan dengan tiga hal utama, yaitu mewujudkan birokrasi yang mampu menciptakan hasil, birokrasi yang mampu menjamin agar manfaat kebijakan itu dirasakan oleh masyarakat (*making delivered*), serta birokrasi yang lincah dan cepat (*agile bureaucracy*). Pelaksanaan RB telah memasuki tiga periode Road Map RB sejak Grand Design RB Tahun 2010–2025 diterbitkan. Berbagai perbaikan telah dilakukan dalam tata kelola pemerintahan, mulai dari penyederhanaan birokrasi, penyetaraan jabatan, pengembangan arsitektur SPBE yang terintegrasi, efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sampai dengan pengintegrasian pelayanan publik dalam mal pelayanan publik yang dilakukan pada Pemerintah Kabupaten Kota.

Progres capaian RB juga dapat dilihat melalui Indeks RB. Indeks RB menggambarkan tingkat kemajuan pemerintah daerah dalam menciptakan birokrasi yang berkualitas. Pada gambar di bawah ini disajikan grafik nilai Indeks RB selama tujuh tahun terakhir.



Gambar II.58
Indeks Reformasi Birokrasi Provinsi Kalimantan Timur
(Sumber: Biro Organisasi Setda Provinsi KALTIM, 2024)

Nilai dari hasil evaluasi Tahun 2023 tidak dapat diperbandingkan dengan nilai hasil evaluasi tahun sebelumnya, karena berdasarkan

Peraturan Menteri PANRB nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 dan peraturan turunannya, terdapat perubahan kerangka logis, komponen, indikator, bobot dan kriteria penilaian yang signifikan. Kenaikan yang signifikan pada tahun 2024 dikarenakan beberapa komponen indikator sudah terlaksana seperti indeks kualitas kebijakan, indeks reformasi hukum yang memiliki nilai istimewa dan sistem kerja dengan penyederhanaan birokrasi mendapatkan nilai yang sempurna sehingga mendongkrak nilai reformasi birokrasi. Namun masih ada beberapa catatan rekomendasi guna peningkatan tata kelola pemerintahan seperti perlunya pemerataan kualitas pelayanan publik dan masih lemahnya persepsi masyarakat terkait tingkat korupsi pemerintah.

b. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2024 menunjukkan nilai sebesar 78,74 dengan predikat “BB”. Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja “Sangat Baik”, yaitu implementasi SAKIP sudah sangat baik pada pemerintah daerah dan sebagian besar unit kerja, ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, serta memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi. Namun masih terdapat komponen yang mengalami penurunan yakni pelaporan kinerja yang dikarenakan masih belum optimalnya laporan kinerja pemda maupun PD dengan analisis benchmark capaian kinerja provinsi lain, analisis efisiensi penggunaan sumber daya, analisis faktor pendukung dalam pencapaian kinerja yang tinggi atau lebih dari 100%.

Tabel II.56
Nilai Akuntabilitas Kinerja Provinsi Kalimantan Timur

KOMPONEN YANG DINILAI		BOBOT	NILAI				
			2020	2021	2022	2023	2024
a.	Perencanaan Kinerja	30	25.92	25.94	26,06	25,89	26,14
b.	Pengukuran Kinerja	30	18.97	18.99	22,50	22,48	22,74
c.	Pelaporan Kinerja	15	12.75	12.76	12,84	12,76	12,56

KOMPONEN YANG DINILAI		BOBOT	NILAI				
			2020	2021	2022	2023	2024
d.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	25	6.21	6.21	16,70	16,76	17,29
e.	Capaian Kinerja	-	13.82	13.92	-	-	-
Nilai Hasil Evaluasi		100	74,89	76,55	78,10	77,89	78,74
Predikat Akuntabilitas Kinerja			BB	BB	BB	BB	BB

Sumber: Surat Kementerian PAN dan RB Nomor: B/414/AA.05/2024 Tanggal 3 September 2024 perihal Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2024.

Hasil evaluasi tahun 2022 “tidak diperbandingkan” dengan hasil evaluasi tahun sebelumnya, karena berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, terdapat perubahan bobot komponen dan sub komponen serta kriteria penilaiannya. Evaluasi tahun ini lebih menitikberatkan pada implementasi akuntabilitas kinerja baik pada level pemerintah daerah maupun level Perangkat Daerah.

c. Indeks Reformasi Hukum

Indeks Reformasi Hukum (IRH) merupakan instrumen untuk mengukur reformasi hukum dengan melakukan identifikasi dan pemetaan regulasi, re-regulasi dan de-regulasi aturan, serta penguatan sistem regulasi. Penghitungan IRH didasarkan pada 4 (empat) variabel yaitu tingkat koordinasi, penguatan kompetensi ASN sebagai perancang peraturan perundang-undangan yang berkualitas, kualitas re-regulasi atau de-regulasi peraturan perundang-undangan berdasarkan hasil reviu serta penataan database peraturan perundang-undangan. Semakin tinggi nilai IRH, menunjukkan semakin berhasilnya pelaksanaan komponen-komponen reformasi hukum.

Berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM, pada tahun 2024 nilai IRH Kalimantan Timur berada pada angka 97,08 dengan kategori AA (Istimewa). Faktor yang menjadi pendukung kenaikan yang signifikan adalah dengan pemenuhan keterisian data yang dibutuhkan dan manajemen pengelolaan tata hukum pemerintah yang meningkat.

d. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk memberikan layanan kepada pengguna, termasuk instansi pemerintah, masyarakat, dan pelaku bisnis. SPBE bertujuan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta meningkatkan kualitas pelayanan publik. Terdapat 4 domain pembentuk indeks SPBE yaitu Kebijakan internal, tata Kelola SPBE, manajemen SPBE dan Layanan SPBE.

Tabel II.57
Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks SPBE	3,14	2,22	2,11	2,91	3,79

Sumber : Diskominfo Provinsi KALTIM, 2025

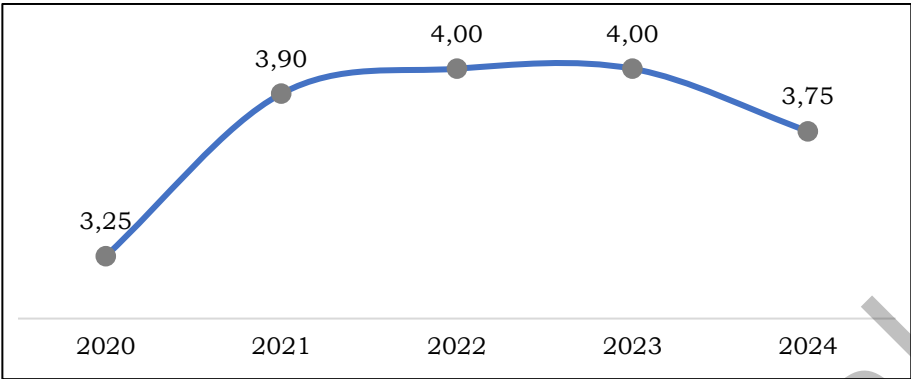
Pada tahun 2021, indeks Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mengalami penurunan nilai menjadi 2,22 dibandingkan tahun sebelumnya berada di angka 3,14. Pada tahun 2024 nilai SPBE Provinsi Kalimantan Timur mengalami peningkatan yang signifikan mencapai 3,79 dan masuk dalam predikat sangat baik. Beberapa area yang masih perlu perbaikan antara lain pada domain kebijakan, tata kelola dan manajemen SPBE.

Selanjutnya untuk tingkat kabupaten/kota, terdapat 2 (dua) daerah yaitu Kota Balikpapan dan Kota Samarinda yang memiliki Indeks SPBE dengan predikat "sangat baik", 6 (enam) daerah yang memiliki indeks SPBE dengan predikat "baik" yakni Kabupaten Paser, Kutai Timur, Penajam Paser Utara, Kutai Kartanegara, Kutai Barat dan Kota Bontang, 3 (tiga) daerah yang memiliki indeks SPBE dengan predikat "cukup" yakni Kabupaten Berau dan Mahakam Ulu.

e. Indeks Pelayanan Publik

Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkup pemerintahan pusat dan daerah. Penilaian IPP diukur menggunakan 6 (enam) aspek yakni Aspek Kebijakan Pelayanan, Aspek Profesionalisme SDM, Aspek

Sarana Prasarana, Aspek Sistem Informasi Pelayanan Publik, Aspek Konsultasi dan Pengaduan serta Aspek Inovasi.



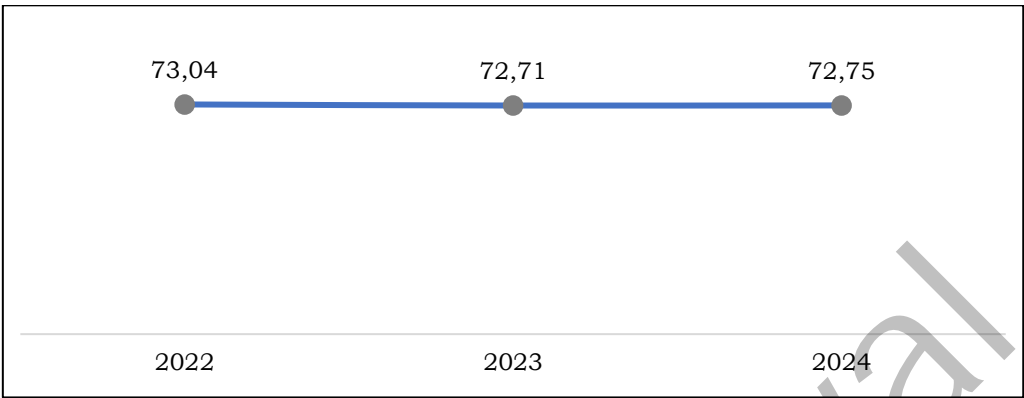
Gambar II.45
Indeks Pelayanan Publik
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024
(Sumber: Biro Organisasi Setda Provinsi KALTIM, 2025)

Indeks Pelayanan Publik Provinsi Kalimantan Timur tahun 2023 masih berada pada nilai 4,00 dari skala 5,00, atau berada pada kategori B (Baik). Namun pada tahun 2024 Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 659 Tahun 2024 tentang Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik pada Lingkup Pemerintah Daerah Tahun 2024, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mendapatkan Indeks Pelayanan Publik senilai 3,75. Belum maksimalnya nilai Indeks Pelayanan Publik di Kalimantan Timur disebabkan oleh faktor belum diterapkannya kebijakan pelayanan namun sesuai dengan peraturan perundang-undangan, belum meratanya kualitas sarana dan prasarana pelayanan publik, serta belum optimalnya penerapan inovasi dalam upaya peningkatan pelayanan publik.

f. Indeks Integritas Nasional

Indeks Integritas Nasional (IIN) adalah indeks yang diukur dengan survei masyarakat yang dibangun untuk memetakan risiko korupsi dan kemajuan upaya pencegahan korupsi yang dilakukan pemerintah pusat dan daerah. Hasil dari IIN dijadikan dasar untuk menyusun rekomendasi peningkatan upaya pencegahan korupsi di lingkup pemerintah pusat dan daerah sesuai karakteristik dan temuan

pemetaan empiris. Penilaian IIN bersumber dari penilaian internal, penilaian eksternal dan penilaian eksper (pakar/ahli).



Gambar II.59
Indeks Integritas Nasional
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022-2024
(Sumber: KPK, 2025)

Berdasarkan data Survei Penilaian Integritas Komisi Pemberantasan Korupsi, nilai IIN Kalimantan Timur tahun 2024 masih pada angka 72,75 dengan kategori tingkat integritas "rentan". Salah satu faktor yang menyebabkan turunnya nilai IIN di tahun 2023 adalah tingginya biaya demokrasi yang tinggi. Pemerintah daerah telah melaksanakan penguatan pengawasan internal, peningkatan kesadaran ASN tentang etika anti-korupsi, dan upaya-upaya lainnya untuk meningkatkan integritas pemerintah.

2. Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional yang Tangguh dan Demokrasi Substansial

a. Persentase Penegakan Perda

Perwujudan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat tidak terlepas dari penegakan produk hukum peraturan daerah. Pada tahun 2022 telah dilakukan upaya penegakan terhadap 3 (tiga) peraturan daerah dan pada tahun 2023 sebanyak 4 (empat) peraturan daerah.

Tabel II.58
**Penegakan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2022 dan Tahun 2023**

No	Tahun	Nomor Peraturan Daerah	Nama Peraturan Daerah
1.	2022	Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017	Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika
		Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014	Pembina Pasar Tradisional dan Pasar Modern
		Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016	Penanganan dan Pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
2.	2023	Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017	Kawasan Tanpa Rokok
		Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022	Pengelolaan Barang Milik Daerah
		Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2017	Jalan Umum, tambang batu bara dan kelapa sawit
		Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012	Perlindungan dan Pemenuhan Hak hak Anak di Provinsi Kalimantan Timur
3.	2024	Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2024	Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Pelindungan Masyarakat
		Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022	Pengelolaan Barang Milik Daerah
		Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022	Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan dan Peredaran Gelap Narkotika, Prekursor Narkotika dan Psikotropika
		Perda Nomor 10 Tahun 2012	Jalan Umum, Tambang Batu Bara dan Kelapa Sawit

Sumber: Satpol PP Provinsi KALTIM, 2025

Belum optimalnya implementasi Peraturan Daerah di Kalimantan Timur disebabkan oleh kurangnya tenaga personil Satpol PP Provinsi Kalimantan Timur baik PPNS maupun anggota di lapangan, kurangnya pemenuhan mutu layanan minimal berupa pemenuhan sarana dan prasarana sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal, kurangnya peningkatan kapasitas SDM baik PPNS, anggota personil Satpol PP dan Satlinmas, kurangnya keterlibatan Perangkat Daerah pemangku Peraturan Daerah didalam pelaksanaan aksi penegakan Perda.

b. Pelaksanaan Aksi HAM

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM), dijelaskan bahwa HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Oleh sebab itu, penting bagi semua pihak untuk melaksanakan Penghormatan, Pemajuan, Perlindungan, Penegakan, dan Pemenuhan HAM (P5 HAM).

Dalam upaya untuk mengimplementasikan P5 HAM, pemerintah telah menyusun Rencana Aksi Nasional HAM (RANHAM) yang memuat sasaran strategis yang digunakan sebagai acuan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota. Evaluasi pelaksanaan RANHAM daerah oleh Pemerintah Pusat diukur dengan indikator Capaian Aksi HAM.

Tabel II.59

Capaian Aksi HAM di Kalimantan Timur Tahun 2020-2024 (persen)

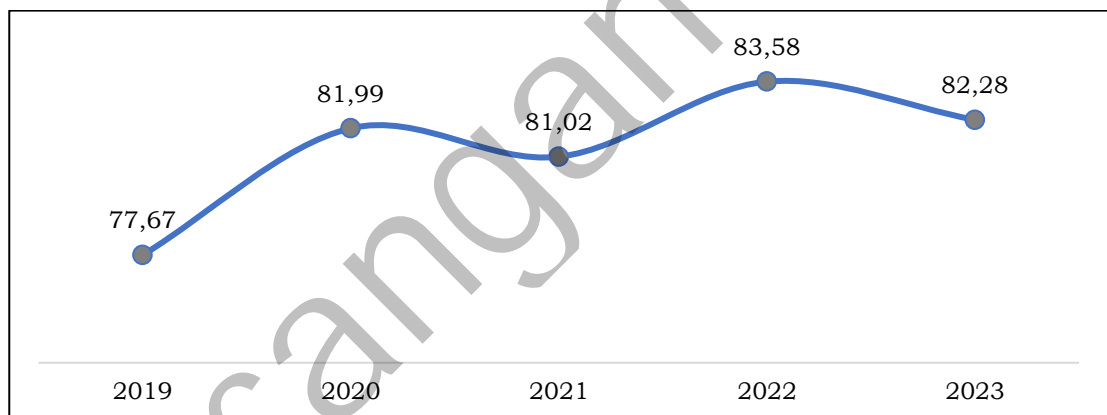
Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Capaian Aksi HAM Daerah	100	61,77	76,21	63,96	64,3

Sumber: Biro Hukum Setda Provinsi KALTIM, 2025

Pada kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, capaian aksi HAM di Kalimantan Timur cenderung mengalami penurunan, dimana capaian tahun 2023 hanya sebesar 63,96 persen dari sebelumnya mencapai 100 persen pada tahun 2020. Kemudian pada tahun 2024 mengalami kenaikan dengan nilai 64,3 persen. Hal yang menyebabkan turunnya capaian aksi HAM daerah adalah belum optimalnya pelaksanaan reviu, kajian, dan perubahan terhadap kebijakan dan peraturan perundang undangan yang diskriminatif terhadap perempuan di tingkat nasional dan daerah. Selanjutnya juga masih kurangnya pemenuhan akomodasi yang layak bagi pekerja penyandang disabilitas di sektor pemerintahan, badan usaha milik negara/daerah dan swasta

c. Indeks Demokrasi

Provinsi Kalimantan Timur, sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, wajib untuk menjalankan sistem demokrasi yang berkeadilan. Jika dilihat dari perhitungan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI), Provinsi Kalimantan Timur memiliki kehidupan berdemokrasi yang baik dengan indeksnya mencapai 82,28 persen pada tahun 2023 dan di level nasional berada pada peringkat kelima setelah Provinsi Bali (85,13), DKI Jakarta (84,57), D.I Yogyakarta (83,88), dan Jawa Barat (83.04). Nilai indeks ini mengalami penurunan sebesar 1,30 poin dibandingkan nilai pada tahun 2022. Dengan capaian tersebut kinerja demokrasi Kalimantan Timur masuk dalam kategori “*high performing democracy*”. Indeks Demokrasi Indonesia Kalimantan Timur masih tetap berada di atas IDI nasional yang mencapai 79,51.



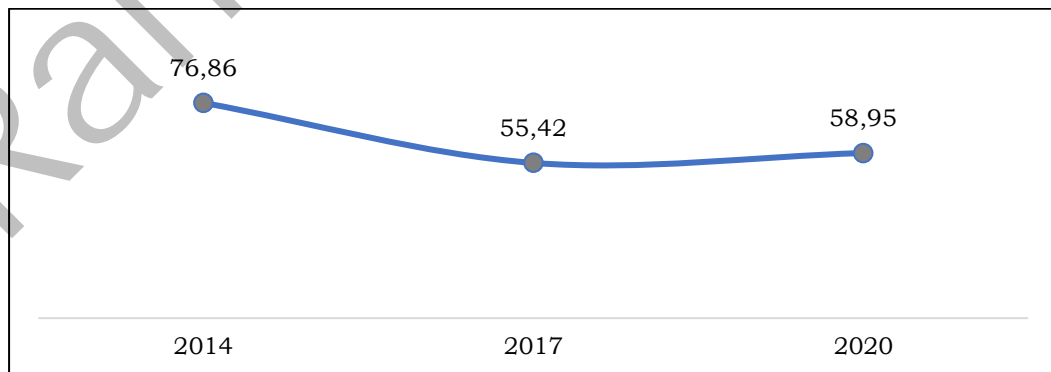
Gambar II.60
Indeks Demokrasi Indonesia
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023
(Sumber: BPS Provinsi KALTIM, 2024)

Pada tahun 2021, Indeks Demokrasi Indonesia menggunakan metode baru, dimana pada metode lama fokus pada demokrasi politik yang hanya mengukur demokrasi politik yang memiliki porsi besar pada *institutional democracy* seperti lembaga pemilu, DPRD, birokrasi, dll. Sedangkan pada metode baru, fokus pada demokrasi lebih luas yang mengurangi porsi ukuran *institutional democracy* dan melibatkan aspek ekonomi politik. Selain itu, pada metode lama terdapat 3 aspek, 11 variabel, dan 28 indikator, sedangkan pada metode baru hanya terdapat 3 aspek dan 22 indikator.

Berdasarkan capaian IDI Kalimantan Timur tahun 2023, masih terdapat beberapa indikator yang nilainya mengalami penurunan signifikan, yaitu aspek kebebasan pada indikator terjaminnya kebebasan berkeyakinan yang mengalami penurunan sebesar 23,60 poin dari tahun 2022 dengan nilai 76,40 dan pada indikator terjaminnya kebebasan berkumpul, berserikat, berekspresi, berpendapat, dan berkeyakinan dalam setiap kebijakan yang mengalami penurunan pada nilai 72,73 atau turun 18,18 dari tahun 2022.

d. Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya

Salah satu indikator yang digunakan sebagai pengukuran kinerja pembangunan sektoral di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat adalah Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya. Indikator ini mencakup beberapa aspek yang meliputi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggal pada siang dan malam hari. Rasa aman yang dimiliki masyarakat sangat mempengaruhi kualitas hidup dan mencerminkan tingkat keamanan di suatu wilayah. Tingginya persentase penduduk yang merasa aman menandakan lingkungan yang kondusif, sedangkan rendahnya persentase bisa menunjukkan adanya kekhawatiran terhadap kriminalitas atau gangguan keamanan lainnya.



Gambar II.61
Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya Tahun 2014–2020
(Sumber: BPS RI, 2024)

Pada kurun waktu tahun 2014–2020, Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya menunjukkan penurunan. Pada tahun 2020 Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya baru mencapai 58,95 persen, atau turun dari tahun 2014 yang sebesar 76,86 persen. Capaian kinerja ini juga berada di bawah capaian Nasional yang sebesar 62,62 persen. Hal ini disebabkan karena belum optimalnya layanan ketenteraman dan ketertiban umum, jumlah pos dan petugas pengamanan di setiap RT, kelurahan ataupun kecamatan masih kurang, minimnya pelaksanaan sosialisasi, informasi pengetahuan kepada masyarakat terhadap layanan trantibumlinmas dan belum optimalnya penerapan sanksi terhadap pelaku pelanggaran ketenteraman dan ketertiban umum.

3. Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan

Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) adalah refleksi tingkat produktivitas, kemajuan, persaingan dan kemandirian suatu daerah. Pentingnya IDSD sebagai alat untuk menilai keberhasilan suatu daerah untuk dapat bersaing dengan daerah lain dan mendukung daya saing nasional. Pengukuran IDSD menggunakan 4 (empat) komponen dasar daya saing yang diadopsi menjadi 4 (empat) kerangka pengukuran, yaitu lingkungan pendukung, sumber daya manusia, pasar, dan ekosistem inovasi. Keempat komponen daya saing ini dielaborasi ke dalam 12 pilar daya saing, diantaranya pilar institusi, pilar infrastruktur, pilar adopsi TIK, pilar stabilitas ekonomi makro, pilar kesehatan, pilar pasar tenaga kerja, pilar kapabilitas inovasi dan lain-lain.

Berdasarkan data yang dirilis oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional tahun 2023, Indeks Daya Saing Daerah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2023 berada pada skor 3,30 atau meningkat dibandingkan tahun 2022 yang sebesar 3,27. Meskipun mengalami peningkatan, namun skor IDSD Kalimantan Timur masih berada di bawah skor IDSD Nasional yang sebesar 3,44. Terdapat beberapa pilar inovasi daerah yang memerlukan perhatian, yaitu pilar infrastruktur, pilar pasar produk, pilar sistem keuangan, pilar dinamisme bisnis dan pilar kapabilitas inovasi.

4. Kinerja Setiap Urusan Pemerintahan Daerah

Indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang disebut juga Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (IKD) merupakan instrumen pengukuran kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi yang termasuk ke dalam Indikator Kinerja Urusan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 dan Draft Kepmendegari IKK. Adapun Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (IKD) dimaksud antara lain adalah sebagai berikut :

Tabel II.60
Indikator Kinerja Daerah (IKD)
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024

No	Indikator Kinerja Daerah (IKD)	Satuan	Tahun 2024
1	2	3	4
I	ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI		
1	Indeks Ketahanan Pangan	poin	78.61
2	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan	%	7,40
3	Konsumsi Listrik Per Kapita	kWh/kapita	1,679
4	Akses Rumah Tangga terhadap Konsumsi Air Minum	%	83.71
5	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	IKLH	76.63
6	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	% RT	4.88
7	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	%	17,59
8	Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah	% RT	60,9
9	Penurunan Intensitas Emisi GRK	%	49,19
10	Indeks Risiko Bencana	poin	136.11
11	Indeks Ketahanan Daerah	Poin	0.53
12	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	1.93
13	Rasio Penduduk	%	107.27
14	Kepadatan Penduduk	Orang/m2	32
II	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT		
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	6.17
2	Tingkat Kemiskinan	%	5.78
3	PDRB Per Kapita	Rp Juta	212.18
4	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	5.14
5	Indeks Gini	angka	0.321
6	Indeks Modal Manusia	angka	0.56*
7	Umur Harapan Hidup	tahun	74.94
8	Indeks Keluarga Sehat	indeks	0,286*
9	Prevalensi Stunting	%	22,90*
10	Rata-Rata Lama Sekolah	tahun	10.02
11	Harapan Lama Sekolah	tahun	14.03
12	Angka Literasi/Numerasi	%	
13	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	indeks	78.34
14	Indeks Literasi Digital	angka	3,62*

No	Indikator Kinerja Daerah (IKD)	Satuan	Tahun 2024
15	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	%	45,32*
16	Indeks Kerukunan Umat Beragama	skor	78.19
17	Indeks Pembangunan Kebudayaan	angka	57,56*
18	Indeks Perlindungan Anak	angka	64,04*
19	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	0-100	79,48*
20	Indeks Ketimpangan Gender	poin	0,414*
21	Indeks Pembangunan Pemuda	indeks	59,17*
22	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun Ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi	%	13,11*
III	ASPEK DAYA SAING DAERAH		
1	Angka Ketergantungan	%	41.16
2	Rasio PDRB Industri Pengolahan	%	18.26
3	Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum	%	1.12
4	Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif	%	5,61*
5	Rasio Kewirausahaan	%	2,04*
6	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	67.07
7	Indeks Inovasi Daerah	skor	61.74
8	Indeks Ekonomi Hijau	Rupiah/Jiwa	63,04*
9	Indeks Ekonomi Biru Indonesia	skor	29,07*
10	Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer	%	12.14
11	Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi	0-10	6,66*
12	Pembentukan Modal Tetap Bruto	% PDRB	35.72
13	Ekspor Barang dan Jasa	% PDRB	40.44
14	Indeks Infrastruktur/Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur	indeks	7.89
15	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak	%	76.77
16	Persentase Desa Mandiri	%	31,15
17	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	%	1
18	Tingkat Inflasi	%	1.47
IV	ASPEK PELAYANAN UMUM		
1	Indeks Reformasi Hukum		97.08
2	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	poin	3,79
3	Indeks Pelayanan Publik	angka	3.75
4	Indeks Integritas Nasional	angka	72.75
5	Persentase Penegakan Perda	%	
6	Persentase Capaian Aksi HAM	%	64.3
7	Indeks Demokrasi Indonesia	%	82,28*
8	Indeks Rasa Aman	angka	n/a
9	Indeks Ketenteraman dan Ketertiban	angka	n/a
10	Indeks Daya Saing Daerah	nilai	3,30*
11	Nilai AKIP	Nilai	78,50
12	Sistem Merit	Skor	271*
13	Indeks Pengelolaan Aset	indeks	2,26
	INDIKATOR KINERJA KUNCI		
A	PENDIDIKAN		

No	Indikator Kinerja Daerah (IKD)	Satuan	Tahun 2024
1	Persentase anak usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah (APS)*	%	81,84
2	Persentase anak usia 4-18 tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus (APS)*	%	53,75
B	KESEHATAN		
1	Rasio daya tampung rumah sakit rujukan di Provinsi	%	1,72
2	Persentase RS rujukan Provinsi yang terakreditasi	%	100
3	Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana	%	100
4	Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB Provinsi	%	100
5	Angka kematian ibu (AKI)*	angka	84
6	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek pada balita)*	%	22.9
C	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		
1	Rasio luas kawasan pemukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir	%	74.19
2	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS kewenangan Provinsi	%	77.35
3	Rasio luas daerah irigasi kewenangan Provinsi yang dilayani oleh jaringan irigasi	%	64.44
4	Persentase peningkatan perlindungan kawasan permukiman rawan banjir*	%	82.21
5	Persentase peningkatan perlindungan kawasan dari abrasi dan banjir rob*	%	60.35
6	Persentase luas layanan irigasi multikomoditas*	%	n/a
7	Persentase peningkatan kapasitas yang terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kabupaten/kota*	%	n/a
8	Persentase peningkatan rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik layak dan aman)*	%	Layak : 84,23% Aman : 4,88%
9	Tingkat kemantapan jalan*	%	78.72
10	Persentase tenaga kerja konstruksi kualifikasi ahli*	%	45.00
11	Persentase penyelesaian kasus pelanggaran pemanfaatan ruang di daerah provinsi*	%	n/a
D	PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		
1	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni*	%	n/a
2	Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni*	%	n/a
3	Persentase Luas kawasan kumuh 10 – 15 Ha yang ditangani*	%	84.84
4	Persentase permukiman yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)*	%	n/a

No	Indikator Kinerja Daerah (IKD)	Satuan	Tahun 2024
E	KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT		
1	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	%	100
2	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan*	%	100
3	Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal	%	n/a
4	Persentase penanganan pra bencana	%	n/a
5	Persentase penanganan tanggap darurat bencana*	%	100
6	Persentase penyelenggaraan Tibumtranmas*	%	n/a
7	Persentase penanganan pasca bencana*	%	n/a
F	SOSIAL		
1	Persentase pekerja sosial/tenaga kesejahteraan sosial yang melaksanakan pelayanan sosial di dalam panti rehabilitasi sosial*	%	n/a
2	Persentase pekerja sosial/tenaga kesejahteraan sosial yang melaksanakan pelayanan sosial di dalam panti rehabilitasi sosial bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA*	%	n/a
3	Persentase pekerja sosial/tenaga kesejahteraan sosial dan/atau relawan sosial yang melaksanakan penanganan korban bencana provinsi pada masa tanggap darurat dan pasca bencana sesuai standar*	%	n/a
4	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti*	%	100
5	Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya didalam panti*	%	100
6	Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti*	%	100
7	Persentase gelandang dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti*	%	100
8	Persentase pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti*	%	n/a
9	Persentase penerima manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasar*	%	n/a
10	Persentase penerima manfaatn yang meningkat kemandirian ekonomi*	%	n/a
11	Persentase korban bencana alam dan/atau non alam yang terpenuhi kebutuhan dasar pada saat dan setelah tanggap darurat bencana*	%	100
G	TENAGA KERJA		
1	Persentase kabupaten/kota yang menyusun rencana tenaga kerja*	%	80
2	Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi	%	94.75
3	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	%	29,10*

No	Indikator Kinerja Daerah (IKD)	Satuan	Tahun 2024
4	Persentase perusahaan yang menerapkan tata Kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	%	69.2
5	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	%	47.82
6	Persentase perusahaan yang menerapkan peraturan perundang-undangan bidang ketenagakerjaan	%	85.33
7	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan di dalam negeri*		
H	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		
1	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	%	28,67
2	Rasio kekerasan terhadap anak per 10.000 anak	%	0.54
3	Rasio kekerasan terhadap perempuan per 10.000 anak	%	22.88
4	Persentase perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan komprehensif*	%	n/a
5	Persentase anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif*	%	n/a
6	Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)*	indeks	79,71*
I	PANGAN		
1	Persentase Jumlah Cadangan Pangan/ Rasio jumlah cadangan beras pemerintah daerah (CBPD) terhadap target jumlah CBPD berdasarkan Perbadan 15/2023	%	372.73
2	Skor pola pangan harapan*	skor	89.1
3	Persentase daerah rentan rawan pangan*	%	0
4	Persentase pangan segar yang memenuhi persyaratan dan mutu keamanan pangan*	%	78.2
J	PERTANAHAN		
1	Persentase tahapan persiapan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yang diselesaikan tepat waktu*	%	n/a
2	Persentase terselesaikannya kasus tanah garapan belum bersertipikat*	%	n/a
3	Tersedianya tanah obyek <i>landreform</i> (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari tanah kelebihan maksimum tanah absentee*		n/a
4	Persentase luas lokasi konsolidasi tanah*	%	n/a
5	Ditetapkannya hak atas tanah dalam penguasaan dan pengelolaan pemerintah daerah*		n/a
K	LINGKUNGAN HIDUP		
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi	%	76.63
2	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi*	%	96.91
3	Indeks kinerja pengelolaan sampah*	indeks	49,34
L	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		

No	Indikator Kinerja Daerah (IKD)	Satuan	Tahun 2024
1	Penyajian data kependudukan skala Provinsi dalam satu tahun	%	100
2	Pemanfaatan data kependudukan	%	45
3	Persentase kepemilikan identitas kependudukan digital*	%	6
4	Persentase kepemilikan kartu identitas anak*	%	76
5	Persentase akta kematian yang diterbitkan bagi yang melaporkan*	%	100
6	Persentase akta kelahiran yang diterbitkan bagi yang melaporkan*	%	100
7	Persentase akta perkawinan yang diterbitkan bagi yang melaporkan*	%	100
8	Persentase akta perceraian yang diterbitkan bagi yang melaporkan*	%	100
M	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA		
1	Persentase pengentasan desa tertinggal	%	20
2	Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri	%	6,3
3	Persentase fasilitasi penataan desa*	%	n/a
4	Persentase fasilitasi kerjasama desa*	%	n/a
5	Persentase fasilitasi pemberdayaan lembaga kemasyarakatan desa (LKD)*	%	n/a
6	Persentase fasilitasi pemberdayaan lembaga adat desa dan lembaga masyarakat hukum adat*	%	n/a
N	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		
1	Angka Kelahiran Total (<i>Total Fertility Rate</i> /TFR)*	%	2,17
2	Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (<i>Age Spesific Fertility</i>)*	%	18,2
3	Angka prevalensi kontrasepsi Modern / <i>Modern Contraceptive</i> (mCPR)*	%	57.1
4	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)*	%	15,80
O	PERHUBUNGAN		
1	Rasio konektivitas provinsi	Poin	0.846
2	Konektivitas Darat*	Rasio	0.44
3	Persentase kelengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal*	%	n/a
4	Konektivitas Laut*		n/a
P	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		
1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	%	100
2	Persentase Layanan Publik yang Diselenggarakan Secara Online Dan Terintegrasi	%	100
3	Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Provinsi	%	84,33

No	Indikator Kinerja Daerah (IKD)	Satuan	Tahun 2024
4	Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik pemerintah daerah (survei)*	%	n/a
Q	KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH		
1	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	%	17
2	Meningkatnya Usaha Kecil yang menjadi wirausaha	%	100
3	Pertumbuhan volume usaha koperasi*	%	n/a
4	Persentase usaha kecil yang bertransformasi dari informal ke formal*	%	n/a
5	Pertumbuhan wirausaha*	%	n/a
6	Proporsi UKM menjalin kemitraan dan ekspor*	%	n/a
R	PENANAMAN MODAL		
1	Persentase peningkatan investasi di provinsi	%	24,46*
2	Realisasi total terhadap target investasi*		n/a
S	KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA		
1	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	%	0.37
2	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	%	1.49
3	Peningkatan Prestasi Olahraga (Medali)	Medali	232
T	STATISTIK		
1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	%	100
2	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	%	100
3	Indeks Pembangunan Statistik*	indeks	2.68
U	PERSANDIAN		
1	Tingkat keamanan informasi pemerintah	%	66.51
2	Tingkat kesiapan pengamanan informasi pemerintah daerah*	%	67
V	KEBUDAYAAN		
1	Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan	%	50
2	Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang ditetapkan	%	35,8
3	Persentase Cagar budaya yang Dilestarikan	%	27,7
W	PERPUSTAKAAN		
1	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat*	skor	69.53
2	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	indeks	78.34
X	KEARSIPAN		
1	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	%	74.88
2	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepetingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	%	36,66

No	Indikator Kinerja Daerah (IKD)	Satuan	Tahun 2024
Y	KELAUTAN DAN PERIKANAN		
1	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap*	Ton	190.000
2	Persentase kepatuhan pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	%	105.72
3	Jumlah produksi perikanan budidaya*	ton	200.000
4	Luas kawasan konservasi*		
5	Angka konsumsi ikan*	Kg/kapita/tahun	58,51*
Z	PARIWISATA		
1	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	%	23.02
2	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke provinsi	%	-28.32
3	Tingkat hunian akomodasi	%	26.73
4	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	%	1.15
5	Persentase pelaku ekonomi kreatif yang memiliki kekayaan intelektual*	%	n/a
AA	PERTANIAN		
1	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	Ton/Ha	3.7
2	Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular	%	370.3
3	Peningkatan produksi tanaman pangan*	%	n/a
4	Peningkatan produksi hortikultura*	%	n/a
5	Peningkatan produksi komoditas peternakan*	%	n/a
BB	KEHUTANAN		
1	Peningkatan akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui Perhutanan Sosial	%	163.64
2	Persentase kerusakan hutan pertahun (deforestasi)	%	0.16
3	Persentase Luas Lahan Kritis yang Direhabilitasi	%	2.07
CC	ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL		
1	Persentase Usaha Tambang Sesuai Kewenangan Provinsi yang Tidak Melanggar Perda	%	80.56
2	Persentase Desa Yang Teraliri Listrik	%	100
DD	PERDAGANGAN		
1	Pertumbuhan Nilai Ekspor Non Migas	%	-18.52
2	Persentase penanganan pengaduan konsumen*	%	100
3	Persentase komoditi potensial yang sesuai dengan ketentuan berlaku	%	100
4	Tertib Usaha	%	100
5	Persentase kinerja realisasi pupuk	%	69
6	Persentase Barang Beredar Yang Diawasi Yang Sesuai Dengan Ketentuan Perundang-Undangan	%	100
7	Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok	%	1.06
8	Nilai ekspor barang*		
EE	PERINDUSTRIAN		
1	Pertambahan Jumlah Industri Besar di Provinsi	%	11.61

No	Indikator Kinerja Daerah (IKD)	Satuan	Tahun 2024
2	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	%	116,78*
3	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Besar yang dikeluarkan oleh instansi terkait	%	100
4	Persentase realisasi investasi sektor industri dan kawasan industri*	%	n/a
5	Tersedianya informasi industri secara lengkap, akurat dan terkini*	%	95
FF	PENGADAAN		
1	Persentase Jumlah Pengadaan yang Dilakukan Dengan Metode Kompetitif	%	43.56
2	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	%	73,42*
3	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah	%	143,07*
4	Tingkat kematangan UKPBJ*		Level 3
GG	SEKRETARIAT DPRD		
1	Ketepatan penetapan perda APBD tahun n*		n/a
2	Persentase penetapan Ranperda tahun n*	%	n/a
HH	KEUANGAN		
1	Rasio Belanja Pegawai Di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan	%	5.09
2	Rasio PAD	%	46.32
3	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	%	15.36
4	Opini Laporan Keuangan	Opini	WTP
5	Budget execution: Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	%	1.02
6	Revenue mobilization: Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	%	3.64
7	Assets Management	Aspek	4
8	Cash Management: Rasio Anggaran Sisa Terhadap Total Belanja Dalam APBD Tahun Sebelumnya	%	5.73
9	Persentase belanja pegawai di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD*	%	n/a
10	Persentase alokasi belanja infrastruktur pelayanan publik*	%	n/a
11	Persentase realisasi anggaran belanja urusan wajib pelayanan dasar*	%	n/a
12	Persentase penurunan SILPA*	%	n/a
13	Persentase penambahan nilai aset tetap*	%	n/a
14	Persentase PAD terhadap pendapatan daerah*	%	46.32
II	KEPEGAWAIAN		
1	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	65.94

No	Indikator Kinerja Daerah (IKD)	Satuan	Tahun 2024
2	Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	27.63
3	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	84
JJ	PENGAWASAN		
1	Tindaklanjut rekomendasi BPK tahun anggaran n-1*	%	72
2	Maturitas Penyeleggaran Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)*	Level	Level 3
3	Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)*	Level	Level 3
KK	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN		
1	Persentase rekomendasi kebijakan pembangunan daerah yang dijadikan sebagai landasan dalam implementasi pembangunan*	%	n/a
2	Persentase produk inovasi yang dimanfaatkan*	%	n/a

Ket :

- 1. IKD terdiri dari Permendagri 18 Tahun 2020 dan Draft Kemendagri IKK;
- 2. IKD bertanda * adalah indikator dari Draft Kemendagri IKK;
- 3. Angka bertanda * adalah data tahun 2023.

BAB III

GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

3.1. Gambaran Keuangan Daerah

Gambaran keuangan daerah tergambarkan melalui kinerja pelaksanaan kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah yang mencakup kegiatan perencanaan dan penganggaran, penatausahaan serta pertanggung-jawaban keuangan daerah sebagai upaya optimalisasi penerimaan daerah untuk percepatan pelaksanaan program pembangunan daerah melalui Pengeluaran Daerah. Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan untuk menjaga 3 (tiga) pilar tata Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif dan rangka pelaksanaan pembangunan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

Secara umum peran pendapatan daerah dalam pengelolaan keuangan daerah sebagai salah satu sumber penerimaan daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 1 ayat 4 menyebutkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Dalam menunjang efektivitas pelaksanaan pemerintahan daerah dalam pembangunan, pemerintah menetapkan APBD dengan merumuskan strategi kebijakan pendapatan dan belanja dalam rangka optimalisasi penerimaan pendapatan dan belanja yang disesuaikan dengan kondisi makro ekonomi daerah. Strategi yang ditempuh diderivasi ke dalam struktur APBD yang dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

Untuk menentukan kerangka pendanaan pembangunan daerah di masa yang akan datang dengan mempertimbangkan tantangan, peluang dan hambatan yang akan dihadapi diperlukan analisis pengelolaan keuangan daerah. Dalam melakukan analisis perlu memahami struktur APBD yang terdiri dari komponen Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan

Pembiayaan Daerah yang disertai dengan jenis objek masing-masing komponen tersebut.

3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD

Komponen APBD Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2020 terdapat perbedaan karena terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyempurnakan aturan Pengelolaan Keuangan Daerah yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005. Komponen APBD pada tahun 2020 terdiri atas: (1) Komponen Pendapatan Daerah, yang di dalamnya terdapat Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah; (2) Komponen Belanja Daerah, yang di dalamnya terdapat Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung; dan (3) Komponen Pembiayaan Daerah, yang di dalamnya terdapat Penerimaan Pembiayaan Daerah, dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah.

Sedangkan perbedaan komponen APBD Provinsi tahun 2020 dengan APBD Provinsi tahun 2021-2024 terletak pada: 1) Komponen Pendapatan Daerah, yang di dalamnya terdapat Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah; dan (2) Komponen Belanja Daerah, yang di dalamnya terdapat Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer. Namun dalam penyajian pendapatan dan belanja daerah tahun 2020-2024 telah disesuaikan penyajiannya sesuai Peraturan Pemerintah No. 12 tahun tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Secara umum realisasi kinerja APBD Provinsi Kalimantan Timur pada kurun waktu 5 tahun terakhir menunjukkan realisasi penerimaan daerah berfluktuatif dengan rata-rata realisasi mencapai 110,18 persen dengan capaian terendah pada tahun 2023 sebesar 96,26 persen. Sedangkan realisasi pengeluaran daerah berfluktuatif dengan rata-rata realisasi mencapai 88,78 persen serta meningkat pada tahun 2024 sebesar 92,51 persen. Kinerja pelaksanaan APBD pada realisasi belanja daerah yang cenderung lebih rendah daripada pendapatan daerah dikarenakan adanya efisiensi belanja daerah dan beberapa kegiatan fisik belum selesai hingga akhir tahun. Hal ini perlu ditindaklanjuti melalui perencanaan anggaran dan belanja yang lebih matang untuk meningkatkan realisasi belanja. Lebih lanjut dijabarkan dalam tabel berikut:

Tabel III.1
Realisasi Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, Penerimaan
Pembiayaan, dan Pengeluaran Pembiayaan Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2020-2024 (Rupiah)

Tahun	Target	Realisasi	Persen
(1)	(2)	(3)	(4)
Pendapatan Daerah			
2020	8.584.526.835.525	10.133.115.629.662	118,04
2021	9.589.762.859.000	10.220.142.967.274	106,57
2022	12.469.541.473.626	16.804.693.776.013	134,77
2023	18.698.658.531.767	17.750.987.305.165	94,93
2024	21.221.750.228.801	22.084.373.012.119	104,06
Belanja Daerah			
2020	10.706.850.002.651	9.328.504.462.478	87,13
2021	12.260.598.307.059	10.723.529.422.431	87,46
2022	14.679.878.053.600	12.393.745.833.368	84,43
2023	21.649.509.223.080	19.724.959.715.482	91,11
2024	22.198.305.000.000	20.463.583.151.616	92,19
Penerimaan Pembiayaan			
2020	2.249.394.164.475	2.249.383.814.348	100,00
2021	2.674.485.448.059	2.953.994.981.532	110,45
2022	2.446.958.526.374	2.446.993.522.588	100,00
2023	6.621.341.468.233	6.621.017.958.435	100,00
2024	976.554.771.199	976.554.771.199	100,00
Pengeluaran Pembiayaan			
2020	150.000.000.000	100.000.000.000	66,67
2021	3.650.000.000	3.650.000.000	100,00
2022	236.621.946.400	236.600.000.000	99,99
2023	3.670.490.776.920	3.670.490.776.920	100,00
2024	976.554.771.199	976.554.771.199	100,00

Sumber: BPKAD Provinsi KALTIM, 2025

1. Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah merupakan semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, komponen pendapatan daerah bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Selama periode 2020-2024, realisasi pendapatan mengindikasikan tingkat efektivitas terhadap pencapaian rencana pendapatan masih termasuk dalam kategori sangat baik walaupun mengalami penurunan pada tahun 2023. Hal tersebut dipengaruhi oleh keadaan ekonomi dan kebijakan nasional terkait dana bagi hasil dari

pemerintah pusat. Rencana dan Realisasi Pendapatan Daerah disajikan pada tabel di bawah.

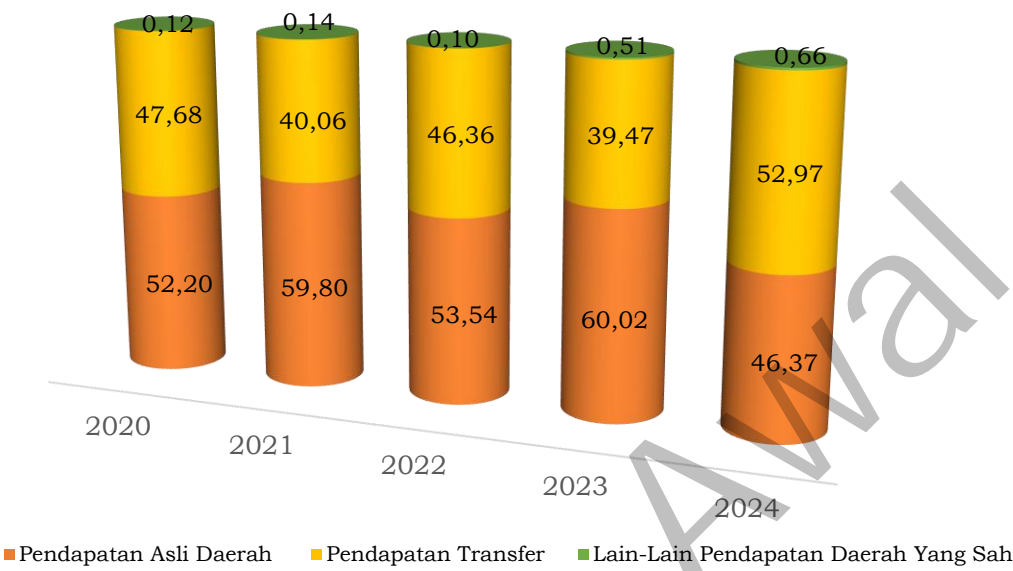
Tabel III.2
Realisasi dan Rata-Rata Pertumbuhan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024 (Miliar Rupiah)

Kode Rekening	Uraian	Realisasi					Rata-rata Pertumbuhan
		2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(5)	(6)	(7)	(6)	(7)	(8)
4.01	Pendapatan Asli Daerah	5.289,2	6.111,9	8.997,3	10.653,8	10.239,6	19,3
4.01.01	Pajak Daerah	3.900,4	4.774,9	7.623,6	8.698,2	8.571,5	23,7
4.01.02	Retribusi Daerah	9,8	13,6	20,0	68,1	1.100,9	460,9
4.01.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	111,0	214,6	310,3	260,2	237,7	28,3
4.01.04	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	1.268,1	1.108,8	1.043,4	1.627,3	329,5	(10,6)
4.02	Pendapatan Transfer	4.831,9	4.094,3	7.790,3	7.006,9	11.698,8	33,0
4.02.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	4.831,9	4.094,3	7.790,3	7.006,9	11.698,8	33,0
4.2.01.01	Dana Perimbangan	4.759,5	4.056,9	7.753,1	7.006,9		22,2
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil (DBH)	3.544,6	2.592,0	6.329,4	5.487,0		34,7
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum (DAU)	831,4	828,1	824,1	857,3		1,1
4.2.01.01.03	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	212,1	247,5	233,2	185,1		(3,3)
4.2.01.01.04	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	171,3	389,4	366,4	477,6		50,6
4.2.01.02	Dana Insentif Daerah (DID)	72,3	37,5	37,2	-		(49,7)
4.2.01.03	Dana Insentif Fiskal	-	-	-	-		
4.03	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	12,0	13,9	17,1	90,2	146,0	131,7
4.03.01	Pendapatan Hibah	3,3	13,9	17,1	21,1	19,2	91,1
4.03.02	Pendapatan Lainnya	8,8	-	-	69,2	126,8	(8,3)
	Pendapatan Daerah	10.133,1	10.220,1	16.804,7	17.751,0	22.084,4	23,8

Sumber: BPKAD Provinsi KALTIM, 2025

Analisis Pendapatan Daerah dilakukan untuk menunjukkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam upaya meningkatkan Pendapatan Daerah, sekaligus digunakan sebagai salah satu dasar dalam merencanakan Pendapatan Daerah dimasa yang akan datang. Kinerja Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur selama kurun waktu 2020 hingga 2024 berfluktuasi dengan rata-rata pertumbuhan pendapatan sebesar 14,6 persen. Capaian realisasi terendah pada tahun 2020 tercatat sebesar Rp10,13 triliun, capaian ini dipengaruhi oleh dampak pandemi

Covid-19. Pendapatan tertinggi tercatat pada tahun 2024 dengan realisasi sebesar Rp22,08 triliun yang diakibatkan meningkatnya Dana Bagi Hasil (DBH) dari Pemerintah Pusat sebagai dampak meningkatnya ekspor gas dan batubara.



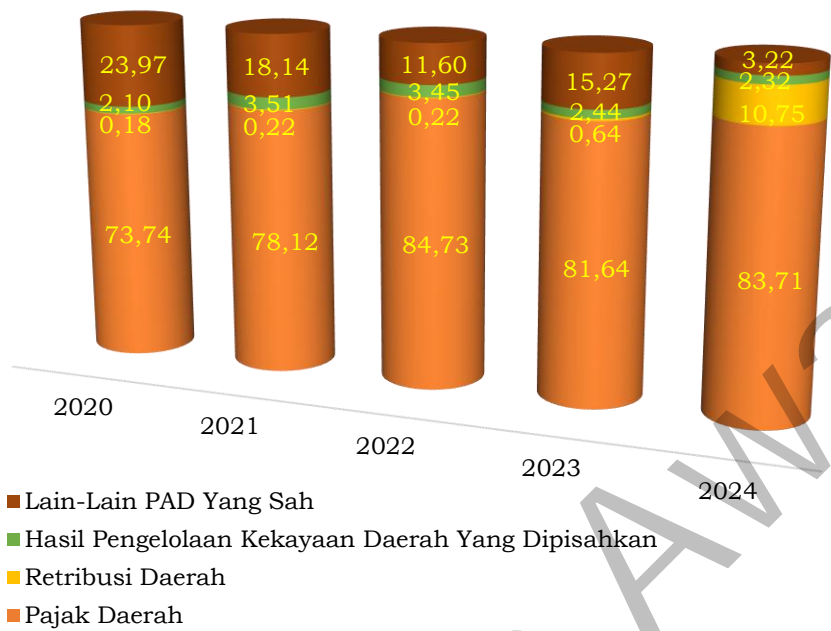
Gambar III.1
Proporsi Realisasi Komponen Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024 (persen)

Jika dilihat dari tren persentase realisasi masing-masing komponen Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur pada kurun waktu tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki proporsi yang lebih dominan dari komponen pendapatan lainnya dengan rata-rata 54,38 persen. Sedangkan Pendapatan Transfer mengalami fluktuasi dengan kontribusi tertinggi pada tahun 2024 yang dipengaruhi oleh peningkatan transfer pemerintah pusat dari Dana Bagi Hasil (DBH). Dominannya PAD menunjukkan bahwa kinerja keuangan Provinsi Kalimantan Timur sangat baik dan mengarah pada kemandirian pendapatan daerah.

a. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi komponen utama pendapatan daerah pada Provinsi Kalimantan Timur. PAD terbesar berasal dari pendapatan pajak daerah dengan besaran proporsi rata-rata selama lima tahun terakhir sebesar 80,39 persen. Secara absolut, realisasi pendapatan pajak daerah setiap tahunnya berfluktuasi dengan capaian terendah pada tahun 2020 sebesar Rp3,9 triliun dikarenakan dampak pandemi Covid-19 dan lesunya aktivitas perekonomian ekstraktif yang

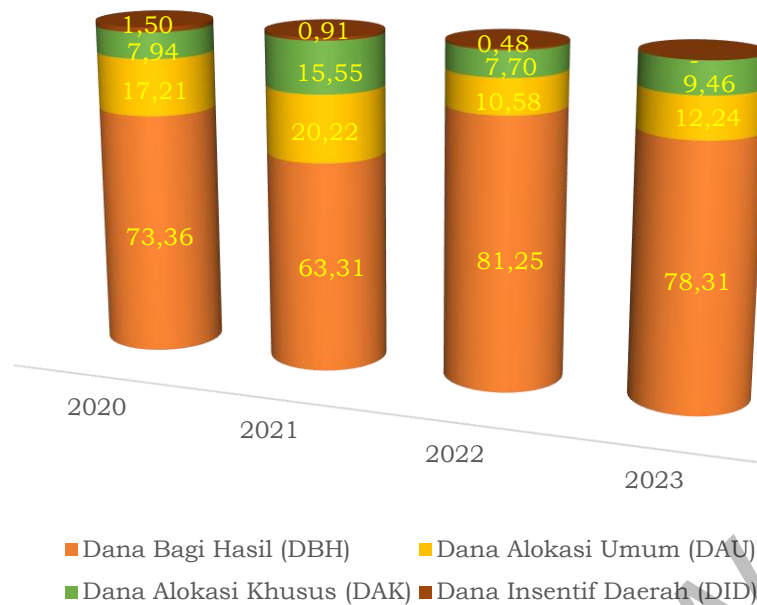
berpengaruh terhadap pengurangan pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB).



Gambar III.2
Proporsi Realisasi Komponen Pendapatan Asli Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024 (persen)

Apabila dilihat dari proporsi komponen pembentuk Pendapatan Asli Daerah (Gambar III.2) terlihat bahwa pendapatan dari Pajak Daerah merupakan komponen yang memberikan kontribusi terbesar terhadap Pendapatan Asli Daerah. Realisasi pajak daerah masih didominasi oleh 3 komponen pembentuk utama yakni Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor semenjak tahun 2026 sebagai dampak pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah.

- b. Pendapatan Transfer
- Kontribusi Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap pendapatan transfer paling dominan rata-rata dalam 4 tahun terakhir mencapai 74,06 persen yang sebagian besar dipengaruhi oleh DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara Royalti. Hal ini membuktikan bahwa pengaruh pertambangan batubara terhadap keuangan daerah Provinsi Kalimantan Timur sangat tinggi.



Gambar III.3
Proporsi Realisasi Komponen Pendapatan Transfer Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024 (persen)

Berdasarkan proporsi komponen pembentuk Pendapatan Transfer yang dimuat pada gambar di atas, penurunan realisasi DBH pada tahun 2021 menjadi Rp4,09 triliun sangat erat kaitannya dengan melemahnya perekonomian daerah yang terjadi di tahun 2020 terutama pada sektor lapangan usaha Kalimantan Timur yakni pertambangan penggalan dan industri pengolahan. Perbaikan ekonomi Kalimantan Timur pada tahun 2022 hingga tahun 2024 memberikan dampak pada meningkatnya DBH terutama yang bersumber dari DBH Mineral dan Batubara seiring dengan tingginya permintaan global serta membaiknya harga batubara acuan.

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Komponen pendaparan daerah Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah dengan rata-rata kontribusi pada kurun waktu 2020 sampai dengan tahun 2024 sebesar 0,31 persen. Capaian komponen ini juga berfluktuasi semenjak tahun 2020 dan kembali meningkat pada tahun 2023 – 2024. Sumber pendapatan pada komponen ini didominasi oleh Pendapatan Lainnya dengan rata-rata kontribusi sebesar 78,8 persen yang dipengaruhi oleh pendapatan atas dana *Reducing Emission for Deforestation and Forest Degradation Results Based Payment* dan keuntungan bersih Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) atas pertambangan mineral logam dan batu bara.

2. Belanja Daerah

Belanja daerah merupakan semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yakni urusan pemerintahan wajib dan pilihan yang dilaksanakan melalui pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan. Pengalokasian belanja daerah wajib memprioritaskan belanja pelayanan dasar dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Analisis Belanja Daerah sangat penting dilakukan untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam penggunaan APBD secara ekonomis, efisien dan efektif. Melalui analisis ini dapat terlihat sejauh mana Pemerintah Daerah telah melakukan efisiensi anggaran, menghindari pengeluaran yang tidak perlu dan pengeluaran yang tidak tepat sasaran. Selain untuk memperoleh gambaran realisasi dari kebijakan belanja pada periode tahun 2020-2024, analisis belanja daerah juga digunakan sebagai bahan untuk menentukan rencana Belanja Daerah dimasa yang akan datang dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan daerah.

Perkembangan belanja daerah Provinsi Kalimantan Timur selama periode tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 menunjukkan realisasi fluktuatif dengan kecenderungan meningkat, yang semula pada tahun 2020 sebesar Rp9,33 triliun menjadi sebesar Rp20,46 triliun pada tahun 2024. Realisasi belanja meningkat signifikan pada tahun 2023 dan 2024 terutama pada komponen belanja modal dan belanja transfer akibat meningkatnya belanja bagi hasil kepada pemerintah kabupaten/kota.

Tabel III.3
Realisasi dan Rata-Rata Pertumbuhan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024 (Miliar Rupiah)

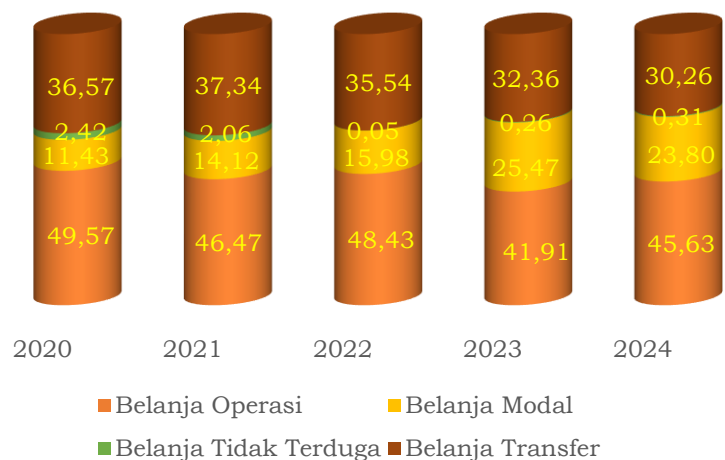
Kode Rek.	Uraian	Tahun					Rata-rata Pertumbuhan
		2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
5.01	BELANJA OPERASI	4.624,5	4.983,2	6.001,8	8.267,5	9.336,8	19,7
5.01.01	Belanja Pegawai	1.668,1	2.105,6	2.334,6	2.591,4	3.225,8	18,1
5.01.02	Belanja Barang dan Jasa	2.779,8	2.634,9	3.184,2	4.984,4	4.898,7	17,6
5.01.03	Belanja Hibah	163,9	228,7	432,0	679,8	1.195,1	65,4
5.01.04	Belanja Bantuan Sosial	12,6	14,0	50,9	11,9	17,2	61,0
5.02	BELANJA MODAL	1.066,6	1.514,5	1.980,0	5.023,5	4.870,0	55,8

Kode Rek.	Uraian	Tahun					Rata-rata Pertumbuhan
		2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
5.02.01	Tanah	0,0	25,3	85,1	215,9	78,0	26.424,2
5.02.02	Peralatan dan Mesin	418,1	300,2	755,3	1.654,1	1.142,6	52,9
5.02.03	Bangunan dan Gedung	247,2	537,5	421,6	1.190,2	1.963,2	85,8
5.02.04	Jalan, jaringan dan irigasi	374,8	638,2	702,1	1.914,8	1.612,4	59,3
5.02.05	Aset tetap lainnya	26,6	13,2	16,0	35,2	41,7	27,4
5.02.06	Aset lainnya	-	-	-	13,3	32,0	140,7
5.03	BELANJA TIDAK TERDUGA	226,2	221,4	6,7	50,4	64,2	145,6
5.04	BELANJA TRANSFER	3.411,3	4.004,5	4.405,3	6.383,6	6.192,6	17,3
5.04.01	Belanja Bagi Hasil	1.863,2	2.455,9	3.542,7	5.186,1	4.391,4	26,8
5.04.02	Belanja Bantuan Keuangan	1.548,0	1.548,6	862,5	1.197,5	1.801,1	11,2
	Jumlah Belanja Daerah	9.328,5	10.723,5	12.393,7	19.725,0	20.463,6	23,4

Sumber: BPKAD Provinsi KALTIM, 2025

Rata-rata pertumbuhan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2020 sampai dengan 2024 terus mengalami pertumbuhan dengan rata-rata mencapai 23,4 persen. Realisasi belanja terendah pada tahun 2022 terdapat pada komponen belanja tidak terduga (BTT) sebesar 1,2 persen dan belanja modal sebesar 74,75 persen. Rendahnya realisasi BTT ini dikarenakan tidak ada belanja untuk penanganan bencana yang terjadi pada tahun 2022 seperti yang dialokasikan pada tahun sebelumnya yang diperuntukkan untuk penanganan dampak pandemi COVID-19.

Secara struktur belanja daerah pada kurun waktu tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 masih didominasi oleh belanja operasi dengan rata-rata sebesar 46,40 persen karena pada komponen dimaksud termasuk komponen belanja pegawai, belanja barang jasa, belanja hibah dan belanja bantuan sosial. Komponen terbesar berikutnya adalah belanja transfer dengan rata-rata sebesar 34,42 persen karena pada pendapatan dimaksud terdapat belanja bagi hasil pajak kepada pemerintah kabupaten/kota.



Gambar III.4
Proporsi Komponen Belanja Daerah Kalimantan Timur
Tahun 2020-2024 (persen)

Sebagai dampak pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah, besaran belanja transfer semenjak tahun 2026 diperkirakan akan menurun karena telah menggunakan pola opsen untuk penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

3. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah adalah transaksi keuangan untuk menutup defisit anggaran atau untuk memanfaatkan surplus. Defisit atau surplus terjadi apabila ada selisih antara anggaran pendapatan daerah dan belanja daerah. Pembiayaan disediakan untuk menganggarkan setiap pengeluaran yang akan diterima kembali dan/atau penerimaan yang perlu dibayar kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Dalam penganggarannya, Pembiayaan Daerah dibagi dalam 2 (dua) bagian yaitu Penerimaan Pembiayaan Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah. Pembiayaan Daerah merupakan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Realisasi Pembiayaan Daerah Provinsi Kalimantan Timur, selama tahun 2020-2024 tergambar dalam tabel di bawah.

Tabel III.4
Realisasi dan Rata-Rata Pertumbuhan Pembiayaan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024 (Miliar Rupiah)

No	Uraian	Realisasi					Rata-rata Pertumbuhan (%)
		2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
A	Penerimaan Pembiayaan						
1.	Penggunaan SiLPA	2.249,38	2.953,99	2.446,99	6.621,02	976,55	24,9
Jumlah Penerimaan		2.249,38	2.953,99	2.446,99	6.621,02	976,55	24,9
B	Pengeluaran Pembiayaan						
1.	Penyertaan Modal Investasi Pemda	100,0	3,7	236,6	3.670,5	976,6	1.915,9
Jumlah Pengeluaran		100,0	3,7	236,6	3.670,5	976,6	1.915,9
Pembiayaan Netto		2.149,38	2.950,34	2.210,39	2.950,53	0,00	(13,6)
SILPA		2.953,99	2.446,96	6.621,34	976,55	1.620,79	33,5

Sumber: BPKAD Provinsi KALTIM, 2025

Pembiayaan Daerah terdiri dari dua komponen yaitu *pertama* penerimaan pembiayaan yang bersumber dari penggunaan SiLPA tahun sebelumnya, *kedua* adalah pengeluaran pembiayaan berupa penyertaan modal atau investasi pemerintah daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Pada kurun waktu tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, penerimaan pembiayaan daerah hanya diperoleh melalui SiLPA. Pengalokasian SiLPA berfluktuasi dengan realisasi tertinggi pada tahun 2023 sebesar Rp6,62 triliun dan terendah terjadi pada tahun 2024 sebesar Rp976,55 miliar. Meningkatnya realisasi SiLPA pada tahun 2023 dikarenakan realisasi pendapatan tahun 2022 yang melampaui target dan realisasi belanja pada tahun 2022 hanya mncapai 77,90 persen.

3.1.2. Neraca Daerah

Salah satu instrumen analisis kondisi keuangan Pemerintah Daerah adalah Neraca Daerah. Neraca Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), dijelaskan bahwa neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Unsur yang dicakup oleh neraca terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas. Neraca Daerah Provinsi Kalimantan Timur, selama tahun 2020-2024 tergambar dalam tabel di bawah.

Tabel III.5
Neraca Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur 2020-2024
(Miliar Rupiah)

No	Uraian	2020 (Rp)	2021 (Rp)	2022 (Rp)	2023 (Rp)	2024 (Rp)	Rata- rata Pertum- buhan (%)
1	Aset	34.958,1	33.527,0	38.361,0	43.420,4	46.589,6	7,70
1.1	Aset Lancar	4.404,8	3.850,0	8.362,1	3.198,0	4.876,1	23,83
1.2	Investasi Jangka Panjang	3.508,1	3.689,2	4.084,4	7.832,2	7.832,2	26,91
1.3	Aset Tetap	24.424,9	24.200,3	24.763,0	27.861,5	32.649,1	7,78
1.5	Aset Lainnya	2.620,4	1.787,5	1.151,5	4.187,9	940,3	29,69
1.6	Properti Investasi				340,9	291,9	(14,36)
2	Kewajiban	2.423,0	1.631,6	1.221,8	890,2	1.219,2	(11,99)
2.1	Kewajiban Jangka Pendek	451,9	483,7	1.133,1	801,5	1.130,5	38,27
2.2	Kewajiban Jangka Panjang	1.971,1	1.147,9	88,7	88,7	88,7	(33,51)
3	Ekuitas	32.535,1	31.895,4	37.139,2	42.530,2	45.370,4	8,92
3.1	Jumlah Ekuitas	32.535,1	31.895,4	37.139,2	42.530,2	45.370,4	8,92

Sumber: BPKAD Provinsi KALTIM, Tahun 202

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari pemanfaatan ekonomi dan/atau sosial serta dapat diukur dalam satuan uang. Aset Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur pada kurun waktu Tahun 2020 sampai dengan 2024 terus mengalami peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 7,70 persen.

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah Daerah. Kewajiban Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur selama periode tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 mengalami penurunan dengan rata-rata penurunan selama 11,99 persen. Penurunan kewajiban ini dipengaruhi oleh signifikannya pengurangan Kewajiban Jangka Panjang.

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah. Ekuitas Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur selama tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 mengalami mengalami peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 8,92 persen atau sebesar Rp45,37 triliun.

3.2. Kerangka Pendanaan

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah erat kaitannya dengan keberhasilan program pembangunan daerah. Oleh karena itu kebijakan keuangan daerah harus sesuai dengan arah kebijakan pembangunan untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan itu sendiri. Dalam pengelolaan anggaran pendapatan daerah harus diperhatikan upaya untuk peningkatan pendapatan pajak dan retribusi daerah tanpa harus menambah beban bagi masyarakat. Pendapatan daerah dalam struktur APBD masih merupakan elemen yang cukup penting peranannya baik untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan maupun pemberian pelayanan kepada publik. Strategi dan kebijakan pengelolaan keuangan daerah terdiri dari strategi dan kebijakan peningkatan pendapatan daerah. Optimalisasi belanja daerah dan pembiayaan daerah. Berikut adalah strategi dan kebijakan mengenai beberapa komponen tersebut.

1. Proyeksi Pendapatan dan Belanja

Dalam merumuskan proyeksi pendapatan dan belanja daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026-2030 akan mempertimbangkan kondisi dan proyeksi ekonomi makro nasional yang tertuang pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional ahun 2025-2029 seperti pada tabel berikut.

Tabel III.6
Asumsi Ekonomi Makro Nasional

Indikator	Tahun 2025	Tahun 2029
(1)	(2)	(3)
Pertumbuhan Ekonomi (% <i>, yoy</i>)	5,3	8,0
<i>Gross National Income</i> per kapita (USD)	5.410	8.000
Konsumsi Rumah Tangga dan Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumah Tangga (%)	5,14	7,27
Konsumsi Pemerintah (%)	6,66	8,40
Invenstasi (%)	5,61	9,65
Ekspor Barang dan Jasa (%)	6,95	9,50
<i>Lifting</i> Minyak Bumi (ribu BOPD)	605	6,42-7,92
<i>Lifting</i> Gas Bumi (ribu BOEPD)	1.005	1.371 - 1.617
<i>Produksi Batubara (Juta Ton)</i>	717	743

Sejalan perbaikan ekonomi nasional dan proyeksi ekonomi nasional yang semakin meningkat pada tahun 2029, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam memproyeksikan pendapatan dan belanja daerah mempertimbangkan asumsi makro ekonomi pada tahun 2025 sampai dengan tahun 2029. Perekonomian Kalimantan Timur diperkirakan

tumbuh pada tahun 2025 pada kisaran 6,17–6,40 persen (yoy), serta pada tahun 2030 diperkirakan berada di kisaran 8,60–8,75 persen (yoy). Selanjutnya inflasi pada 2025-2030 diperkirakan berada di kisaran target $2,5 \pm 2$ persen.

Pendapatan dan belanja daerah merupakan instrumen yang menjamin terciptanya disiplin dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan kebijakan pendapatan maupun belanja daerah. Penyusunan pendapatan dan belanja daerah pada dasarnya bertujuan untuk menyelaraskan kebijakan ekonomi makro dan sumber daya yang tersedia, mengalokasikan sumber daya secara tepat sesuai kebijakan pemerintah dan mempersiapkan kondisi bagi pelaksanaan pengelolaan anggaran secara akuntabel.

A. Proyeksi Pendapatan Daerah

Proyeksi pendapatan daerah sebagai sumber pendanaan pembangunan Kalimantan Timur pada tahun 2026 sampai dengan tahun 2029 diproyeksikan lebih rendah dari tahun 2025 namun terus meningkat hingga pada tahun 2030 mencapai Rp20,9 triliun atau dengan rata-rata peningkatan sebesar 0,88 persen. Proyeksi pendapatan daerah pada tahun 2026 sampai dengan tahun 2030 akan didominasi oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan kontribusi rata-rata sebesar 46,85 persen atau dengan rata-rata peningkatan sebesar 0,82 persen. Komponen pendapatan terbesar berikutnya pendapatan transfer dengan kontribusi rata-rata sebesar 52,21 persen atau dengan rata-rata peningkatan sebesar 1,40 persen. Masih tingginya kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah menjadikan Kalimantan Timur menjadi daerah yang memiliki kemandirian fiskal.

Tingginya kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah dipengaruhi Pajak Daerah yang akan berkontribusi dengan rata-rata selama 5 tahun sebesar 81,03 persen dengan perolehan utama yang bersumber dari pendapatan pajak bahan bakar kendaraan bermotor. Sedangkan proyeksi pendapatan dari Pendapatan Transfer akan dipengaruhi oleh Dana Bagi Hasil (DBH) yang akan berkontribusi dengan rata-rata selama 5 tahun sebesar 78,72 persen dengan perolehan utama dari DBH sumber daya alam mineral dan batubara.

Menurunnya target Pajak Daerah dan DBH pada tahun 2026 dari target yang ditetapkan pada penatapan tahun 2025 dikarenakan

pelaksanaan ketentuan Undang-undang No. 01 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (HKPD) yang diturunkan melalui Peraturan Daerah Nomor 1 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dimana terdapat perubahan tarif PKB dan BBNKB dan kebijakan opsen sebagai pengganti bagi hasil Pemerintah Kabupaten/Kota. Sedangkan penurunan penerimaan DBH dipengaruhi oleh penurunan DBH sumber daya alam mineral dan batubara sebagai akibat menurunnya produksi batubara dari tahun sebelumnya.

Pendapatan Daerah diharapkan terus lebih meningkat ditahun 2027 sampai dengan tahun 2030, dengan diikuti beberapa upaya dan kebijakan untuk dapat mencapainya. Untuk tahun 2026 sampai dengan tahun 2030, dirumuskan beberapa arah kebijakan Pendapatan Daerah yaitu sebagai berikut:

1. Komponen Pendapatan Asli Daerah selaku representasi kinerja riil pemerintah daerah dalam menggali pendapatan daerah secara mandiri. Strategi peningkatan pendapatan yang dijalankan adalah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi meliputi:
 - a. Optimalisasi pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - b. Melakukan kajian secara holistik untuk seluruh potensi pendapatan daerah di seluruh lingkup perangkat daerah;
 - c. Pendekatan pelayanan kepada masyarakat serta perluasan dan pengembangan layanan untuk mempermudah pembayaran pajak oleh masyarakat/Wajib Pajak;
 - d. Optimalisasi penanganan pemungutan piutang pajak dan retribusi melalui inventarisasi dan penagihan piutang pajak dan retribusi daerah dengan melibatkan Instansi Vertikal, SKPD dan pemerintah Kabupaten/Kota;
 - e. Melakukan pengendalian dan Pengawasan terhadap penjualan/distribusi BBM sektor Industri oleh Tim Inspektorat, BPKP Perwakilan Prov. Kaltim, dan Kepolisian terhadap penerimaan dari Wajib Pungut;
 - f. Penertiban ijin wajib pungut Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
 - g. Adanya penambahan izin pemakaian/pemanfaatan air permukaan dari perusahaan baru;

- h. Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai langkah Pengendalian dan Pengawasan Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - i. Melakukan *cleansing database* kendaraan bermotor melalui registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
 - j. Pemberian relaksasi pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor;
 - k. Pembaharuan regulasi melalui revisi kebijakan terhadap peraturan untuk menjamin kepastian hukum dalam upaya optimalisasi Pendapatan Daerah;
 - l. Peningkatan koordinasi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dalam optimalisasi penerimaan Pajak Alat Berat dan Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan (MBLB);
 - m. Upaya penyesuaian dividen dari Perusda/BUMD untuk Pemerintah Provinsi melalui hasil evaluasi dan monitoring terhadap kinerja BUMD;
2. Komponen Pendapatan Transfer bagi Provinsi Kalimantan Timur memiliki peran strategis dalam menyusun pendapatan daerah terkait Dana Bagi Hasil Pajak dan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam, dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Insentif Fiskal. Oleh karena itu strategi yang dijalankan terutama melalui peningkatan koordinasi dengan pemerintah pusat dengan arah kebijakan sebagai berikut:
 - a. Peningkatan koordinasi dengan pemerintah pusat dan antar provinsi dalam pengelolaan dan penyaluran pendapatan transfer.
 - b. Peningkatan pengendalian dan pengawasan pengelolaan sumber daya alam.
3. Komponen lain-lain pendapatan daerah yang sah. Strategi yang dijalankan melalui arah kebijakan sebagai berikut:
 - a. Peningkatan koordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dalam penyaluran dana Dana *Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation Results Based Payment*;
 - b. Peningkatan koordinasi dengan perusahaan pemegang IUPK atas Pertambangan Mineral Logam dan Batu Bara dalam pembayaran laba bersih kepada pemerintah provinsi.

Tabel III.7
Penetapan Pendapatan Daerah tahun 2025 dan
Proyeksi Pendapatan Daerah Povinsi Kalimantan Timur Tahun 202-2026 (Rupiah)

Kode Rek	Uraian	Penetapan 2025	Proyeksi					
			2026	2027	2028	2029	2030	Rata-Rata Pertumbuhan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
4	Pendapatan Daerah	20.100.000.000.000	18.778.464.000.000	18.748.000.000.000	19.360.000.000.000	20.070.293.000.000	20.917.210.000.000	2,75
4.01	Pendapatan Asli Daerah	10.035.157.739.563	9.753.535.391.163	9.934.779.767.753	10.192.998.415.720	10.461.923.166.077	10.744.345.960.649	2,45
4.1.01	Pajak Daerah	8.400.000.000.000	8.067.500.000.000	8.169.950.000.000	8.278.300.000.000	8.376.725.000.000	8.480.240.000.000	1,26
4.1.02	Retribusi Daerah	1.070.333.040.395	1.126.375.315.643	1.203.993.442.567	1.285.324.080.085	1.371.520.951.766	1.464.888.069.807	6,79
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	449.309.792.556	432.266.776.014	446.601.810.672	510.770.391.391	589.267.398.076	668.863.829.150	11,64
4.1.04	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	115.514.906.612	127.393.299.506	114.234.514.514	118.603.944.243	124.409.816.235	130.354.061.693	0,79
4.2	Pendapatan Transfer	9.862.791.865.296	8.425.772.462.437	8.727.832.244.735	9.091.259.569.202	9.540.173.346.319	10.110.527.585.740	4,67
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	9.862.791.865.296	8.425.772.462.437	8.727.832.244.735	9.091.259.569.202	9.540.173.346.319	10.110.527.585.740	4,67
4.2.01.06	Dana Insentif Fiskal	21.414.666.000	21.414.666.000	17.879.814.047	14.928.449.053	12.464.256.649	10.406.820.780	-16,51
4.2.01.07	Dana Bagi Hasil (DBH)	8.120.244.188.296	6.683.224.785.437	6.888.691.614.605	7.146.241.820.588	7.479.244.084.218	7.922.795.006.272	4,35
4.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.068.787.337.000	1.068.787.337.000	1.107.239.257.142	1.147.074.567.703	1.188.343.039.126	1.231.096.232.450	3,60
4.2.01.09	Dana Alokasi Khusus (DAK)	652.345.674.000	652.345.674.000	714.021.558.941	783.014.731.858	860.121.966.326	946.229.526.238	9,74
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	202.050.395.141	599.156.146.400	85.387.987.512	75.742.015.078	68.196.487.604	62.336.453.611	-28,90
4.03.01	Hibah	13.864.392.517	29.805.805.044	28.435.288.996	29.179.856.266	29.946.760.554	30.736.671.971	0,82
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	188.186.002.624	569.350.341.356	56.952.698.516	46.562.158.812	38.249.727.050	31.599.781.640	-35,87

Sumber: BPKAD Provinsi KALTIM & Bapenda Provinsi KALTIM, 2025

BAB IV

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

Pengidentifikasian permasalahan pembangunan dan isu strategis berperan penting dalam merumuskan kebijakan pembangunan jangka menengah di Provinsi Kalimantan Timur setiap lima tahun. Pemetaan yang akurat terhadap permasalahan pembangunan menjadi landasan bagi penyusunan kebijakan yang menyeluruh. Permasalahan pembangunan mencerminkan kondisi daerah atau masyarakat yang masih belum mencapai harapan, sementara isu strategis mengacu pada tantangan dan peluang yang perlu diperhatikan dalam perencanaan karena dampaknya yang besar di masa depan.

3.1 PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH

Berdasarkan hasil analisis data dan informasi pada gambaran umum kondisi daerah serta menelaah hasil evaluasi capaian kinerja pelaksanaan pembangunan periode sebelumnya, diperoleh 6 (enam) permasalahan pokok pembangunan Provinsi Kalimantan Timur yaitu:

- 1) Belum meratanya kualitas dan daya saing sumber daya manusia;
- 2) Masih lambatnya transformasi ekonomi;
- 3) Belum meratanya infrastruktur dasar dan infrastruktur penunjang ekonomi;
- 4) Kesenjangan pendapatan dan pembangunan wilayah;
- 5) Tingginya risiko penurunan kualitas lingkungan hidup;
- 6) Belum optimalnya tata kelola pemerintahan yang baik.

Keenam permasalahan utama tersebut merupakan tantangan pembangunan lintas sektor yang menjadi faktor utama dalam belum optimalnya pembangunan daerah di Provinsi Kalimantan Timur. Permasalahan ini dapat dijelaskan lebih rinci sebagai berikut:

1. Belum meratanya kualitas dan daya saing sumber daya manusia

Sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing tinggi merupakan salah satu pengungkit untuk mendorong pembangunan daerah yang berkelanjutan. Namun, kualitas dan daya saing SDM di Kalimantan Timur masih belum merata di seluruh wilayah. Dilihat dari Indeks

Pembangunan Manusia (IPM), beberapa kabupaten memiliki capaian di bawah rata-rata nasional sebesar 75,02 yakni Mahakam Ulu sebesar 70,79, Kutai Barat sebesar 74,76, dan Penajam Paser Utara 74,94. Hal tersebut menunjukkan masih adanya kesenjangan dalam akses pendidikan, layanan kesehatan, serta kesejahteraan masyarakat di ketiga wilayah.

Tingkat pendidikan tenaga kerja juga masih menjadi tantangan besar. Pada tahun 2024, tenaga kerja di Kalimantan Timur didominasi oleh lulusan SMA/ sederajat sebesar 27,6% persen dan SD/ sederajat ke bawah sebesar 24,4 persen. Selain itu, angka putus sekolah pada jenjang SMA/ SMK yang mencapai 18,16 persen menunjukkan bahwa banyak anak muda yang tidak dapat menyelesaikan pendidikan menengah. Kurangnya akses terhadap pendidikan berkualitas dan minimnya keterampilan yang dimiliki oleh angkatan kerja menyebabkan daya saing tenaga kerja lokal rendah, sehingga sulit bersaing dalam dunia kerja yang semakin kompetitif. Kesenjangan SDM yang dialami pada akhirnya turut berkontribusi terhadap tingginya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kalimantan Timur yang mencapai 5,14 persen atau masih lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional sebesar 4,91 persen.

Tantangan dalam sektor kesehatan juga turut memengaruhi kualitas SDM. Pada tahun 2023, capaian prevalensi stunting di Kalimantan Timur masih tergolong cukup tinggi yaitu berada pada angka 22,90 persen. Selain aspek pendidikan dan kesehatan, faktor ekonomi juga menjadi tantangan dalam meningkatkan daya saing SDM di Kalimantan Timur. Tingkat kemiskinan di beberapa kabupaten seperti Penajam Paser Utara, Kutai Kartanegara, Kutai Timur, Paser, Kutai Barat, dan Mahakam Ulu masih berada di atas 5,00 persen. Kemiskinan yang tinggi berpotensi memperburuk ketimpangan akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan sehingga menghambat peningkatan kualitas SDM secara keseluruhan.

2. Masih lambatnya transformasi ekonomi

Transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan merupakan salah satu tantangan utama dalam pembangunan Kalimantan Timur. Sebagai daerah yang selama ini bergantung pada sektor ekstraktif, seperti pertambangan dan penggalian, upaya untuk mendorong diversifikasi ekonomi masih berjalan lambat. Ketergantungan terhadap sumber daya alam

berisiko terhadap ketidakstabilan ekonomi, terutama akibat fluktuasi harga komoditas global. Oleh karena itu, percepatan pengembangan sektor non-ekstraktif, seperti industri dan pertanian, dan kawasan ekonomi menjadi penting untuk menciptakan struktur ekonomi yang lebih seimbang dan berkelanjutan.

Pada tahun 2024, sektor pertambangan dan penggalan masih mendominasi struktur ekonomi Kalimantan Timur dengan kontribusi sebesar 38,38 persen. Sementara itu, sektor industri mengalami perlambatan pertumbuhan sebesar 0,23 persen, begitupun dengan sektor pertanian sebesar 2,38 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya diversifikasi ekonomi belum berjalan optimal. Selain itu, pengembangan kawasan peruntukan industri dalam konsep Superhub Ekonomi IKN, seperti di Kariangau, Buluminung, dan Maloy, masih menghadapi berbagai kendala. Hambatan dalam pembangunan infrastruktur, investasi, serta regulasi yang belum optimal menjadi faktor penghambat utama dalam percepatan transformasi ekonomi di Kalimantan Timur.

3. Belum meratanya infrastruktur dasar dan infrastruktur penunjang ekonomi

Infrastruktur dasar dan infrastruktur penunjang ekonomi memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan dan pemerataan pembangunan di Kalimantan Timur. Ketersediaan infrastruktur yang memadai tidak hanya meningkatkan konektivitas antarwilayah, tetapi juga mendukung sektor-sektor strategis. Namun, pemerataan pembangunan infrastruktur di Kalimantan Timur masih menjadi tantangan besar hingga saat ini.

Salah satu tantangan utama dalam infrastruktur dasar di Kalimantan Timur adalah kondisi jalan yang masih banyak mengalami kerusakan. Jalan provinsi yang mengalami rusak berat mencapai 111,46 km, sementara yang rusak ringan mencapai 55,55 km. Kondisi serupa juga terjadi pada jalan nasional, di mana terdapat 100,5 km jalan rusak berat dan 136,41 km jalan rusak ringan. Infrastruktur jalan yang belum optimal menyebabkan mobilitas barang dan orang menjadi terhambat, meningkatkan biaya logistik, serta memperlambat pertumbuhan ekonomi di daerah-daerah yang bergantung pada transportasi darat. Selain itu, masih terdapat wilayah yang belum memiliki konektivitas darat yang memadai, seperti di Ujoh Bilang, Mahakam

Ulu, yang hingga kini belum memiliki akses jalan darat yang terhubung dengan wilayah lain. Selain itu, belum adanya bandara di Ujoh Bilang semakin memperburuk aksesibilitas wilayah. Belum terbangunnya jalur transportasi di wilayah tersebut berpotensi menghambat mobilitas masyarakat dan distribusi barang serta sulitnya mengakses layanan dasar, seperti kesehatan dan pendidikan.

Pada sektor pelayanan dasar, cakupan layanan air minum di Kalimantan Timur baru mencapai 83,71 persen, sementara di beberapa daerah seperti Kota Balikpapan dan Bontang masih menghadapi krisis air bersih. Selain itu, cakupan akses sanitasi layak baru mencapai 84,23 persen. Hal tersebut menunjukkan masih adanya masyarakat yang belum memiliki akses terhadap fasilitas sanitasi yang memadai sehingga berisiko terhadap penyebaran penyakit dan menurunkan kualitas lingkungan. Di samping itu, infrastruktur penunjang pertanian dan pariwisata juga belum optimal yang dapat menghambat produktivitas kedua sektor tersebut.

4. Kesenjangan pendapatan dan pembangunan wilayah

Kesenjangan pendapatan dan pembangunan wilayah juga masih menjadi tantangan dalam pembangunan ekonomi di Kalimantan Timur. Ketimpangan ini terlihat dari disparitas distribusi pendapatan masyarakat serta ketidakseimbangan pembangunan infrastruktur antara kawasan perkotaan dan daerah yang lebih terpinggirkan. Jika tidak diatasi, kesenjangan ini dapat menghambat pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Salah satu indikator yang mencerminkan ketimpangan ekonomi adalah nilai rasio Gini yang mencapai 0,321 pada tahun 2024, dimana capaian tersebut tertinggi di Pulau Kalimantan. Selain itu, Indeks Williamson yang relatif tinggi di angka 0,423 menunjukkan adanya ketimpangan signifikan dalam distribusi pembangunan antarwilayah. Pembangunan infrastruktur dan fasilitas umum lebih terkonsentrasi di wilayah perkotaan dan pesisir timur, sedangkan wilayah barat Kalimantan Timur masih cukup tertinggal. Hal tersebut berpotensi memperlambat pemerataan kesejahteraan masyarakat dan memperbesar kesenjangan sosial di masa depan.

5. Tingginya risiko penurunan kualitas lingkungan hidup

Kalimantan Timur menghadapi tantangan besar dalam menjaga kualitas lingkungan hidup seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan ekspansi berbagai sektor industri. Risiko penurunan kualitas lingkungan semakin meningkat akibat eksploitasi sumber daya alam yang tidak terkendali, pengelolaan limbah yang belum optimal, serta alih fungsi lahan yang semakin masif. permasalahan ini dapat berdampak serius terhadap keseimbangan ekosistem dan kualitas hidup masyarakat di masa mendatang apabila tidak segera diatasi.

Sebagai salah satu komponen pembentuk Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), capaian Indeks Kualitas Air (IKA) Kalimantan Timur masih tergolong rendah, yaitu sebesar 52,64. Selain itu, pengelolaan sampah di Kalimantan Timur pun masih jauh dari optimal, dengan hanya 17,59 persen sampah yang terolah di fasilitas pengelolaan sampah. Tekanan terhadap lingkungan juga diperparah dengan alih fungsi lahan akibat desakan aktivitas ekonomi, seperti ekspansi pertambangan dan perkebunan. Kerusakan lingkungan semakin sulit dikendalikan karena pengawasan dan regulasi yang belum berjalan secara optimal, sehingga diperlukan langkah strategis untuk meningkatkan pengelolaan sumber daya alam yang lebih berkelanjutan.

6. Belum optimalnya tata kelola pemerintahan yang baik

Tata kelola pemerintahan yang baik merupakan faktor kunci dalam mewujudkan pembangunan yang efektif dan berkelanjutan di Kalimantan Timur. Namun, berbagai aspek dalam tata kelola pemerintahan masih belum berjalan secara optimal hingga saat ini. Akuntabilitas, pelayanan publik, sistem pengawasan, serta penerapan prinsip-prinsip pemerintahan yang bersih dan transparan masih menghadapi berbagai tantangan. Kondisi ini berpotensi menghambat efektivitas kebijakan serta menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.

Berdasarkan hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kalimantan Timur, akuntabilitas kinerja pemerintah daerah belum cukup optimal dengan skor 78,74. Kualitas pelayanan publik Kalimantan Timur juga perlu ditingkatkan yang saat ini masih berada pada skala 3,75 dari 5,00 atau dikategorikan Baik (B). Selain itu, implementasi Sistem Merit dalam manajemen aparatur sipil negara masih kurang optimal dengan skor

271, begitu pula dengan pembangunan zona integritas yang mencapai angka 0,5. Capaian Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Kalimantan Timur juga belum cukup optimal, dengan skor 3,2, menunjukkan perlunya peningkatan dalam mekanisme pengawasan dan pengendalian kebijakan. Untuk mewujudkan pemerintahan yang transparan dan berorientasi pada pelayanan publik, diperlukan upaya sistematis dalam memperbaiki berbagai aspek tata kelola tersebut.

3.2 ISU STRATEGIS

Isu-isu strategis merupakan permasalahan yang berdampak luas dan signifikan terhadap berbagai aspek pembangunan suatu daerah. Isu-isu ini bersifat kompleks yang mencakup berbagai dimensi, seperti ekonomi, sosial, politik, lingkungan, dan budaya. Pengidentifikasian isu-isu strategis menjadi salah satu langkah krusial dalam proses perencanaan dan pengelolaan pembangunan daerah agar arah pembangunan dapat berjalan secara lebih efektif.

Identifikasi isu-isu strategis berperan sebagai landasan dalam penyusunan kebijakan serta program pembangunan yang lebih responsif terhadap kebutuhan dan tantangan suatu wilayah. Penyusunan isu strategis daerah dilakukan dengan mempertimbangkan keterkaitan antara isu-isu strategis di tingkat internasional, nasional, dan regional. Perumusan isu strategis juga turut memperhatikan isu pembangunan berkelanjutan sebagaimana yang termuat dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) serta mempertimbangkan konteks lokal, potensi, dan tantangan yang dihadapi Kalimantan Timur guna menyusun langkah-langkah pembangunan yang lebih efektif dan berkelanjutan. Perumusan isu strategis ini dapat dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel IV.1

Matriks Potensi, Permasalahan, Isu KLHS, dan Isu Strategis Daerah Provinsi Kalimantan Timur

POTENSI DAERAH	PERMASALAHAN	ISU KLHS	ISU LINGKUNGAN DINAMIS			ISU STRATEGIS DAERAH
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1) Keberadaan universitas dan perguruan tinggi vokasi yang mendukung industri lokal; 2) Peningkatan akses pendidikan dan kesehatan melalui program subsidi dan bantuan sosial; 3) Pemberdayaan ekonomi perempuan dan kelompok marjinal; 4) Pengembangan komoditas unggulan sektor pertanian: a) Sub Sektor TP (padi, jagung); b) Sub Sektor TH (pisang); c) Sub Sektor Perkebunan (kelapa sawit, karet, kakao,	Belum meratanya kualitas dan daya saing sumber daya manusia	Kesehatan, kesejahteraan, pendidikan berkualitas, dan kesetaraan gender	Globalisasi tenaga kerja	Investasi sektor SDM	Link & match pendidikan-DUDI	Peningkatan Kualitas dan Daya Saing SDM
				Penanganan stunting	Kualitas SDM lokal	
			Perkembangan teknologi			
	Kesenjangan pendapatan dan pembangunan wilayah	Pengentasan kemiskinan, pemenuhan gizi dan ketahanan pangan		Penurunan kemiskinan	Kemiskinan dan kesenjangan	Pengentasan Kemiskinan dan Kesenjangan
			Ketahanan pangan		Ketahanan pangan	
	Masih lambatnya transformasi ekonomi	Industri, inovasi, dan infrastruktur	Perubahan geopolitik dan peta ekonomi dunia	Akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	Diversifikasi ekonomi	Transformasi Ekonomi Berbasis Industrialisasi yang Inklusif
					Pengembangan Industri	

POTENSI DAERAH	PERMASALAHAN	ISU KLHS	ISU LINGKUNGAN DINAMIS			ISU STRATEGIS DAERAH
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
lada, aren, kelapa dalam, kopi); d) Sub Sektor Peternakan (ayam petelur dan pedaging, domba dan sapi); 5) Keberadaan bandara internasional, pelabuhan internasional, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Maloy Batuta Trans Kalimantan (MBTK) dan kawasan industri; 6) Pembangunan infrastruktur konektivitas antarwilayah; 7) Penguatan peran Balikpapan dan Samarinda sebagai kota penopang IKN; 8) Perlindungan kawasan konservasi dan hutan lindung; 9) Penghijauan kembali lahan bekas			Konflik antar-negara			
	Belum meratanya infrastruktur dasar dan infrastruktur penunjang ekonomi			Pelaksanaan Astacita dan PSN	Konektivitas wilayah	Pemerataan Pembangunan Wilayah
		Perwujudan kota dan permukiman berkelanjutan (air bersih, sanitasi, dll)	Urbanisasi masyarakat dunia		Pemenuhan SPM	Infrastruktur Dasar dan Infrastruktur Penunjang Ekonomi
		Penanganan dampak pemindahan IKN		Pembangunan IKN, <i>Superhub</i> Ekonomi IKN, dan Mitra IKN	Minimnya pusat pertumbuhan	Peluang Pembangunan <i>Superhub</i> Ekonomi dan Mitra IKN
	Tingginya risiko penurunan kualitas lingkungan hidup	Pembangunan ramah lingkungan, perubahan iklim dan transisi energi	Tantangan perubahan iklim	Kebijakan ekonomi hijau dan biru	Kerusakan ekosistem	Kualitas Lingkungan Hidup dan Penurunan Emisi GRK
			Pelaksanaan agenda SDGs			
			Komitmen transisi energi			
	Belum optimalnya tata kelola pemerintahan yang baik			3 Agenda Transformasi		Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

POTENSI DAERAH	PERMASALAHAN	ISU KLHS	ISU LINGKUNGAN DINAMIS			ISU STRATEGIS DAERAH
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
tambang dan konservasi hutan; 10) Implementasi <i>e-government</i> dan digitalisasi layanan publik.						

3.2.1 Isu Pembangunan Daerah

Berdasarkan analisis terhadap permasalahan daerah, isu global, isu nasional, isu regional, serta KLHS, dihasilkan 9 (sembilan) isu strategis pembangunan daerah Kalimantan Timur sebagai berikut:

1. Peningkatan Kualitas dan Daya Saing SDM

Isu strategis dalam peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia (SDM) di Kalimantan Timur terletak pada perlunya integrasi rencana pembangunan SDM sebagai bagian dari strategi transformasi ekonomi. Kualitas SDM menjadi kunci dalam menghadapi tantangan global dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan. Akses merata terhadap layanan dasar pendidikan dan kesehatan yang berkualitas menjadi salah satu kunci untuk mengatasi kesenjangan kualitas dan daya saing sumber daya manusia. Peningkatan kualitas dan daya saing SDM juga berkaitan dengan adaptasi terhadap perkembangan teknologi dan perubahan kebutuhan pasar kerja. Masih minimnya keselarasan antara keahlian dan kompetensi SDM sesuai dengan pengembangan sektor ekonomi masa depan akan memperbesar potensi ketidaksiapan tenaga kerja dalam menghadapi perubahan pasar kerja.

Perubahan struktur ekonomi dalam proses diversifikasi dan transformasi ekonomi juga berpotensi menurunkan kesejahteraan masyarakat terdampak, misalnya hilangnya pekerjaan dan usaha yang berasal dari sektor pertambangan dan penggalian. Masyarakat yang kehilangan pekerjaan dan usaha memerlukan dukungan untuk mendapatkan pekerjaan atau usaha baru. Isu ini memerlukan mitigasi komprehensif melalui kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan lembaga pendidikan dalam penyusunan program pelatihan yang sesuai kebutuhan dunia usaha di berbagai tingkat serta penyediaan data dan analisis untuk merumuskan kebijakan peningkatan kualitas SDM yang tepat sasaran. Melalui pendekatan yang terintegrasi, Kalimantan Timur dapat menciptakan SDM unggul yang siap bersaing secara lokal maupun global, serta berkontribusi optimal terhadap pembangunan ekonomi dan sosial.

2. Pengentasan Kemiskinan dan Kesenjangan

Isu strategis pengentasan kemiskinan dan kesenjangan merupakan salah satu yang perlu mendapat perhatian utama. Ketergantungan ekonomi

pada sektor industri ekstraktif cenderung menghasilkan pertumbuhan ekonomi tanpa pemerataan kesejahteraan sehingga belum semua masyarakat di Kalimantan Timur dapat menikmati manfaat dari pertumbuhan tersebut. Selain itu, akses masyarakat terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur yang belum merata memperburuk kondisi sosial-ekonomi, terutama di daerah pedalaman dan perbatasan. Kondisi ini menyebabkan kesenjangan dalam akses terhadap pendidikan, kesehatan, serta peluang ekonomi, yang semakin memperlebar jurang kesejahteraan.

Oleh karena itu, diperlukan strategi pembangunan yang lebih inklusif dan menyeluruh serta komitmen berbagai pihak dalam mempercepat pengentasan kemiskinan dan mengurangi kesenjangan di Kalimantan Timur. Hal tersebut termasuk dalam meningkatkan akses infrastruktur, pemerataan investasi, serta penguatan sektor ekonomi berbasis masyarakat. Dengan pendekatan yang lebih inklusif dan berkeadilan, pembangunan di Kalimantan Timur dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan antarwilayah secara merata.

3. Transformasi Ekonomi Berbasis Industrialisasi yang Inklusif

Isu strategis yang perlu mendapatkan perhatian serius dalam pembangunan Kalimantan Timur adalah transformasi ekonomi berbasis industrialisasi yang inklusif. Ketergantungan ekonomi Kalimantan Timur terhadap sumberdaya tidak terbarukan masih tinggi dimana kontribusi sektor pertambangan dan penggalian terhadap PDRB Kalimantan Timur pada periode Tahun 2013-2024 selalu mendominasi pada kisaran 40-57 persen. Keberlanjutan dan resiliensi ekonomi Kalimantan Timur ditentukan oleh percepatan diversifikasi dan transformasi ekonomi daerah terutama untuk mengatasi dampak kebijakan transisi energi yang telah disepakati secara internasional. Transformasi ekonomi yang lambat dapat menghambat kemampuan daerah untuk beradaptasi terhadap perubahan ekonomi global, serta dapat mempengaruhi tingkat inklusifitas dan keberlanjutan pembangunan. Selain itu, kesenjangan sosial-ekonomi antar kelompok masyarakat dapat terjadi akibat lambatnya transformasi ekonomi.

Faktor-faktor yang menyebabkan lambatnya transformasi ekonomi di Kalimantan Timur antara lain adalah karena belum optimalnya diversifikasi ekonomi baik secara horisontal maupun vertikal, masih rendahnya investasi

pada sektor non migas dan batubara, serta belum berfungsi optimalnya kawasan-kawasan industri. Pelaksanaan transformasi ekonomi diyakini akan membangun resiliensi ekonomi daerah untuk menghadapi tantangan eksternal, seperti krisis ekonomi global dan/atau bencana, serta meningkatkan inklusifitas pembangunan. Peran Kalimantan Timur ke depan sebagai *Superhub* Ekonomi dan Mitra IKN diyakini akan mengakselerasi upaya transformasi ekonomi daerah menuju ekonomi hijau yang berkelanjutan.

4. Pemerataan Pembangunan Wilayah

Isu strategis yang menjadi perhatian utama dalam pembangunan Provinsi Kalimantan Timur adalah pemerataan pembangunan wilayah. Kesenjangan antar wilayah di Kalimantan Timur masih cukup tinggi yakni mencakup disparitas ekonomi, infrastruktur, dan akses terhadap pelayanan publik di berbagai wilayah Kalimantan Timur, khususnya di wilayah pedalaman dan perbatasan. Fenomena ini memperlihatkan ketidaksetaraan dalam distribusi manfaat pembangunan yang dapat memberikan dampak negatif terhadap kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, upaya untuk pemerataan antarwilayah menjadi esensial agar pembangunan dapat menyentuh seluruh lapisan masyarakat.

Kesenjangan yang tinggi akan menyebabkan sebagian wilayah menjadi semakin tertinggal dan kesulitan mengakses peluang pembangunan. Pemerataan pembangunan wilayah secara terfokus dan proporsional sangat dibutuhkan agar inklusifitas pembangunan dapat terwujud. Pemerataan distribusi investasi, pembangunan infrastruktur, dan pelayanan publik perlu menjadi agenda utama pembangunan wilayah di Kalimantan Timur. Belum optimalnya kebijakan pembangunan wilayah yang didasarkan pada analisa karakteristik, potensi, serta keunggulan komparatif dan kompetitif suatu wilayah menjadi salah satu hal strategis yang perlu segera diantisipasi, terlebih dengan hadirnya IKN sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi baru NKRI.

5. Infrastruktur Dasar dan Infrastruktur Penunjang Ekonomi

Isu strategis yang juga masih memerlukan perhatian dalam pembangunan Kalimantan Timur adalah infrastruktur dasar dan

infrastruktur penunjang ekonomi. Infrastruktur yang belum merata dapat menciptakan kesenjangan antarwilayah, menghambat pertumbuhan ekonomi, dan mempengaruhi akses masyarakat terhadap layanan dasar. Selain itu, tidak terintegrasinya sistem konektivitas dapat mengurangi efisiensi dalam pergerakan orang dan barang, membatasi pertumbuhan ekonomi, dan memperlambat pengembangan wilayah.

Wilayah-wilayah yang masih tertinggal di Kalimantan Timur pada umumnya masih menghadapi masalah dalam hal pemenuhan infrastruktur dasar. Hal ini perlu segera diantisipasi agar masyarakat yang tinggal pada wilayah-wilayah tersebut mendapatkan hak kehidupan yang layak, untuk selanjutnya masyarakat tersebut mampu menjadi penopang pembangunan daerahnya. Di sisi lain, persoalan konektivitas antar-wilayah juga muncul karena belum optimalnya sistem transportasi publik yang terintegrasi, baik transportasi darat, sungai, laut dan udara yang menjangkau seluruh wilayah. Selain itu, pembangunan infrastruktur teknologi informasi di era digitalisasi masa kini juga dibutuhkan untuk meningkatkan konektivitas digital di seluruh wilayah. Akses internet yang cepat dan terjangkau akan mengakselerasi pertukaran informasi, memfasilitasi bisnis, serta meningkatkan akses masyarakat terhadap perkembangan informasi dan kemudahan layanan publik.

6. Peluang Pembangunan *Superhub* Ekonomi dan Mitra IKN

Isu strategis paling aktual dalam pembangunan Kalimantan Timur kedepan adalah peluang dari pembangunan *Superhub* Ekonomi dan Mitra IKN sebagaimana telah dijabarkan dalam Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2023 tentang Rincian Rencana Induk Ibukota Nusantara. Keberhasilan daerah untuk mengidentifikasi dan memanfaatkan peluang yang dihadirkan oleh IKN menjadi langkah penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah. Pembangunan *Superhub* Ekonomi IKN memiliki konsep pengembangan kawasan-kawasan industri dengan pendekatan aglomerasi serta pengembangan konsep *tri-city* Balikpapan- Samarinda-IKN yang didukung rantai pasok dari daerah-daerah Mitra IKN. Kedepannya, *Superhub* Ekonomi IKN diproyeksikan dapat menjadi katalisator untuk menciptakan lapangan kerja, meningkatkan investasi, dan menggerakkan sektor-sektor ekonomi yang strategis di Provinsi Kalimantan Timur.

Sinergi dan kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan sektor swasta sangat diperlukan untuk dapat mengoptimalkan perolehan manfaat dari pembangunan *Superhub* Ekonomi dan Mitra IKN, sekaligus meminimalisir risiko dan dampak negatif yang mungkin muncul. Salah satu hal penting yang perlu diperhatikan adalah aspek peningkatan kapasitas SDM sesuai kualifikasi pasar industri. Hal ini akan meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam kegiatan industri-industri yang dikembangkan sesuai klaster *Superhub* Ekonomi IKN, yang pada akhirnya dapat memberikan dampak positif yang lebih luas terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat. Selain itu, tantangan yang perlu diantisipasi sebagai dampak dari Pembangunan *Superhub* Ekonomi dan Mitra IKN adalah pemerataan pembangunan antar-wilayah dan keberlanjutan lingkungan. Kedua hal ini harus dapat dikendalikan agar pembangunan daerah dapat berjalan secara beriringan dan berkelanjutan.

7. Kualitas Lingkungan Hidup dan Penurunan Emisi GRK

Isu strategis yang wajib diperhatikan dalam pembangunan Provinsi Kalimantan Timur adalah kualitas lingkungan hidup dan penurunan emisi gas rumah kaca (GRK). Sebagai daerah yang ekonominya digerakan oleh sektor ekonomi berbasis lahan, resiko penurunan kualitas lingkungan hidup akan terus meningkat seiring dengan bertambahnya aktivitas ekonomi masyarakat. Sebagai bagian dari paru-paru dunia, upaya penurunan emisi gas rumah kaca menjadi prioritas dalam menghadapi dampak perubahan iklim global dan pencegahan kerusakan lingkungan. Upaya tersebut perlu difokuskan pada kegiatan-kegiatan ekonomi yang berpotensi menjadi sumber utama emisi GRK Kalimantan Timur hingga tahun 2045 yaitu penggunaan energi fosil, alih fungsi lahan, dan kegiatan produksi yang berisiko meningkatkan emisi GRK. Transisi menuju energi bersih, perlindungan lahan berhutan dan lahan gambut, dan penerapan perkebunan dan produksi pangan berkelanjutan merupakan langkah kunci mencapai *net zero emissions* yang ditargetkan terwujud pada tahun 2060 atau lebih cepat.

Dinamika pembangunan daerah akan sangat mempengaruhi pola tekanan terhadap lingkungan hidup. Kehadiran IKN diyakini akan menarik jumlah penduduk yang cukup besar ke Kalimantan Timur yang juga akan meningkatkan resiko penurunan kualitas lingkungan hidup. Selain itu,

konsepsi transformasi ekonomi yang berfokus pada pengembangan kawasan-kawasan industri juga perlu diiringi dengan kesiapan pengelolaan limbah industri untuk mencegah masifnya polusi udara, kerusakan ekosistem, serta penurunan kualitas air. Lingkungan yang sehat dan berkelanjutan menjadi faktor kunci dalam mendukung kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi. Pemerintah perlu memastikan bahwa kebijakan-kebijakan yang diterapkan dapat memberikan manfaat yang seimbang bagi perekonomian masyarakat dan lingkungan hidup. Isu mengenai kualitas lingkungan hidup dan emisi GRK tidak hanya berfokus pada pelestarian alam saja, namun juga mempertimbangkan kebutuhan dan keseimbangan pembangunan wilayah.

8. Kemandirian Pangan

Isu strategis yang krusial perlu diperhatikan dalam pembangunan Kalimantan Timur adalah terkait dengan kemandirian pangan. Sebagai daerah yang terdampak langsung dari pembangunan IKN, kebutuhan pangan di Kalimantan Timur akan meningkat secara signifikan. Padahal saat ini Kalimantan Timur masih menghadapi tantangan berupa keterbatasan lahan pertanian produktif yang menyebabkan keterbatasan produksi pangan secara mandiri. Hal ini menyebabkan Kalimantan Timur memiliki ketergantungan impor bahan pangan dari daerah lain. Selain itu, permasalahan terkait kemandirian pangan yang dihadapi adalah akses distribusi pangan yang belum memadai karena kondisi geografis yang luas dan infrastruktur pendukung pertanian yang belum merata, masih kurangnya jumlah petani muda terampil yang mampu menerapkan konsep pertanian modern, perubahan iklim yang mempengaruhi pola curah hujan dan kondisi tanah yang berdampak pada produktivitas pertanian, serta distribusi, integrasi dan pengelolaan sumberdaya air untuk irigasi yang masih perlu diperbaiki. Keseluruhan isu tersebut memerlukan pendekatan strategis yang terintegrasi dan komprehensif, agar Kalimantan Timur dapat memperkuat sektor pangan, hortikultura, peternakan, dan perikanan untuk menciptakan kemandirian pangan yang berkelanjutan

9. Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Isu strategis yang perlu mendapat perhatian dalam pembangunan Kalimantan Timur adalah tata kelola pemerintahan yang profesional dan

akuntabel. Tata kelola pemerintahan yang baik memiliki peran krusial dalam menciptakan lingkungan yang kondusif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, pembangunan wilayah, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pengembangan tata pemerintahan yang profesional melibatkan peningkatan kualitas dan kapasitas SDM di sektor pemerintahan. Hingga saat ini, masih terdapat disparitas dalam kemampuan teknis, manajerial, dan penggunaan teknologi di berbagai instansi pemerintahan yang menghambat efektivitas pelaksanaan program dan kebijakan strategis. Pemerintahan harus membangun SDM Aparatur Sipil Negara (ASN) yang pekerja keras, dinamis, *agile*, terampil, dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) agar mampu bersaing dan menjawab tantangan pembangunan di masa depan.

Selain itu, transparansi dan akuntabilitas juga masih menjadi tantangan, khususnya dalam hal pengelolaan anggaran dan pelayanan publik. Tingginya harapan masyarakat terhadap pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi memerlukan penguatan sistem pengawasan internal, penerapan *e-governance* secara menyeluruh, serta integrasi sistem informasi di seluruh perangkat daerah. Pemberdayaan dan pelibatan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi kebijakan publik juga penting untuk menciptakan hubungan harmonis antara pemerintah dan masyarakat, serta memastikan bahwa kebijakan yang disusun telah sesuai dengan kebutuhan serta aspirasi publik. Melalui konsep pembangunan yang terukur, monitoring yang intensif, dan evaluasi berkelanjutan, Kalimantan Timur dapat meningkatkan kepercayaan publik sekaligus mewujudkan pemerintahan yang responsif, inovatif, dan berdaya saing global.

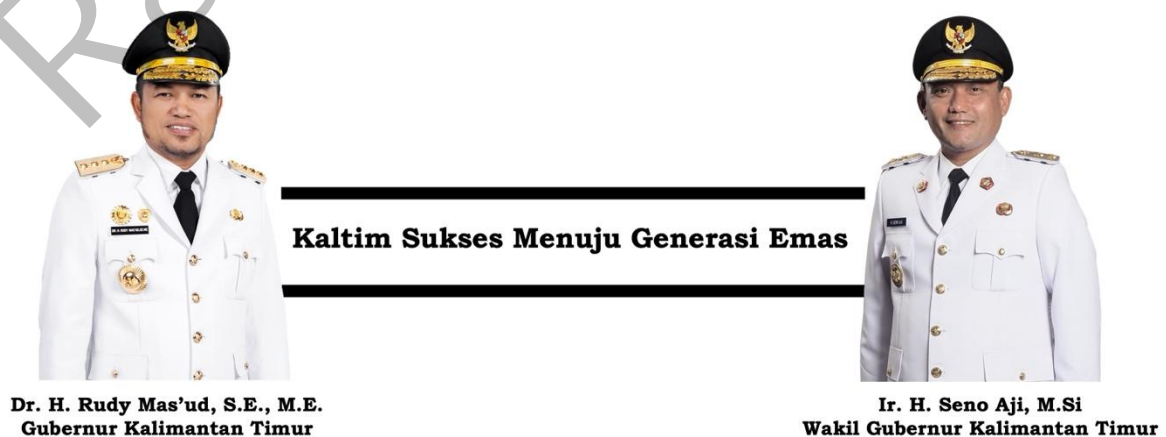
BAB V

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dijelaskan bahwa RPJMD adalah dokumen rencana pembangunan 5 (lima) tahunan yang menjabarkan visi, misi dan program kepala daerah yang selanjutnya memuat tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Rumusan visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Kalimantan Timur periode 2025–2029 disusun dengan berpedoman pada visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2025-2030. Rumusan tersebut juga diselaraskan dengan visi, sasaran visi, misi, arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan daerah yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kalimantan Timur Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025-2045. Selain itu, sebagai bagian dari integral pembangunan Nasional, maka perumusan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan dalam RPJMD Tahun 2025-2029 juga telah mempedomani visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029.

5.1. Visi Pembangunan Daerah

Berdasarkan visi dan misi pembangunan yang diusung oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2025-2030, Bapak Dr. H. Rudy Mas'ud S.E., M.E. dan Bapak Ir. H. Seno Aji, S.E., M.Si, telah ditetapkan Visi RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2029, yaitu :



Gambar V.1. Visi RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2029

Visi Kaltim Sukses Menuju Generasi Emas mengandung makna, bahwa pelaksanaan pembangunan di Kalimantan Timur tidak semata hanya berorientasi pada sukses kemajuan daerahnya, tetapi juga harus mengutamakan kesuksesan masyarakatnya. Pembangunan daerah harus dapat menjamin terwujudnya masyarakat yang sejahtera dan bahagia. Pelaksanaan pembangunan harus berpijak pada kemajuan dan kesuksesan masyarakat yang diraih secara beriringan dengan menumbuhkan semangat dan kepercayaan bahwa **“Semua Bisa Sukses”**. Pembangunan yang dilaksanakan harus mampu membawa masyarakat Kalimantan Timur menjadi lebih cerdas, lebih sehat, lebih produktif, dan lebih berakhlak mulia. Adapun penjelasan kata kunci visi RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

Kaltim Sukses, yang dimaknai dengan keberhasilan membangun Kalimantan Timur sebagai pusat perekonomian baru Nasional di Kawasan Timur Indonesia yang dilaksanakan secara inklusif dan berkelanjutan. Akselerasi kemajuan pembangunan ekonomi dilaksanakan dengan berlandaskan pada upaya transformasi ekonomi menuju basis hilirisasi. Pertumbuhan ekonomi tersebut harus diiringi dengan berkurangnya kemiskinan dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat telah terpenuhi dan ketimpangan semakin berkurang dengan pembangunan infrastruktur secara berkeadilan. Selain itu, seluruh aspek pembangunan juga dilaksanakan dengan berorientasi pada upaya pelestarian lingkungan hidup dalam rangka menjamin keberlanjutan kehidupan generasi penerus.

Generasi Emas, yang dimaknai dengan adanya tekad dan semangat kuat untuk membangun kualitas Sumber Daya Manusia Kalimantan Timur menjadi generasi yang unggul dan produktif. Hal tersebut menjadi kunci keberhasilan peningkatan daya saing dan penggerak pertumbuhan ekonomi daerah, khususnya dalam mengentaskan masyarakat dari kemiskinan. Generasi yang sehat, cerdas, produktif dan berakhlak mulia adalah sasaran pembangunan yang harus diwujudkan. Penyiapan manusia yang unggul diyakini akan meningkatkan peran dan kontribusi Masyarakat dalam pembangunan daerah, sehingga dampaknya dapat dirasakan dan dimanfaatkan untuk sebesar-sebesarnya kemakmuran masyarakat. Perwujudan Generasi Emas akan membangun manusia di Kalimantan Timur untuk menjadi generasi penerus berdaya saing menuju Indonesia Emas 2045.

5.2. Misi Pembangunan Daerah

Dalam rangka mewujudkan visi RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2026, ditetapkan 6 (enam) misi pembangunan sebagai berikut :

Misi 1, Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Sejahtera;

Misi pertama berhubungan dengan upaya transformasi sosial untuk membentuk manusia yang sehat, cerdas, kreatif, produktif, berdaya saing dan sejahtera. Upaya perlu didasari dengan peningkatan ketersediaan dan kualitas layanan kesehatan, memastikan bahwa setiap individu memiliki akses penuh untuk mencapai kesehatan fisik dan mental. Pembangunan sektor pendidikan diarahkan untuk menciptakan lingkungan belajar yang merangsang kreativitas dan pengembangan potensi individu, sehingga setiap warga dapat menjadi manusia yang cerdas dan kreatif. Pendidikan vokasi didorong lebih berkembang dan spesifik mengarah pada pengembangan ekonomi unggulan dan potensial masa depan untuk menghasilkan manusia yang produktif. Perlindungan sosial dilaksanakan untuk memastikan bahwa setiap anggota masyarakat memiliki jaminan keamanan dan keberlanjutan dalam berbagai aspek kehidupan. Secara proses pelaksanaan misi ini dimulai dari peningkatan pemenuhan layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial, yang diharapkan dapat mengakselerasi pembangunan sumber daya manusia yang berdaya saing. Tahapan berikutnya adalah peningkatan inklusifitas ketenagakerjaan dari sumber daya manusia yang tersedia serta pemberian jaminan perlindungan sosial bagi seluruh masyarakat. Pada akhirnya hal tersebut akan menghasilkan sumber daya manusia Provinsi Kalimantan Timur yang unggul dan sejahtera.

Misi 2, Mewujudkan Kalimantan Timur sebagai Pusat Ekonomi Baru yang Inklusif Berbasis Industrialisasi Komoditas Unggulan Daerah;

Misi kedua menggambarkan upaya untuk meningkatkan peran dan pengaruh daerah dalam perekonomian Nasional. Kalimantan Timur akan dibangun sebagai pusat aglomerasi yang didukung dengan stabilitas ekonomi-lingkungan serta penguatan jaringan rantai nilai global dan domestik. Perekonomian daerah harus tumbuh menjadi perekonomian yang tangguh, berdampak, dan berkelanjutan. Peningkatan produktivitas secara masif, *shifting* struktur perekonomian melalui percepatan diversifikasi ekonomi pada sektor sekunder dan tersier, serta penerapan ekonomi berkelanjutan menjadi sasaran utama. Instrumen utama pelaksanaan misi ini adalah

melalui pengembangan komoditi unggulan non-migas dan batubara, pembangunan kawasan-kawasan industri, serta optimalisasi hilirisasi untuk perluasan nilai tambah. Untuk peningkatan inklusifitas, hal tersebut perlu diiringi dengan penyiapan kompetensi tenaga kerja. Hilirisasi diarahkan pada basis sumber daya alam terbarukan dalam konteks pelaksanaan transformasi ekonomi. Selain itu, pembangunan ekonomi juga diarahkan pada sektor-sektor potensial ekonomi kerakyatan yang disesuaikan dengan karakteristik daerah. Pengembangan daya saing sektor UMKM dan ekonomi kreatif lokal secara langsung akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Perwujudan hal tersebut diyakini dapat terakselerasi dengan memanfaatkan peluang daerah sebagai *Superhub* Ekonomi IKN dan daerah Mitra IKN.

Misi 3, Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Guna Menunjang Kegiatan Perekonomian, Pelayanan Publik dan Kesehatan;

Misi ketiga menggambarkan upaya untuk mewujudkan pemerataan pembangunan antar-wilayah melalui peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana infrastruktur. Pembangunan infrastruktur dimaksud mencakup infrastruktur dasar yang berhubungan langsung dengan pelayanan publik maupun infrastruktur penunjang ekonomi. Perluasan aksesibilitas dan konektivitas antar-wilayah menjadi salah satu kunci utama pengembangan ekonomi daerah, terutama di wilayah tertinggal dan perbatasan. Pembangunan infrastruktur dilaksanakan dengan berwawasan lingkungan yang disesuaikan dengan rencana pemanfaatan ruang. Fokus pembangunan infrastruktur diprioritaskan pada pembangunan infrastruktur jalan, air baku dan air bersih, sanitasi, permukiman, transportasi, kesehatan, pendidikan, kelistrikan, serta telekomunikasi. Pembangunan infrastruktur penunjang pengembangan sektor ekonomi juga terus dilakukan, seperti infrastruktur penunjang pertanian, pariwisata, industri, dan sektor lainnya.

Misi 4, Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Profesional, dan Berintegritas Berbasis Teknologi Informasi;

Misi keempat menjadi faktor penentu bagi keberhasilan pelaksanaan misi-misi lainnya. Pada era reformasi birokrasi saat ini, perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik menjadi salah satu fokus dari reformasi birokrasi. Pemerintahan perlu ditopang oleh aparatur dengan kompetensi yang memadai, kinerja yang baik, berintegritas, berinovasi, bertanggung jawab,

serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, sebagai modal untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, profesional, dan efektif. Kondisi ini diharapkan mampu meningkatkan kinerja pemerintah dalam merumuskan kebijakan publik yang berkualitas, menciptakan pelayanan publik yang prima, serta menciptakan kepastian hukum dan akuntabilitas publik. Upaya peningkatan tata kelola pemerintahan juga dilaksanakan melalui harmonisasi antar level pemerintahan, pembenahan sistem birokrasi, mulai dari penataan kewenangan, standar operasional prosedur, kerjasama, sinergi, dan integrasi organisasi, serta penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Selain itu, pemerintah daerah juga melaksanakan pembenahan manajemen kepegawaian, serta upaya-upaya terobosan guna meningkatkan kapasitas, mutu, dan kinerja aparatur pemerintah. Keterbukaan layanan informasi publik, penguatan akuntabilitas serta kecepatan layanan perijinan, juga menjadi fokus pelaksanaan misi ini agar tingkat kepuasan layanan masyarakat semakin meningkat.

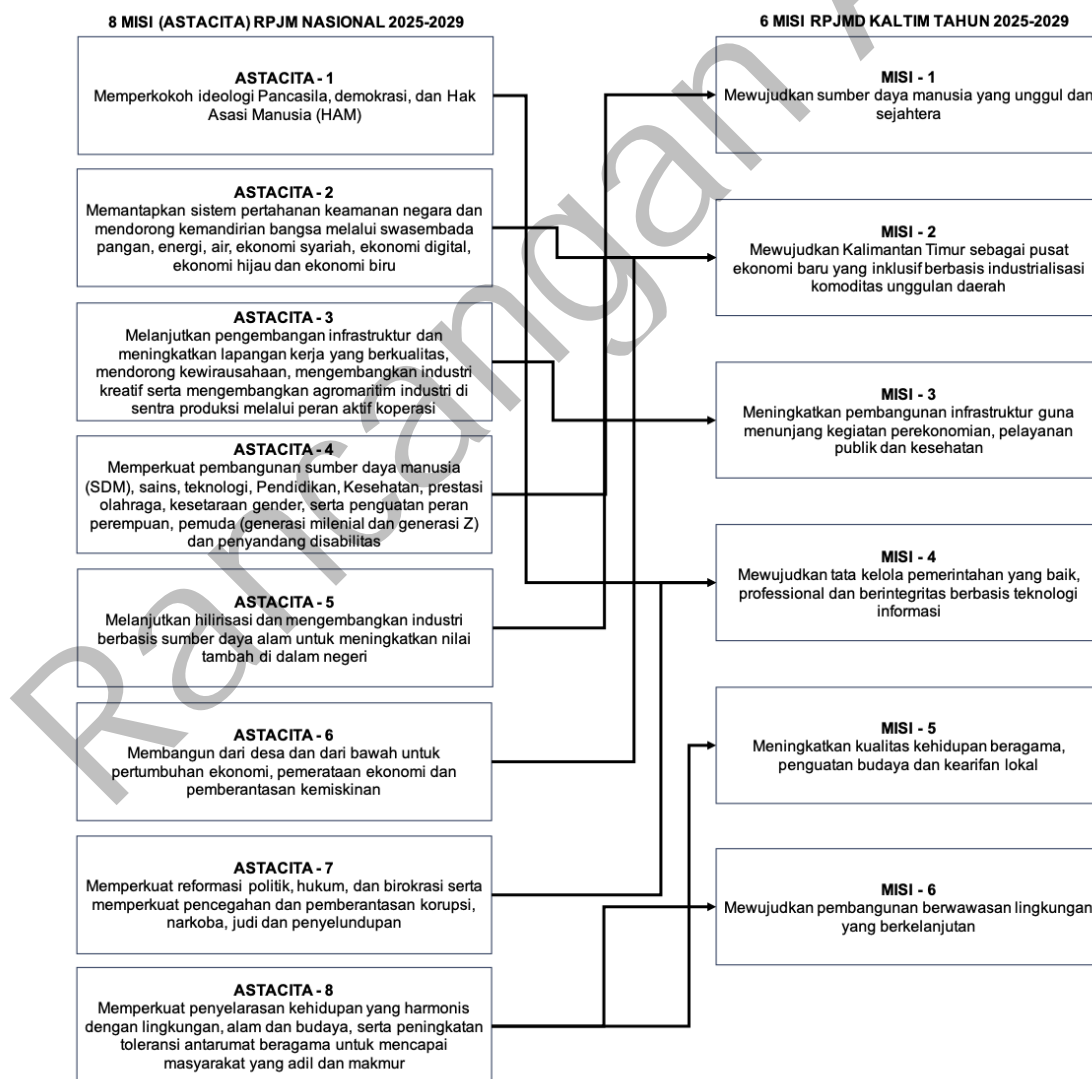
Misi 5, Meningkatkan Kualitas Kehidupan Beragama serta Penguatan Budaya dan Kearifan Lokal;

Misi kelima menjadi landasan bagi terwujudnya kehidupan bermasyarakat yang damai, aman, dan tenteram di tengah heterogenitas penduduk Kalimantan Timur. Peningkatan kualitas kehidupan beragama dilakukan dengan meningkatkan keimanan, toleransi, dan kerukunan antarumat beragama. Setiap warga masyarakat diberikan akses, sarana dan prasarana yang baik untuk dapat menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Nilai-nilai keagamaan ini selanjutnya diperkuat dengan nilai-nilai kebudayaan melalui pelestarian tradisi, budaya, dan kearifan lokal dalam kehidupan bermasyarakat. Budaya dan kearifan lokal Kalimantan Timur diarahkan untuk terus berkembang dan beradaptasi mengikuti kemajuan zaman. Internalisasi nilai-nilai agama, budaya, dan kearifan lokal dalam berbagai aspek kehidupan pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pembangunan daerah.

Misi 6, Mewujudkan Pembangunan Berwawasan Lingkungan yang Berkelanjutan;

Misi keenam menggambarkan upaya pelaksanaan amanat dari tujuan pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berwawasan lingkungan akan menjamin keberlanjutan kehidupan yang baik bagi generasi mendatang di

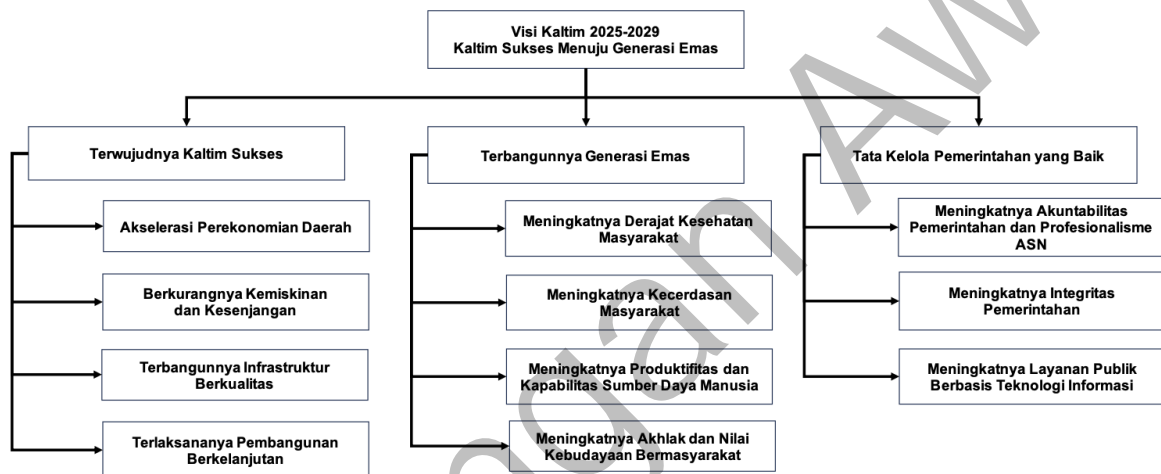
tengah tantangan dan isu perubahan iklim. Implementasi pembangunan rendah karbon melalui konsep ekonomi hijau dan ekonomi biru diperlukan agar pemanfaatan sumber daya alam untuk kepentingan sosial dan kegiatan ekonomi tetap dalam koridor tidak merusak kualitas lingkungan hidup. Upaya pemerintah daerah untuk terus mengendalikan tingkat emisi Gas Rumah Kaca tidak hanya berdampak positif bagi keberlanjutan Kalimantan Timur semata, namun juga Indonesia dan Dunia. Pengembangan inovasi dan penerapan teknologi hijau juga perlu dioptimalisasi agar penggunaan sumber daya menjadi lebih efisien untuk mengurangi dampak lingkungan. Pembangunan berwawasan lingkungan menjadi pilar penting agar pelaksanaan misi lainnya tetap berada dalam koridor pilar keberlanjutan melalui sinergitas pembangunan ekonomi-sosial-lingkungan hidup menuju pertumbuhan hijau. Pada akhirnya pelaksanaan pembangunan berwawasan lingkungan yang berkelanjutan akan mewujudkan kesinambungan pembangunan jangka panjang untuk pencapaian kesejahteraan masyarakat.



Gambar V.2. Keterkaitan Astacita dengan Misi RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2029

5.3. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah

Pencapaian visi pembangunan daerah selanjutnya diturunkan ke dalam rumusan tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Rumusan tujuan pembangunan merupakan rangkaian kinerja yang menggambarkan kondisi tercapainya visi selama 5 (lima) tahun, sedangkan sasaran pembangunan merupakan rangkaian kinerja dari hasil pelaksanaan pembangunan daerah untuk pencapaian tujuan pembangunan. Rumusan tujuan dan sasaran pembangunan daerah ini selanjutnya menjadi sebuah rangkaian kinerja yang terhubung secara cascading dengan pencapaian visi, dengan tetap memperhatikan keterkaitan dengan pelaksanaan 6 (enam) misi pembangunan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2029 yang akan menjadi dasar perumusan arah kebijakan pembangunan daerah.



Gambar V.3. Cascading Kinerja Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah

Pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan diukur dengan indikator kinerja dan target kinerja dari tahun 2025 sampai dengan tahun 2030. Indikator kinerja yang digunakan dalam rumusan tujuan dan sasaran pembangunan daerah telah menginternalisasi indikator sasaran visi dan sebagian indikator utama pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2045. Sedangkan untuk target kinerja juga telah memperhatikan target indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dalam RPJPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2045 tahap pertama. Khusus untuk target indikator makro pembangunan, telah disusun dengan memperhatikan target kinerja yang ditetapkan dalam RPJM Nasional Tahun 2025-2029 untuk Provinsi Kalimantan Timur. Terdapat 3 (tiga) tujuan dan 11 (sebelas) sasaran RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2029 yang dapat dilihat pada Tabel 5.1 sebagai berikut.

Tabel V.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2029

TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	BASELINE TAHUN 2024	TARGET KINERJA					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
KATA KUNCI VISI : KALTIM SUKSES								
Tujuan 1 : Terwujudnya Kaltim Sukses	Kontribusi PDRB Provinsi (%)	3,90	3,92–3,95	3,95–3,97	3,97–3,99	3,99–4,00	4,00–4,01	4,01–4,05
Sasaran 1 : Akselerasi Perekonomian Daerah	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	6,17	6,17–6,40	6,40–7,20	7,20–8,30	8,30–8,50	8,50–8,60	8,60–8,75
	Kontribusi PDRB Industri Pengolahan (%)	18,26	18,26–18,28	18,28–18,46	18,46–18,74	18,74–19,27	19,27–20,03	20,03–21,04
	Indeks Daya Saing Daerah (indeks)	3,30*	3,35–3,40	3,40–3,45	3,45–3,49	3,49–3,53	3,53–3,57	3,57–3,62
Sasaran 2 : Berkurangnya Kemiskinan dan Kesenjangan	Tingkat Kemiskinan (%)	5,78	5,05–5,78	4,70–5,20	4,20–4,70	3,70–4,20	3,37–3,70	3,06–3,37
	Indeks Gini (indeks)	0,321	0,310–0,321	0,313–0,318	0,308–0,313	0,303–0,308	0,298–0,303	0,293–0,298
Sasaran 3 : Terbangunnya Infrastruktur Berkualitas	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (indeks)	7,89	7,89–8,01	8,01–8,13	8,13–8,26	8,26–8,38	8,38–8,50	8,50–9,00
Sasaran 4. Terlaksananya Pembangunan Berkelanjutan	Indonesia <i>Blue Economy Index</i> (indeks)	NA	27,04–32,92	32,92–38,81	38,81–44,69	44,69–50,58	50,58–56,46	56,46–62,35

TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	BASELINE TAHUN 2024	TARGET KINERJA					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Indeks Ekonomi Hijau Daerah (indeks)	63,04*	65,42– 68,66	68,66– 71,89	71,89– 75,13	75,13– 78,36	78,36– 81,59	81,59– 84,83
	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (indeks)	76,63	76,63– 80,20	80,20– 80,52	80,52– 80,83	80,83– 81,15	81,15– 81,46	81,46– 81,78
	Intensitas Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (%)	38,59	38,59– 40,82	55,05– 60,70	60,70– 60,80	60,80– 65,90	65,90– 67,46	67,46– 72,63
	Indeks Risiko Bencana (indeks)	136,11	131,64– 136,11	127,17– 131,64	122,70– 127,17	118,23– 122,70	113,76– 114,56	108,83– 113,76
KATA KUNCI VISI : GENERASI EMAS								
Tujuan 2 : Terbangunnya Generasi Emas	Indeks Modal Manusia (indeks)	0,56*	0,59	0,60	0,61	0,61	0,62	0,63
Sasaran 5 : Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Umur Harapan Hidup (UHH)	74,94	74,94– 75,17	75,17– 75,40	75,40– 75,62	75,62– 75,85	75,85– 76,08	76,08– 76,31
	Prevalensi Stunting (%)	22,9	19,80– 21,35	18,73– 19,80	17,65– 18,73	16,58– 17,65	15,50– 16,58	14,29– 15,50
Sasaran 6 : Meningkatnya Kecerdasan Masyarakat	Harapan Lama Sekolah (tahun)	14,03	14,12– 14,13	14,13– 14,23	14,23– 14,32	14,32– 14,42	14,50– 14,51	14,51– 14,60

TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	BASELINE TAHUN 2024	TARGET KINERJA					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Rata-Rata Lama Sekolah (tahun)	10,02	10,55–10,57	10,57–10,75	10,75–10,93	10,93–11,10	11,10–11,28	11,28–11,59
	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun Ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%)	13,11*	13,80–14,50	14,50–15,19	15,19–15,89	15,89–16,58	16,58–17,28	17,28–17,97
Sasaran 7 : Meningkatnya Produktifitas dan Kapabilitas Sumber Daya Manusia	PDRB Per-Kapita (Juta Rp)	212,18	212,18–221,55	221,55–232,10	232,10–246,65	246,65–263,58	263,58–282,92	282,92–305,14
	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,14	4,60–5,14	4,54–5,07	4,50–4,82	4,30–4,77	4,14–4,75	3,95–4,68
Sasaran 8 : Meningkatnya Akhlak dan Nilai Kebudayaan Masyarakat	Indeks Kerukunan Umat Beragama (indeks)	78,19	78,19–78,50	78,50–78,80	78,80–79,11	79,11–79,41	79,67–79,72	79,72–80,12
	Indeks Pembangunan Kebudayaan (indeks)	57,56*	58,80–58,84	58,84–59,46	59,46–60,08	60,08–60,69	61,18–61,31	61,31–61,93

TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	BASELINE TAHUN 2024	TARGET KINERJA					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
KONDISI PEMUNGKIN PELAKSANAAN VISI : PEMERINTAHAN YANG BAIK								
Tujuan 3 : Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Indeks Reformasi Birokrasi (indeks)	85,16	85,16– 85,84	85,84– 86,53	86,53– 87,22	87,22– 87,92	87,92– 88,63	88,63– 89,34
Sasaran 9 : Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintahan dan Profesionalisme ASN	Nilai AKIP (nilai)	78,50	78,50– 79,19	79,19– 79,78	79,78– 80,36	80,36– 80,95	80,95– 81,54	81,54– 82,13
	Indeks Inovasi Daerah (indeks)	61,74	61,7462,87	62,87– 64,00	64,00– 65,13	65,13– 66,26	66,26– 67,39	67,39– 68,52
	Sistem Merit (skor)	271*	279–286	286–294	294–301	301–309	309–316	316–324
	Indeks Pengelolaan Aset (indeks)	2,26	2,26–2,33	2,33–2,40	2,40–2,47	2,47–2,54	2,54–2,61	2,61–2,69
Sasaran 10 : Meningkatnya Integritas Pemerintahan	Indeks Integritas Nasional (indeks)	72,75	75,75– 75,84	75,84– 76,81	76,81– 77,78	77,78– 78,75	78,75– 79,72	79,72– 80,91
Sasaran 11 : Meningkatnya Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Indeks Pelayanan Publik (indeks)	4,00*	4,03–4,06	4,06–4,09	4,09–4,12	4,12–4,14	4,14–4,17	4,17–4,20
	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (indeks)	3,79	3,79–3,85	3,85–3,91	3,91–3,97	3,97–4,03	4,03–4,09	4,09–4,15

Keterangan : *) Capaian Tahun 2023

Tujuan dan sasaran pembangunan Provinsi Kalimantan Timur tahun 2025-2029 ini telah selaras dengan 3 (tiga) agenda transformasi Nasional, yaitu transformasi ekonomi (tujuan 1), transformasi sosial (tujuan 2), dan transformasi tata kelola sebagai landasan pencapaian visi (tujuan 3). Selain itu, rumusan tujuan dan sasaran pembangunan juga telah diselaraskan dengan 17 (tujuh belas) agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDG's), yang mengarah pada upaya pengentasan persoalan sosial, pertumbuhan ekonomi, dan pelestarian lingkungan dalam kerangka kebijakan Pembangunan Hijau. Keselarasan antara RPJMD dengan tujuan SGD's dapat dilihat pada Tabel 5-2.

Tabel V.2.
Keselarasan Tujuan dan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ *Sustainable Developments Goals* (SDGs)

Sasaran RPJMD Prov. Kaltim Tahun 2025-2029	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDG's
Tujuan 1 : Terwujudnya Kaltim Sukses	
Sasaran 1 : Akselerasi Perekonomian Daerah	(T-2) Tanpa Kelaparan
	(T-8) Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi
	(T-9) Industri, Inovasi dan Infrastruktur
	(T-12) Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab
Sasaran 2 : Berkurangnya Kemiskinan dan Kesenjangan	(T-1) Tanpa Kemiskinan
	(T-2) Tanpa Kelaparan
	(T-10) Berkurangnya Kesenjangan
Sasaran 3 : Terbangunnya Infrastruktur Berkualitas	(T-6) Air Bersih dan Sanitasi Layak
	(T-7) Energi Bersih dan Terjangkau
	(T-9) Industri, Inovasi dan Infrastruktur
Sasaran 4. Terlaksananya Pembangunan Berkelanjutan	(T-7) Energi Bersih dan Terjangkau
	(T-11) Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan
	(T-13) Penanganan Perubahan Iklim
	(T-14) Ekosistem Lautan
	(T-15) Ekosistem Daratan
Tujuan 2 : Terbangunnya Generasi Emas	
Sasaran 5 : Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	(T-3) Kehidupan Sehat dan Sejahtera
Sasaran 6 : Meningkatnya Kecerdasan Masyarakat	(T-4) Pendidikan Berkualitas
Sasaran 7 : Meningkatnya Produktifitas dan Kapabilitas Sumber Daya Manusia	(T-5) Kesenjangan Gender
	(T-8) Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi

Sasaran RPJMD Prov. Kaltim Tahun 2025-2029	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDG's
Sasaran 8 : Meningkatnya Akhlak dan Nilai Kebudayaan Masyarakat	(T-16) Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh
Tujuan 3 : Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	
Sasaran 9 : Meningkatnya Profesionalitas Layanan Pemerintahan	(T-16) Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh
Sasaran 10 : Meningkatnya Integritas Pemerintahan	(T-16) Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh
Sasaran 11 : Meningkatnya Digitalisasi Pemerintahan	(T-17) Kemitraan untuk Mencapai Tujuan

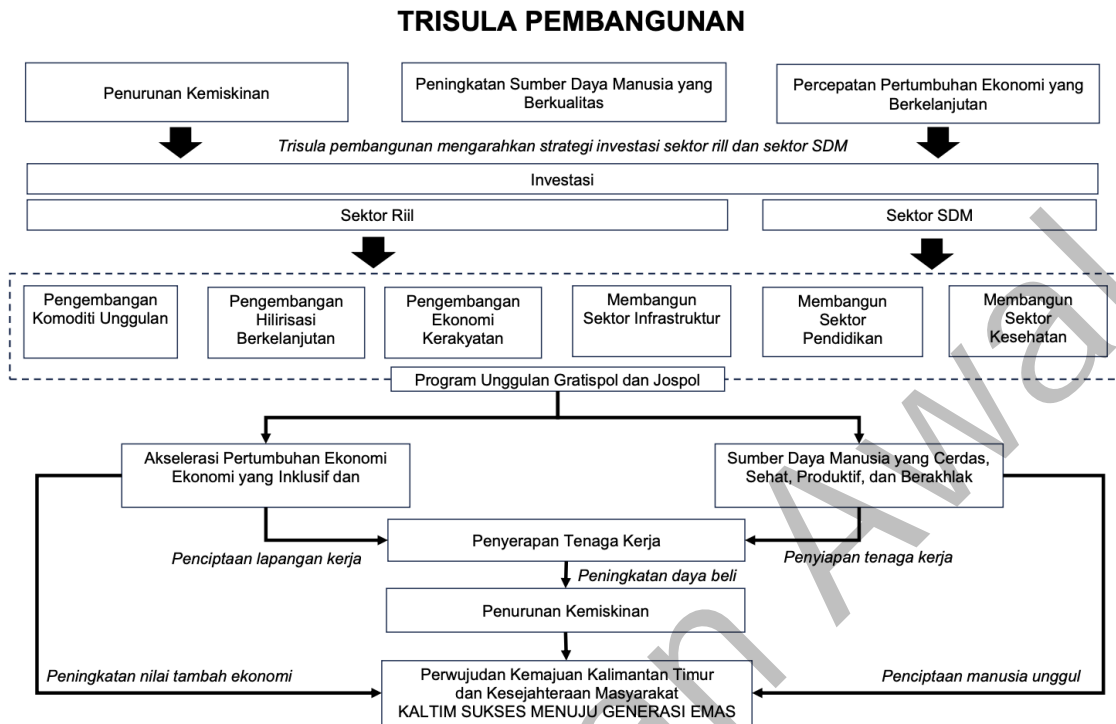
Tujuan RPJMD juga menggambarkan capaian visi dalam kaitannya dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yang bertujuan untuk menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang inklusif dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

5.4. Program Unggulan

Konsepsi pencapaian visi dan keberhasilan pelaksanaan misi RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2029 yang telah dioperasionalkan ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah selanjutnya membutuhkan dukungan pelaksanaan program unggulan. Hasil dari pelaksanaan program unggulan ini dianggap dapat menjadi pengungkit utama upaya pencapaian visi dan pelaksanaan misi dimaksud. Pendefinsian program unggulan yang dimaksud disini bukan merupakan nomenklatur program yang diambil berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri, namun lebih kepada program-program kerja yang telah menjadi janji politik atau direktif Gubernur dan Wakil Gubernur untuk dilaksanakan dalam 5 (lima) tahun kedepan.

Terdapat 2 (dua) program unggulan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2025-2030, yaitu program unggulan Gratispol dan program unggulan Jospol. Kedua program unggulan tersebut menekankan pada upaya percepatan pembangunan di sektor sumber daya manusia, sektor ekonomi, dan sektor infrastruktur sebagai sebuah investasi untuk mewujudkan

“Kaltim Sukses Menuju Generasi Emas”. Pelaksanaan program unggulan dimaksud juga menjadi bagian penting dari upaya pelaksanaan Trisula Pembangunan Nasional yakni penurunan kemiskinan, peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas, serta percepatan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.



Gambar V.4. Keterhubungan Program Unggulan Gubernur dan Wakil Gubernur dengan Trisula Pembangunan Nasional

Program Unggulan Gratispol, terdiri dari 7 (tujuh) kegiatan unggulan yang mendukung upaya perwujudan Generasi Emas, yaitu :

1) Gratis Bersekolah SMA/SMK Hingga S3;

Merupakan kegiatan unggulan yang menjamin bahwa seluruh penduduk usia sekolah di Kalimantan Timur dapat bersekolah SMA/SMK secara gratis. Kegiatan ini mengusung semangat bahwa tidak ada anak-anak di Kalimantan Timur yang tidak bersekolah hingga SMA/SMK hanya karena alasan tidak mampu membayar uang sekolah. Instrumen utama yang digunakan untuk pembiayaan kegiatan unggulan ini adalah melalui optimalisasi Bantuan Operasional Sekolah Provinsi (BOSP). Sementara itu untuk pendidikan tinggi, setiap penduduk usia produktif juga akan diberikan bantuan pembiayaan untuk dapat melanjutkan kuliah Sarjana (S1), Magister (S2), hingga Doktoral (S3) secara gratis. Instrumen utama yang digunakan untuk pelaksanaan kegiatan unggulan ini adalah melalui pembiayaan Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang dikerjasamakan dengan institut dan universitas.

Adapun indikator dan target kinerja kegiatan unggulan Gratis Bersekolah SMA/SMK adalah sebagai berikut :

No	Kinerja	Indikator Kinerja	Target Kinerja	
			Tahun 2025	Tahun 2030
1.	Terpenuhinya biaya sekolah SMA/SMK dan biaya kuliah S1, S2, S3 bagi warga Kaltim secara gratis	Jumlah Siswa Penerima Manfaat Gratispol SMA/SMK	184.600 siswa	230.800 siswa
		Jumlah Mahasiswa Penerima Manfaat Gratispol S1, S2, S3 Dalam Kaltim	21.500 mahasiswa	108.000 mahasiswa
		Jumlah Mahasiswa Penerima Manfaat Gratispol S1, S2, S3 Luar Kaltim	650 mahasiswa	1.600 mahasiswa
		Jumlah Mahasiswa Penerima Manfaat Gratispol S2 dan S3 Luar Negeri	60 mahasiswa	130 mahasiswa
		Jumlah Mahasiswa Penerima Manfaat Gratispol Khusus/ Kerjasama	1.500 mahasiswa	2.000 mahasiswa

*)ket : Asumsi penambahan jumlah siswa di tahun 2030 sebesar 25% dari baseline 2025

2) Gratis Biaya Berobat dan Layanan Kesehatan Berkualitas;

Merupakan kegiatan unggulan yang menjamin bahwa seluruh masyarakat domisili Kalimantan Timur dapat berobat di seluruh fasilitas layanan kesehatan secara gratis (sesuai standar yang ditentukan). Kegiatan ini memiliki semangat bahwa setiap warga Kalimantan Timur harus memiliki jaminan kesehatan aktif yang dapat digunakan untuk berobat, sehingga pengobatan tersebut dapat dilakukan tanpa biaya. Instrumen utama yang digunakan untuk pelaksanaan kegiatan unggulan ini adalah pembebasan biaya iuran jaminan kesehatan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kelas III untuk seluruh masyarakat Kalimantan Timur. Kelompok sasarannya diutamakan bagi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) seperti fakir miskin dan orang tidak mampu. Lingkup biaya berobat gratis ini tidak hanya diterapkan pada puskesmas/rumah sakit pemerintah saja, namun juga di klinik/rumah sakit swasta yang melayani BPJS. Selain itu, jaminan biaya pengobatan gratis ini juga akan di ikuti dengan peningkatan sarana dan prasarana fasilitas layanan kesehatan (terutama Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi) untuk tetap menjamin bahwa layanan kesehatan yang diberikan tetap berkualitas.

Adapun indikator dan target kinerja kegiatan unggulan Gratis Biaya Berobat dan Layanan Kesehatan Berkualitas adalah sebagai berikut :

No	Kinerja	Indikator Kinerja	Target Kinerja	
			Tahun 2025	Tahun 2030
1.	Terpenuhinya biaya berobat bagi seluruh masyarakat Kalimantan Timur secara gratis	Cakupan kepesertaan aktif jaminan kesehatan BPJS Kelas III	90%	100%

3) **Gratis Makanan Bergizi;**

Merupakan kegiatan unggulan yang dilaksanakan untuk meningkatkan daya ungkit keberhasilan Program Strategis Nasional (PSN) Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diperuntukan bagi seluruh peserta didik dari PAUD hingga SMA/SMK (atau yang disetarakan) baik negeri maupun swasta. Selain itu, pelaksanaan Program MBG juga menyasar kepada balita, ibu hamil, dan ibu menyusui. Kegiatan unggulan Gratis Makanan Bergizi ini memiliki semangat untuk menurunkan angka prevalensi stunting di Kalimantan Timur yang pada tahun 2023 masih di angka 22,9%. Instrumen utama yang digunakan untuk pelaksanaan kegiatan unggulan ini adalah Pemberian Makanan Tambahan (PMT) bergizi secara gratis yang diberikan kepada ibu-ibu hamil dan bayi dua tahun (baduta). Instrumen pendukung lainnya yang digunakan untuk pelaksanaan kegiatan unggulan ini adalah melalui aktivasi Posyandu, yang nantinya akan menjadi garda depan pelaksana PMT bergizi dimaksud.

Adapun indikator dan target kinerja kegiatan unggulan Gratis Biaya Berobat dan Layanan Kesehatan Berkualitas adalah sebagai berikut :

No	Kinerja	Indikator Kinerja	Target Kinerja	
			Tahun 2025	Tahun 2030
1.	Diberikannya Pemberian Makanan Tambahan (PMT) untuk ibu hamil dan anak bayi dua tahun	Jumlah pemberian PMT untuk ibu hamil	5.800 orang	6.800 orang
		Jumlah pemberian PMT untuk bayi dua tahun	33.500 orang	39.200 orang

*)ket : Asumsi pertumbuhan jumlah ibu hamil dan bayi dua tahun sebesar 2,67% per-tahun

4) **Gratis Wifi Internet di Seluruh Desa;**

Merupakan kegiatan unggulan yang menjamin bahwa seluruh desa memiliki paling sedikit 1 (satu) titik akses internet secara gratis dalam rangka membuka ruang bagi masyarakat pedesaan untuk dapat mengakses

informasi global. Pengembangan ekonomi masyarakat pedesaan diharapkan tumbuh lebih cepat karena meningkatnya aksesibilitas terhadap lokapasar. Internet memungkinkan pelajar di pedesaan untuk memperluas wawasan tentang perkembangan terkini di berbagai bidang serta mengakses sumber belajar secara daring (kursus dan pendidikan jarak jauh). Instrumen utama yang digunakan untuk pelaksanaan kegiatan unggulan ini adalah melalui pembebasan biaya paket berlangganan internet dan penyediaan perangkat keras (bagi desa yang belum memiliki) masing-masing 1 (satu) titik di setiap desa. Adapun untuk desa yang belum terakses jaringan internet melalui fiber optik dan/atau provider telekomunikasi, maka opsi yang diberikan adalah melalui jaringan internet satelit. Sebagai catatan penting, bahwa pelaksanaan kegiatan unggulan ini juga perlu di ikuti dengan pengendalian, pengawasan dan edukasi mengenai pemanfaatan internet kepada seluruh masyarakat desa agar tidak digunakan untuk hal-hal yang berdampak negatif.

Adapun indikator dan target kinerja kegiatan unggulan Gratis Wifi Internet di seluruh desa adalah sebagai berikut :

No	Kinerja	Indikator Kinerja	Target Kinerja	
			Tahun 2025	Tahun 2030
1.	Tersedianya fasilitas internet desa gratis yang aktif	Jumlah desa yang memiliki jaringan internet	841 desa	841 desa
		Jumlah desa yang memiliki pojok internet aktif	50 desa	250 desa

*)ket : Asumsi jumlah desa se-Kalimantan Timur di Tahun 2030 tidak bertambah (total 841 desa)

5) **Gratis Seragam Sekolah**

Merupakan kegiatan unggulan yang menjamin bahwa setiap peserta didik baru SMA/SMK/MA negeri dan swasta serta SLB mendapatkan bantuan seragam sekolah gratis. Kegiatan unggulan ini memiliki semangat untuk menekan biaya pengeluaran orangtua peserta didik yang harus membeli seragam sekolah baru pada masa kelulusan SMP/MTs menuju jenjang SMA/SMK/MA. Instrumen utama yang digunakan untuk pelaksanaan kegiatan unggulan ini adalah pembagian seragam sekolah secara gratis dalam bentuk barang. Setiap peserta didik baru SMA/SMK/MA dan SLB akan diberikan bantuan seragam sekolah yang direncanakan sebanyak 7 (tujuh) pasang dengan atribut) serta sepatu sekolah (secara bertahap).

Adapun indikator dan target kinerja kegiatan unggulan Gratis Seragam Sekolah adalah sebagai berikut :

No	Kinerja	Indikator Kinerja	Target Kinerja	
			Tahun 2025	Tahun 2030
1.	Tersedianya seragam sekolah gratis bagi peserta didik SMA/SMK/MA dan SLB	Jumlah peserta didik SMA/SMK/MA dan SLB yang mendapatkan bantuan seragam sekolah gratis	61.500 siswa	230.800 siswa

*)ket : Asumsi pertumbuhan jumlah peserta didik sebesar 5%

6) **Gratis Biaya Administrasi Kepemilikan Rumah;**

Merupakan kegiatan unggulan yang membuka kesempatan bagi setiap penduduk untuk dapat memiliki rumahnya sendiri. Kegiatan unggulan ini memiliki semangat untuk mengurangi backlog¹ kepemilikan rumah. Kelompok sasaran dari kegiatan unggulan ini diutamakan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)². Kegiatan unggulan ini juga menyasar kepada segmen anak muda dan pengusaha pemula yang hendak memiliki rumah. Instrumen utama yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan unggulan ini adalah pembebasan biaya administrasi pembelian rumah (seperti biaya provisi, biaya notaris, biaya akta jual beli, biaya appraisal, biaya balik nama sertifikat, dll). Secara bertahap kegiatan unggulan ini rencana juga akan dikembangkan pada instrumen *down payment* (DP) 0% dengan angsuran kredit yang sangat rendah. Pemerintah akan memberikan dukungan berupa pembangunan fasilitas umum dan fasilitas sosial oleh pemerintah, sehingga biaya penyediaan rumah menjadi lebih murah.

Adapun indikator dan target kinerja kegiatan unggulan Gratis Biaya Administrasi Kepemilikan Rumah adalah sebagai berikut :

No	Kinerja	Indikator Kinerja	Target Kinerja	
			Tahun 2025	Tahun 2030
1.	Tersedianya rumah murah bagi MBR dan segmen anak muda/ pengusaha pemula	Jumlah penerima manfaat gratis biaya administrasi kepemilikan rumah	1.000 orang	5.000 orang

¹ Backlog rumah adalah kondisi kesenjangan antara jumlah rumah terbangun dengan jumlah yang dibutuhkan rakyat (Kamus Istilah Pengembangan Wilayah, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI, 2016)
² Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) adalah Masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah (Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2016)

7) **Gratis Haji dan Umroh untuk Marbot;**

Merupakan kegiatan unggulan yang memberikan kesempatan dan penghargaan bagi setiap imam (atau dengan sebutan lainnya) serta penjaga rumah ibadah untuk dapat menunaikan ibadah umroh (perjalanan suci atau dengan sebutan lainnya) dan mendaftar ibadah haji secara gratis. Kelompok sasaran kegiatan unggulan ini adalah para imam (atau dengan sebutan lainnya) dan penjaga rumah ibadah yang telah ditetapkan melalui surat keputusan pemerintah/lembaga/yayasan rumah ibadah setempat serta mendapatkan persetujuan dari Gubernur. Instrumen utama kegiatan unggulan ini adalah pembiayaan penuh biaya perjalanan ibadah umroh (perjalanan suci atau dengan sebutan lainnya) oleh pemerintah. Sementara untuk ibadah haji, pemerintah akan memberikan bantuan pembiayaan pendaftaran kursi haji. Melalui kegiatan unggulan ini, diharapkan akan semakin memperkuat nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat sebagai modal terwujudnya kehidupan yang rukun, damai dan toleran.

Adapun indikator dan target kinerja kegiatan unggulan Gratis Biaya Umroh dan Haji adalah sebagai berikut :

No	Kinerja	Indikator Kinerja	Target Kinerja	
			Tahun 2025	Tahun 2030
1.	Diberikannya fasilitas pembiayaan umroh (perjalanan suci, dll) dan pendaftaran haji secara gratis bagi imam dan penjaga rumah ibadah	Jumlah penerima manfaat gratis ibadah umroh (perjalanan suci, dll)	750 orang	865 orang
		Jumlah penerima manfaat gratis pendaftaran haji (agama islam)	0 orang (belum dilaksanakan)	650 orang

*)ket : Penerima manfaat gratis ibadah umroh (perjalanan suci, dll) dan pendaftaran haji tidak berulang

Program Unggulan Jospol, terdiri dari 9 (sembilan) arah kebijakan unggulan yang mendukung upaya perwujudan Kaltim Sukses, yaitu :

1) **Hilirisasi industri pertanian melalui peningkatan dan perluasan areal tanam berbasis pertanian modern;**

Peningkatan nilai tambah dari komoditi pertanian menjadi salah satu mesin penggerak transformasi ekonomi Kalimantan Timur. Komoditi pertanian Kalimantan Timur yang potensial dikembangkan untuk menjadi bahan baku industri antara lain kelapa sawit, karet, kakao, lada, pisang, padi dan jagung. Pengembangan hilirisasi industri berbasis pertanian membutuhkan kepastian ketersediaan bahan baku yang mencukupi agar

aglomerasi ekonomi dapat berjalan optimal. Oleh karena itu, dibutuhkan peningkatan produksi komoditi pertanian untuk memastikan bahwa kebutuhan bahan baku tercukupi untuk memenuhi permintaan industri. Peningkatan produksi tersebut dapat dilakukan melalui ekstensifikasi areal tanam maupun intensifikasi dengan modernisasi sarana dan prasarana pertanian dalam rangka peningkatan produktifitas tanam

2) Pengembangan teknologi dan inovasi di semua sektor perikanan, kelautan, industri dan pelayanan publik;

Peningkatan efisiensi dan produktifitas membutuhkan adanya pengembangan teknologi dan inovasi. penerapan teknologi modern dan inovasi dalam pengelolaan sumber daya laut serta usaha perikanan lokal diharapkan mampu melakukan pengawasan yang lebih baik terhadap ekosistem dan menghasilkan produk yang berkualitas, terlebih dalam konsepsi pengembangan ekonomi biru. Penggunaan teknologi ramah lingkungan pada sektor industri yang menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi juga diyakini akan mendukung keberlanjutan lingkungan. Selain itu, inisiatif digitalisasi dalam pelayanan publik akan mempermudah akses masyarakat terhadap berbagai layanan. Pengembangan teknologi dan inovasi ini tidak hanya berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjaga kelestarian sumber daya alam di Kalimantan Timur.

3) Peningkatan insentif guru sekolah umum, pesantren, serta penjaga rumah ibadah;

Peningkatan insentif bagi guru sekolah umum, pesantren, serta penjaga rumah ibadah di Kalimantan Timur merupakan penghargaan yang diberikan untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik dan pengabdian masyarakat, sekaligus mendorong kualitas pendidikan dan kehidupan beragama. Guru sekolah umum dan pesantren dapat diberikan tunjangan kinerja, insentif khusus, serta pelatihan berkala untuk peningkatan kompetensi. Sementara itu, penjaga rumah ibadah juga perlu mendapat perhatian melalui pemberian insentif rutin sebagai bentuk apresiasi atas peran mereka dalam menjaga keberlangsungan kegiatan keagamaan. Melalui meningkatkan insentif ini diharapkan motivasi dan kinerja para pendidik serta penjaga rumah ibadah akan meningkat, yang pada akhirnya berkontribusi pada pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan kehidupan beragama yang harmonis di Kalimantan Timur.

4) Mendorong ekonomi inklusif berbasis ekonomi kreatif dan digital untuk mendukung UMKM;

Pengembangan ekonomi inklusif berbasis ekonomi kreatif dan digital merupakan langkah strategis untuk mendukung Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kalimantan Timur. Melalui pemanfaatan teknologi informasi dan platform digital, UMKM di daerah dapat memperluas visibilitas dan akses pasar, serta mengembangkan inovasi produk yang lebih menarik bagi konsumen. Pelatihan dan pendampingan dalam bidang digital marketing, desain produk, dan manajemen keuangan juga menjadi penting untuk membekali pelaku UMKM dengan keterampilan yang dibutuhkan di era digital. Selain itu, kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan komunitas lokal dapat menciptakan ekosistem yang mendukung pertumbuhan UMKM, sehingga diharapkan dapat mendorong kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan dan memperkuat ketahanan ekonomi daerah. Pengembangan UMKM melalui ekonomi kreatif dan digitalisasi ini akan menciptakan lapangan kerja yang lebih luas dan merata.

5) Mengembangkan pariwisata dan budaya berbasis desa;

Pengembangan pariwisata dan budaya berbasis desa merupakan pendekatan yang efektif untuk memberdayakan komunitas lokal serta melestarikan warisan budaya dan alam. Penedeapanan potensi khusus yang dimiliki tiap desa, seperti tradisi, kerajinan tangan, kuliner lokal, dan keindahan alam dari desa-desa tersebut dapat menjadi destinasi wisata yang menarik. Strategi ini tidak hanya dapat meningkatkan pendapatan masyarakat melalui kegiatan pariwisata, tetapi juga mendorong masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam melestarikan budaya dan lingkungan. Pelatihan bagi masyarakat lokal dalam hal manajemen pariwisata, layanan pengunjung, dan pemasaran digital juga dilaksanakan secara beriringan. Selain itu, sinergi antara pemerintah daerah, pelaku industri pariwisata, dan masyarakat akan memperkuat dukungan yang diperlukan untuk menciptakan pariwisata yang berkelanjutan dan bermanfaat bagi semua pihak. Ekonomi masyarakat desa akan terakselerasi sebagai dampak positif adanya destinasi wisata. Kedepannya pengembangan pariwisata dan budaya berbasis desa dapat menjadi pendorong utama dalam menciptakan ekonomi yang berkelanjutan dan kesejahteraan yang merata.

6) Membangun dan meningkatkan infrastruktur layanan pendidikan dan kesehatan;

Pembangunan dan peningkatan infrastruktur layanan pendidikan dan kesehatan di Kalimantan Timur memerlukan pendekatan holistik yang melibatkan pembangunan fasilitas fisik, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan pemerataan akses di seluruh wilayah. Di sektor pendidikan, strategi ini dapat diwujudkan dengan membangun unit sekolah baru, pengembangan sekolah menjadi sekolah unggulan, rehabilitasi sarana dan prasarana yang rusak, serta penyediaan sarana prasarana pendukung seperti perpustakaan dan laboratorium terutama di daerah terpencil. Sementara itu, di sektor kesehatan, perlu dilakukan pembangunan rumah sakit baru, puskesmas, dan posyandu yang memadai, dilengkapi dengan peralatan medis modern dan tenaga kesehatan yang terlatih. Pemerintah juga perlu memastikan keterjangkauan layanan ini bagi seluruh masyarakat, termasuk melalui program bantuan sosial dan kerja sama dengan pihak swasta atau lembaga non-pemerintah. Peningkatan infrastruktur pendidikan dan kesehatan diharapkan dapat mendorong peningkatan kualitas hidup, mengurangi kesenjangan sosial, dan menciptakan sumber daya manusia yang sehat dan berdaya saing di Kalimantan Timur.

7) Pembangunan infrastruktur di seluruh Kaltim seperti jalan (tol dan non-tol), jembatan, transportasi umum, jaringan komunikasi, dan pelabuhan internasional;

Pembangunan infrastruktur di seluruh Kalimantan Timur, meliputi jalan tol dan non-tol, jembatan, transportasi umum, jaringan komunikasi, serta pelabuhan internasional, merupakan langkah strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan di wilayah ini. Pembangunan jalan tol dan non-tol serta jembatan akan meningkatkan konektivitas antarwilayah, mempermudah distribusi barang dan jasa, serta mengurangi isolasi daerah terpencil dan perbatasan. Sementara itu, pengembangan transportasi umum yang modern dan terintegrasi akan mendukung mobilitas masyarakat secara efisien dan ramah lingkungan. Di sisi lain, penguatan jaringan komunikasi, termasuk internet berkecepatan tinggi, akan mendukung digitalisasi dan peningkatan produktivitas di berbagai sektor. Selain itu, pembangunan pelabuhan internasional akan membuka peluang ekspor-impor, menarik investasi asing, serta memperkuat posisi Kalimantan Timur sebagai hub logistik dan perdagangan di kawasan

Asia Tenggara. Pembangunan infrastruktur yang terintegrasi ini diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mempercepat transformasi ekonomi menuju Kalimantan Timur yang lebih maju dan berkelanjutan.

8) Revitalisasi sungai Mahakam untuk transportasi publik, angkutan industri dan pariwisata;

Revitalisasi Sungai Mahakam untuk transportasi publik, angkutan industri, dan pariwisata merupakan langkah strategis yang dapat mengoptimalkan potensi Sungai Mahakam dan anak sungainya sebagai tulang punggung perekonomian wilayah. Sungai Mahakam dapat dikembangkan menjadi alternatif moda transportasi yang mudah diakses bagi alur barang dan jasa kegiatan ekonomi, memiliki daya tarik wisata, serta meningkatkan aksesibilitas bagi masyarakat yang tinggal di sepanjang aliran sungai. Untuk mendukung angkutan industri, revitalisasi ini meliputi pengerukan dan pemeliharaan alur sungai agar kapal-kapal pengangkut barang seperti batu bara, hasil perkebunan, dan produk industri lainnya dapat beroperasi secara lancar, sehingga menurunkan biaya logistik dan meningkatkan daya saing ekonomi daerah. Selain itu, Sungai Mahakam juga memiliki potensi besar sebagai destinasi pariwisata, dengan mengembangkan fasilitas seperti wisata susur sungai, wisata kuliner terapung, dan wisata alam di sepanjang sungai, yang dapat menarik minat wisatawan domestik maupun mancanegara. Melalui pendekatan terpadu, revitalisasi Sungai Mahakam diharapkan tidak hanya meningkatkan mobilitas dan perekonomian, tetapi juga melestarikan ekosistem sungai sebagai warisan alam yang berharga bagi generasi mendatang.

9) Memudahkan investasi termasuk pemberian insentif dan kerjasama antara pemerintah daerah, pusat, dan swasta;

Memudahkan investasi termasuk melalui pemberian insentif dan kerjasama antara pemerintah daerah, pusat, dan swasta, merupakan langkah krusial untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif dan menarik minat investor domestik maupun asing. Pemerintah daerah dapat menyederhanakan perizinan investasi dengan menerapkan sistem satu pintu yang efisien, transparan dan terdigitalisasi, sementara pemerintah pusat dapat mendukung melalui kebijakan fiskal seperti *tax holiday*, *tax allowance*, atau pembebasan bea masuk untuk industri tertentu. Kerjasama dengan pihak swasta juga perlu ditingkatkan melalui skema Public-Private

Partnership (PPP) untuk proyek-proyek strategis seperti infrastruktur, energi, dan pariwisata. Selain itu, perlu adanya sinergi antara ketiga pihak dalam menyediakan data dan informasi yang akurat mengenai potensi investasi di Kalimantan Timur, serta memastikan keamanan dan keberlanjutan investaso, serta kepastian hukum bagi investor. Melalui strategi ini diharapkan investasi di Kalimantan Timur akan meningkat pesat, menciptakan lapangan kerja, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan mempercepat pembangunan wilayah secara berkelanjutan.

5.4. Kegiatan Unggulan

Sebagai salah satu strategi utama untuk mewujudkan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah, telah ditetapkan 2 (dua) Program Unggulan yakni Gratispol dan Jospol yang akan dilaksanakan dalam 5 (lima) tahun kedepan. Selanjutnya dari kedua program unggulan tersebut, dilaksanakan indikasi kegiatan-kegiatan unggulan sebagai berikut :

Tabel V.3.
Indikasi Kegiatan Unggulan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2030

No	Kegiatan Unggulan	Lokus Indikatif
Program Unggulan Gratispol		
1.	Gratis Bersekolah SMA/SMK hingga S3	10 kabupaten/kota
2.	Gratis Biaya Berobat dan Layanan Kesehatan Berkualitas	10 kabupaten/kota
3.	Gratis Makanan Bergizi	10 kabupaten/kota
4.	Gratis Wifi Internet di Seluruh Desa	10 kabupaten/kota
5.	Gratis Seragam Sekolah	10 kabupaten/kota
6.	Gratis Biaya Administrasi Kepemilikan Rumah	10 kabupaten/kota
7.	Gratis Haji dan Umroh Untuk Marbot	10 kabupaten/kota
Program Unggulan Jospol		
1.	Pembangunan Jalan Tering-Ujoh Bilang	Kutai Barat - Mahakam Ulu
2.	Pembangunan Jalan Long Bagun – Long Boh	Mahakam Ulu
3.	Pembangunan Jalan Sotek – Bongan	Kutai Barat
4.	Pembangunan Jalan Akses dan Jembatan Nibung	Kutai Timur

No	Kegiatan Unggulan	Lokus Indikatif
5.	Penyiapan Pembangunan Jalan Tol Samarinda-Bontang	Samarinda - Bontang
6.	Pembangunan Bandara Ujoh Bilang	Mahakam Ulu
7.	Pembangunan SPAM Regional	Balikpapan, Samarinda, Penajam Paser Utara
8.	Pembangunan Sekolah Unggulan	10 kabupaten/kota
9.	Pembangunan Rumah Sakit Jiwa dan Kesehatan Atma Husada Mahakam	Samarinda
10.	Pembangunan Rumah Sakit Daerah di Eks. Rumah Sakit Islam dan Rumah Sakit	Samarinda
11.	Rumah Sakit Umum Daerah	Kutai Barat - Mahakam Ulu
12.	Pembangunan Dermaga Multipurpose Kariangau	Balikpapan
13.	Revitalisasi Dermaga Sungai Mahakam	Samarinda, Kutai Kartanegara, Kutai Barat, Mahakam Ulu
14.	Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri Kariangau	Balikpapan
15.	Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri Buluminung	Penajam Paser Utara
16.	Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri Maloy	Kutai Timur

*) Ket : Kegiatan unggulan bersifat indikatif, dapat berubah menyesuaikan dengan permasalahan, isu strategis dan perkembangan pembahasan dalam proses penyusunan RPJMD 2025-2029

5.5. Penyelarasan Indikator Makro RPJMD Provinsi dengan RPJM Nasional

Memperhatikan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029, maka dalam rangka pencapaian target sasaran RPJM Nasional Tahun 2025-2029 diperlukan penyelarasan perencanaan pembangunan. Hal ini menjadi kunci bagi sinergi pembangunan antara pusat daerah. Penyelarasan RPJMD terhadap RPJMN tahun 2025-2029 bertujuan untuk menciptakan integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah di tingkat pusat dan daerah, mewujudkan RPJMD yang harmonis dengan RPJMN tahun 2025-2029, menjamin sinkronisasi kebijakan-kebijakan di dalam RPJMD dengan RPJMN tahun 2025-2029, dan menjamin hadirnya dukungan perencanaan daerah terhadap sasaran, program, dan target pembangunan nasional.

Salah satu penyelarasan yang dilakukan adalah penyelarasan target indikator makro yang dimaksudkan untuk menjamin sinergi dukungan Pemerintah Daerah dalam upaya pencapaian target indikator kinerja makro pembangunan Nasional. Hal ini bertujuan untuk mendorong daerah agar

dapat merumuskan dan menyelaraskan pencapaian target yang mendukung pencapaian target nasional dengan mempertimbangkan intervensi kebijakan serta karakteristik dan potensi setiap daerah. Adapun penyelarasan target indikator makro dilakukan dengan menyandingkan target indikator makro nasional dengan target indikator makro daerah sebagaimana yang telah diamanatkan dalam arah kebijakan wilayah RPJM Nasional Tahun 2025 untuk Kalimantan Timur. Adapun indikator makro yaitu Laju Pertumbuhan Ekonomi, PDRB Per-Kapita, Kontribusi PDRB Provinsi, Tingkat Kemiskinan, Rasio Gini, Indeks Modal Manusia, Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, dan Tingkat Pengangguran.

Tabel V- 4.
Penyelarasan Target Makro RPJMD Provinsi Kalimantan Timur terhadap Target Makro RPJM Nasional Tahun 2025-2029

Indikator Makro	Target RPJM Nasional		Target RPJMD Prov. Kaltim	
	2025	2029	2025	2029
Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	7,8 (rata-rata)	8,6	6,17-6,40	8,50-8,60
PDRB Per-Kapita (juta Rupiah)	237,1	326,9	212,18-221,55	263,58-282,92
Kontribusi PDRB Provinsi	4,2	4,6	3,92-3,95	4,00-4,01
Tingkat Kemiskinan (%)	4,24-5,05	2,37-3,37	5,05-5,78	3,37-3,70
Indeks Gini	0,310-0,321	0,309-0,313	0,310-0,321	0,298-0,303
Indeks Modal Manusia	0,59	0,62	0,59	0,62
Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	40,82	67,46	38,59-40,82	65,90-67,46
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	80,20	80,87	76,63-80,20	81,15-81,46
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,60-5,14	4,14-4,77	4,60-5,14	4,14-4,75

Keterangan : indikator makro sesuai dengan Lampiran Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025

BAB VI

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

6.1 Arah Kebijakan

Arah Kebijakan RPJMD Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kerja yang merupakan penjabaran misi yang selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran RPJMD. Berikut indikasi arah kebijakan dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 – 2029:

Misi 1: Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Unggul Dan Sejahtera

- 1) Pelaksanaan wajib belajar 13 tahun kepada seluruh lapisan Masyarakat;
- 2) Pemberian biaya sekolah dan perkuliahan yang tepat dan bermanfaat bagi seluruh warga sampai tingkat S3;
- 3) Peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan, serta tenaga kesehatan secara proporsional;
- 4) Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pendidikan (termasuk GTK) serta mendorong pendidikan unggul di semua daerah secara bertahap;
- 5) Pengembangan perguruan tinggi dan program studi berstandar internasional berbasis riset dan bidang keilmuan khusus;
- 6) Penanganan stunting, eliminasi penyakit menular (TBC dan Malaria), dan kesadaran penerapan pola hidup bersih dan sehat;
- 7) Penurunan penduduk miskin serta perlindungan sosial adaptif bagi seluruh masyarakat, terutama bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
- 8) Membangun lingkungan yang inklusif bagi penduduk lansia dan penyandang disabilitas;
- 9) Pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia serta peningkatan partisipasi di berbagai bidang pembangunan;
- 10) Peningkatan kesempatan kerja untuk mengurangi pengangguran;

- 11) Perluasan upaya promotif-preventif kesehatan;
- 12) Penambahan dan pemerataan tenaga kesehatan dan dokter spesialis.

Misi 2: Mewujudkan Kalimantan Timur Sebagai Pusat Ekonomi Baru Yang Inklusif Berbasis Industrialisasi Komoditas Unggulan Daerah

- 1) Perluasan dan percepatan hilirisasi produk unggulan daerah;
- 2) Percepatan pengembangan pusat kegiatan kawasan industri;
- 3) Pengembangan industri hijau bernilai tambah tinggi dan berkelanjutan. Percepatan pengembangan industri strategis berbasis sektor ekonomi eksisting seperti pengembangan industri berbasis oleokimia dan petrokimia;
- 4) Peningkatan hasil produksi komoditas unggulan pertanian dan pengembangan diversifikasi pangan;
- 5) Peningkatan kemandirian pangan;
- 6) Pengembangan destinasi wisata potensial berbasis kerakyatan dan ekowisata unggulan sebagai perwujudan penerapan blue economic;
- 7) Prioritas pengembangan talenta wirausaha berbasis pada UMKM;
- 8) Perluasan kerja sama perdagangan antar daerah dan antar negara dalam rangka memperkuat rantai nilai;
- 9) Pengembangan teknologi dan kualitas sumber daya konstruksi;
- 10) Penguatan rantai pasok dan rantai nilai dengan memastikan kelancaran alur barang/jasa dari pusat produksi menuju kawasan industri dan outlet, mengoptimalkan nilai tambah melalui hilirisasi, penguatan struktur ekonomi yang berkelanjutan, efisiensi, inovasi dan pemerataan pembangunan;
- 11) Peningkatan keterkaitan UMKM pada rantai nilai industri domestik dan global dilaksanakan melalui peningkatan akses ke sumber daya produktif (termasuk pembiayaan dan pemasaran), penerapan teknologi dan kemitraan usaha;
- 12) Pembangunan pusat distribusi pangan untuk menjamin ketersediaan pangan di Kalimantan Timur;

Misi 3: Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Guna Menunjang Kegiatan Perekonomian, Pelayanan Publik Dan Kesehatan

- 1) Peningkatan jalan mantap di seluruh wilayah Kalimantan timur;
- 2) Membangun kemudahan konektivitas antar pusat pertumbuhan ekonomi hingga seluruh wilayah;
- 3) Pembangunan sarana irigasi, bendungan, jalan usaha tani dan sarana pertanian lainnya untuk peningkatan produktivitas komoditas pertanian;
- 4) Pengembangan superhub ekonomi IKN dan mitra IKN;
- 5) Pengembangan kawasan perkotaan yang terintegrasi dan berkelanjutan yang terintegrasi dengan IKN;
- 6) Pembangunan dan pengembangan prasarana terminal, bandara, pelabuhan sungai dan laut;
- 7) Pengembangan sarana transportasi darat, sungai dan laut yang memadai;
- 8) Penyediaan jaringan dan layanan listrik yang andal yang mengarah pada pemanfaatan EBT;
- 9) Pemenuhan akses air minum dan sanitasi aman, berkelanjutan dan inklusif;
- 10) Perluasan jaringan internet untuk percepatan penerapan teknologi informasi bagi kehidupan masyarakat;
- 11) Penguatan pembangunan kawasan perdesaan yang berkontribusi pada pembangunan terpadu berkelanjutan;
- 12) Percepatan pembangunan kemaritiman untuk peningkatan ekonomi masyarakat pesisir;
- 13) Percepatan pembangunan daerah pedalaman dan perbatasan;
- 14) Peningkatan dan pembangunan sarana dan prasarana kesehatan di Rumah Sakit;
- 15) Pengembangan pembiayaan inovatif dalam rangka mengatasi keterbatasan anggaran Pembangunan.

Misi 4: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Professional Dan Berintegritas Berbasis Teknologi Informasi

- 1) Optimalisasi penerapan sistem merit pemerintahan;
- 2) Peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam berbagai aspek pembangunan;
- 3) Pelayanan publik pada kategori sangat baik;
- 4) Digitalisasi seluruh layanan pemerintahan;
- 5) Penciptaan pola pengaduan masyarakat secara luas dan transparan dan respon cepat untuk penyelesaian aduan;
- 6) Penegakan integritas pegawai;
- 7) Pengawasan proses pengembangan karier, promosi mutasi ASN dan manajemen kinerja;
- 8) Perkuatan pengendalian pembangunan, melalui penerapan manajemen risiko;
- 9) Peningkatan produktivitas BUMD;
- 10) Peningkatan kapasitas fiskal daerah.

Misi 5: Meningkatkan Kualitas Kehidupan Beragama, Penguatan Budaya Dan Kearifan Lokal

- 1) Peningkatan kualitas keagamaan masyarakat;
- 2) Penguatan karakter dan budaya asli daerah dalam kerangka NKRI;
- 3) Peningkatan partisipasi bermakna masyarakat sipil dan masyarakat adat dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan;
- 4) Penguatan pendidikan yang berbasis kerukunan antar etnis dan agama dilaksanakan sejak usia dini;
- 5) Peningkatan penerapan kurikulum bermuatan lokal;
- 6) Pengakuan dan penghormatan pada lembaga-lembaga adat dan hak ulayat masyarakat;
- 7) Perlindungan masyarakat lokal dan promosi budaya;

- 8) Pengembangan nilai-nilai luhur budaya dan kearifan lokal, serta pendidikan karakter;
- 9) Penyediaan ruang publik yang inklusif sebagai wahana interaksi sosial antar warga dan ekspresi budaya;
- 10) Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal.

Misi 6: Mewujudkan Pembangunan Berwawasan Lingkungan Yang Berkelanjutan

- 1) Pembangunan pengelolaan sampah dan limbah, serta peningkatan daur ulang serta terpadu antar daerah;
- 2) Peningkatan ketahanan energi, ketahanan air dan ketahanan ekologi;
- 3) Pemahaman dan penerapan kehidupan berwawasan lingkungan oleh seluruh lapisan masyarakat;
- 4) Pemerataan terhadap akses hunian layak;
- 5) Penanganan kawasan kumuh;
- 6) Perlindungan dan rehabilitasi hutan dan lahan gambut;
- 7) Rehabilitasi dan pemanfaatan lahan pasca tambang;
- 8) Pelestarian bentang alam, perlindungan keanekaragaman hayati, dan penguatan ekosistem lingkungan berbasis kearifan lokal;
- 9) Perencanaan tata ruang yang berwawasan lingkungan;
- 10) Peningkatan mitigasi penanggulangan bencana.

6.2 Strategi

Strategi RPJMD Tahun 2025-2029 adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus, lokus dan penentuan program prioritas dalam menghadapi lingkungan dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran RPJMD.

Penahapan pembangunan merupakan salah satu bagian dari strategi yang menggambarkan arah prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2029. Adapun penahapan pembangunan RPJMD secara indikatif

Tahap 1 (2026)	Tahap 2 (2027)	Tahap 3 (2028)	Tahap 4 (2029)	Tahap 5 (2030)
Penguatan Fondasi Pembangunan Kaltim Sukses Menuju Generasi Emas	Akselerasi Pembangunan Kaltim Sukses Menuju Generasi Emas	Perluasan Upaya Pembangunan Kaltim Sukses Menuju Generasi Emas	Perwujudan Kaltim Sukses Menuju Generasi Emas	Kesinambungan Pembangunan Kaltim Sukses Menuju Generasi Emas

direpresentasikan melalui tema pembangunan tahunan yang disajikan pada tabel di bawah ini :

Tabel 6.1
Penahapan Pembangunan RPJMD

Berikut indikasi Strategi dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 – 2029:

Tabel 6.2
Strategi Arah Kebijakan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2025 – 2029

No.	Arah Kebijakan	Strategi
Misi 1 Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Unggul Dan Sejahtera		
1.	Pelaksanaan wajib belajar 13 tahun kepada seluruh lapisan Masyarakat;	Percepatan wajib belajar 13 tahun dilaksanakan melalui pemenuhan akses 1 tahun pra-sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
2.	Pemberian biaya sekolah dan perkuliahan yang tepat dan bermanfaat bagi	Penyediaan program beasiswa penuh atau sebagian bagi siswa dan mahasiswa berprestasi maupun kurang mampu, serta mengalokasikan anggaran

No.	Arah Kebijakan	Strategi
	seluruh warga sampai tingkat S3;	pendidikan yang memadai untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat.
3.	Peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan, serta tenaga kesehatan secara proporsional;	Penyesuaian tunjangan dan insentif secara proporsional berdasarkan beban kerja, lokasi tugas, dan kinerja.
4.	Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pendidikan (termasuk GTK) serta mendorong pendidikan unggul di semua daerah secara bertahap;	<ol style="list-style-type: none">1) pembangunan dan atau pembentukan sekolah unggulan di setiap Kabupaten/kota2) peningkatan dan pemerataan kualitas guru3) peningkatan fasilitas penunjang pembelajaran4) peningkatan sarana dan prasarana sekolah5) peningkatan kemitraan antara SMK dengan DUDI
5.	Pengembangan perguruan tinggi dan program studi berstandar internasional berbasis riset dan bidang keilmuan khusus;	Pengembangan maupun pembukaan perguruan tinggi baru dan program studi berstandar internasional berbasis riset dan bidang keilmuan khusus dilaksanakan melalui kemitraan bersama perguruan tinggi global yang didasarkan pada lapangan usaha potensial masa depan.
6.	Penanganan stunting, eliminasi penyakit menular (TBC dan Malaria), dan kesadaran	Penuntasan stunting, percepatan eliminasi malaria, dan penurunan insidensi tuberkulosis dilaksanakan melalui pendekatan integrasi

No.	Arah Kebijakan	Strategi
	penerapan pola hidup bersih dan sehat;	multisektor, rekayasa lingkungan habitat vektor dan pemanfaatan teknologi informasi bidang kesehatan
7.	Penurunan penduduk miskin serta perlindungan sosial adaptif bagi seluruh masyarakat, terutama bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);	<ol style="list-style-type: none"> 1) Perlindungan sosial adaptif yang didukung data akurat penerima manfaat menjangkau seluruh penduduk rentan terutama kelompok marginal, 2) Pemenuhan cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan khususnya bagi pekerja bukan penerima upah dan rentan maupun perlindungan pensiun bagi lansia miskin dan tidak mampu, 3) Bantuan sosial terhadap penyandang disabilitas yang dilaksanakan secara terintegrasi antara program perlindungan sosial daerah dengan program pemberdayaan ekonomi, program peningkatan infrastruktur, program ketenagakerjaan, serta program peningkatan akses Pendidikan dan kesehatan.
8.	Membangun lingkungan yang inklusif bagi penduduk lansia dan penyandang disabilitas;	Upaya membangun lingkungan yang inklusif bagi penyandang disabilitas dilaksanakan melalui pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam Panti Kewenangan Provinsi
9.	Pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas,	Pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia dilaksanakan melalui penguatan

No.	Arah Kebijakan	Strategi
	dan lansia serta peningkatan partisipasi di berbagai bidang pembangunan;	kapasitas, kemandirian, kemampuan dalam pengambilan keputusan, peningkatan partisipasi di berbagai bidang pembangunan serta peningkatan perlindungan terhadap resiko kekerasan, penelantaran dan eksploitasi.
10.	Peningkatan kesempatan kerja untuk mengurangi pengangguran;	Pelatihan reskilling, upskilling dan newskilling serta transisi school-to-work dalam upaya memperkuat keterkaitan antara dunia pendidikan dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI) yang disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi pengembangan ekonomi masa depan
11.	Perluasan upaya promotif-preventif kesehatan;	Perluasan upaya promotif- preventif kesehatan dilaksanakan melalui pembudayaan perilaku hidup sehat dan pendidikan kesehatan sejak dini, termasuk eliminasi praktik Buang Air Besar Sembarangan (BABS)
12.	Penambahan dan pemerataan tenaga kesehatan dan dokter spesialis.	Peningkatan program rekrutmen dan penempatan tenaga kesehatan, terutama di daerah terpencil dan tertinggal, melalui insentif finansial dan fasilitas pendukung yang memadai. Selain itu, perlu dilakukan pelatihan dan pendidikan berkelanjutan untuk meningkatkan kompetensi tenaga kesehatan serta kerja sama dengan institusi pendidikan kedokteran untuk

No.	Arah Kebijakan	Strategi
		memastikan ketersediaan dokter spesialis yang merata di seluruh wilayah.
Misi 2 : Mewujudkan Kalimantan Timur Sebagai Pusat Ekonomi Baru Yang Inklusif Berbasis Industrialisasi Komoditas Unggulan Daerah		
1.	Perluasan dan percepatan hilirisasi produk unggulan daerah;	<ol style="list-style-type: none"> 1. investasi dan insentif di sektor pengolahan 2. infrastruktur terintegrasi 3. kemudahan perizinan 4. penguatan komoditas unggulan melalui riset, teknologi, dan ekspansi pasar global 5. pelatihan vokasi dan kolaborasi pendidikan-industri
2.	Percepatan pengembangan pusat kegiatan kawasan industri;	Percepatan pengembangan industri strategis berbasis sektor ekonomi eksisting dilaksanakan melalui penguatan nilai tambah industri strategis, pengembangan industri yang memiliki kontribusi besar bagi peningkatan kesejahteraan rakyat, menguasai hajat hidup orang banyak, dan meningkatkan nilai tambah sumber daya alam strategis.
3.	Pengembangan industri hijau bernilai tambah tinggi dan berkelanjutan. Percepatan pengembangan industri strategis berbasis sektor ekonomi eksisting seperti pengembangan industri	Pengembangan industri hijau bernilai tambah tinggi dan berkelanjutan dilaksanakan melalui pengembangan industri biokimia pangan, bioprospeksi/bioekonomi, herbal, nutrisi, industri farmasi maju, industri kendaraan listrik dan bioteknologi untuk meningkatkan nilai tambah dan

No.	Arah Kebijakan	Strategi
	berbasis oleokimia dan petrokimia;	kompleksitas industri yang didukung dengan ketersediaan bahan baku yang memadai.
4.	Peningkatan hasil produksi komoditas unggulan pertanian dan pengembangan diversifikasi pangan;	Intensifikasi pertanian melalui penggunaan teknologi modern, bibit unggul, dan pupuk berkualitas, serta perluasan lahan pertanian yang produktif. Selain itu, diversifikasi pangan perlu didorong dengan mengembangkan komoditas alternatif yang adaptif terhadap kondisi lokal, disertai pelatihan dan pendampingan bagi petani untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan dalam mengelola berbagai jenis tanaman pangan.
5.	Peningkatan kemandirian pangan;	Optimalisasi produksi pertanian lokal melalui penerapan teknologi modern, penyediaan bibit unggul, dan peningkatan akses petani terhadap sarana irigasi yang memadai. Selain itu, diversifikasi pangan dan penguatan cadangan pangan nasional perlu dilakukan untuk mengurangi ketergantungan pada impor dan memastikan stabilitas pasokan pangan di seluruh wilayah.
6.	Pengembangan destinasi wisata potensial berbasis kerakyatan dan ekowisata unggulan sebagai	Pengembangan destinasi wisata potensial dilaksanakan melalui penetapan destinasi super prioritas seperti Derawan dan sekitarnya, pengembangan eco-tourism kelas dunia

No.	Arah Kebijakan	Strategi
	perwujudan penerapan blue economic;	berbasis aset alam (termasuk menjadi global geopark) dengan pelibatan mitra lokal untuk meningkatkan nilai tambah pariwisata dan penyerapan tenaga kerja seperti ekowisata kelas dunia yang berbasis aset alam, wisata kebugaran dengan identitas khas wilayah, serta destinasi MICE dan perkotaan yang dilakukan dengan pembangunan investasi infrastruktur pariwisata, pemasaran pariwisata terutama dengan penyelenggaraan event-event pariwisata berskala nasional dan internasional, pelatihan pengembangan keterampilan dan pemberian insentif pelaku pariwisata, serta kerja sama antara sektor publik, swasta, dan lembaga swadaya masyarakat.
7.	Prioritas pengembangan talenta wirausaha berbasis pada UMKM;	Memberikan pelatihan kewirausahaan, akses permodalan, dan pendampingan bisnis secara intensif kepada pelaku UMKM. Selain itu, perlu diciptakan ekosistem yang mendukung melalui kemudahan perizinan, pemanfaatan teknologi digital, dan perluasan jaringan pasar untuk meningkatkan daya saing dan pertumbuhan usaha UMKM
8.	Perluasan kerja sama perdagangan antar daerah dan antar negara	Memperluas jaringan kerja sama perdagangan antar daerah dan antar negara melalui pembentukan kemitraan strategis, peningkatan akses pasar, serta

No.	Arah Kebijakan	Strategi
	dalam rangka memperkuat rantai nilai;	harmonisasi regulasi untuk mempermudah arus barang dan jasa. Selain itu, perlu ditingkatkan kapasitas produksi dan inovasi lokal agar produk dalam negeri dapat bersaing di pasar global, sekaligus memperkuat rantai nilai dari hulu hingga hilir
9.	Pengembangan teknologi dan kualitas sumber daya konstruksi;	Pengembangan teknologi dan kualitas sumber daya konstruksi dilaksanakan melalui diantaranya sertifikasi tenaga kerja konstruksi, pengembangan media/sarana untuk peningkatan kapasitas tenaga kerja konstruksi, serta pemanfaatan dan dukungan pengembangan teknologi jasa konstruksi untuk mendukung penegakan standar keandalan bangunan.
10.	Penguatan rantai pasok dan rantai nilai dengan memastikan kelancaran alur barang/jasa dari pusat produksi menuju kawasan industri dan outlet, mengoptimalkan nilai tambah melalui hilirisasi, penguatan struktur ekonomi yang berkelanjutan, efisiensi, inovasi dan pemerataan pembangunan;	memastikan kelancaran distribusi barang/jasa dari pusat produksi ke kawasan industri dan outlet. Selain itu, perlu mendorong hilirisasi industri, inovasi teknologi, dan pemerataan pembangunan guna meningkatkan nilai tambah, efisiensi, serta menciptakan struktur ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif.

No.	Arah Kebijakan	Strategi
11.	Peningkatan keterkaitan UMKM pada rantai nilai industri domestik dan global dilaksanakan melalui peningkatan akses ke sumber daya produktif (termasuk pembiayaan dan pemasaran), penerapan teknologi dan kemitraan usaha;	Peningkatan keterkaitan UMKM pada rantai nilai industri domestik dan global dilaksanakan melalui peningkatan akses ke sumber daya produktif (termasuk pembiayaan dan pemasaran), penerapan teknologi, dan kemitraan usaha.
12.	Pembangunan pusat distribusi pangan untuk menjamin ketersediaan pangan di Kalimantan Timur;	pembangunan infrastruktur logistik yang terintegrasi, seperti gudang penyimpanan modern dan jaringan transportasi yang efisien, untuk memastikan distribusi pangan yang merata dan tepat waktu. Selain itu, perlu adanya kerja sama dengan petani lokal, pelaku usaha, dan pemerintah daerah untuk mengoptimalkan pasokan pangan, mengurangi kerugian pascapanen, dan menjaga stabilitas harga pangan di seluruh wilayah.
Misi 3 : Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Guna Menunjang Kegiatan Perekonomian, Pelayanan Publik Dan Kesehatan		
1.	Peningkatan jalan mantap di seluruh wilayah Kalimantan timur	peningkatan dan pemeliharaan jalan secara berkala, dengan fokus pada daerah yang sering mengalami kerusakan atau memiliki akses terbatas. serta mengalokasikan anggaran khusus untuk rehabilitasi jalan, memperkuat

No.	Arah Kebijakan	Strategi
		koordinasi antarinstansi, serta memanfaatkan teknologi terkini dalam pembangunan jalan yang tahan lama.
2.	Membangun kemudahan konektivitas antar pusat pertumbuhan ekonomi hingga seluruh wilayah	memperluas dan meningkatkan kualitas infrastruktur transportasi, seperti jalan tol, jalan non-tol, jembatan, bandara, pelabuhan serta jaringan transportasi umum yang terintegrasi. serta memprioritaskan pembangunan infrastruktur di wilayah perbatasan untuk mengurangi kesenjangan aksesibilitas.
3.	Pembangunan sarana irigasi, bendungan, jalan usaha tani dan sarana pertanian lainnya untuk peningkatan produktivitas komoditas pertanian	meningkatkan produktivitas komoditas pertanian melalui penyediaan infrastruktur yang mendukung kegiatan pertanian secara berkelanjutan. Pemerintah perlu memprioritaskan pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi serta bendungan untuk memastikan ketersediaan air sepanjang tahun, terutama di daerah-daerah yang sering mengalami kekeringan.
4.	Pengembangan superhub ekonomi IKN dan mitra IKN	penciptaan pusat pertumbuhan ekonomi yang terintegrasi dengan wilayah sekitarnya. Selain itu, sinergi dengan daerah mitra IKN melalui program kemitraan ekonomi, pengembangan kawasan industri, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia akan memperkuat posisi IKN sebagai pusat

No.	Arah Kebijakan	Strategi
		ekonomi baru yang berdaya saing tinggi di tingkat nasional dan global.
5.	Pengembangan kawasan perkotaan yang terintegrasi dan berkelanjutan yang terintegrasi dengan IKN	penciptaan kota cerdas yang ramah lingkungan, efisien, dan didukung oleh teknologi terkini. Pemerintah perlu memastikan pembangunan infrastruktur dasar, transportasi umum, serta fasilitas publik yang terhubung dengan IKN, sambil menerapkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan seperti pengelolaan limbah, energi terbarukan, dan ruang terbuka hijau untuk menciptakan kualitas hidup yang baik bagi masyarakat.
6.	Pembangunan dan pengembangan prasarana terminal, bandara, pelabuhan sungai dan laut	pembangunan dan pengembangan prasarana terminal, bandara, pelabuhan sungai, dan laut diarahkan untuk meningkatkan konektivitas dan efisiensi logistik di seluruh wilayah. Pemerintah perlu memprioritaskan modernisasi fasilitas, perluasan kapasitas, dan peningkatan kualitas layanan untuk mendukung arus barang, jasa, dan penumpang yang lebih lancar
7.	Pengembangan sarana transportasi darat, sungai dan laut yang memadai	pembangunan infrastruktur yang terintegrasi dan berkelanjutan untuk meningkatkan konektivitas antarwilayah. Pemerintah perlu memperbaiki dan memperluas jaringan jalan, revitalisasi sungai sebagai jalur transportasi, serta mengoptimalkan pelabuhan laut untuk

No.	Arah Kebijakan	Strategi
		mendukung mobilitas barang dan jasa secara efisien, ramah lingkungan, dan berdaya saing tinggi
8.	Penyediaan jaringan dan layanan listrik yang andal yang mengarah pada pemanfaatan EBT	Peningkatan ketersediaan daya dan jaringan energi listrik serta Energi Baru Terbarukan (EBT)
9.	Pemenuhan akses air minum dan sanitasi aman, berkelanjutan dan inklusif	Penyediaan Air Minum Layak Jaringan Perpipaan, Peningkatan Akses Sanitasi, Pengembangan Dan Peningkatan Kinerja Lembaga Penyelenggara Spam, Peningkatan Pengawasan Kualitas Air Minum Dan Pemanfaatan Iptek Dalam Pemenuhan Akses Air Minum Aman.
10.	Perluasan jaringan internet untuk percepatan penerapan teknologi informasi bagi kehidupan masyarakat	perluasan jaringan internet diarahkan untuk menjangkau seluruh wilayah, termasuk daerah terpencil, guna mendukung percepatan penerapan teknologi informasi dalam kehidupan masyarakat. Pemerintah perlu meningkatkan investasi dalam infrastruktur digital, seperti pembangunan menara BTS dan jaringan fiber optik, serta memberikan pelatihan literasi digital agar masyarakat dapat memanfaatkan teknologi secara optimal
11.	Penguatan pembangunan kawasan perdesaan yang berkontribusi pada pembangunan terpadu berkelanjutan	peningkatan infrastruktur dasar perdesaan, aksesibilitas, dan ekonomi lokal yang mendukung pembangunan terpadu dan berkelanjutan. serta memprioritaskan pembangunan jalan

No.	Arah Kebijakan	Strategi
		desa, irigasi, listrik, serta program pemberdayaan masyarakat berbasis potensi lokal untuk meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi kesenjangan antara desa dan kota.
12.	Percepatan pembangunan kemaritiman untuk peningkatan ekonomi masyarakat pesisir	membangun dan memperbaiki infrastruktur pelabuhan, pusat logistik, serta fasilitas pendukung seperti cold storage dan pasar ikan modern. Selain itu, perlu dilakukan pemberdayaan masyarakat pesisir melalui pelatihan keterampilan, akses permodalan, dan pengembangan usaha berbasis kelautan seperti budidaya perikanan, pariwisata bahari, dan industri pengolahan hasil laut untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan mereka.
13.	Percepatan pembangunan daerah pedalaman dan perbatasan	memprioritaskan pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, listrik, dan akses air bersih untuk mengurangi kesenjangan dengan wilayah perkotaan. Selain itu, mendorong program pemberdayaan masyarakat, pengembangan ekonomi lokal, serta peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan untuk meningkatkan kesejahteraan dan daya saing masyarakat di daerah tersebut.
14.	Peningkatan dan pembangunan sarana dan	1. Pembangunan Prasarana Layanan Kesehatan Berupa Rumah Sakit Tipe A dan Tipe B di Kota Samarinda dan

No.	Arah Kebijakan	Strategi
	prasarana kesehatan di Rumah Sakit	Balickpapan serta Tipe C di Kabupaten Paser dan Kutai Barat. 2. Melibatkan pelaku usaha swasta untuk pembangunan prasarana pembangunan publik (sekolah unggulan, rumah sakit, infrastruktur jalan, dll)
15.	Pengembangan pembiayaan inovatif dalam rangka mengatasi keterbatasan anggaran Pembangunan	Pengembangan pembiayaan inovatif dilaksanakan melalui Kerja Sama Pembiayaan Badan Usaha (KPBU), CSR, blended finance, pemanfaatan dana abadi daerah, dana jasa ekosistem dan pasar karbon.
Misi 4: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Professional Dan Berintegritas Berbasis Teknologi Informasi		
1.	Optimalisasi penerapan sistem merit pemerintahan	Optimalisasi penerapan sistem merit dilaksanakan melalui peningkatan pengawasan proses pengembangan karier, promosi mutasi ASN dan manajemen kinerja, perencanaan kebutuhan yang memanfaatkan teknologi informasi.
2.	Peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam berbagai aspek pembangunan	Peningkatan partisipasi bermakna masyarakat sipil dan masyarakat adat dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan dilaksanakan melalui akomodasi aspirasi sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan, perluasan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan, serta

No.	Arah Kebijakan	Strategi
		peningkatan transparansi pelaksanaan pembangunan.
3.	Pelayanan publik pada kategori sangat baik	Peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur melalui pelatihan dan pengembangan kompetensi secara berkala. Selain itu, perlu diterapkan sistem pelayanan berbasis teknologi digital yang transparan, cepat, dan akurat untuk memastikan kepuasan masyarakat serta efisiensi dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
4.	Digitalisasi seluruh layanan pemerintahan	Percepatan pembangunan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang merata serta mengintegrasikan sistem layanan digital berbasis satu data. Pemerintah perlu meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) aparatur dan masyarakat dalam penggunaan teknologi digital, serta memastikan keamanan data dan transparansi dalam setiap layanan yang diberikan.
5.	Penciptaan pola pengaduan masyarakat secara luas dan transparan dan respon cepat untuk penyelesaian aduan	membangun platform pengaduan masyarakat yang mudah diakses, terintegrasi, dan transparan, seperti aplikasi atau website yang dapat digunakan secara luas oleh masyarakat. serta membentuk tim respons cepat yang terlatih untuk menindaklanjuti setiap aduan secara efisien, disertai dengan

No.	Arah Kebijakan	Strategi
		mekanisme pelaporan terbuka agar masyarakat dapat memantau proses penyelesaian aduan tersebut.
6.	Penegakan integritas pegawai	Meningkatkan pengawasan dan penegakan disiplin pegawai melalui penerapan sistem pengendalian internal yang ketat. Membangun budaya kerja yang berlandaskan nilai-nilai integritas, transparansi, dan akuntabilitas dalam setiap aspek tugas dan tanggung jawab pegawai.
7.	Pengawasan proses pengembangan karier, promosi mutasi ASN dan manajemen kinerja	Memperkuat sistem pengawasan berbasis data dan meritokrasi dalam pengembangan karier, promosi, serta mutasi ASN. Meningkatkan akuntabilitas manajemen kinerja dengan mekanisme evaluasi yang transparan dan objektif.
8.	Perkuatan pengendalian pembangunan, melalui penerapan manajemen risiko	Meningkatkan efektivitas pengendalian pembangunan dengan menerapkan manajemen risiko berbasis data dan evaluasi berkala. Memastikan setiap program dan proyek pembangunan memiliki mitigasi risiko yang jelas untuk mencegah hambatan dan penyimpangan.
9.	Peningkatan produktivitas BUMD	Memperkuat tata kelola dan manajemen BUMD agar lebih profesional, transparan, dan berdaya saing. Mendorong diversifikasi usaha serta inovasi bisnis guna meningkatkan kontribusi BUMD terhadap perekonomian daerah.

No.	Arah Kebijakan	Strategi
10.	Peningkatan kapasitas fiskal daerah	Mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD) melalui inovasi kebijakan pajak dan retribusi yang efektif. Meningkatkan efisiensi pengelolaan anggaran serta mendorong investasi dan kemitraan strategis untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah.
Misi 5: Meningkatkan Kualitas Kehidupan Beragama, Penguatan Budaya Dan Kearifan Lokal		
1.	Peningkatan kualitas keagamaan masyarakat	Meningkatkan akses dan mutu pendidikan keagamaan serta pembinaan keagamaan yang inklusif bagi seluruh masyarakat. Mendorong harmoni antarumat beragama melalui penguatan dialog, toleransi, dan kolaborasi dalam kegiatan keagamaan.
2.	Penguatan karakter dan budaya asli daerah dalam kerangka NKRI	Meningkatkan edukasi dan sosialisasi nilai-nilai budaya lokal sebagai bagian dari identitas daerah dalam bingkai NKRI. Mendorong pelestarian seni, tradisi, dan kearifan lokal melalui kolaborasi dengan komunitas, lembaga pendidikan, dan pemerintah.
3.	Peningkatan partisipasi bermakna masyarakat sipil dan masyarakat adat dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan	Meningkatkan keterlibatan masyarakat sipil dan masyarakat adat melalui mekanisme konsultasi publik yang inklusif dan transparan. Memperkuat peran mereka dalam pengawasan pembangunan dengan membangun ruang partisipatif serta akses informasi yang mudah dan terbuka.

No.	Arah Kebijakan	Strategi
4.	Penguatan pendidikan yang berbasis kerukunan antar etnis dan agama dilaksanakan sejak usia dini	Mengintegrasikan nilai-nilai toleransi dan kerukunan dalam kurikulum pendidikan sejak usia dini. Meningkatkan kolaborasi antara sekolah, keluarga, dan komunitas untuk membangun budaya harmoni antar etnis dan agama.
5.	Peningkatan penerapan kurikulum bermuatan lokal	Mengintegrasikan kearifan lokal dalam kurikulum pendidikan untuk memperkaya pengalaman belajar siswa. Meningkatkan pelatihan bagi guru agar mampu mengimplementasikan kurikulum berbasis budaya dan potensi daerah secara efektif.
6.	Pengakuan dan penghormatan pada lembaga-lembaga adat dan hak ulayat masyarakat	Menguatkan peran lembaga adat dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan sumber daya alam sesuai dengan kearifan lokal. Menjamin perlindungan hak ulayat masyarakat adat melalui kebijakan yang mendukung pengakuan hukum atas tanah dan wilayah adat.
7.	Perlindungan masyarakat lokal dan promosi budaya	Meningkatkan program pemberdayaan masyarakat lokal melalui pendidikan, pelatihan, dan akses ke peluang ekonomi. Mempromosikan budaya daerah melalui acara, festival, dan pelestarian tradisi untuk memperkuat identitas lokal dan pariwisata.
8.	Pengembangan nilai-nilai luhur budaya dan	Mengintegrasikan nilai-nilai luhur budaya dan kearifan lokal dalam kurikulum pendidikan untuk

No.	Arah Kebijakan	Strategi
	kearifan lokal, serta pendidikan karakter	memperkuat karakter generasi muda. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam melestarikan budaya melalui program pelestarian dan promosi budaya yang inklusif.
9.	Penyediaan ruang publik yang inklusif sebagai wahana interaksi sosial antar warga dan ekspresi budaya	Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan ruang publik yang ramah bagi semua kalangan, termasuk penyandang disabilitas. Mendorong partisipasi masyarakat dalam merancang dan mengelola ruang publik sebagai sarana interaksi sosial dan ekspresi budaya lokal.
10.	Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal	Mendorong program pemberdayaan keluarga dengan mengintegrasikan nilai-nilai kearifan lokal dalam pembinaan kesejahteraan. Membangun kolaborasi dengan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang mendukung ketahanan keluarga melalui budaya gotong royong dan pemanfaatan sumber daya lokal.
Misi 6: Mewujudkan Pembangunan Berwawasan Lingkungan Yang Berkelanjutan		
1.	Pembangunan pengelolaan sampah dan limbah, serta peningkatan daur ulang serta terpadu antar daerah	Meningkatkan fasilitas dan infrastruktur pengelolaan sampah serta limbah yang ramah lingkungan dan terintegrasi antar daerah. Mendorong program daur ulang yang lebih efisien dan melibatkan masyarakat serta sektor swasta dalam pengelolaan sampah secara berkelanjutan.

No.	Arah Kebijakan	Strategi
2.	Peningkatan ketahanan energi, ketahanan air dan ketahanan ekologi	Mengembangkan sumber energi terbarukan dan meningkatkan efisiensi energi untuk mendukung ketahanan energi daerah. Meningkatkan pengelolaan sumber daya air dan pelestarian ekosistem melalui kebijakan konservasi dan teknologi ramah lingkungan.
3.	Pemahaman dan penerapan kehidupan berwawasan lingkungan oleh seluruh lapisan masyarakat	Meningkatkan sosialisasi dan edukasi tentang pentingnya kehidupan berwawasan lingkungan kepada seluruh lapisan masyarakat. Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam program-program pelestarian lingkungan melalui kebijakan yang inklusif dan berbasis komunitas.
4.	Pemerataan terhadap akses hunian layak	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dan Perbaikan/Penyediaan PSU Permukiman Serta Akses Pembiayaan Perumahan di 10 Kabupaten/Kota.
5.	Penanganan kawasan kumuh	Penanganan kawasan permukiman kumuh 10-15 Ha dilaksanakan melalui pemugaran, peremajaan, permukiman kembali,
6.	Perlindungan dan rehabilitasi hutan dan lahan gambut	<ol style="list-style-type: none">1. Mendorong skema perhutanan sosial untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan hutan serta lahan gambut secara berkelanjutan.2. Mengembangkan alternatif ekonomi berbasis ekosistem hutan, seperti

No.	Arah Kebijakan	Strategi
		<p>ekowisata, produk hasil hutan bukan kayu (HHBK), dan pertanian ramah gambut.</p> <p>3. Meningkatkan insentif bagi pelaku usaha dan masyarakat yang menerapkan praktik restorasi dan konservasi hutan serta lahan gambut</p>
7.	Rehabilitasi dan pemanfaatan lahan pasca tambang	Mengoptimalkan lahan pascatambang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjaga keseimbangan lingkungan
8.	Pelestarian bentang alam, perlindungan keanekaragaman hayati, dan penguatan ekosistem lingkungan berbasis kearifan lokal	<p>1. Meningkatkan kapasitas tata kelola kawasan hutan dan lahan berkelanjutan dengan memperkuat regulasi dan sistem pengawasan.</p> <p>2. Mempercepat rehabilitasi ekosistem hutan, gambut, dan mangrove sebagai upaya mitigasi perubahan iklim dan peningkatan ketahanan ekosistem.</p> <p>3. Mendorong transisi menuju ekonomi hijau dan berbasis lingkungan dengan mengembangkan usaha berbasis perhutanan sosial, ekowisata, dan jasa ekosistem.</p>
9.	Perencanaan tata ruang yang berwawasan lingkungan	Menjadikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan perizinan berbasis lahan
10.	Peningkatan mitigasi penanggulangan bencana	Peningkatan sistem mitigasi dan peringatan dini yang andal, Inovatif, Kolaboratif dan Implementatif serta

No.	Arah Kebijakan	Strategi
		Peningkatan kesiapsiagaan pemerintah daerah, lembaga usaha, masyarakat, Akademisi dan media yang terkoordinasi dalam menghadapi bencana

Rancangan Awal

6.3 Program Prioritas Pembangunan Daerah

Program Prioritas adalah program strategis yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen untuk mewujudkan tujuan dan sasaran RPJMD yang diperoleh dengan teknik cascading (penurunan) kinerja. Berikut program prioritas yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 – 2029:

Tabel 6.3
Program Prioritas Pembangunan Daerah

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Urusan /Program	Outcome Kinerja	Indikator Kinerja	Baseline	Target Kinerja						Perangkat Daerah
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	TUJUAN 1 : TERWUJUDNYA KALTIM SUKSES										
	SASARAN 1 : AKSELERASI PEREKONOMIAN DAERAH										
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN										
3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Meningkatkan daya saing, memperluas pasar global, dan mendorong ekspor berbasis nilai tambah	Produk Daerah yang masuk pasar ekspor dan atau negara tujuan baru (jenis)	28	70	73	74	75	76	77	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN										
3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Berkembangnya sektor industri yang inovatif, inklusif, dan berbasis sumber daya lokal	Pertumbuhan industri pengolahan non migas dan non batubara (%)	10,27	5,56	5,92	6,28	6,64	7,00	7,36	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH										
2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Meningkatnya daya saing UMKM	Proporsi UKM Menjalinkan Kemitraan dan Ekspor (%)	N/A							Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Urusan/Program	Outcome Kinerja	Indikator Kinerja	Baseline	Target Kinerja						Perangkat Daerah
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
											Kecil Menengah
2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN UMKM	Meningkatkan daya saing pelaku UKM di era digitalisasi	Persentase UKM yang Masuk Pasar Digital (%)	5	10	15	20	25	30	35	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN											
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN*	tersedianya prasarana pertanian yang sesuai dengan kebutuhan	Tingkat Pemenuhan Prasarana Pertanian Hortikultura (%)	34	43	52	54	56	58	60	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
			Tingkat Pemenuhan Prasarana Pertanian Tanaman Pangan (%)	79,19	81	83	85	87	89	90	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN*	Meningkatnya produktivitas pertanian	Peningkatan Produksi tanaman pangan (%)	7,37	7-9	7-9	7-9	7-9	7-9	7-9	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
			Peningkatan Produksi tanaman hortikultura (%)	13.5	13-15	13-15	13-15	13-15	13-15	13-15	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN*	Meningkatnya Luasan Areal Perkebunan	Luas kebun yang dibangun (Ha)	62772	64.053	65.360	66.694	68.055	69.444	70.861	Dinas Perkebunan
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN*	Meningkatnya produksi komoditas tanaman perkebunan	Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan (%)	-5,40%	3-5%	3-5%	3-5%	3-5%	3-5%	3-5%	Dinas Perkebunan
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN*	Terpenuhinya prasarana peternakan	Tingkat pemenuhan prasarana peternakan (Skor)	100	70	72	74	76	78	80	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

[illegible]

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Urusan/ Program	Outcome Kinerja	Indikator Kinerja	Baseline	Target Kinerja						Perangkat Daerah
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
			di rehabilitasi								
			5. Persentase luas kerusakan kawasan hutan diluar Hutan Konservasi	0.16	<1	<1	<1	<1	<1	<1	Dinas Kehutanan
3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN*	Meningkatnya pendapatan masyarakat dari usaha berbasis hutan	1. Nilai Transaksi Ekonomi (NTE) Kelompok Masyarakat Kehutanan	1,500,000,000	1,500,000,000	1,500,000,000	1,750,000,000	2,000,000,000	2,250,000,000	2,500,000,000	Dinas Kehutanan
		Meningkatnya kualitas sumber daya manusia di bidang kehutanan	2. Luas kawasan yang dikelola masyarakat	29	20000	20000	10000	10000	10000	10000	Dinas Kehutanan
			3. Persentase Peningkatan Kelompok Tani Hutan (KTH)	1	2	2	3	3	4	4	Dinas Kehutanan
			4. Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS)	10	10	12	12	15	15	15	Dinas Kehutanan
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA										
3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan	1,69	2,19	2,69	3,19	4,01	4,51	5,00	Dinas Pariwisata

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Urusan/Program	Outcome Kinerja	Indikator Kinerja	Baseline	Target Kinerja						Perangkat Daerah
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Meningkatnya Cakupan Rehabilitasi Sosial	Persentase Peningkatan PMKS yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Didalam Panti (%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Sosial
1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Meningkatnya Cakupan Perlindungan Sosial korban Bencana	Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana (%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Sosial
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA											
2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Mendorong Tata Kelola Pemerintahan Desa	Persentase Peningkatan Tata Kelola Administrasi Pemerintahan Desa	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
			Jumlah Fasilitas Penyelesaian Batas Desa	2 Kabupaten	2 Kabupaten						Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Mendorong Pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan Desa	Jumlah MHA yang dibina	13	13						Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
			Jumlah Pendayagunaan Lembaga	27	27						Dinas Pemberdayaan Masyarakat

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Urusan/Program	Outcome Kinerja	Indikator Kinerja	Baseline	Target Kinerja						Perangkat Daerah
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
			Kemasyarakatan Desa								dan Pemerintahan Desa
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN										
1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN*	Meningkatnya kualitas kawasan permukiman (Inmendagri)	Persentase Luas Kawasan Kumuh 10 - 15 Ha yang Ditangani (Inmendagri)	84.84%	78.45%	60.58%	49.16%	34.22%	15.43%	0	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN										
2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT		Meningkatnya Bumdes yang aktif (Bumdes)	30 Bumdes	1699649500	35 Bumdes	1990178289	45 Bumdes		1793722922	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
2.09.04	PROGRAM KERAWANAN PANGAN		Desa Tertinggal dan Sangat Tertinggal yang Lembaga Kemasyarakatan Desa, TP PKK, MHA, KPM dan Pokmas mampu berperan aktif dalam pembangunan	30 Desa	3019466000	30 Desa	3535597003	30 Desa		3186589573	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
	SASARAN 3 : TERBANGUNNYA INFRASTRUKTUR BERKUALITAS										
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG										
1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Optimalisasi konektivitas dan aksesibilitas jalan dalam mendukung pendistribusian barang dan jasa	Ruas jalan baru yang dibangun	3	3	3	3	3	3	3	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
			Rasio Kemantapan	79%	82%	88%	95%	97%	99%	100%	Dinas Pekerjaan Umum,

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Urusan/Program	Outcome Kinerja	Indikator Kinerja	Baseline	Target Kinerja						Perangkat Daerah
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
			Jalan Provinsi								Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR	Meningkatnya pembangunan infrastruktur sumber daya air secara merata.	Daerah Irigasi Kewenangan provinsi yang terlayani jaringan irigasi	1.822 Ha	1.904,71 Ha	2.104,7 Ha	2.254,7 Ha	2.494,7 Ha	2.744,7 Ha	2.984,7 Ha	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
			Panjang pantai kritis yang ditangani	13,03 Km	0,225 Km	1,565 Km	2,905 Km	4,245 Km	5,855 Km	6,925 Km	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
			Kapasitas air baku untuk air bersih	10.980 Liter/Detik	11.220 Liter/Detik	11.460 Liter/Detik	11.700 Liter/Detik	11.940 Liter/Detik	12.830 Liter/Detik	13.070 Liter/Detik	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
			Penanganan luas genangan banjir perkotaan	71,6 Ha	79,61 Ha	211,76 Ha	378,78 Ha	539,87 Ha	679,84 Ha	805,9 Ha	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Terpenuhinya/Terselesainya Infrastrukturnya Air Minum Skala Regional	Persentase Kesiapan Penyelenggaraan Infrastruktur Air Minum Regional (%)	16	26	34	48	74	91	100	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Meningkatnya Pemenuhan Layanan Air Limbah Domestik Aman Skala Regional dan Kab/Kota	Persentase Kesiapan Penyelenggaraan Infrastruktur Air Limbah Domestik Regional (%)	6	11	16	25	40	68	90	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Urusan/Program	Outcome Kinerja	Indikator Kinerja	Baseline	Target Kinerja						Perangkat Daerah
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Terwujudnya bangunan gedung kawasan strategis provinsi yang tertata atau dalam kondisi baik	Persentase Jumlah Gedung Untuk Kepentingan Strategis Provinsi yang Ditangani (%)	0	84	100	50	67	83	100	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN											
1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Terpenuhinya rumah layak huni bagi warga negara korban bencana dan/atau yang terkena relokasi akibat program pemerintah (Inmendagri)	Persentase Kesiapan Penyediaan Rumah Layak Huni bagi Korban Bencana dan/atau Terkena Relokasi Program Pemerintah	0	0	32.3%	50.85%	69.40%	87.95%	1	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN*	Meningkatnya kualitas kawasan permukiman (Inmendagri)	Persentase Luas Kawasan Kumuh 10 - 15 Ha yang Ditangani (Inmendagri)	84.84%	78.45%	60.58%	49.16%	34.22%	15.43%	0%	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Meningkatnya penyediaan PSU permukiman (Inmendagri)	Persentase Peningkatan PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum) Permukiman	57.89%	73.58%	20%	40%	60%	80%	100%	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN											
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Peningkatan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan	Jumlah Kecelakaan di Ruas Jalan Provinsi (Kejadian)	175	165	155	145	135	125	115	Dinas Perhubungan
			Konektivitas Darat (Rasio)	0	0	0	0	1	1	1	Dinas Perhubungan

[illegible]

[illegible]

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Urusan/Program	Outcome Kinerja	Indikator Kinerja	Baseline	Target Kinerja						Perangkat Daerah
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
			4. Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47	Dinas Kehutanan
			5. Persentase luas kerusakan kawasan hutan diluar Hutan Konservasi	0.16	<1	<1	<1	<1	<1	<1	Dinas Kehutanan
3.28.04	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Meningkatnya kelestarian sumber daya alam hayati dan ekosistemnya	1. Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	N/A	0.533	0.540	0.547	0.555	0.562	1	Dinas Kehutanan
			2. Luas kawasan bernilai ekosistem penting, daerah penyangga di KSA/KPA dan konservasi provinsi yang dikelola	610,540.98	88617	95337	109140	115860	122580	132580	Dinas Kehutanan
3.28.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	Meningkatnya kelestarian dan fungsi daerah aliran sungai (DAS)	Luas DAS dan Sub DAS yang dikelola	248,026.31	263	358	193187	9603	7195	388381	Dinas Kehutanan
3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN*	Meningkatnya pendapatan masyarakat dari usaha berbasis hutan	1. Nilai Transaksi Ekonomi (NTE) Kelompok Masyarakat Kehutanan	1,500,000,000	1,500,000,000	1,500,000,000	1,750,000,000	2,000,000,000	2,250,000,000	2,500,000,000	Dinas Kehutanan
		Meningkatnya kualitas sumber daya manusia di bidang kehutanan	2. Luas kawasan yang dikelola masyarakat	28,56	20000	20000	10000	10000	10000	10000	Dinas Kehutanan

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Urusan/ Program	Outcome Kinerja	Indikator Kinerja	Baseline	Target Kinerja						Perangkat Daerah
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
			3. Persentase Peningkatan Kelompok Tani Hutan (KTH)	1	2	2	3	3	4	4	Dinas Kehutanan
			4. Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS)	10	10	12	12	15	15	15	Dinas Kehutanan
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL											
3.29.05	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN (EBT)	Meningkatnya tata kelola energi baru terbarukan	1. Jumlah Rumah Tangga Penerima Listrik yang Bersumber dari Pembangkit EBT	5	5	6	6	6	7	7	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
			2. Porsi EBT dalam Bauran Energi	12	12	16	19	22	26	29	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN											
3.25.02	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Meningkatnya Pengelolaan Kawasan Konservasi di Perairan, wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil	Persentase luas kawasan konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil yang dikelola (Ha)	72.97	327819.31	328247	355658	355658	355658	390076	Dinas Kelautan Dan Perikanan
3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Meningkatnya produksi perikanan tangkap	Volume produksi perikanan tangkap (Ton)	190000	195000	200000	205000	210000	215000	220000	Dinas Kelautan Dan Perikanan

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Urusan/Program	Outcome Kinerja	Indikator Kinerja	Baseline	Target Kinerja						Perangkat Daerah
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Meningkatnya produksi perikanan budidaya secara berkelanjutan	Volume produksi perikanan budidaya (Ton)	200000	201000	202000	203400	204800	206200	207700	Dinas Kelautan Dan Perikanan
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT										
1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Meningkatnya Ketangguhan dalam menghadapi bencana	Indeks Pra Bencana	N/A	110	115	119	124	129	134	Badan Penanggula ngan Bencana Daerah
			Indeks Kedaruratan dan Logistik Peralatan	N/A	33	34	35	36	37	38	Badan Penanggula ngan Bencana Daerah
			Indeks Pasca Bencana	N/A	16	16	17	17	18	19	Badan Penanggula ngan Bencana Daerah
	TUJUAN 2: TERBANGUNNYA GENERASI EMAS										
	SASARAN 5: MENINGKATNYA DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT										
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN										
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Meningkatnya kualitas upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Persentase Penduduk yang Mempunyai Keluhan Kesehatan dalam Sebulan Terakhir	23,53 *	23	23	22	22	22	21	Dinas Kesehatan
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Meningkatnya kapasitas sumber daya manusia kesehatan	Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan yang ditingkatkan kompetensin ya	35	45	50	55	60	65	70	Dinas Kesehatan
	SASARAN 6: MENINGKATNYA KECERDASAN MASYARAKAT										
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN										

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Urusan/Program	Outcome Kinerja	Indikator Kinerja	Baseline	Target Kinerja						Perangkat Daerah
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	meningkatkan partisipasi sekolah usia 4-18 tahun disabilitas	1. Persentase Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus	53,75	62,55	71,34	72,43	73,52	74,61	75,70	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		meningkatkan partisipasi sekolah usia 6-18 tahun	2. Persentase Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK	81,84	82,20	82,57	82,93	83,29	83,66	84,02	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Meningkatnya kesadaran dan toleransi di satuan pendidikan terhadap siswa dengan kebutuhan khusus dan siswa dari latar belakang yang berbeda	3. Persentase Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	66,17	67,79	69,41	71,03	72,65	74,27	75,89	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Meningkatnya jumlah siswa yang merasa aman di sekolah, baik secara fisik dan psikologis, seperti tidak adanya perundungan dan hukuman fisik.	4. Persentase Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	75,12	78,08	79,16	80,24	81,32	82,40	83,48	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		meningkatkan toleransi agama dan budaya serta komitmen kebangsaan pada satuan pendidikan	5. Persentase Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	73,11	74,53	75,95	77,37	78,79	80,21	81,63	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		meningkatkan kemampuan dalam memahami, menggunakan, merefleksi, dan mengevaluasi beragam jenis teks (teks informasi dan teks fiksi)	6. Persentase Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	78,52	79,42	80,32	81,22	82,12	83,02	83,92	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Urusan/Program	Outcome Kinerja	Indikator Kinerja	Baseline	Target Kinerja						Perangkat Daerah
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
		meningkatkan kemampuan dalam berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan.	7. Persentase Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	69,22	70,25	71,28	72,31	73,34	74,37	75,40	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		meningkatkan lulusan SMK yang mendapatkan penilaian budaya kerja minimal puas dari DUDI SMK	8. Persentase Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK	81,63	82,17	82,71	83,25	83,79	84,33	84,87	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		meningkatkan lulusan SMK yang melanjutkan pendidikan ke jenjang selanjutnya, bekerja, dan/atau berwirausaha dalam satu tahun setelah lulus.	9. Persentase Tingkat Penyerapan Lulusan SMK	88,20	89,19	90,18	91,17	92,16	93,15	94,14	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	meningkatkan jumlah tenaga pendidik yang memiliki ijazah Diploma dan sarjana	Persentase Tenaga Pendidik yang memiliki Ijazah diploma dan sarjana	99,69							Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
SASARAN 7: MENINGKATNYA PRODUKTIFITAS DAN KAPABILITAS SUMBER DAYA MANUSIA											
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA											
2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Meningkatnya kinerja pembangunan ketenagakerjaan dalam rangka produktivitas tenaga kerja	Persentase Lulusan Pelatihan Tenaga Kerja yang Dimagangkan dan Bekerja (%)	65%	67%	67%	70%	71%	75%	80%	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Meningkatnya kinerja pembangunan ketenagakerjaan dalam rangka kesempatan kerja	Persentase Pencari Kerja yang ditempatkan (%)	27%	28%	28%	29%	29%	30%	30%	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

			2024	2025	2026	2027	2028	2029
BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK								
	Meningkatnya Kualitas dan Efektifitas Penyelenggaraan PUG dan Peran Perempuan dalam Pembangunan	Presentase Anggaran Responsif Gender (ARG)	29%	29%	29,22%	29,57%	29,92%	30,27%
BIDANG PERTANIAN								
	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia dan kelembagaan pertanian	Persentase Sumber Daya Manusia Pertanian yang Meningkatkan Kapasitasnya (%)	80	80	82	84	86	88
	Meningkatnya kapasitas Sumber Daya Manusia Perkebunan	Persentase sumber daya manusia pertanian yang meningkatkan kapasitasnya (%)	13,48	23,03	34,55	36	38	40
	Meningkatnya kapasitas Kelembagaan Perkebunan	Persentase kelembagaan petani yang kapasitasnya meningkat (%)	30,77	52,99	79,49	82	85	90
	Meningkatnya kapasitas SDM dan Kelembagaan Peternakan	Peningkatan Kapasitas SDM dan Kelembagaan peternakan (skor)	99,99	99,73	99,78	99,8	99,9	100
NILAI AKHLAK DAN NILAI KEBUDAYAAN MASYARAKAT								
POLITIK								

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Urusan/Program	Outcome Kinerja	Indikator Kinerja	Baseline	Target Kinerja						Perangkat Daerah
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Meningkatnya pemberian edukasi dan literasi masyarakat terkait ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan agama	Persentase elemen masyarakat yang mendapatkan penguatan edukasi terkait ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan agama	100%	100%	100%	100%	100%	100%	3500000000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
KESEKTARIATAN DAERAH											
4.01.04	PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	Meningkatnya Kualitas Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Persentase perumusan kebijakan di bidang kesra yang difasilitasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Sekretariat Daerah
			Persentase lembaga Bina Spiritual dan Sarana prasarana keagamaan yang difasilitasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Sekretariat Daerah
TUJUAN 3: TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK											
SASARAN 9: MENINGKATNYA AKUNTABILITAS PEMERINTAHAN DAN PROFESIONALISME ASN											
KESEKTARIATAN DAERAH											
4.01.02	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang mendapatkan nilai SAKIP dengan predikat A (Memuaskan)	10,26%	12,50%	15,00%	17,50%	20,00%	22,50%	25,00%	Sekretariat Daerah
		Meningkatnya kualitas layanan pemerintah	Persentase Perangkat Daerah yang memperoleh Indeks	95,69%	96,00%	97,00%	98,00%	99,00%	100,00%	100,00%	Sekretariat Daerah

lainnya melalui dukungan riset dan inovasi daerah	yang ditindaklanjuti (%)
---	--------------------------

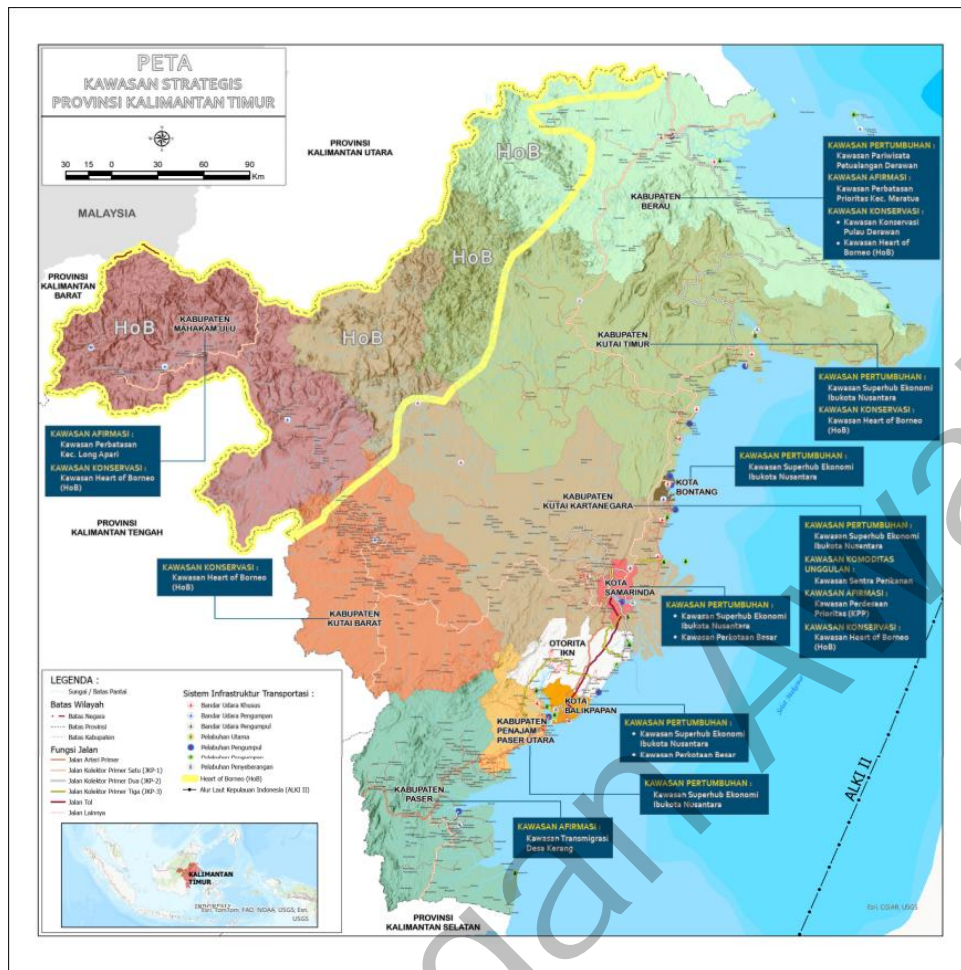
NYA INTEGRITAS PEMERINTAHAN

Memastikan penyelenggaraan pemerintahan berjalan sesuai dengan rencana dan peraturan perundang-undangan	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Internal Pemda
---	--

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Urusan/Program	Outcome Kinerja	Indikator Kinerja	Baseline	Target Kinerja						Perangkat Daerah
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
			Provinsi dan Kab/Kota								
	SASARAN 11: MENINGKATNYA LAYANAN PUBLIK BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI										
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA										
2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA*	Terwujudnya tata kelola dan pemberdayaan informatika serta infrastruktur teknologi informasi	Persentase pemanfaatan teknologi informasi dalam administrasi pemerintahan dan pelayanan publik	80%	82%	85%	87%	89%	91%	93%	Dinas Komunikasi dan Informatika

6.4 Keselarasan RPJMD Provinsi Kaltim 2025 – 2029 dengan dengan RTRW Provinsi Kaltim 2023 - 2042

Penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kalimantan Timur 2025-2029 telah diselaraskan dengan Pola Ruang, Struktur Ruang, dan Indikasi Program yang terdapat dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kalimantan Timur 2023-2042. Hal ini bertujuan untuk memastikan konsistensi antara perencanaan pembangunan jangka menengah dengan arah kebijakan dan pengembangan wilayah yang telah dirumuskan dalam RTRW, yang mencakup penataan ruang dan pengembangan kawasan strategis di provinsi. Penyusunan RPJMD ini juga mempertimbangkan pemanfaatan ruang secara optimal, dengan memprioritaskan pembangunan infrastruktur, ekonomi, dan lingkungan yang mendukung keberlanjutan pembangunan daerah. Dengan demikian, RPJMD Kaltim 2025-2029 diharapkan dapat mendorong pertumbuhan yang terintegrasi dan berkelanjutan, seiring dengan pencapaian tujuan pembangunan yang sejalan dengan visi jangka panjang RTRW Kaltim 2023-2042.



Gambar 6.1
Peta Kawasan Strategis Provinsi Kalimantan Timur

(Sumber: RTRWP Kaltim 2023 – 2042)

6.5 Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten/Kota

Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur merupakan agregat dari pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan di sepuluh kabupaten/kota. Pengarusutamaan setiap kebijakan menjadi kunci penting pada tahapan pembangunan yang diimplementasikan dari perencanaan pembangunan. Oleh karena itu, perencanaan pembangunan kabupaten/kota diharapkan mampu memberi kontribusi nyata dalam capaian kinerja pembangunan Kalimantan Timur sehingga keberhasilan visi dan misi dapat dirasakan secara menyeluruh. Arah kebijakan pembangunan lebih lanjut dirinci kedalam highlights indikasi kebijakan yang akan menjadi pedoman masing – masing kabupaten/kota dalam melaksanakan pembangunan.

Dalam rangka menyusun arah kebijakan pembangunan Kabupaten/Kota yang terukur dan berkelanjutan, diperlukan indikator makro yang menjadi acuan dalam menilai capaian, memantau progres, serta menetapkan target jangka menengah dan panjang. Indikator-indikator ini disusun untuk memastikan keselarasan antara perencanaan strategis, implementasi program, dan evaluasi kinerja pembangunan, sesuai dengan visi dan misi daerah.

a. Kabupaten Paser

Kabupaten Paser diarahkan untuk mendorong pengembangan sektor pertanian TPH, perkebunan, perikanan, yang di-iringi dengan peningkatan kapasitas SDM pertanian yang professional, berikut data capaian indikator makro beserta highlights indikasi kebijakan Provinsi untuk Kab. Paser:

Tabel 6.4
Capaian Indikator Makro Kab. Paser

Indikator Makro	Capaian 2024	Baseline 2025	Target 2030
IPM	70,79	70,79–71,07	72,06–72,35
LPE (%)	3,60	3,60–3,65	4,69–4,80
Tingkat Kemiskinan (%)	10,75	9,70–10,75	6,50–6,90
Indeks Gini	0,285	0,280–0,285	0,232–0,233
TPT (%)	2,51	2,18–2,51	1,40–1,50

Sumber: BPS Kaltim, RPJPD Prov. Kaltim 2025 - 2045

Highlights Indikasi Kebijakan Provinsi untuk Kab. Paser:

1. Pemenuhan dan pemerataan kuantitas maupun kualitas tenaga medis dan kesehatan
2. Pemerataan akses pelayanan kesehatan berkualitas
3. Pemerataan akses dan kualitas antarsatuan pendidikan dan antardaerah
4. Penyediaan afirmasi akses pendidikan

5. Pengembangan kawasan sentra produksi pangan terpadu, modern, dan berkelanjutan
6. Pengembangan destinasi wisata potensial Derawan dan sekitarnya
7. Pengembangan ekonomi maritim
8. Penyelesaian permasalahan *Outstanding Boundary Problems*
9. Pembangunan irigasi baru

b. Kabupaten Kutai Barat

Kabupaten Kubar diarahkan untuk Mendorong pertumbuhan sektor perkebunan sawit dan karet sebagai hulu rantai pasok agroindustri Kaltim, dengan terus memperkuat infrastruktur ekonomi. Berikut data capaian indikator makro beserta highlights indikasi kebijakan Provinsi untuk Kab. Kutai Barat:

Tabel 6.5
Capaian Indikator Makro Kab. Kutai Barat

Indikator Makro	Capaian 2024	Baseline 2025	Target 2030
IPM	74,76	74,76–74,90	76,55–77,09
LPE (%)	7,57	7,57–8,35	8,72–8,78
Tingkat Kemiskinan (%)	9,56	8,50–9,56	5,42–6,14
Indeks Gini	0,266	0,250–0,266	0,233–0,235
TPT (%)	5,58	5,11–5,58	3,70–4,00

Sumber: BPS Kaltim, RPJPD Prov. Kaltim 2025 - 2045

Highlights Indikasi Kebijakan Provinsi untuk Kab. Kutai Barat:

1. Pemenuhan dan pemerataan kuantitas maupun kualitas tenaga medis dan kesehatan
2. Penyediaan afirmasi akses pendidikan
3. Pengembangan kawasan sentra produksi pangan terpadu, modern, dan berkelanjutan
4. Penguatan pembangunan kawasan perdesaan yang berkontribusi pada pembangunan terpadu berkelanjutan
5. Pengembangan diversifikasi pangan

6. Pembangunan irigasi baru
7. Pengembangan angkutan Sungai

c. Kabupaten Kutai Kartanegara

Kabupaten Kukar diarahkan untuk Mendorong pengembangan sektor pertanian TPH sebagai lumbung pangan, perkebunan, perikanan, agroindustri dan pariwisata yang di-iringi dengan peningkatan infrastruktur pendukung ekonomi. Berikut data capaian indikator makro beserta highlights indikasi kebijakan Provinsi untuk Kab. Kutai Kartanegara:

Tabel 6.6
Capaian Indikator Makro Kab. Kutai Kartanegara

Indikator Makro	Capaian 2024	Baseline 2025	Target 2030
IPM	76,57	76,57–76,86	78,84–79,41
LPE (%)	5,62	5,62–5,70	7,60–7,71
Tingkat Kemiskinan (%)	7,28	6,10–7,28	3,35–3,50
Indeks Gini	0,307	0,290–0,307	0,270–0,272
TPT (%)	4,11	3,85–4,11	3,00–3,18

Sumber: BPS Kaltim, RPJPD Prov. Kaltim 2025 - 2045

Highlights Indikasi Kebijakan Provinsi untuk Kab. Kutai Kartanegara:

1. Pemerataan akses dan kualitas antarsatuan pendidikan dan antardaerah
2. Penyediaan afirmasi akses pendidikan
3. Percepatan pengembangan industri strategis berbasis sektor ekonomi eksisting
4. Pengembangan kawasan sentra produksi pangan terpadu, modern, dan berkelanjutan
5. Pengembangan ekonomi maritim
6. Pengembangan diversifikasi pangan
7. Pembangunan irigasi baru
8. Pengembangan angkutan sungai

d. Kabupaten Kutai Timur

Kabupaten Kutai Timur diarahkan untuk Mengakselerasi pertumbuhan industri pengolahan eksisting (terutama agroindustri), pertanian pangan, perkebunan sawit dan pisang, serta mendukung upaya revitalisasi KEK Maloy. Berikut data capaian indikator makro beserta highlights indikasi kebijakan Provinsi untuk Kab. Kutai Timur:

Tabel 6.7
Capaian Indikator Makro Kab. Kutai Timur

Indikator Makro	Capaian 2024	Baseline 2025	Target 2030
IPM	75,90	75,90–76,18	77,75–78,29
LPE (%)	9,82	9,82–10,00	11,75–11,90
Tingkat Kemiskinan (%)	8,81	7,50–8,81	4,06–5,21
Indeks Gini	0,283	0,280–0,283	0,252–0,253
TPT (%)	5,76	5,44–5,76	4,30–4,50

Sumber: BPS Kaltim, RPJPD Prov. Kaltim 2025 - 2045

Highlights Indikasi Kebijakan Provinsi untuk Kab. Kutai Timur:

1. Pembangunan jembatan Nibung
2. Pembangunan jalan pendekat jembatan Nibung
3. Dukungan pengembangan KEK Maloy
4. Penyediaan afirmasi akses pendidikan
5. Pengembangan kawasan sentra produksi pangan terpadu, modern, dan berkelanjutan
6. Pengembangan pelabuhan Maloy
7. Pengembangan destinasi wisata potensial
8. Pengembangan ekonomi maritim

e. Kabupaten Berau

Kabupaten Berau diarahkan untuk Mendorong pertumbuhan sektor pariwisata-ekraf dan UMKM, yang di-iringi dengan pengembangan sektor pertanian pangan, perkebunan, dan perikanan. Berikut data

capaian indikator makro beserta highlights indikasi kebijakan Provinsi untuk Kab. Berau:

Tabel 6.8
Capaian Indikator Makro Kab. Berau

Indikator Makro	Capaian 2024	Baseline 2025	Target 2030
IPM	77,17	77,17–77,57	79,15–79,65
LPE (%)	7,28	7,28–7,30	9,60–9,75
Tingkat Kemiskinan (%)	5,08	4,00–5,08	2,50–2,75
Indeks Gini	0,317	0,312–0,317	0,277–0,282
TPT (%)	5,16	4,78–5,16	3,90–4,05

Sumber: BPS Kaltim, RPJPD Prov. Kaltim 2025 - 2045

Highlights Indikasi Kebijakan Provinsi untuk Kab. Berau:

1. Pemerataan akses dan kualitas antarsatuan pendidikan dan antardaerah
2. Penyediaan afirmasi akses pendidikan
3. Pengembangan kawasan sentra produksi pangan terpadu, modern, dan berkelanjutan
4. Pengembangan destinasi wisata potensial Derawan dan sekitarnya
5. Pengembangan ekonomi maritim
6. Penyelesaian permasalahan *Outstanding Boundary Problems*
7. Pembangunan irigasi baru

f. Kabupaten Penajam Paser Utara

Kabupaten PPU diarahkan untuk Meningkatkan inklusi dampak pembangunan IKN melalui pengembangan Kawasan industri Buluminung, pengembangan sektor pertanian TPH, pariwisata, jasa dan perdagangan, yang di-iringi revitalisasi kawasan yang berbatasan dengan

IKN. Berikut data capaian indikator makro beserta highlights indikasi kebijakan Provinsi untuk Kab. Penajam Paser Utara:

Tabel 6.9
Capaian Indikator Makro Kab. Penajam Paser Utara

Indikator Makro	Capaian 2024	Baseline 2025	Target 2030
IPM	74,94	74,94–75,00	76,93–77,46
LPE (%)	30,68	8,50–10,00	9,53–10,00
Tingkat Kemiskinan (%)	6,69	5,50–6,69	3,31–3,76
Indeks Gini	0,258	0,255–0,258	0,230–0,240
TPT (%)	2,05	2,00–2,05	1,40–1,52

Sumber: BPS Kaltim, RPJPD Prov. Kaltim 2025 - 2045

Highlights Indikasi Kebijakan Provinsi untuk Penajam Paser Utara:

1. Pengembangan maupun pembukaan perguruan tinggi baru dan program studi berstandar internasional
2. Dukungan pengembangan Kawasan Industri Buluminung
3. Pengembangan kawasan sentra produksi pangan terpadu, modern, dan berkelanjutan
4. Pengembangan ekonomi maritim
5. Pengembangan pelabuhan laut
6. Pengembangan dan pembangunan bandara
7. Pengembangan diversifikasi pangan
8. Pembangunan irigasi baru

g. Kabupaten Mahakam Ulu

Kabupaten Mahulu diarahkan untuk Akselerasi pembangunan konektivitas infrastruktur jalan & jembatan untuk membuka akses perdagangan produk-produk hasil pertanian TPH dan perkebunan.

Berikut data capaian indikator makro beserta highlights indikasi kebijakan Provinsi untuk Kab. Mahakam Ulu:

Tabel 6.10
Capaian Indikator Makro Kab. Mahakam Ulu

Indikator Makroi	Capaian 2024	Baseline 2025	Target 2030
IPM	70,79	70,79–71,07	72,06–72,35
LPE (%)	3,60	3,60–3,65	4,69–4,80
Tingkat Kemiskinan (%)	10,75	9,70–10,75	6,50–6,90
Indeks Gini	0,285	0,280–0,285	0,232–0,233
TPT (%)	2,51	2,18–2,51	1,40–1,50

Sumber: BPS Kaltim, RPJPD Prov. Kaltim 2025 – 2045

Highlights Indikasi Kebijakan Provinsi untuk Kab. Mahakam Ulu:

1. Pemenuhan dan pemerataan kuantitas maupun kualitas tenaga medis dan kesehatan
2. Pemerataan akses pelayanan kesehatan berkualitas
3. Pemerataan akses dan kualitas antarsatuan pendidikan dan antardaerah
4. Penyediaan afirmasi akses pendidikan
5. Pengembangan kawasan sentra produksi pangan terpadu, modern, dan berkelanjutan
6. Pengembangan destinasi wisata potensial Derawan dan sekitarnya
7. Pengembangan ekonomi maritim
8. Penyelesaian permasalahan *Outstanding Boundary Problems*
9. Pembangunan irigasi baru

h. Kota Balikpapan

Kota Balikpapan diarahkan untuk Meningkatkan peran sebagai kota pusat MICE yang di-iringi dengan pengembangan sektor UMKM-Ekraf, serta peningkatan investasi industri terutama di KIK. Berikut data capaian indikator makro beserta highlights indikasi kebijakan Provinsi untuk Kota Balikpapan:

Tabel 6.11
Capaian Indikator Makro Kota Balikpapan

Indikator Makro	Capaian 2024	Baseline 2025	Target 2030
IPM	82,62	82,62–83,09	84,53–84,98
LPE (%)	3,23	3,23–3,30	5,71–5,77
Tingkat Kemiskinan (%)	2,23	2,00–2,23	1,66–1,72
Indeks Gini	0,324	0,305–0,324	0,272–0,279
TPT (%)	6,22	6,03–6,22	5,00–5,20

Sumber: BPS Kaltim, RPJPD Prov. Kaltim 2025 – 2045

Highlights Indikasi Kebijakan Provinsi untuk Kota Balikpapan:

1. Pembangunan Dermaga Multipurpose Kariangau, Pelabuhan Balikpapan
2. Penanganan Simpang Muara Rapak
3. Pembangunan SPAM Regional Sistem Mahakam/Sistem Sepaku-Semai
4. Pengembangan Fasilitas dan Sarana Prasarana RSUD Kanudjoso Djatiwibowo
5. Dukungan pengembangan Kawasan Peruntukan Industri Kariangau
6. Pembangunan Sekolah Menengah Unggulan*
7. Pembangunan TPA Regional
8. Peningkatan Jalan Provinsi di Kota Balikpapan

i. Kota Samarinda

Kota Samarinda diarahkan untuk Mengakselerasi pertumbuhan sektor jasa dan perdagangan dengan mengoptimalkan peran sebagai bagian tri-city IKN-Samarinda-Balikpapan. Berikut data capaian indikator makro beserta highlights indikasi kebijakan Provinsi untuk Kota Samarinda:

Tabel 6.12
Capaian Indikator Makro Kota Samarinda

Indikator Makro	Capaian 2024	Baseline 2025	Target 2030
IPM	83,11	83,11–83,40	83,50–85,77
LPE (%)	8,66	8,66–8,70	10,20–10,40
Tingkat Kemiskinan (%)	4,30	4,00–4,30	2,45–2,60
Indeks Gini	0,330	0,312–0,330	0,278–0,284
TPT (%)	5,75	5,65–5,75	4,80–5,20

Sumber: BPS Kaltim, RPJPD Prov. Kaltim 2025 - 2045

Highlights Indikasi Kebijakan Provinsi untuk Kota Samarinda:

1. Pembangunan Rumah Sakit Jiwa Atma Husada dan Rumah Sakit Islam
2. Pengembangan Fasilitas dan Sarana Prasarana RS Mata dan RSUD AMS II
3. Pembangunan Sekolah Menengah Unggulan*
4. Peningkatan Jalan Provinsi di Kota Samarinda
5. Pembangunan Jalan di Kota Samarinda
6. Rencana SAUM (Sarana Angkutan Umum Masal) Kota Samarinda
7. Pengendalian Banjir di Kota Samarinda

j. Kota Bontang

Kota Bontang diarahkan untuk Mendorong inklusi industri eksisting dalam rangka membuka lapangan kerja, yang di-iringi dengan peningkatan daya saing SDM tenaga kerja, serta memperkuat peran sektor jasa dan perdagangan. Berikut data capaian indikator makro beserta highlights indikasi kebijakan Provinsi untuk Kota Bontang:

Tabel 6.13
Capaian Indikator Makro Kota Bontang

Indikator Makro	Capaian 2024	Baseline 2025	Target 2030
IPM	82,49	82,49–82,86	84,22–84,58
LPE (%)	-2,51	1,00–1,15	4,50–4,70
Tingkat Kemiskinan (%)	3,74	3,40–3,74	2,60–2,74
Indeks Gini	0,330	0,300–0,330	0,270–0,275
TPT (%)	7,06	6,73–7,06	5,31–5,35

Sumber: BPS Kaltim, RPJPD Prov. Kaltim 2025 - 2045

Highlights Indikasi Kebijakan Provinsi untuk Kota Bontang:

1. Peningkatan akses dan kualitas pendidikan vokasi
2. Pengembangan maupun pembukaan perguruan tinggi baru dan program studi berstandar internasional
3. Percepatan pengembangan industri strategis berbasis sektor ekonomi eksisting
4. Pembangunan perkotaan yang cerdas, hijau, dan berkelanjutan
5. Pengembangan ekonomi maritim
6. Pengembangan transportasi angkutan massal perkotaan terintegrasi

BAB VII

KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Bab ini akan menguraikan tentang aspek pendanaan dan program perangkat daerah guna mendukung tercapainya kinerja pembangunan daerah. Pendanaan pembangunan daerah pada bab ini lebih menekankan pada dukungan pendanaan yang bersumber dari APBD Provinsi Kalimantan Timur. Perubahan RPJMD memisahkan penyajian APBD berdasarkan amanat Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang dialokasikan dalam bentuk pagu program perangkat daerah dengan nomenklatur berdasarkan Permendagri No. 90 Tahun 2020 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Kepmendagri No. 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

7.1. Program Perangkat Daerah

Program perangkat daerah dipisahkan pula menjadi 2 (dua) bagian yaitu program untuk perencanaan strategis dan program untuk perencanaan operasional. Dalam hal program didalamnya menjadi strategis maka perencanaan, pengendalian, dan evaluasi yang dilakukan lebih tinggi intensitasnya dibanding yang operasional. Begitu pula dalam penganggarannya, harus diprioritaskan terlebih dahulu. Pertimbangan yang demikian dikarenakan urusan yang bersifat strategis ditetapkan temanya karena memiliki pengaruh yang sangat luas dan kepentingan untuk diselenggarakannya sangat tinggi, yang selanjutnya disebut dengan program/kegiatan pembangunan daerah.

Perumusan program bagi penyelenggaraan urusan dilakukan berdasarkan rumusan permasalahan pembangunan daerah di tiap urusan (wajib dan pilihan) sebagaimana Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah, yaitu:

1. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi:
 - a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. pekerjaan umum dan penataan ruang;

- d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
 - e. ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat; dan
 - f. sosial.
2. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi:
- a. tenaga kerja;
 - b. pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak;
 - c. pangan;
 - d. pertanahan;
 - e. lingkungan hidup;
 - f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - g. pemberdayaan masyarakat dan Desa;
 - h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - i. perhubungan;
 - j. komunikasi dan informatika;
 - k. koperasi, usaha kecil, dan menengah;
 - l. penanaman modal;
 - m. kepemudaan dan olah raga;
 - n. statistik;
 - o. persandian;
 - p. kebudayaan;
 - q. perpustakaan; dan
 - r. kearsipan.
3. Urusan Pemerintahan Pilihan meliputi:
- a. kelautan dan perikanan;
 - b. pariwisata;
 - c. pertanian;
 - d. kehutanan;
 - e. energi dan sumber daya mineral;
 - f. perdagangan;
 - g. perindustrian; dan
 - h. transmigrasi.
4. Urusan Pendukung Urusan Pemerintahan
- a. Kesekretariatan Daerah; dan
 - b. Sekretariat DPRD.
5. Urusan Penunjang Urusan Pemerintahan

- a. Perencanaan;
 - b. Keuangan;
 - c. Kepegawaian;
 - d. Pendidikan dan Pelatihan;
 - e. Penelitian dan Pengembangan; dan
 - f. Pengelolaan Penghubung.
6. Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan
- a. Inspektorat Daerah.
7. Unsur Pemerintahan Umum
- a. Kesatuan Bangsa dan Politik.

Berbagai program yang disajikan dalam Bab VII ini berdasarkan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dijalankan oleh masing-masing perangkat daerah yang bertanggungjawab dengan rincian program pembangunan pada masing-masing bidang urusan sebagaimana dapat dilihat pada Tabel VII-1.

Tabel VII-1 Program Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2030

No	Program	Outcome Kinerja	Indikator Kinerja	Baseline	Target						PERANGKAT DAERAH
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Meningkatnya kualitas upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Persentase Penduduk yang Mempunyai Keluhan Kesehatan dalam Sebulan Terakhir	23,53 *	23,10	22,70	22,30	21,90	21,50	21,10	Dinas Kesehatan
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Meningkatnya kapasitas sumber daya manusia kesehatan	Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya	35	45	50	55	60	65	70	Dinas Kesehatan
	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Terpenuhinya sarana farmasi dan alat kesehatan yang memiliki izin operasional sesuai standar	Persentase sarana farmasi dan alat kesehatan yang memiliki izin operasional sesuai standar	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Terkelolanya Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Kabupaten/Kota yang Menerapkan Kebijakan GERMAS	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Indeks)	75	80	90	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
			Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Meningkatnya kualitas upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Persentase Penduduk yang Mempunyai Keluhan Kesehatan dalam Sebulan Terakhir	23,53 *	23,1	22,7	22,3	21,9	21,5	21,1	RSUD A. Wahab Sjahranie di Samarinda
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Meningkatnya kapasitas sumber daya manusia kesehatan	Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya	35	45	50	55	60	65	70	RSUD A. Wahab Sjahranie di Samarinda
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Indeks)	81	82	83	84	85	86	87	RSUD A. Wahab Sjahranie di Samarinda
			Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti	100	100	100	100	100	100	100	RSUD A. Wahab Sjahranie di Samarinda

No	Program	Outcome Kinerja	Indikator Kinerja	Baseline	Target						PERANGKAT DAERAH
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Meningkatnya kualitas upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Persentase Penduduk yang Mempunyai Keluhan Kesehatan dalam Sebulan Terakhir	23,53 *	23,1	22,7	22,3	21,9	21,5	21,1	RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo di Balikpapan
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Meningkatnya kapasitas sumber daya manusia kesehatan	Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya	35	45	50	55	60	65	70	RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo di Balikpapan
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Indeks)	60	65	70	70	70	70	70	RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo di Balikpapan
			Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti	100	100	100	100	100	100	100	RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo di Balikpapan
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Meningkatnya kualitas upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Persentase Penduduk yang Mempunyai Keluhan Kesehatan dalam Sebulan Terakhir	23,53 *	23,1	22,7	22,3	21,9	21,5	21,1	Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Meningkatnya kapasitas sumber daya manusia kesehatan	Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya	35	45	50	55	60	65	70	Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Indeks)	98,4	84	86	87	88	89	90	Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam
			Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti	100	100	100	100	100	100	100	Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam
	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Meningkatnya Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial	Presentase Lembaga Sosial Atau Mitra Sosial yang diberdayakan (%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Sosial
	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Meningkatnya Cakupan Rehabilitasi Sosial	Persentase Peningkatan PMKS yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Didalam Panti (%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Sosial
	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Meningkatnya Cakupan Perlindungan dan Jaminan Sosial	1. Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar (%)	5.000 Orang	4.500 Orang	4.500 Orang	4.500 Orang	4.000 Orang	3.500 Orang	3.500 Orang	Dinas Sosial

No	Program	Outcome Kinerja	Indikator Kinerja	Baseline	Target						PERANGKAT DAERAH
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL		2. Persentase Penerima Manfaat yang Meningkatkan Kemandirian Ekonomi (%)								Dinas Sosial
	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Meningkatnya Cakupan Perlindungan Sosial korban Bencana	Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana (%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Sosial
	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Meningkatnya Kaulitas Layanan Taman Makam Pahlawan	Cakupan Layanan Taman Makam Pahlawan	1 Taman Makam Pahlawan	1 Taman Makam Pahlawan	1 Taman Makam Pahlawan	1 Taman Makam Pahlawan	1 Taman Makam Pahlawan	1 Taman Makam Pahlawan	1 Taman Makam Pahlawan	Dinas Sosial
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Meningkatnya Tata Kelola Pelayanan Pendukung Penyelenggaraan Urusan Sosial	Indeks Kualitas Layanan Pendukung Penyelenggaraan Urusan Sosial								Dinas Sosial
	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Terpetakannya kesesuaian tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan Dunia Usaha dan Dunia Industri	Persentase Perencanaan Tenaga Kerja Kabupaten/Kota yang difasilitasi (%)	30%	70%	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Meningkatnya kinerja pembangunan ketenagakerjaan dalam rangka produktivitas tenaga kerja	Persentase Lulusan Pelatihan Tenaga Kerja yang Dimagangkan dan Bekerja (%)	65%	66,50%	67%	70%	70,50%	75%	80%	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Meningkatnya kinerja pembangunan ketenagakerjaan dalam rangka kesempatan kerja	Persentase Pencari Kerja yang ditempatkan (%)	27,10%	27,60%	28,10%	28,60%	29%	29,60%	30%	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Meningkatnya kinerja pembangunan ketenagakerjaan dalam rangka perlindungan pekerja	Persentase Perusahaan Lintas Kabupaten/Kota yang Menetapkan Tata Kelola Kerja yang Layak (%)	65%	72%	80%	83%	85%	87%	90%	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	Meningkatnya kinerja pembangunan ketenagakerjaan dalam rangka pengawasan ketenagakerjaan	Persentase Perusahaan yang diperiksa dan Diawasi (%)	17,64%	18,23%	19,41%	20%	25%	40%	50%	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Mewujudkan transformasi kawasan transmigrasi menjadi	Jumlah Perencanaan Kawasan Transmigrasi	1 Kawasan	1 Kawasan	1 Kawasan	1 Kawasan	1 Kawasan	1 Kawasan	1 Kawasan	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

No	Program	Outcome Kinerja	Indikator Kinerja	Baselin e	Target						PERANGKAT DAERAH
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
		pusat pertumbuhan lokal Transmigrasi									
	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Mewujudkan transformasi kawasan transmigrasi menjadi pusat pertumbuhan lokal Transmigrasi	Dukungan Pembangunan Pemerintah Daerah yang Dilaksanakan di Kawasan Transmigrasi (%)	70%	70%	70%	75%	75%	80%	80%	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Mewujudkan transformasi kawasan transmigrasi menjadi pusat pertumbuhan lokal Transmigrasi	Persentase Transmigran yang ditingkatkan Keterampilannya (%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Meningkatnya Kualitas Pemuda Melalui Penyadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan di Provinsi Kalimantan Timur	Persentase Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri (%)	1,02%	1,31%	1,45%	1,50%	2%	2,50%	3%	Dinas Pemuda dan Olah Raga
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN		Persentase Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan (%)	20,49%	27,32%	34,97%	40%	40,50%	45%	45,50%	Dinas Pemuda dan Olah Raga
	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Meningkatnya Prestasi dan Budaya Olahraga yang Inklusif Melalui Pembinaan dan pengembangan atlet Kaltim	Persentase Peningkatan Pretasi Olahraga (%)	70%	75%	75%	80%	80%	85%	85%	Dinas Pemuda dan Olah Raga
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Meningkatnya Kepramukaan Melalui Pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan Kalimantan Timur	Persentase Pramuka yang terlibat dalam pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan (%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Pemuda dan Olah Raga
	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Kemudahan dalam penyusunan dokumen perencanaan dan lainnya melalui dukungan penelitian dan pengembangan daerah	Presentase Hasil Riset yang Ditindaklanjuti Dalam Dokumen (%)	70%	72%	75%	80%	80%	85%	85%	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
	PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH	Kemudahan dalam penyusunan dokumen perencanaan dan lainnya melalui dukungan riset dan inovasi daerah	Persentase Hasil Riset dan Inovasi yang ditindaklanjuti (%)	65%	66%	67%	70%	70%	72%	73%	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah

No	Program	Outcome Kinerja	Indikator Kinerja	Baseline	Target						PERANGKAT DAERAH
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Meningkatnya Kualitas dan Efektifitas Penyelenggaraan PUG dan Peran Perempuan dalam Pembangunan	Presentase Anggaran Responsif Gender (ARG)	28,67%	28,87%	29,22%	29,57%	29,92%	30%		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Peningkatan Upaya Pemenuhan Hak dan Perlindungan terhadap Perempuan dan anak	Persentase korban Kekerasan Perempuan yang terlayani	23,46%	23,23%	23,00%	22,8	22,6	22,4	22,2	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Peningkatan ketersediaan data gender dan anak yang berkualitas	Persentase Capaian Data Gender dan anak	75%	80%	85%	87%	90%	92%	100%	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Peningkatan Upaya Pemenuhan Hak dan Perlindungan terhadap Perempuan dan anak	Predikat Kabupaten/Kota layak anak	90%	90%	100%	100	100	100	100	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Peningkatan Upaya Pemenuhan Hak dan Perlindungan terhadap Perempuan dan anak	Persentase penyelesaian kasus kekerasan terhadap anak	4.07%	3.88%	3.69%	3,4	3,2	3	2,8	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Peningkatan kualitas pelayanan publik bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana	Angka kelahiran total	2,10%	55%	60%	62	65	67	70	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	Program	Outcome Kinerja	Indikator Kinerja	Baseline	Target						PERANGKAT DAERAH
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Peningkatan kualitas pelayanan publik bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana	Angka prevalensi kontrasepsi modern	67.98%	68.42%	69	70	71	72	73	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Peningkatan kesejahteraan, kemandirian dan ketahanan keluarga	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	65.54 indeks	67.62 indeks	68.87%	70,53	72,19	73,85	75,51	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Peningkatan Layanan Kualitas Keluarga	Persentase Kab/Kota yang menyediakan layanan Kualitas Keluarga	30%		40%	50%	60%	70%		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI										Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Meningkatnya kualitas layanan pendaftaran penduduk	Persentase Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk Kab/Kota :								Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			1. Persentase Perekaman KTP-el	99,4	99,8	99,85	99,9	99.95	99.99	99,99	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			2. Persentase Kepemilikan KIA	76	80	85	90	95	99	99,5	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No	Program	Outcome Kinerja	Indikator Kinerja	Baseline	Target						PERANGKAT DAERAH
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
											Pencatatan Sipil
			2. Buku Profil Perkembangan Kependudukan (1 buku)	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	PROGRAM PENATAAN DESA	Meningkatkan Status Desa	Jumlah Desa Tertinggal menjadi Berkembang	1	1	1	1				Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
			Jumlah Desa Maju menjadi Mandiri	25	25	30	35	40	45	50	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Desa	Persentase Peningkatan Ekonomi Masyarakat di Desa	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
			Persentase Lembaga Ekonomi Desa yang Aktif (Alternatif)								Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
			Persentase Desa yang memiliki Kerjasama Antar Desa (Alternatif)								Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Mendorong Tata Kelola Pemerintahan Desa	Persentase Peningkatan Tata Kelola Administrasi Pemerintahan Desa	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

No	Program	Outcome Kinerja	Indikator Kinerja	Baseline	Target						PERANGKAT DAERAH
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
			Jumlah Fasilitasi Penyelesaian Batas Desa	2 Kabupaten	2 Kabupaten						Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Mendorong Pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan Desa	Jumlah MHA yang dibina	13	13						Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
			Jumlah Pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan Desa	27	27						Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	77 Indeks	84 Indeks	86 Indeks	86 Indeks				Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
			Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%				Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
	PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG	Terlaksananya Pelayanan Penghubung sesuai standar pelayanan minimal	Persentase Keluhan Pengguna Layanan Badan Penghubung		5,31 %	4,13%	3,23%	2,47%	1,83%	67%	Badan Penghubung Provinsi
			Persentase Keluhan Pengguna Layanan Badan Penghubung yang Ditindaklanjuti		67%	67%	67%	67%	67%	67%	Badan Penghubung Provinsi
		Terlaksananya fasilitasi dan pelayanan aparatur/pimpinan daerah dengan pusat, kerjasama antar lembaga, pemerintah daerah dan pemerintah pusat	Persentase fasilitasi dan pelayanan aparatur/pimpinan daerah dengan pusat, antar lembaga, pemerintah daerah dan pemerintah pusat		56,25%	57,50%	58,75%	60%	60,75%	61,25%	Badan Penghubung Provinsi

No	Program	Outcome Kinerja	Indikator Kinerja	Baseline	Target						PERANGKAT DAERAH
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Meningkatnya Kualitas layanan kesekretariatan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Badan Penghubung Provinsi		71,51	72,00	72,51	73	73,51		Badan Penghubung Provinsi
	Program Penanggulangan Bencana	Meningkatnya Ketangguhan dalam menghadapi bencana	Indeks Pra Bencana	Indikator Baru	110	115	119	124	129	134	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
			Indeks Kedaruratan dan Logistik Peralatan	Indikator Baru	33	34	35	36	37	38	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
			Indeks Pasca Bencana	Indikator Baru	16	16	17	17	18	19	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Meningkatnya Kualitas layanan kesekretariatan	Indeks kualitas layanan kesekretariatan	85	85	86	86	87	87	88	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Tercapainya target pembangunan secara efektif, efisien dan ekonomis	Persentase Rekomendasi Hasil Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah yang Ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Tercapainya target pembangunan secara efektif, efisien dan ekonomis	Tingkat Kesesuaian Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Antar Level Pemerintahan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Tercapainya target pembangunan secara efektif, efisien dan ekonomis	Tingkat Kesesuaian Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Antar Periode Perencanaan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Peningkatan kualitas perencanaan, penganggaran, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	Tingkat Kesesuaian Dokumen Rencana Pembangunan Daerah dengan Dokumen Rencana Pembangunan Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Peningkatan kualitas perencanaan, penganggaran, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	Tingkat Kesesuaian Dokumen Rencana Perangkat Daerah Antar Periode Perencanaan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Peningkatan pelayanan dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	80 Indeks	82 Indeks	85 Indeks	87 Indeks	89 Indeks	91 Indeks	93 Indeks	Badan Perencanaan

No	Program	Outcome Kinerja	Indikator Kinerja	Baseline	Target						PERANGKAT DAERAH
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
											Pembangunan Daerah
		Peningkatan pelayanan dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Meningkatnya reputasi pemerintah, transparansi dan akuntabilitas pemerintah	Persentase khalayak yang terpapar informasi program kebijakan pemerintah daerah	60,00%	70,00%	80,00%	85,00%	90,00%	95,00%	100,00 %	Dinas Komunikasi dan Informatika
	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Terwujudnya tata kelola dan pemberdayaan informatika serta infrastruktur teknologi informasi	Persentase pemanfaatan teknologi informasi dalam administrasi pemerintahan dan pelayanan publik	80,00%	82,00%	85,00%	87,00%	89,00%	91,00%	93,00%	Dinas Komunikasi dan Informatika
	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Indeks Pembangunan Statistik (IPS) dan peningkatan kualitas data statistik sektoral	Persentase ketersediaan daftar data pada portal satu data	80,00%	85,00%	90,00%	93,00%	96,00%	99,00%	100,00 %	Dinas Komunikasi dan Informatika
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Terjaganya kerahasiaan, keutuhan, keaslian dan tidak adanya pengingkaran informasi yang disandikan	Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah	3 Tingkat	3 Tingkat	3 Tingkat	3 Tingkat	3 Tingkat	3 Tingkat	3 Tingkat	Dinas Komunikasi dan Informatika
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Peningkatan pelayanan dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 indeks	100 indeks	100 indeks	100 indeks	100 indeks	100 indeks	100 indeks	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Peningkatan pelayanan dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Komunikasi dan Informatika
	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	meningkatnya pemberian edukasi dan literasi masyarakat dalam pemahaman ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	Persentase elemen masyarakat yang mendapatkan penguatan edukasi dan literasi ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	83,33%	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap etika dan budaya politik demokrasi	Persentase masyarakat yang mendapatkan pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	1,16%	1,32%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

No	Program	Outcome Kinerja	Indikator Kinerja	Baseline	Target						PERANGKAT DAERAH
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Penguatan kelembagaan organisasi masyarakat	Persentase peningkatan kapasitas dan kualitas organisasi masyarakat	77,04%	78,00%	79,00%	80,00%	81,00%	82,00%		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Meningkatnya pemberian edukasi dan literasi masyarakat terkait ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan agama	Persentase elemen masyarakat yang mendapatkan penguatan edukasi terkait ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan agama	100	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	meningkatnya pemberian edukasi dan literasi masyarakat tentang manajemen konflik sosial dan kewaspadaan dini	Tingkat pemahaman masyarakat terhadap kewaspadaan dini potensi konflik sosial	-	63,00%	65,00%	67,00%	69,00%	70,00%		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH										Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Memastikan penyelenggaraan pemerintahan berjalan sesuai dengan rencana dan peraturan perundang-undangan	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Internal Pemda Provinsi dan Kab/Kota	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Inspektorat
	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Meningkatnya kualitas perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi	Persentase Pemenuhan Aksi Pencegahan Korupsi	87%	89%	91%	93%	95%	97%	99%	Inspektorat
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Peningkatan pelayanan dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 Indeks	100 Indeks	100 Indeks	100 Indeks	100 Indeks	100 Indeks	100 Indeks	Inspektorat
		Peningkatan pelayanan dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Inspektorat
	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Terwujudnya Pelayanan Satpol PP, dan Satlinmas sesuai dengan SPM	Indeks Penyelenggaran Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat	Indikat or Baru	52.22	57.44	63.18	69.5	76.45	80	Satuan Polisi Pamong Praja
	Program Pencegahan Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Terwujudnya Pelayanan Pencegahan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran sesuai dengan SPM	Indeks Penyelenggaran Sub Urusan Kebakaran	Indikat or Baru	70	72	75	78	80	85	Satuan Polisi Pamong Praja
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Meningkatnya Nilai Akuntabilitas Satpol PP dan Indeks Kepuasan Pengguna Layanan	Nilai SAKIP Satpol PP	65	65	68	70	72	75	75	Satuan Polisi Pamong Praja
			Indeks Kepuasan Pengguna Layanan	85	85	87	89	91	93	95	Satuan Polisi Pamong Praja

[illegible]

No	Program	Outcome Kinerja	Indikator Kinerja	Baseline	Target						PERANGKAT DAERAH
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
			Persentase lembaga Bina Spiritual dan Sarana prasarana keagamaan yang difasilitasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Sekretariat Daerah
	PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	Meningkatnya kualitas rancangan produk hukum daerah, bantuan hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM)									Sekretariat Daerah
			Persentase rancangan Produk Hukum dan bantuan hukum yang difasilitasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Sekretariat Daerah
	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Meningkatnya Kualitas Kebijakan Bidang Perekonomian yang Mendorong Ekonomi yang Berkualitas	Persentase Perumusan Kebijakan Daerah di Bidang Perekonomian yang difasilitasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Sekretariat Daerah
		Meningkatnya Kualitas Kebijakan Bidang Perekonomian yang Mendorong Ekonomi yang Berkualitas	Persentase Realisasi Pendapatan Daerah dari hasil kebijakan Bidang Perekonomian	90%	95%	100%	100%	100%	100%	100%	Sekretariat Daerah
	PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	Meningkatnya akses penyedia, efisiensi proses, transparansi serta kepastian transaksi dan pembayaran	Persentase transaksi e-purchasing terhadap pengadaan melalui penyedia	35%	36%	37%	38%	39%	40%	41%	Sekretariat Daerah
			Tingkat kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ)	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 4	Level 4	Level 4	Sekretariat Daerah
	PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	Meningkatnya Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Persentase Rekomendasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah oleh Perangkat Daerah	80%	85%	86%	87%	88%	89%	90%	Sekretariat Daerah
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Meningkatnya kualitas layanan Biro Umum	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Umum	84%	84,5%	85%	85,5%	86%	86,5%	87%	Sekretariat Daerah
			Persentase Keluhan Pimpinan yang Ditindaklanjuti	80%	85%	87%	90%	92%	95%	97%	Sekretariat Daerah
		Meningkatnya kualitas layanan Biro Adpim	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Administrasi Pimpinan	82	83,5	84	84,5	85	85,5	86	Sekretariat Daerah
			Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti	-	80,5	81	81,5	82	82,5	83	Sekretariat Daerah
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	meningkatnya partisipasi sekolah usia 4-18 tahun disabilitas	1. Persentase Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus	53,75	62,55	71,34	72,43	73,52	74,61	75,7	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

No	Program	Outcome Kinerja	Indikator Kinerja	Baseline	Target						PERANGKAT DAERAH
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
		meningkatnya partisipasi sekolah usia 6-18 tahun	2. Persentase Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK	81,84	82,2	82,57	82,93	83,29	83,66	84,02	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Meningkatnya kesadaran dan toleransi di satuan pendidikan terhadap siswa dengan kebutuhan khusus dan siswa dari latar belakang yang berbeda	3. Persentase Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	66,17	67,79	69,41	71,03	72,65	74,27	75,89	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Meningkatnya jumlah siswa yang merasa aman di sekolah, baik secara fisik dan psikologis, seperti tidak adanya perundungan dan hukuman fisik.	4. Persentase Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	75,12	78,08	79,16	80,24	81,32	82,4	83,48	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		meningkatnya toleransi agama dan budaya serta komitmen kebangsaan pada satuan pendidikan	5. Persentase Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	73,11	74,53	75,95	77,37	78,79	80,21	81,63	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		meningkatnya kemampuan dalam memahami, menggunakan, merefleksi, dan mengevaluasi beragam jenis teks (teks informasional dan teks fiksi)	6. Persentase Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	78,52	79,42	80,32	81,22	82,12	83,02	83,92	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		meningkatnya kemampuan dalam berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan.	7. Persentase Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	69,22	70,25	71,28	72,31	73,34	74,37	75,4	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		meningkatnya lulusan SMK yang mendapatkan penilaian budaya kerja minimal puas dari DUDI SMK	8. Persentase Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK	81,63	82,17	82,71	83,25	83,79	84,33	84,87	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		meningkatnya lulusan SMK yang melanjutkan pendidikan ke jenjang selanjutnya, bekerja, dan/atau berwirausaha dalam satu tahun setelah lulus.	9. Persentase Tingkat Penyerapan Lulusan SMK	88,2	89,19	90,18	91,17	92,16	93,15	94,14	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

No	Program	Outcome Kinerja	Indikator Kinerja	Baseline	Target						PERANGKAT DAERAH
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	meningkatnya jumlah tenaga pendidik yang memiliki ijazah Diploma dan sarjana	Persentase Tenaga Pendidik yang memiliki Ijazah diploma dan sarjana	99,69							Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM		Persentase Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	100							Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN		Persentase Kebudayaan yang dikembangkan	86							Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA		Persentase Cagar Budaya yang dikelola dan Dilestarikan	62							Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN		Persentase Pengelolaan Permuseuman	47							Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH		Persentase Lembaga Sejarah yang Dibina	77							Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL		Persentase Kesenian Tradisional yang dikembangkan	66							Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Meningkatnya kualitas pengelolaan kepegawaian	Sistem Merit	271	278,5	298	315,5	325	330	335	Badan Kepegawaian Daerah
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Meningkatnya Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kualitas Pelayanan Kesekretariatan	85	87	89	90	92	94	95	Badan Kepegawaian Daerah
	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Terwujudnya Budaya Literasi untuk meningkatkan kualitas Masyarakat Kalimantan Timur yang Berdaya Saing	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	35 Indeks	40 Indeks	70,5 Indeks	71 Indeks	71,5 Indeks	72 Indeks	72,5 Indeks	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Meningkatnya Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kearsipan yang Sesuai Standar	Jumlah OPD dan LKD yang Memperoleh Nilai Pengawasan Kearsipan Kategori "Baik"	5	72 Skor	73 SKor	74 Skor	75 Skor	76 Skor	77 Skor	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah

No	Program	Outcome Kinerja	Indikator Kinerja	Baseline	Target						PERANGKAT DAERAH
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Meningkatnya ketersediaan, keberadaan dan keutuhan arsip yang dikelola	Tingkat Ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional (Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan)	76%	77%	78%	79%	80%	81%	82%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan layanan publik perangkat daerah	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	82 Indeks	83 Indeks	83,5 Indeks	84 Indeks	84,5 Indeks	85 Indeks	85,5 Indeks	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
	Program Pengembangan Sumberdaya Manusia	Terwujudnya peningkatan kapasitas, keterampilan, dan profesionalisme ASN dalam menjalankan tugasnya	Persentase ASN yang memenuhi 20 JP dalam pengembangan kompetensi	45	50	60	65	70	75	80	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	Penunjang urusan Pemerintah Provinsi	Terwujudnya Kepuasan Masyarakat terhadap layanan BPSDM	Persentase Kepuasan Masyarakat terhadap layanan BPSDM	85	90	95	95	95	95	95	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	72,20	74,60	77,00	80,27	83,54	86,81	90,08	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
			Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Meningkatnya pembangunan infrastruktur sumber daya air secara merata.	Daerah Irigasi Kewenangan provinsi yang terlayani jaringan irigasi	1.822 Ha	1.904,71 Ha	2.104,7 Ha	2.254,7 Ha	2.494,7 Ha	2.744,7 Ha	2.984,7 Ha	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
			Panjang pantai kritis yang ditangani	13,03 Km	0,225 Km	1,565 Km	2,905 Km	4,245 Km	5,855 Km	6,925 Km	Dinas Pekerjaan Umum,

No	Program	Outcome Kinerja	Indikator Kinerja	Baseline	Target						PERANGKAT DAERAH
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
											Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
			Kapasitas air baku untuk air bersih	10.980 Liter/D etik	11.220 Liter/D etik	11.460 Liter/D etik	11.700 Liter/D etik	11.940 Liter/D etik	12.830 Liter/D etik	13.070 Liter/D etik	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
			Penanganan luas genangan banjir perkotaan	71,6 Ha	79,61 Ha	211,76 Ha	378,78 Ha	539,87 Ha	679,84 Ha	805,9 Ha	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Terpenuhinya/Terselesaikannya Infrastruktur Air Minum Skala Regional	Persentase Kesiapan Penyelenggaraan Infrastruktur Air Minum Regional (%)	15,70	25,50	34,00	47,50	73,50	90,50	100,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Terwujudnya TPA/TPST Skala Regional dan TPA/TPST yang layak di Kab/Kota	Persentase Kesiapan Penyelenggaraan Infrastruktur Persampahan Regional (%)	0,00	7,00	10,50	16,50	32,00	68,00	90,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Meningkatnya Pemenuhan Layanan Air Limbah Domestik Aman Skala Regional dan Kab/Kota	Persentase Kesiapan Penyelenggaraan Infrastruktur Air Limbah Domestik Regional (%)	6,00	11,00	15,50	25,00	39,50	68,00	90,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Meningkatnya kualitas sistem drainase perkotaan (Inmendagri)	Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik (%) (Inmendagri)	9,38%	10,80%	22,13%	33,45%	44,75%	56,96%	68,38%	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan

No	Program	Outcome Kinerja	Indikator Kinerja	Baseline	Target						PERANGKAT DAERAH
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
											Perumahan Rakyat
	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Mewujudkan SPAM, SPALD, TPA/TPST di Kawasan Strategis Provinsi	Persentase penanganan infrastruktur permukiman di kawasan strategis provinsi (%)	18,18	31,82	45,45	59,09	72,73	86,36	100,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Terwujudnya bangunan gedung kawasan strategis provinsi yang tertata atau dalam kondisi baik	Persentase Jumlah Gedung Untuk Kepentingan Strategis Provinsi yang Ditangani (%)	0,00	83,58	100,00	50,00	66,67	83,33	100,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Terwujudnya penataan bangunan lingkungan kawasan cagar budaya di level provinsi	Persentase Jumlah Kawasan yang Ditata (%)	0,00	13,33	33,33	46,67	66,67	80,00	100,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Optimalisasi konektivitas dan aksesibilitas jalan dalam mendukung pendistribusian barang dan jasa	Ruas jalan baru yang dibangun	3	3	3	3	3	3	3	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
			Rasio Kemantapan Jalan Provinsi	78,72%	82,17%	87,58%	94,62%	96,63%	98,64%	100,00 %	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI (UPTD LABKON)	Peningkatan Kualitas Tenaga kerja	Cakupan Pengujian Standar Mutu Konstruksi	56,67%	56,67%	63,34%	70,67%	77,67%	85,01%	92,01%	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan

[illegible]

No	Program	Outcome Kinerja	Indikator Kinerja	Baseline	Target						PERANGKAT DAERAH
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
			Persentase Realisasi Pendapatan Daerah yang Sah	72.2	100	100	100	100	100	100	Badan Pendapatan Daerah
			Persentase Realisasi Pendapatan Transfer	106.04	100	100	100	100	100	100	Badan Pendapatan Daerah
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Meningkatnya Realisasi Retribusi Daerah	Persentase Realisasi Retribusi Daerah	105.87	100	100	100	100	100	100	Badan Pendapatan Daerah
		Meningkatnya Tata kelola Kesekretariatan	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	81.4	81	81.5	82	82.5	83	83.5	Badan Pendapatan Daerah
	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Mendorong pelaku usaha di Kaltim untuk melakukan hilirisasi pada sektor usaha yang dilakukan	Pelaku Usaha yang melakukan hilirisasi (Pelaku Usaha)	0 Pelaku Usaha	1 Pelaku Usaha	1 Pelaku Usaha	1 Pelaku Usaha	1 Pelaku Usaha	1 Pelaku Usaha	1 Pelaku Usaha	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Pernyataan kepedulian investor dengan Pemerintah Kaltim untuk berinvestasi di Kaltim	Rencana nilai investasi yang ditanamkan (Rupiah)	12,36 Triliun	13 Triliun	13 Triliun	14 Triliun	14 Triliun	15 Triliun	15 Triliun	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan	Indeks Kualitas Layanan Perizinan (Indeks)	92	93	94	95	96	97	98	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Mendorong pelaku usaha menyampaikan LKPM tepat waktu agar target investasi dapat tercapai	Realisasi PMA dan PMDN (Rupiah)	76,33 Triliun	79,86 Triliun	81,88 Triliun	83,9 Triliun	85,4 Triliun	86,9 Triliun	88,4 Triliun	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Menyiapkan data dan informasi yang dibutuhkan calon investor untuk berinvestasi di Kaltim	Persentase ketersediaan daftar data pada portal DPMPSTP (%)	63,6 %	73 %	82 %	86 %	91 %	95 %	100%	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No	Program	Outcome Kinerja	Indikator Kinerja	Baseline	Target						PERANGKAT DAERAH
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	PROGRAM KERJA SAMA PENANAMAN MODAL	Menjalin kerjasama internasional dengan negara lain/ BUMN/BUMD/BUMS	MoU Kerjasama penanaman modal (MoU)	0	1 MoU	1 MoU	1 MoU	1 MoU	1 MoU	1 MoU	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Meningkatnya kualitas pelayanan pegawai	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Indeks)	91	91	92	93	93	94	95	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	Meningkatnya cakupan pelayanan kelistrikan	Rasio Elektrifikasi	96,17	96,62	97,06	97,48	97,88	98,26	98,63	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
	Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan	Meningkatnya tata kelola energi baru terbarukan	1. Jumlah Rumah Tangga Penerima Listrik yang Bersumber dari Pembangkit EBT	5,147	5,457	5,767	6,077	6,387	6,697	7,007	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
			2. Porsi EBT dalam Bauran Energi	12,14	12,4	15,73	19,06	22,39	25,72	29,05	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
	Pengelolaan Aspek Kegeologian	Meningkatnya tata kelola kegeologian	1. Jumlah Volume Air Tanah pada Cekungan Air Tanah di Wilayah Sungai Lintas Kabupaten/Kota	12.939.254,38	12.939.254,38	12.939.254,38	12.939.254,38	12.939.254,38	12.939.254,38	12.939.254,38	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
			2. Luas Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah di Wilayah Sungai Lintas Kabupaten/Kota	2.307	3.075	3.798,25	5.088,25	5.688,25	6.219,25	6.750,25	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
	Pengelolaan Mineral dan Batubara	Meningkatnya tata kelola mineral dan batubara	1. Luas WPR yang Diusulkan Pemerintah Daerah	0	10	20	20	20	40	40	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
			2. Jumlah Rekomendasi terhadap Usulan IPR	0	2	4	4	4	8	8	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Indeks)	84,2	86,51	89,12	90	91	92	93	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
			Persentase Keluhan Penggunaan Layanan yang Ditindaklanjuti (%)	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Meningkatnya produktivitas hasil hutan	1. Produksi Hasil Hutan Kayu	6,293,432.95	6,343,433	6,393,433	6,443,433	6,493,433	6,543,433	6,593,433	Dinas Kehutanan

[illegible]

No	Program	Outcome Kinerja	Indikator Kinerja	Baselin e	Target						PERANGKAT DAERAH
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Meningkatnya penyelesaian sengketa/ kasus tindak pidana lingkungan hidup	Persentase pengaduan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup kewenangan provinsi yang diselesaikan*	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Lingkungan Hidup
	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Meningkatnya kualitas pengelolaan keanekaragaman hayati	Luas kawasan yang memiliki nilai keanekaragaman hayati tinggi di dalam kawasan hutan ataupun diluar kawasan hutan yang dikelola*	162103 Ha	239464 Ha	319286 Ha	399107 Ha	478929 Ha	532143 Ha Ha	Dinas Lingkungan Hidup
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Indeks)	88	88,5	89	90	91	92	93	Dinas Lingkungan Hidup
			Persentase Keluhan Penggunaan Layanan yang Ditindaklanjuti (%)	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Lingkungan Hidup
	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Meningkatnya pembinaan dan pengawasan koperasi	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi (%)	N/A							Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Meningkatnya produktivitas koperasi	Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas (%)	N/A							Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Meningkatkan daya saing pelaku UKM di era digitalisasi	Persentase UKM yang Masuk Pasar Digital (%)	5,02	10	15	20	25	30	35	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Meningkatnya daya saing UMKM	Proporsi UKM Menjalin Kemitraan dan Ekspor (%)	N/A							Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Meningkatnya kemudahan proses perizinan dan pendaftaran berusaha	Persentase Izin Usaha Perdagangan yang Difasilitasi (%)	N/A							Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan

No	Program	Outcome Kinerja	Indikator Kinerja	Baseline	Target						PERANGKAT DAERAH
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
											Usaha Kecil Menengah
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Tersedianya Pusat Distribusi Provinsi	Persentase Terbentuknya Food Station / Pusat Distribusi Pangan (%)	10	50	100	100	100	100	100	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting (%)	N/A							Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
			Persentase kinerja realisasi pupuk (%)	69	90	92	93	94	95	96	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Meningkatkan daya saing, memperluas pasar global, dan mendorong ekspor berbasis nilai tambah	Produk Daerah yang masuk pasar ekspor dan atau negara tujuan baru (jenis)	28	70	73	74	75	76	77	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Terlaksananya edukasi konsumen dan pengawasan barang beredar	Persentase Barang Beredar Yang Diawasi Yang Sesuai Dengan Ketentuan Perundang-Undangan (%)	100	79	80	81	82	83	85	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN (UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang)	Meningkatnya layanan sertifikasi/kalibrasi	Mutu layanan UPTD BPSMB	(A) 95,43	(A) 83	(A) 83	(A) 83	(A) 83	(A) 83	(A) 83	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
		Meningkatnya jumlah komoditi unggulan UKM yang dilakukan pengujian	Persentase komoditi potensial yang sesuai dengan ketentuan berlaku (%)	75	74	74	74	74	74	74	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan

No	Program	Outcome Kinerja	Indikator Kinerja	Baseline	Target						PERANGKAT DAERAH
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
											Usaha Kecil Menengah
	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Meningkatnya daya saing produk lokal, memperluas pasar domestik, serta mengurangi ketergantungan terhadap produk impor	Persentase produk UMKM binaan yang terserap di pasar dalam negeri (%)	75	90	100	100	100	100	100	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Berkembangnya sektor industri yang inovatif, inklusif, dan berbasis sumber daya lokal	Pertumbuhan industri pengolahan non migas dan non batubara (%)	10,27	5,56	5,92	6,28	6,64	7	7,36	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Terciptanya iklim investasi yang kondusif, berkurangnya dampak negatif industri terhadap lingkungan, serta meningkatnya kepatuhan hukum pada sektor industri	Persentase Izin Usaha Industri yang Diterbitkan (%)	10	15	20	25	30	35	40	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Meningkatnya industri yang terdaftar di SIINas	Persentase Jumlah Industri yang Terdaftar di SIINas (%)	59,24	19,02	19,58	20,01	20,35	20,8	21,15	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN (UPTD Pelatihan Koperasi)	Meningkatnya kapasitas dan kompetensi pelaku koperasi dan UKM	Persentase koperasi dan UKM yang mengikuti pelatihan (%)	1,4	4,97	7,81	8,1	8,5	8,85	9,25	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Meningkatnya Tata Kelola Kesekretariatan	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Indeks)	88,5	88,8	89	89	89	89	89	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
			Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti (%)	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Perindustrian, Perdagangan,

No	Program	Outcome Kinerja	Indikator Kinerja	Baseline	Target						PERANGKAT DAERAH
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
											Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (UPTD BPSMB)		Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Indeks)	88,5	88,8	89	89	89	89	89	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
			Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti (%)	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (UPTD Pelatihan Koperasi)		Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Indeks)	88,5	88,8	89	89	89	89	89	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
			Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti (%)	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Meningkatnya Luasan Areal Perkebunan	Luas kebun yang dibangun (Ha)	62772	64.053	65.360	66.694	68.055	69.444	70.861	Dinas Perkebunan
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Meningkatnya produksi komoditas tanaman perkebunan	Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan (%)	-5,40%	3-5%	3-5%	3-5%	3-5%	3-5%	3-5%	Dinas Perkebunan
	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Meningkatnya kapasitas Sumber Daya Manusia Perkebunan	Persentase sumber daya manusia pertanian yang meningkat kapasitasnya (%)	13,48	23,03	34,55	36	38	40	42	Dinas Perkebunan
		Meningkatnya kapasitas Kelembagaan Pekebun	Persentase kelembagaan petani yang kapasitasnya meningkat (%)	30,77	52,99	79.49	82	85	90	92	Dinas Perkebunan
	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Meningkatnya Pembinaan, Pengawasan Pembangunan, dan Kemitraan Usaha Perkebunan	Persentase perusahaan yang mendapat sertifikat penilaian usaha perkebunan (PUP) (%)	41,22	55,4	70,3	72	76	80	85	Dinas Perkebunan

[illegible]

No	Program	Outcome Kinerja	Indikator Kinerja	Baseline	Target						PERANGKAT DAERAH
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan (PBTP))	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan (PBTP)) (Indeks)	97,4	82,75	85,5	92	94	96	98	Dinas Perkebunan
			Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti (UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan (PBTP)) (%)	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Perkebunan
	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Meningkatnya Pengelolaan Kawasan Konservasi di Perairan, wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil	Persentase luas kawasan konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil yang dikelola (Ha)	72.97	327819.31	328.247,25	355.658,24	355.658,24	355.658,24	390.076,41	Dinas Kelautan dan Perikanan
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Meningkatnya produksi perikanan tangkap	Volume produksi perikanan tangkap (Ton)	190.000	195.000	200.000	205000	210000	215000	220000	Dinas Kelautan dan Perikanan
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Meningkatnya produksi perikanan budidaya secara berkelanjutan	Volume produksi perikanan budidaya (Ton)	200000	201000	202000	203400	204800	206200	207700	Dinas Kelautan dan Perikanan
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA (UPTD SPAPAL Manggar)	Meningkatnya ketersediaan benih udang dan ikan air laut yang bermutu	Jumlah Produksi Ketersediaan Benih Udang/Ikan Air Laut (milyar ekor)	0,75	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5	1,6	Dinas Kelautan dan Perikanan
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA (UPTD SPAPAL Muara Badak-Sebulu)	Meningkatnya ketersediaan benih udang, ikan air laut/payau dan ikan air tawar endemik lokal yang bermutu	Jumlah Produksi Ketersediaan Benih Udang/Ikan Air Laut/Payau/Tawar (Ekor)	5053156,6	4.612.500	4.612.500	4.840.750	4.949.250	5.057.750	5.166.250	Dinas Kelautan dan Perikanan
	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan	Persentase Kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan (%)	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Kelautan dan Perikanan
	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Meningkatnya produk dan nilai hasil perikanan yang diolah dan dipasarkan	Volume produk olahan hasil perikanan (ton)	68.144*	146.933,80	154.233,40	161.882,80	169.977,00	178.475,90	187.399,70	Dinas Kelautan dan Perikanan
			Nilai produk olahan hasil perikanan (Rp)	5000000000*	5.439.889.692	5.803.184.818	6.152.768.866	6.531.188.803	6.978.126.009	7.495.987.647	Dinas Kelautan dan Perikanan
	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN (UPTD PMHP)	Meningkatnya mutu produk perikanan yang memenuhi standar keamanan pangan	Persentase hasil uji produk perikanan yang memenuhi standar keamanan pangan (%)	70	80	90	100	250	275	300	Dinas Kelautan dan Perikanan

[illegible]

No	Program	Outcome Kinerja	Indikator Kinerja	Baseline	Target						PERANGKAT DAERAH
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Meningkatnya Kemanfaatan sarana terhadap kinerja teknis kegiatan agribisnis peternakan	Peningkatan produksi komoditas peternakan	4,43	2-3,5	2-3,5	2-3,5	2-3,5	2-3,5	2-3,5	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN (UPTD PTHPT)	Meningkatnya Manfaat Sarana terhadap kinerja teknis kegiatan Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Tingkat Kemanfaatan Sarana terhadap capaian kinerja teknis kegiatan Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak (Skor)	89,12	98,73	99	99,27	99,54	99,81	100	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Terpenuhinya prasarana peternakan	Tingkat pemenuhan prasarana peternakan (Skor)	100	70	72	74	76	78	80	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Terkendalinya penyakit Hewan Menular Strategis dan zoonosis di wilayah KALTIM	Tingkat Pengendalian Wilayah dari PHMSZ (skor)	95,41	95,81	97,75	98,5	99	99,5	100	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER (UPTD Lab Keswan & Kesmavet)	Meningkatnya Layanan Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Tingkat Layanan Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner (skor)	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Meningkatnya peran aktif pelaku usaha peternakan	Tingkat peran aktif pelaku usaha dalam usaha peternakan (skor)	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Meningkatnya kapasitas SDM dan Kelembagaan Peternakan	Peningkatan Kapasitas SDM dan kelembagaan peternakan (skor)	99,99	99,73	99,78	99,8	99,9	100	100	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Meningkatnya Layanan Kesekretariatan	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan) (Indeks)	93,3	95,17	96,88	98,59	100	100	100	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
			Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti (Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan) (%)	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

No	Program	Outcome Kinerja	Indikator Kinerja	Baseline	Target						PERANGKAT DAERAH
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (UPTD Lab Keswan & Kesmavet)	Meningkatnya Layanan Kesekretariatan	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (UPTD Lab Keswan & Kesmavet) (Indeks)	93,3	95,17	96,88	98,59	100	100	100	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
			Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti (UPTD Lab Keswan & Kesmavet) (%)	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (UPTD PTHPT)	Meningkatnya Layanan Kesekretariatan	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (UPTD PTHPT) (Indeks)	93,3	95,17	96,88	98,59	100	100	100	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
			Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti (UPTD PTHPT) (%)	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Terpenuhinya kebutuhan pangan secara optimal	Rasio pemenuhan beras (%)	43,58	44	45	46	47	49	50	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas konsumsi pangan masyarakat	Skor PPH (skor)	89,1	89,74	90,39	91,04	91,7	92,36	93,02	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Penguatan Akses Pangan Masyarakat di Daerah Rawan Pangan	Persentase Daerah Rentan Pangan (%)	1	0	0	0	0	0	0	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Terjaminnya keamanan dan mutu pangan segar	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan (%)	78,2	82	87	90	92	94	95	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Meningkatnya produktivitas pertanian	Peningkatan Produksi tanaman pangan (%)	7,37	7-9	7-9	7-9	7-9	7-9	7-9	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
			Peningkatan Produksi tanaman hortikultura (%)	13,5	13-15	13-15	13-15	13-15	13-15	13-15	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura

No	Program	Outcome Kinerja	Indikator Kinerja	Baseline	Target						PERANGKAT DAERAH
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian (UPTD BBI TPH)	tersedianya sarana pertanian yang sesuai dengan kebutuhan	Persentase Pemenuhan Benih Sumber dan Sebar Hortikultura (%)	48	50	66,67	70	75	85	90	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
			Persentase Pemenuhan Benih Sumber Tanaman Pangan (%)	36,31	40	42	45	47	49	50	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian (UPTD PSBTPH)	tersedianya sarana pertanian yang sesuai dengan kebutuhan	Persentase benih tanaman pangan dan hortikultura yang tersertifikasi (%)	98	98	99	100	100	100	100	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian (UPTD PTPH)	tersedianya sarana pertanian yang sesuai dengan kebutuhan	Persentase Pengawasan Peredaran Pestisida dan Pupuk (%)	37	41	45	49	53	57	61	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	tersedianya prasarana pertanian yang sesuai dengan kebutuhan	Tingkat Pemenuhan Prasarana Pertanian Hortikultura (%)	34	43	52	54	56	58	60	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
			Tingkat Pemenuhan Prasarana Pertanian Tanaman Pangan (%)	79,19	81	83	85	87	89	90	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	terkendalinya penyebaran organism pengganggu tanaman (OPT) dan dampak perubahan iklim (DPI) pada tanaman serta penyakit hewan,	Rasio luas serangan OPT Tanaman Pangan dan Hortikultura yang dapat ditangani terhadap luas serangan OPT (%)	74,5	75,9	76	76,1	76,2	76,3	76,4	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
	Program Penyuluhan Pertanian (UPTD BPPSDMP)	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia dan kelembagaan pertanian	Persentase Sumber Daya Manusia Pertanian yang Meningkatkan Kapasitasnya (%)	80	80	82	84	86	88	90	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (DPTPH) (Indeks)	81,58	82,7	83,4	83,6	84,4	85,2	90	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
			Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti (DPTPH) (%)	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura

No	Program	Outcome Kinerja	Indikator Kinerja	Baseline	Target						PERANGKAT DAERAH
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (UPTD BBI TPH) (Indeks)	82	82	82,8	83,6	84,4	85,2	90	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
			Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti (UPTD BBI TPH) (%)	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (UPTD BPPSDMP) (Indeks)	81,58	82	82,8	83,6	84,4	85,2	90	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
			Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti (UPTD BPPSDMP) (%)	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (UPTD PSBTPH) (Indeks)	81,58	82	82,8	83,6	84,4	85,2	90	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
			Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti (UPTD PSBTPH) (%)	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (UPTD PTPH) (Indeks)	81,58	82	82,8	83,6	84,4	85,2	90	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
			Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti (UPTD PTPH) (%)	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura

BAB VIII

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Kinerja pembangunan daerah merupakan capaian keluaran/hasil/dampak dari sub kegiatan/kegiatan/program/sasaran berkenaan dengan penggunaan sumber daya pembangunan. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Timur untuk periode tahun 2025-2029 diarahkan untuk mencapai tujuan dan sasaran sebagaimana telah dimuat pada Bab V dokumen ini. Pelaksanaan pembangunan pada periode tersebut diharapkan mencapai kinerja tujuan dan sasaran, yang akan diukur dengan beberapa alat ukur yang disebut indikator kinerja. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu sub kegiatan, kegiatan, program, atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*).

Peristilahan kinerja sebagaimana dijelaskan di atas sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Sementara berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 memiliki peristilahan yang berbeda, namun memiliki arsitektur atau penjenjangan kinerja yang sama. Adapun pemetaan penjenjangan kinerja kedua aturan tersebut dijelaskan sebagai berikut:

- a. Tujuan dan sasaran pada RPJMD memiliki kinerja Dampak (*impact*) sama dengan *Ultimate outcome*.
- b. Tujuan dan sasaran pada Renstra PD memiliki kinerja Dampak (*impact*) sama dengan *Intermediate outcome* urusan.
- c. Program pada Renstra PD memiliki kinerja Hasil (*outcome*) sama dengan *Intermediate outcome* sub urusan.
- d. Kegiatan pada Renstra PD memiliki kinerja Keluaran (*output*) sama dengan *Immediate outcome*.
- e. Sub Kegiatan pada Renstra PD memiliki kinerja Keluaran (*output*) sama dengan *Output*.

Pada subbab ini memuat beberapa indikator kinerja yang menjadi komitmen pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan selama periode tahun 2025-2029. Rincian masing-masing indikator kinerja disajikan sebagai berikut:

8.1. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan tolok ukur kinerja daerah pada tingkat tertinggi yang menggambarkan kinerja dampak (*impact*) atau *ultimate outcome*. Indikator kinerja tujuan dan sasaran menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) pemerintah daerah dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2029. Adapun IKU dan target per tahun disajikan pada Tabel VIII.1 berikut ini.

Rancangan Awal

Tabel VIII.1
Indikator Kinerja Utama (IKU)

No.	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. INDIKATOR KINERJA TUJUAN										
1	Kontribusi PDRB Provinsi	Persen	3,90	3,92–3,95	3,95–3,97	3,97–3,99	3,99–4,00	4,00–4,01	4,01–4,05	
2	Indeks Modal Manusia	Indeks	0,56*	0,59	0,60	0,61	0,61	0,62	0,63	
3	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	85,16	85,16–85,84	85,84–86,53	86,53–87,22	87,22–87,92	87,92–88,63	88,63–89,34	
II. INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS										
4	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	6,17	6,17–6,40	6,40–7,20	7,20–8,30	8,30–8,50	8,50–8,60	8,60–8,75	
5	Kontribusi Industri Pengolahan	Persen	18,26	18,26–18,28	18,28–18,46	18,46–18,74	18,74–19,27	19,27–20,03	20,03–21,04	
6	Tingkat Kemiskinan	Persen	5,78	5,05–5,78	4,70–5,20	4,20–4,70	3,70–4,20	3,37–3,70	3,06–3,37	
7	Indeks Gini	Indeks	0,321	0,310–0,321	0,313–0,318	0,308–0,313	0,303–0,308	0,298–0,303	0,293–0,298	
8	Indeks Ekonomi Biru Indonesia	Indeks	29,07*	27,04–32,92	32,92–38,81	38,81–44,69	44,69–50,58	50,58–56,46	56,46–62,35	
9	Indeks Daya Saing Daerah	Indeks	3,30*	3,35–3,40	3,40–3,45	3,45–3,49	3,49–3,53	3,53–3,57	3,57–3,62	
10	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	76,63	76,63–80,20	80,20–80,52	80,52–80,83	80,83–81,15	81,15–81,46	81,46–81,78	
11	Penurunan Intensitas Emisi GRK	Persen	38,59	38,59–40,82	55,05–60,70	60,70–60,80	60,80–65,90	65,90–67,46	67,46–72,63	
12	PDRB Per Kapita	Juta Rp	212,18	212,18–221,55	221,55–232,10	232,10–246,65	246,65–263,58	263,58–282,92	282,92–305,14	
13	Indeks Inovasi Daerah	Indeks	61,74	61,74–62,87	62,87–64,00	64,00–65,13	65,13–66,26	66,26–67,39	67,39–68,52	

No.	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	5,14	4,60–5,14	4,54–5,07	4,50–4,82	4,30–4,77	4,14–4,75	3,95–4,68	
15	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Indeks	78,19	78,19–78,50	78,50–78,80	78,80–79,11	79,11–79,41	79,67–79,72	79,72–80,12	

Ket : *) Data Tahun 2023; Sumber: Hasil proyeksi, 2025

8.2. Indikator Kinerja Daerah (IKD)

Indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang disebut juga Indikator Kinerja Daerah (IKD) merupakan instrumen pengukuran kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi. IKD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2025-2029 memuat indikator yang menggambarkan kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan provinsi dengan mengacu pada IKK *Outcome* yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Draft Kemendagri IKK. Indikator-indikator tersebut menjadi tolok ukur penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan oleh perangkat daerah sesuai tugas dan fungsi serta kewenangan masing-masing. Indikator kinerja dan target setiap tahun mulai 2025 sampai dengan 2029 disajikan pada Tabel VIII.2 dibawah ini.

Tabel VIII.2
Indikator Kinerja Daerah (IKD)

No	Indikator Kinerja Daerah (IKD)	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI										
1	Indeks Ketahanan Pangan	poin	78.61	78,61–79,69	79,69–80,47	80,47–80,69	80,69–81,46	81,46–81,69	81,69–82,46	
2	Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan	%	7,40	7,08–8,24	6,76–7,08	6,45–6,76	6,13–6,45	5,81–6,13	5,49–5,81	
3	Konsumsi Listrik Per Kapita	kWh/kapita	1,679	1,172	1,388	1,605	1,821	2,038	2,254	
4	Akses Rumah Tangga terhadap Konsumsi Air Minum	%	83.71	83,71–84,76	84,76–85,81	85,81–86,86	86,86–87,90	87,90–88,95	88,95–90,00	
5	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	IKLH	76.63	80.2	80.52	80.83	81.15	81.46	81,78	
6	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	% RT	4.88	4,88–9,14	9,14–13,88	13,88–18,63	18,63–23,37	23,37–28,11	28,11–32,80	
7	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	%	17,59	15,00–18,75	18,75–22,50	22,50–26,25	26,25–30,00	30,00–33,75	33,75–37,50	
8	Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah	% RT	60,9	60,9–69,00	69,00–70,55	70,55–72,10	72,10–73,65	73,65–75,20	75,20–76,75	
9	Penurunan Intensitas Emisi GRK	%	49,19	47,65–50,29	50,29–55,05	55,05–60,80	60,80–65,90	65,90–67,46	67,46–72,63	
10	Indeks Risiko Bencana	poin	136.11	131,64–136,11	127,17–131,64	122,70–127,17	118,23–122,70	113,76–114,56	108,83–113,76	

No	Indikator Kinerja Daerah (IKD)	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
11	Indeks Ketahanan Daerah	Poin	0.53	0,53–0,55	0,55–0,62	0,62–0,68	0,68–0,74	0,74–0,80	0,80–0,86	
12	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	1.93	1,93–2,15	2,15–2,54	2,54–2,78	2,78–2,91	2,91–2,98	2,98–2,99	
13	Rasio Penduduk	%	107.27	106,84	106,46	106,09	105,76	105,44	105,11	
14	Kepadatan Penduduk	Orang/m2	32	34,29	35,98	37,58	39,08	40,48	41,88	
II	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT									
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	6.17	6,17–6,40	6,40–7,20	7,20–8,30	8,30–8,50	8,50–8,60	8,60–8,75	
2	Tingkat Kemiskinan	%	5.78	5,05–5,78	4,70–5,20	4,20–4,70	3,70–4,20	3,37–3,70	3,06–3,37	
3	PDRB Per Kapita	Rp Juta	212.18	212,18–221,55	221,55–232,10	232,10–246,65	246,65–263,58	263,58–282,92	282,92–305,14	
4	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	5.14	4,60–5,14	4,54–5,07	4,50–4,82	4,30–4,77	4,14–4,75	3,95–4,68	
5	Indeks Gini	angka	0.321	0,310–0,321	0,313–0,318	0,308–0,313	0,303–0,308	0,298–0,303	0,293–0,298	
6	Indeks Modal Manusia	angka	0.56*	0,59	0,60	0,61	0,61	0,62	0,63	
7	Umur Harapan Hidup	tahun	74.94	74,94–75,17	75,17–75,40	75,40–75,62	75,62–75,85	75,85–76,08	76,08–76,31	
8	Indeks Keluarga Sehat	indeks	0,286*	0,302–0,318	0,318–0,336	0,336–0,355	0,355–0,375	0,375–0,396	0,396–0,418	
9	Prevalensi Stunting	%	22,90*	19,80–21,35	18,73–19,80	17,65–18,73	16,58–17,65	15,50–16,58	14,29–15,50	
10	Rata-Rata Lama Sekolah	tahun	10.02	10,55–10,57	10,57–10,75	10,75–10,93	10,93–11,10	11,10–11,28	11,28–11,59	
11	Harapan Lama Sekolah	tahun	14.03	14,12–14,13	14,13–14,23	14,23–14,32	14,32–14,42	14,50–14,51	14,51–14,60	
12	Angka Literasi/Numerasi	%								
13	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	indeks	78.34	78,34–81,95	81,95–85,56	85,56–89,17	89,17–92,78	92,78–96,39	96,39–100	
14	Indeks Literasi Digital	angka	3,62*	3,73–3,79	3,79–3,85	3,85–3,91	3,91–3,97	3,97–4,03	4,03–4,09	

No	Indikator Kinerja Daerah (IKD)	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
15	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	%	45,32*	57,68–70,04	70,04–71,74	71,74–73,44	73,44–75,14	76,14–76,84	76,84–81,50	
16	Indeks Kerukunan Umat Beragama	skor	78.19	78,19–78,50	78,50–78,80	78,80–79,11	79,11–79,41	79,67–79,72	79,72–80,12	
17	Indeks Pembangunan Kebudayaan	angka	57,56*	58,80–58,84	58,84–59,46	59,46–60,08	60,08–60,69	61,18–61,31	61,31–61,93	
18	Indeks Perlindungan Anak	angka	64,04*	66,09–68,15	68,15–70,20	70,20–71,49	71,49–72,86	72,86–74,22	74,22–75,59	
19	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	0-100	65,5	69,0	72,0	76,1	79,6	83,2	86,7	Sesuai kewenangan DPPPA (Bidang Dalduk KB) indikatornya iBangga
20	Indeks Ketimpangan Gender	poin	0,414*	0.392–0.393	0,375–0,392	0,358–0,375	0,341–0,358	0,336–0,341	0,321–0,336	
21	Indeks Pembangunan Pemuda	indeks	59,17*	62,45–63,09	63,09–63,73	63,73–64,37	64,37–65,01	65,01–65,64	65,64–66,28	
22	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun Ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%)	%	13,11*	13,80–14,50	14,50–15,19	15,19–15,89	15,89–16,58	16,58–17,28	17,28–17,97	
III	ASPEK DAYA SAING DAERAH									
1	Angka Ketergantungan	%	41.16	40,17	39,57	39,28	39,23	39,35	39,58	
2	Rasio PDRB Industri Pengolahan	%	18.26	18,28	18,46	18,74	19,27	20,03	21,04	
3	Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum	%	1.12	1.17	1,20	1,24	1,30	1,37	1,45	
4	Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif	%	5,67	5,72	5,78	5,84	5,90	5,96	6,01	
5	Rasio Kewirausahaan	%	2,04*	2,71–3,37	3,37–3,61	3,61–3,85	3,85–4,09	4,09–4,33	4,33–4,69	
6	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	67.07							

No	Indikator Kinerja Daerah (IKD)	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
7	Indeks Inovasi Daerah	skor	61.74	61,74-62,87	62,87-64,00	64,00-65,13	65,13-66,26	66,26-67,39	67,39-68,52	
8	Indeks Ekonomi Hijau	Rupiah/Jiwa	63,04*	65,42-68,66	68,66-71,89	71,89-75,13	75,13-78,36	78,36-81,59	81,59-84,83	
9	Indeks Ekonomi Biru Indonesia	skor	29,07*	27,04-32,92	32,92-38,81	38,81-44,69	44,69-50,58	50,58-56,46	56,46-62,35	
10	Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer	%	12.14	12,40	15.73	19.06	22.39	25,72	29.05	
11	Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi	0-10	6,66*	6,68-6,70	6,70-6,78	6,78-6,87	6,87-6,95	6,95-7,03	7,03-7,10	
12	Pembentukan Modal Tetap Bruto	% PDRB	35.72	32,72				33,10		
13	Ekspor Barang dan Jasa	% PDRB	40.44	66,40				69,32		
14	Indeks Infrastruktur/Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur	indeks	7.89	7,89-8,01	8,01-8,13	8,13-8,26	8,26-8,38	8,38-8,50	8,50-9,00	
15	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak	%	76.77	76,77-80,64	80,64-81,85	81,85-83,06	83,06-84,27	84,27-85,48	85,48-86,96	
16	Persentase Desa Mandiri	%	31,15%	23,91%	23,78%	21,17%	0,00%	-	-	
17	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	%	1	1,00-1,36	1,36-1,42	1,42-1,48	1,48-1,54	1,54-1,60	1,60-1,76	
18	Tingkat Inflasi	%	1.47	1,5-2,0	1,5-2,0	1,5-2,0	1,5-2,0	1,5-2,0	1,5-2,0	
IV	ASPEK PELAYANAN UMUM									
1	Indeks Reformasi Hukum		97.08	97,0-97,5	97,0-97,5	97,5-98,0	97,5-98,0	97,5-98,0	99.00	
2	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	poin	3.79	3,79-3,85	3,85-3,91	3,91-3,97	3,97-4,03	4,03-4,09	4,09-4,15	
3	Indeks Pelayanan Publik	angka	3.75	4,03-4,06	4,06-4,09	4,09-4,12	4,12-4,14	4,14-4,17	4,17-4,20	

No	Indikator Kinerja Daerah (IKD)	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
4	Indeks Integritas Nasional	angka	72.75	75,75–75,84	75,84–76,81	76,81–77,78	77,78–78,75	78,75–79,72	79,72–80,91	
5	Persentase Penegakan Perda	%	-	-	-	-	-	-	-	sudah masuk ke dalam Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas
6	Persentase Capaian Aksi HAM	%	64.3	65,00–68,00	65,00–68,00	65,00–68,00	68,00–70,00	68,00–70,00	68,00–70,00	
7	Indeks Demokrasi Indonesia	%	82,28*	82,40	82,45	82,50	82,55	82,60	82,65	
8	Indeks Rasa Aman	angka	n/a	60,00	62,00	65,00	70,00	72,00	75,00	
9	Indeks Ketenteraman dan Ketertiban/Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas	angka	n/a	51,01	52,22	60,00	62,01	65,00	70,00	
10	Indeks Daya Saing Daerah	nilai	3,30*	3,35–3,40	3,40–3,45	3,45–3,49	3,49–3,53	3,53–3,57	3,57–3,62	
11	Indeks Risiko Bencana	Indeks	136,11	135,10 (143,47)	129,60	124,10	118,60	113,76 - 110,56	108,93	Pada tahun 2025 ada tanda kurung dikarenakan masih menggunakan data RPD 2024 - 2026
12	Nilai AKIP	nilai	78,50	78,50–79,19	79,19–79,78	79,78–80,36	80,36–80,95	80,95–81,54	81,54–82,13	
13	Sistem Merit	skor	271*	279–286	286–294	294–301	301–309	309–316	316–324	
14	Indeks Pengelolaan Aset	indeks	2,26	2,26–2,33	2,33–2,40	2,40–2,47	2,47–2,54	2,54–2,61	2,61–2,69	
INDIKATOR KINERJA KUNCI										
A	PENDIDIKAN									
1	Persentase anak usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam	%	81,84	82,2	82,57	82,93	83,29	83,66	84,02	

No	Indikator Kinerja Daerah (IKD)	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	pendidikan menengah (APS)*									
2	Persentase anak usia 4-18 tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus (APS)*	%	53,75	62,55	71,34	72,43	73,52	74,61	75,7	
B	KESEHATAN									
1	Rasio daya tampung rumah sakit rujukan di Provinsi	%	1.72	1.78	1.8	1.81	1.82	1.83	1.84	
2	Persentase RS rujukan Provinsi yang terakreditasi	%	100	100	100	100	100	100	100	
3	Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana	%	100	100	100	100	100	100	100	
4	Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB Provinsi	%	100	100	100	100	100	100	100	
5	Angka kematian ibu (AKI)*	angka	74	66	60	54	49	44	42	
6	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek pada balita)*	%	22,9	19,8	18,43	17,15	15,96	14,85	13,85	
C	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG									

[illegible]

No	Indikator Kinerja Daerah (IKD)	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kabupaten/kota*									
8	Persentase peningkatan rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik layak dan aman)*	%	Layak : 84,23% Aman : 4,88%							Masih dalam perhitungan
9	Tingkat kemantapan jalan*	%	78.72	82.17	87.58	94.02	96.63	98.64	100	
10	Persentase tenaga kerja konstruksi kualifikasi ahli*	%	45.00	48.91	55.02	61.68	68.91	76,68	80.00	
11	Persentase penyelesaian kasus pelanggaran pemanfaatan ruang di daerah provinsi*	%								
D	PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN									
1	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni*	%								Masih Proses Perhitungan
2	Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni*	%								Masih Proses Perhitungan

No	Indikator Kinerja Daerah (IKD)	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
3	Persentase Luas kawasan kumuh 10 – 15 Ha yang ditangani*	%	84.84	78.45	60.58	49.16	34.22	15.43	0	
4	Persentase permukiman yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)*	%								Masih Proses Perhitungan
E	KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT									
1	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	%	100	100	100	100	100	100	100	
2	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan*	%	100	100	100	100	100	100	100	
3	Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal	%	n/a	100	100	100	100	100	100	
4	Persentase penanganan pra bencana	%	n/a	100	100	100	100	100	100	
5	Persentase penanganan tanggap darurat bencana*	%	100	100	100	100	100	100	100	
6	Persentase penyelenggaraan Tibumtranmas*	%	n/a	100	100	100	100	100	100	
7	Persentase penanganan pasca bencana*	%	n/a							
F	SOSIAL									

No	Indikator Kinerja Daerah (IKD)	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Persentase pekerja sosial/tenaga kesejahteraan sosial yang melaksanakan pelayanan sosial di dalam panti rehabilitasi sosial bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA*	%								
2	Persentase pekerja sosial/tenaga kesejahteraan sosial yang melaksanakan pelayanan sosial di dalam panti rehabilitasi sosial bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA*	%								
3	Persentase pekerja sosial/tenaga kesejahteraan sosial dan/atau relawan sosial yang melaksanakan penanganan korban bencana provinsi pada masa tanggap darurat dan pasca	%								

No	Indikator Kinerja Daerah (IKD)	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	bencana sesuai standar*									
4	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti*	%	100	100	100					
5	Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya didalam panti*	%	100	100	100					
6	Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti*	%	100	100	100					
7	Persentase gelandang dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti*	%	100	100	100					
8	Persentase pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti*	%								
9	Persentase penerima manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasar*	%								

No	Indikator Kinerja Daerah (IKD)	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
10	Persentase penerima manfaatn yang meningkat kemandirian ekonomi*	%								
11	Persentase korban bencana alam dan/atau non alam yang terpenuhi kebutuhan dasar pada saat dan setelah tanggap darurat bencana*	%	100	100	100					
G	TENAGA KERJA									
1	Persentase kabupaten/kota yang menyusun rencana tenaga kerja*	%	80	90	90					
2	Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi	%	94.75	50	50					
3	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	%	29,10*	7:00	7:00					
4	Persentase perusahaan yang menerapkan tata Kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	%	69.2	20	20					

No	Indikator Kinerja Daerah (IKD)	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
5	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	%	47.82	27.60	28:10:00					
6	Persentase perusahaan yang menerapkan peraturan perundang-undangan bidang ketenagakerjaan	%	85.33	85	86					
7	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan di dalam negeri *									
H PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK										
1	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	%	28,67	28,87	29,22	29,57	29,92	30,27	30,27	
2	Rasio kekerasan terhadap anak per 10.000 anak	%	0.54	1.99	1.98					
3	Rasio kekerasan terhadap perempuan per 10.000 anak	%	22.88	23.23	23.11					
4	Persentase perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan komprehensif*	%	100	100	100	100	100	100	100	

[illegible]

No	Indikator Kinerja Daerah (IKD)	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	yang diselesaikan tepat waktu*									
2	Persentase terselesaikannya kasus tanah garapan belum bersertipikat*									kewenangan ATR/BPN
3	Tersedianya tanah obyek <i>landreform</i> (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari tanah kelebihan maksimum tanah absentee*									kewenangan ATR/BPN
4	Persentase luas lokasi konsolidasi tanah*									kewenangan ATR/BPN
5	Ditetapkannya hak atas tanah dalam penguasaan dan pengelolaan pemerintah daerah*									kewenangan ATR/BPN
K	LINGKUNGAN HIDUP									
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi	%	76.63	80.2	80.52	80.83	81.15	81.46	81,78	
2	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi*	%	96.91	98	98					

No	Indikator Kinerja Daerah (IKD)	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
3	Indeks kinerja pengelolaan sampah*	indeks	49,34	51,5	54	56,5	59	61,5	64	
L	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL									
1	Penyajian data kependudukan skala Provinsi dalam satu tahun	%	100	100	100	100	100	100	100	
2	Pemanfaatan data kependudukan	%	45	50	55	60	65	70	75	
3	Persentase kepemilikan identitas kependudukan digital*	%	6	15	20	25	30	35	40	
4	Persentase kepemilikan kartu identitas anak*	%	76	80	82,5	85	87,5	90	95	
5	Persentase akta kematian yang diterbitkan bagi yang melaporkan*	%	100	100	100	100	100	100	100	
6	Persentase akta kelahiran yang diterbitkan bagi yang melaporkan*	%	100	100	100	100	100	100	100	
7	Persentase akta perkawinan yang diterbitkan bagi yang melaporkan*	%	100	100	100	100	100	100	100	
8	Persentase akta perceraian yang diterbitkan bagi yang melaporkan*	%	100	100	100	100	100	100	100	
M	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA									

No	Indikator Kinerja Daerah (IKD)	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Persentase pengentasan desa tertinggal	%	20	25	25	25	25	0	0	
2	Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri	%	6,3	13,8	13,8	13,8	13,8	13,8	0	
3	Persentase fasilitasi penataan desa*	%	NA	2,9	3	3,2	3,5	3,8	4,1	
4	Persentase fasilitasi kerjasama desa*	%	NA	7	10	10	10	10	10	
5	Persentase fasilitasi pemberdayaan lembaga kemasyarakatan desa (LKD)*	%	NA	3,2	19,38	20	20	20	20	
6	Persentase fasilitasi pemberdayaan lembaga adat desa dan lembaga masyarakat hukum adat*	%	NA	4,2	20,1	20,1	20,1	20,1	20,1	
N	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA									
1	Angka Kelahiran Total (<i>Total Fertility Rate</i> /TFR)*	%	2,17	2,14	2,12	2,11	2,10	2,10	2,9	Kemendukbangga/BKKBN
2	Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (<i>Age Spesific Fertility</i>)*	%	18,2	18,4	17,2	16,2	15,1	14,2	13,3	
3	Angka prevalensi kontrasepsi Modern / <i>Modern Contraceptive</i> (mCPR)*	%	57,1	57,15	57,25	57,35	57,45	57,25	57,25	Kemendukbangga/BKKBN
4	Persentase kebutuhan ber-KB	%	15,80	14,96	14,24	13,51	12,79	12,07	12,07	Kemendukbangga/BKKBN

No	Indikator Kinerja Daerah (IKD)	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	yang tidak terpenuhi (unmet need)*									
O PERHUBUNGAN										
1	Rasio konektivitas provinsi	Poin	0.846	0.864	0.882					Masih dalam proses perhitungan ulang
2	Konektivitas Darat*	Rasio	0.44	0.44	0.48	0.48	0.52	0.52	0.56	
3	Persentase kelengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal*	%								Masih dalam proses perhitungan
4	Konektivitas Laut*									Masih dalam proses perhitungan
P KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA										
1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	%	100	100	100	100	100	100	100	
2	Persentase Layanan Publik yang Diselenggarakan Secara Online Dan Terintegrasi	%	100	100	100	100	100	100	100	
3	Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan	%	84,33							

No	Indikator Kinerja Daerah (IKD)	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	Pemerintah Daerah Provinsi									
4	Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik pemerintah daerah (survei)*	%								
Q	KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH									
1	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	%	17	39	60					
2	Meningkatnya Usaha Kecil yang menjadi wirausaha	%	100	75	75					
3	Pertumbuhan volume usaha koperasi*	%								
4	Persentase usaha kecil yang bertransformasi dari informal ke formal*	%								
5	Pertumbuhan wirausaha*	%								
6	Proporsi UKM menjalin kemitraan dan ekspor*	%								
R	PENANAMAN MODAL									
1	Persentase peningkatan investasi di provinsi	%	24,46*	1	1	1	1	1	1	

No	Indikator Kinerja Daerah (IKD)	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
2	Realisasi total terhadap target investasi*									
S	KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA									
1	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	%	0.37	1.31	1.45					
2	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	%	1.49	27.32	34.97					
3	Peningkatan Prestasi Olahraga (Medali)	Medali	232	135	135					
T	STATISTIK									
1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	Laporan Perencanaan Setiap Perangkat Daerah
2	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	Laporan Evaluasi Setiap Perangkat Daerah
3	Indeks Pembangunan Statistik*	indeks	2.68	2.7	2.75	2.8	2.85	2.9	3	BPS RI
U	PERSANDIAN									
1	Tingkat keamanan informasi pemerintah	%	66.51	68	70	73	75	77	80	

No	Indikator Kinerja Daerah (IKD)	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
2	Tingkat kesiapan pengamanan informasi pemerintah daerah*	%	67	75	80	83	85	90	90	
V KEBUDAYAAN										
1	Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan	%	50	50,5	60	60,5	70	75	88	DAPOBUD
2	Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang ditetapkan	%	35,8	40	40,5	50,58	51	51,5	52	DAPOBUD
3	Persentase Cagar budaya yang Dilestarikan	%	27,7	28	28,8	29	29,5	30	30,5	DAPOBUD
W PERPUSTAKAAN										
1	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat*	skor	69.53	70,5	71,5	72,5	73,5	74,5	75,5	
2	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	indeks	78.34	70	70,5	71	71,5	72	72,5	
X KEARSIPAN										
1	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	%	74.88	77	78	79	80	81	82	

No	Indikator Kinerja Daerah (IKD)	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
2	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepetingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	%	36,66	40	45	50	55	60	65	
Y	KELAUTAN DAN PERIKANAN									
1	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap*	Ton	190,000	195,000	200,000	205000	210000	215000	220000	
2	Persentase kepatuhan pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	%	105.72	100	100	100	100	100	100	
3	Jumlah produksi perikanan budidaya*	ton	200000	201000	202000	203400	204800	206200	207700	
4	Luas kawasan konservasi*	Ha	327819.31	327819.31	328247.25	355658.24	355658.24	355658.24	390076.41	
5	Angka konsumsi ikan*	Kg/kapita/tahun	58,51*	36.73	36.75	36.77	36.79	36.81	36.83	
Z	PARIWISATA									
1	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	%	23.02	12	12,1	12,3	12,5	12,8	13	
2	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan	%	-28.32	63	64,5	66	68,5	69	70	

No	Indikator Kinerja Daerah (IKD)	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	nusantara yang datang ke provinsi									
3	Tingkat hunian akomodasi	%	26.73	27,42	28,67	29,82	32,01	34,87	36,33	
4	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	%	1.12	1.17	1,20	1,24	1,30	1,37	1,45	
5	Persentase pelaku ekonomi kreatif yang memiliki kekayaan intelektual*	%		19,29	19,29	19,29	19,29	19,29	19,29	
AA	PERTANIAN									
1	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	Ton/Ha	3.96	4,02	4,10	4,17	4,25	4,32	4,44	
2	Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular	%	370.3	-2.75	-3.64					
3	Peningkatan produksi tanaman pangan (padi dan Jagung)	%	9.08							
4	Peningkatan produksi hortikultura (cabai, bawang merah, pisang)	%								
5	Peningkatan produksi komoditas peternakan*	%								
BB	KEHUTANAN									
1	Peningkatan akses legal kepada masyarakat dalam	%	163.64	75.75	78.78	80	82	84	86	

No	Indikator Kinerja Daerah (IKD)	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	pengelolaan hutan melalui Perhutanan Sosial									
2	Persentase kerusakan hutan pertahun (deforestasi)	%	0.16	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	
3	Persentase Luas Lahan Kritis yang Direhabilitasi	%	2.07	2.15	2.24	2.32	2.41	2.49	2.58	
CC	ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL									
1	Persentase Usaha Tambang Sesuai Kewenangan Provinsi yang Tidak Melanggar Perda	%	80.56	100	100	100	100	100	100	
2	Persentase Desa Yang Teraliri Listrik	%	100	100	100	100	100	100	100	
DD	PERDAGANGAN									
1	Pertumbuhan Nilai Ekspor Non Migas	%	-18.52	54.5	54					
2	Persentase penanganan pengaduan konsumen*	%	100	100	100					
3	Persentase komoditi potensial yang sesuai dengan ketentuan berlaku	%	100	74	75					
4	Tertib Usaha	%	100	100	100					
5	Persentase kinerja realisasi pupuk	%	69	90	92,00,					
6	Persentase Barang Beredar Yang Diawasi Yang Sesuai Dengan	%	100	79	80					

No	Indikator Kinerja Daerah (IKD)	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	Ketentuan Perundang-Undangan									
7	Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok	%	1.06	1.15	1.15					
8	Nilai ekspor barang*									
EE	PERINDUSTRIAN									
1	Pertambahan Jumlah Industri Besar di Provinsi	%	11.61	16	15					
2	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	%	116,78*	118	120					
3	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Besar yang dikeluarkan oleh instansi terkait	%	100	25.5	26					
4	Persentase realisasi investasi sektor industri dan kawasan industri*	%								
5	Tersedianya informasi industri secara	%	95	95	95					

No	Indikator Kinerja Daerah (IKD)	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	lengkap, akurat dan terkini*									
FF	PENGADAAN									
1	Persentase Jumlah Pengadaan yang Dilakukan Dengan Metode Kompetitif	%	43.56	3.8	3.7	3.7	3.8	3.9	4	
2	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	%	73,42*	75	75	76	77	78	79	
3	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah	%	143,07*	35	40	45	50	55	60	
4	Tingkat kematangan UKPBJ*		Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 4	Level 4	Level 4	
GG	SEKRETARIAT DPRD									
1	Ketepatan penetapan perda APBD tahun n*	%	-	-	100	100	100	100	100	Pada Tahun 2024 sd 2025 belum menggunakan indikator tersebut (indikator yang digunakan adalah IKM)
2	Persentase penetapan Ranperda tahun n*	%	-	-	70	70	70	70	70	
HH	PERENCANAAN									
1	Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD	%								
2	Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD	%								

No	Indikator Kinerja Daerah (IKD)	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
3	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	%								
4	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	%								
5	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA	%								
II KEUANGAN										
1	Rasio Belanja Pegawai Di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan	%	5.09	9.67	9.69					
2	Rasio PAD	%	0.9	1.04	1.18	1.32	1.46	1.6	1.74	
3	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	%	15.36	64.93	64.8					
4	Opini Laporan Keuangan	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	
5	Budget execution: Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	%	1.02	1.01	1	0.99	0.98	0.97	0.96	

No	Indikator Kinerja Daerah (IKD)	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
6	Revenue mobilization: Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	%	4.3	3.6	3.1	2.6	2.1	1.6	1.1	
7	Assets Management	Aspek	4	4	4	4	4	4	4	
8	Cash Management: Rasio Anggaran Sisa Terhadap Total Belanja Dalam APBD Tahun Sebelumnya	%	5.7	5.5	5	4.5	4	3.5	3	
9	Persentase belanja pegawai di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD*	%								
10	Persentase alokasi belanja infrastruktur pelayanan publik*	%								
11	Persentase realisasi anggaran belanja urusan wajib pelayanan dasar*	%								
12	Persentase penurunan SILPA*	%								
13	Persentase penambahan nilai aset tetap*	%								
14	Persentase PAD terhadap pendapatan daerah*	%	46.32	49.93	51.94	52.99	52.65	52.13	52.13	
JJ	KEPEGAWAIAN									
1	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak	%	65.94	67	68	69	70	72	75	

No	Indikator Kinerja Daerah (IKD)	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	termasuk guru dan tenaga kesehatan)									
2	Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	27.63	30	35	40	42	43	45	
3	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	84	85	86	87	88	89	90	
KK	PENGAWASAN									
1	Tindaklanjut rekomendasi BPK tahun anggaran n-1*	%	72	85	90	95	95	95	95	
2	Maturitas Penyelegaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)*	Level	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 4	Level 4	
3	Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)*	Level	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 4	Level 4	
LL	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN									
1	Persentase rekomendasi kebijakan pembangunan daerah yang dijadikan sebagai landasan	%								

No	Indikator Kinerja Daerah (IKD)	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	dalam implementasi pembangunan*									
2	Persentase produk inovasi yang dimanfaatkan*	%								

- Ket :
- 1. IKD terdiri dari Permendagri 18 Tahun 2020 dan Draft Kemendagri IKK;
 - 2. IKD bertanda * adalah indikator dari Draft Kemendagri IKK;
 - 3. Angka bertanda * adalah data tahun 2023.

BAB IX

PENUTUP

Visi pembangunan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2045 yakni “Kaltim Sukses Menuju Generasi Emas” menjadi pedoman bagi pemerintah dan masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan daerah 5 (lima) tahun ke depan, dimana dalam pelaksanaannya akan memerlukan dukungan kontribusi aktif, sinergi, dan kolaborasi dari seluruh unsur pemangku kepentingan. RPJMD Provinsi Kalimantan Timur 2025-2029 mengarah pada upaya pencapaian Visi RPJM Nasional Tahun 2025-2029. Selanjutnya, untuk mewujudkan keberhasilan pembangunan jangka menengah daerah, RPJMD ini akan menjadi dasar di dalam penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah dalam dimensi lima tahunan dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dalam dimensi satu tahunan.

RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2029 ditetapkan dengan peraturan daerah dan berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan ditetapkannya RPJMD periode berikutnya (atau jika ada penetapan perubahan RPJMD). Dalam kaitannya dengan hal tersebut, perlu ditetapkan kaidah pelaksanaan dan pembiayaan pembangunan untuk mengawal implementasi RPJMD Kalimantan Timur Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

- 1) Sebagai bagian integral pembangunan Nasional, pelaksanaan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2029 menjadi bagian penting dalam upaya pencapaian Visi Presiden dan Wakil Presiden yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJM Nasional Tahun 2025-2029. Selanjutnya, pencapaian visi RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2029 juga sangat dipengaruhi oleh pelaksanaan RPJMD Kabupaten/Kota se-Kalimantan Timur.
- 2) Indikator kinerja sasaran pembangunan daerah wajib diturunkan ke dalam indikator tujuan RENSTRA Perangkat Daerah untuk selanjutnya menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Kepala Perangkat Daerah. Sementara untuk target kinerja di setiap tahapan pembangunan dapat dilakukan pemutakhiran dalam RKPD dan/atau RENJA Perangkat Daerah yang memperhatikan dinamika pembangunan terkini, dengan mempertahankan target akhir pada tahun 2030 sebagai target minimal.

- 3) Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2029, meliputi antara lain :
 - a. Pengendalian dan evaluasi terhadap pencapaian tujuan, sasaran, program, dan program unggulan melalui pemantauan, supervisi, dan penilaian hasil capaian kinerja pelaksanaan RPJMD secara periodik;
 - b. Menyusun dan melaksanakan manajemen risiko pembangunan daerah sebagai bagian dari upaya pencapaian sasaran pembangunan daerah.
- 4) Perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses penyusunan dan substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan sesuai ketentuan yang berlaku, serta terjadi perubahan yang mendasar. Perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku RPJMD lebih dari 3 (tiga) tahun.
- 5) Melaksanakan komunikasi publik untuk mewujudkan sistem pemerintahan yang dinamis, transparan, responsif, dan komunikatif melalui berbagai metode komunikasi yang memudahkan masyarakat memahami dan berpartisipasi dalam pembangunan daerah.
- 6) Peraturan Daerah tentang RPJMD disebarluaskan kepada para pemangku kepentingan pembangunan daerah, baik secara elektronik dan/atau non-elektronik.
- 7) Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, DPRD, dan seluruh masyarakat termasuk swasta, media, akademisi, organisasi masyarakat sipil, diaspora, pemuda, dan kelompok rentan, seperti perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan lansia secara bersama-sama memiliki komitmen yang kuat untuk mendukung konsistensi implementasi RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2029 untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan yang telah ditetapkan melalui pelaksanaan berbagai program dan kegiatan pembangunan dengan sebaik-baiknya.
- 8) Unit satuan kerja vertikal maupun lembaga-lembaga lokal non-pemerintah atau lembaga internasional pemerintah dan non-pemerintah yang melaksanakan program dan kegiatan di Provinsi Kalimantan Timur, serta komponen masyarakat dalam berbagai bentuk partisipasinya agar melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk menyelaraskan dan menjamin konsistensi pelaksanaan program,

kegiatan dan partisipasinya terhadap RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2029.

- 9) Peningkatan kapasitas pembiayaan daerah melalui pengembangan pembiayaan daerah alternatif dan kreatif baik bersumber dari dana pemerintah maupun non pemerintah, serta optimalisasi jasa sektor keuangan dalam upaya pencapaian visi RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2029.
- 10) Pada saat Peraturan Daerah tentang RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2029 ditetapkan, maka Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 16 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 Nomor 16) dinyatakan tidak berlaku.

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

RUDY MAS'UD

